



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

**PERATURAN DAERAH TANAH LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2022**





BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61730);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
30. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 60);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

TORONG MUJI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
11. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II PERTANGUNGJAWABAN APBD

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Perusahaan Daerah dan Ikhtisar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 2.159.239.661.099,87
b. Belanja	Rp 1.639.631.878.652,92
c. Transfer	Rp <u>224.230.043.540,00 (+)</u>
Total Belanja dan Transfer	Rp 1.863.861.922.192,92
Surplus/Defisit	Rp 295.377.738.906,95
d. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp 611.325.812.033,83
2) Pengeluaran	Rp <u>75.000.000.000,00 (-)</u>
Pembiayaan Netto	Rp 536.325.812.033,83

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 604.990.188.933,83
b. Penggunaan SAL Tahun berjalan	Rp <u>604.990.188.933,83 (-)</u>
Sub Total	Rp 0,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp <u>831.703.550.940,78 (+)</u>
Sub Total	Rp 831.703.550.940,78
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan	Rp <u>0,00 (+)</u>
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 831.703.550.940,78

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp 5.036.136.501.789,41
b. Jumlah kewajiban	Rp <u>45.004.188.394,46 (-)</u>
c. Jumlah ekuitas	Rp 4.991.132.313.394,95

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp 2.311.644.285.066,64
b. Beban	Rp <u>1.614.801.880.693,39 (-)</u>
c. Surplus/Defisit-kegiatan Operasional	Rp 696.842.404.373,25

d. Beban Defisit Non Operasional	Rp 9.651.798.009,56
e. Beban Tak Terduga	<u>Rp 746.426.000,00 (-)</u>
f. Surplus/Defisit-LO	Rp 686.444.180.363,69

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Saldo awal kas per 1 Januari 2022	Rp 604.990.188.933,83
b. Kenaikan/Penurunan Kas	
b.1 Aktivitas operasi	Rp 692.464.308.935,95
b.2 Aktivitas investasi	Rp (397.086.570.029,00)
b.3 Aktivitas pendanaan/pembiayaan	Rp (68.664.376.900,00)
b.4 Aktivitas non anggaran	<u>Rp 0,00 (-)</u>
Total Kenaikan/Penurunan Kas	Rp 226.713.362.006,95
c. Saldo kas akhir per 31 Desember 2022	Rp 831.703.550.940,78

Saldo Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp831.703.550.940,78 termasuk di dalamnya Kas di Rekening Kas Umum Daerah Sebesar Rp762.266.975.672,06, Kas di Bendahara Pengeluaran Sebesar Rp0,00, Kas di Badan Layanan Umum Daerah Sebesar Rp65.761.548.698,67, Kas di Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Sebesar Rp0,00, Kas di dana Bantuan Operasional Sekolah Sebesar Rp 3.626.594.575,05, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00, dan Kas Lainnya Rp 48.431.995,00.

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp 4.230.967.002.274,38
b. Surplus/Defisit-LO	Rp 686.444.180.363,69
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	<u>Rp 73.721.130.756,88 (+)</u>
d. Ekuitas Akhir	Rp 4.991.132.313.394,95

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022;

NOPEKSA 2023-27

- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2022;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun 2022 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,



H. DAHMAL KIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN I

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

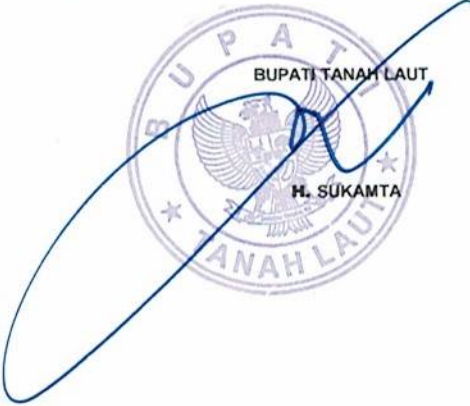


PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CaLK	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6	5
1	PENDAPATAN - LRA		1.740.032.489.864,00	2.159.239.661.099,87	124,09	1.522.901.390.516,55
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	5.1.1.1	178.390.127.793,00	193.890.015.753,87	108,69	206.135.630.695,55
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.1	41.000.250.000,00	45.363.440.225,80	110,64	43.638.422.656,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.2	7.952.619.500,00	6.971.598.007,00	87,66	5.743.153.528,80
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	11.010.810.370,00	11.010.810.384,00	100,00	9.836.676.685,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.1.1.4	118.426.447.923,00	130.544.167.137,07	110,23	146.917.377.825,75
7	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	5.1.1.2	1.560.894.562.071,00	1.963.205.983.275,00	125,77	1.274.449.541.251,00
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	5.1.1.2.2	1.335.967.846.071,00	1.667.151.026.122,00	124,79	1.174.467.043.937,00
9	Dana Perimbangan		1.335.967.846.071,00	1.667.151.026.122,00	124,79	1.045.900.191.937,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		114.676.716.000,00	114.436.736.400,00	99,79	128.566.852.000,00
10	Dana Insentif Daerah (DID)		10.342.946.000,00	10.342.946.000,00	100,00	19.072.439.000,00
11	Dana Desa		104.333.770.000,00	104.093.790.400,00	99,77	109.494.413.000,00
12	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.4	110.250.000.000,00	181.618.220.753,00	164,73	99.982.497.314,00
13	Pendapatan Bagi Hasil		110.250.000.000,00	181.618.220.753,00	164,73	99.282.497.314,00
14	Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	700.000.000,00
15	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	5.1.1.3	747.800.000,00	2.143.662.071,00	286,66	42.316.218.570,00
16	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	747.800.000,00	2.143.662.071,00	286,66	3.203.438.570,00
17	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	39.112.780.000,00
18	BELANJA		2.122.153.778.445,00	1.863.861.922.192,92	87,83	1.894.067.926.592,83
19	BELANJA OPERASI	5.1.1.4	1.439.009.698.746,00	1.241.627.856.198,92	86,28	1.214.778.642.853,00
20	Belanja Pegawai	5.1.1.4.1	761.383.543.055,00	653.956.945.688,00	85,89	639.840.569.796,56
21	Belanja Barang dan Jasa	5.1.1.4.2	604.326.333.840,00	520.933.208.907,92	86,20	505.996.286.092,44
22	Belanja Hibah	5.1.1.4.3	47.079.621.851,00	44.321.201.603,00	94,14	53.691.496.964,00
23	Belanja Bantuan Sosial	5.1.1.4.4	26.220.200.000,00	22.416.500.000,00	85,49	15.250.290.000,00
24	BELANJA MODAL	5.1.1.5	436.247.177.182,00	397.257.596.454,00	91,06	443.098.788.114,83
25	Belanja Modal Tanah	5.1.1.5.1	394.310.000,00	240.492.000,00	60,99	2.897.145.120,00
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.1.5.2	109.403.917.048,00	91.151.091.039,00	83,32	87.589.675.673,00
27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.1.5.3	112.572.068.902,00	104.788.622.560,00	93,09	125.469.046.825,83
28	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.1.5.4	213.225.317.172,00	200.681.712.555,00	94,12	226.307.789.870,00
29	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.1.5.5	24.289.060,00	16.548.300,00	68,13	835.130.626,00
30	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.1.5.6	627.275.000,00	379.130.000,00	60,44	0,00
31	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.1.6	22.426.879.377,00	746.426.000,00	3,33	6.471.571.965,00
32	Belanja Tak Terduga		22.426.879.377,00	746.426.000,00	3,33	6.471.571.965,00
33	BELANJA TRANSFER	5.1.1.7	224.470.023.140,00	224.230.043.540,00	99,89	229.718.923.660,00
34	Belanja Bagi Hasil	5.1.1.7.1	4.895.286.950,00	4.895.286.950,00	100,00	5.183.544.470,00
35	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.1.8	219.574.736.190,00	219.334.756.590,00	99,89	224.535.379.190,00
36	SURPLUS / (DEFISIT)		(382.121.288.581,00)	295.377.738.906,95	(77,30)	(371.166.536.076,28)
37	PEMBIAYAAN					
38	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.1.9	610.990.188.934,00	611.325.812.033,83	100,05	996.156.725.010,11
39	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		604.990.188.934,00	604.990.188.933,83	100,00	990.302.466.610,11
40	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		6.000.000.000,00	6.004.455.100,00	100,07	5.747.184.400,00

NO	URAIAN	CaLK	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6	5
41	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan		0,00	331.168.000,00	100,00	107.074.000,00
42	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.1.10	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
43	Pembentukan Dana Cadangan		40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	0,00
44	Pemberian Pinjaman Daerah		10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
45	PEMBIAYAAN NETTO		535.990.188.934,00	536.325.812.033,83	100,06	976.156.725.010,11
46	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		153.868.900.353,00	831.703.550.940,78	540,53	604.990.188.933,83


BUPATI TANAH LAUT
H. SUKAMTA

LAMPIRAN I.1

Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintah Daerah Dan
Organisasi

Lampiran I.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
 Nomor : 1 Tahun 2023
 Tanggal : 10 Agustus 2023



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.740.032.489.864,00	2.159.239.661.099,87	419.207.171.235,87	124,09
4.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	103.682.683.188,00	109.332.194.446,26	5.649.511.258,26	105,45
4.1.01	PENDIDIKAN	142.350.000,00	292.312.985,03	149.962.985,03	205,35
4.1.01.1-01.2-22.0-00.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	142.350.000,00	292.312.985,03	149.962.985,03	205,35
4.1.02	KESEHATAN	102.740.333.188,00	108.095.372.461,23	5.355.039.273,23	105,21
4.1.02.1-02.0-00.0-00.01	Dinas Kesehatan	102.740.333.188,00	108.095.372.461,23	5.355.039.273,23	105,21
4.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	400.000.000,00	532.176.500,00	132.176.500,00	133,04
4.1.03.1-03.2-10.0-00.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	400.000.000,00	532.176.500,00	132.176.500,00	133,04
4.1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	400.000.000,00	412.332.500,00	12.332.500,00	103,08
4.1.04.1-04.2-11.2-15.01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	400.000.000,00	412.332.500,00	12.332.500,00	103,08
4.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.449.976.000,00	4.532.448.007,00	(917.527.993,00)	83,16
4.2.09	PANGAN	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00
4.2.09.2-09.3-25.0-00.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00
4.2.15	PERHUBUNGAN	1.100.000.000,00	963.394.000,00	(136.606.000,00)	87,58
4.2.15.2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan	1.100.000.000,00	963.394.000,00	(136.606.000,00)	87,58
4.2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	555.056.000,00	562.424.000,00	7.368.000,00	101,33
4.2.16.2-16.2-20.2-21.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	555.056.000,00	562.424.000,00	7.368.000,00	101,33

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
4.2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.508.920.000,00	1.737.940.500,00	229.020.500,00	115,18
4.2.17.2-17.3-30.0-00.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	1.508.920.000,00	1.737.940.500,00	229.020.500,00	115,18
4.2.18	PENANAMAN MODAL	1.700.000.000,00	1.156.939.507,00	(543.060.493,00)	68,06
4.2.18.2-18.0-00.0-00.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.700.000.000,00	1.156.939.507,00	(543.060.493,00)	68,06
4.2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	511.000.000,00	36.750.000,00	(474.250.000,00)	7,19
4.2.19.2-19.0-00.0-00.01	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	511.000.000,00	36.750.000,00	(474.250.000,00)	7,19
4.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.450.015.000,00	1.206.587.000,00	(243.428.000,00)	83,21
4.3.26	PARIWISATA	950.015.000,00	957.349.000,00	7.334.000,00	100,77
4.3.26.3-26.0-00.0-00.01	Dinas Pariwisata	950.015.000,00	957.349.000,00	7.334.000,00	100,77
4.3.27	PERTANIAN	500.000.000,00	249.238.000,00	(250.762.000,00)	49,85
4.3.27.3-27.0-00.0-00.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	500.000.000,00	249.238.000,00	(250.762.000,00)	49,85
4.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	100.000.000,00	107.329.000,00	7.329.000,00	107,33
4.4.01	SEKRETARIAT DAERAH	100.000.000,00	107.329.000,00	7.329.000,00	107,33
4.4.01.4-01.0-00.0-00.01	Sekretariat Daerah	100.000.000,00	107.329.000,00	7.329.000,00	107,33
4.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.629.257.737.176,00	2.044.061.102.646,61	414.803.365.470,61	125,46
4.5.02	KEUANGAN	1.629.257.737.176,00	2.044.061.102.646,61	414.803.365.470,61	125,46
4.5.02.5-02.0-00.0-00.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.588.184.287.176,00	1.998.312.342.100,81	410.128.054.924,81	125,82
4.5.02.5-02.0-00.0-00.02	Badan Pendapatan Daerah	41.073.450.000,00	45.748.760.545,80	4.675.310.545,80	111,38
4.7	UNSUR KEWILAYAHAN	92.078.500,00	0,00	(92.078.500,00)	0,00
4.7.01	KECAMATAN	92.078.500,00	0,00	(92.078.500,00)	0,00
4.7.01.7-01.0-00.0-00.01	Kantor Kecamatan Bajuin	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0,00
4.7.01.7-01.0-00.0-00.02	Kantor Kecamatan Bati-Bati	11.895.000,00	0,00	(11.895.000,00)	0,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
4.7.01.7-01.0-00.0-00.03	Kantor Kecamatan Batu Ampar	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	0,00
4.7.01.7-01.0-00.0-00.04	Kantor Kecamatan Bumi Makmur	3.450.000,00	0,00	(3.450.000,00)	0,00
4.7.01.7-01.0-00.0-00.05	Kantor Kecamatan Jorong	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00
4.7.01.7-01.0-00.0-00.06	Kantor Kecamatan Kintap	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00
4.7.01.7-01.0-00.0-00.07	Kantor Kecamatan Kurau	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00
4.7.01.7-01.0-00.0-00.08	Kantor Kecamatan Pelaihari	19.233.250,00	0,00	(19.233.250,00)	0,00
4.7.01.7-01.0-00.0-00.09	Kantor Kecamatan Panyipatan	5.000.250,00	0,00	(5.000.250,00)	0,00
4.7.01.7-01.0-00.0-00.10	Kantor Kecamatan Takisung	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00
4.7.01.7-01.0-00.0-00.11	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	0,00
5	BELANJA DAERAH	2.122.153.778.445,00	1.863.861.922.192,92	(258.291.856.252,08)	87,83
5.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.414.718.545.395,00	1.236.584.664.717,92	(178.133.880.677,08)	87,41
5.1.01	PENDIDIKAN	522.572.058.830,00	443.112.528.493,00	(79.459.530.337,00)	84,79
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	522.572.058.830,00	443.112.528.493,00	(79.459.530.337,00)	84,79
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	471.700.246.326,00	397.034.657.350,00	(74.665.588.976,00)	84,17
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	390.088.070.197,00	327.579.648.056,00	(62.508.422.141,00)	83,98
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.524.311.804,00	61.584.897.294,00	(11.939.414.510,00)	83,76
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	8.087.864.325,00	7.870.112.000,00	(217.752.325,00)	97,31
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2	BELANJA MODAL	50.871.812.504,00	46.077.871.143,00	(4.793.941.361,00)	90,58
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.573.203.116,00	13.377.597.903,00	(2.195.605.213,00)	85,90
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.259.909.388,00	32.666.823.240,00	(2.593.086.148,00)	92,65
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	38.700.000,00	33.450.000,00	(5.250.000,00)	86,43
5.1.02	KESEHATAN	450.120.221.110,00	383.348.022.608,92	(66.772.198.501,08)	85,17

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01	Dinas Kesehatan	450.120.221.110,00	383.348.022.608,92	(66.772.198.501,08)	85,17
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	338.477.094.295,00	289.234.181.280,92	(49.242.913.014,08)	85,45
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	118.492.691.806,00	104.597.213.245,00	(13.895.478.561,00)	88,27
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.984.402.489,00	184.636.968.035,92	(35.347.434.453,08)	83,93
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	111.643.126.815,00	94.113.841.328,00	(17.529.285.487,00)	84,30
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.451.250.611,00	64.926.385.208,00	(14.524.865.403,00)	81,72
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.748.084.202,00	27.904.518.949,00	(2.843.565.253,00)	90,75
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.427.292.002,00	1.268.012.171,00	(159.279.831,00)	88,84
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.500.000,00	14.925.000,00	(1.575.000,00)	90,45
5.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	298.381.563.726,00	279.426.034.490,00	(18.955.529.236,00)	93,65
5.1.03.1-03.2-10.0-00.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	298.381.563.726,00	279.426.034.490,00	(18.955.529.236,00)	93,65
5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	108.613.522.065,00	100.878.537.134,00	(7.734.984.931,00)	92,88
5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	9.263.780.970,00	8.208.619.958,00	(1.055.161.012,00)	88,61
5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.306.141.081,00	85.837.516.176,00	(6.468.624.905,00)	92,99
5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	7.043.600.014,00	6.832.401.000,00	(211.199.014,00)	97,00
5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.2	BELANJA MODAL	189.768.041.661,00	178.547.497.356,00	(11.220.544.305,00)	94,09
5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	458.696.900,00	405.296.326,00	(53.400.574,00)	88,36
5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.814.543.266,00	29.263.883.100,00	(1.550.660.166,00)	94,97
5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	158.432.601.495,00	148.820.517.930,00	(9.612.083.565,00)	93,93
5.1.03.1-03.2-10.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	62.200.000,00	57.800.000,00	(4.400.000,00)	92,93
5.1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	106.649.899.448,00	101.308.883.488,00	(5.341.015.960,00)	94,99
5.1.04.1-04.2-11.2-15.01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	106.649.899.448,00	101.308.883.488,00	(5.341.015.960,00)	94,99

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
5.1.04.1-04.2-11.2-15.01.1	BELANJA OPERASI	51.063.996.531,00	48.251.241.933,00	(2.812.754.598,00)	94,49
5.1.04.1-04.2-11.2-15.01.1.01	Belanja Pegawai	7.840.203.298,00	7.730.847.554,00	(109.355.744,00)	98,61
5.1.04.1-04.2-11.2-15.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.388.793.233,00	32.685.394.379,00	(2.703.398.854,00)	92,36
5.1.04.1-04.2-11.2-15.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.835.000.000,00	7.835.000.000,00	0,00	100,00
5.1.04.1-04.2-11.2-15.01.2	BELANJA MODAL	55.585.902.917,00	53.057.641.555,00	(2.528.261.362,00)	95,45
5.1.04.1-04.2-11.2-15.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.246.276.110,00	3.983.683.023,00	(262.593.087,00)	93,82
5.1.04.1-04.2-11.2-15.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.258.955.713,00	8.035.876.305,00	(223.079.408,00)	97,30
5.1.04.1-04.2-11.2-15.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	43.080.671.094,00	41.038.082.227,00	(2.042.588.867,00)	95,26
5.1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	18.244.732.766,00	16.441.893.322,00	(1.802.839.444,00)	90,12
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	13.322.059.818,00	12.424.756.791,00	(897.303.027,00)	93,26
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	13.257.798.876,00	12.360.508.191,00	(897.290.685,00)	93,23
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	6.246.703.350,00	5.647.226.488,00	(599.476.862,00)	90,40
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.011.095.526,00	6.713.281.703,00	(297.813.823,00)	95,75
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	64.260.942,00	64.248.600,00	(12.342,00)	99,98
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.260.942,00	64.248.600,00	(12.342,00)	99,98
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.922.672.948,00	4.017.136.531,00	(905.536.417,00)	81,60
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	4.583.896.955,00	3.701.186.206,00	(882.710.749,00)	80,74
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	2.611.858.215,00	2.074.698.592,00	(537.159.623,00)	79,43
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.972.038.740,00	1.626.487.614,00	(345.551.126,00)	82,48
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	338.775.993,00	315.950.325,00	(22.825.668,00)	93,26
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	338.775.993,00	315.950.325,00	(22.825.668,00)	93,26
5.1.06	SOSIAL	18.750.069.515,00	12.947.302.316,00	(5.802.767.199,00)	69,05

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01	Dinas Sosial	18.750.069.515,00	12.947.302.316,00	(5.802.767.199,00)	69,05
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	18.490.860.358,00	12.709.766.762,00	(5.781.093.596,00)	68,74
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	5.263.260.574,00	3.634.166.714,00	(1.629.093.860,00)	69,05
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.720.099.784,00	2.317.800.048,00	(402.299.736,00)	85,21
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.507.500.000,00	6.757.800.000,00	(3.749.700.000,00)	64,31
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	259.209.157,00	237.535.554,00	(21.673.603,00)	91,64
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	193.574.127,00	171.951.329,00	(21.622.798,00)	88,83
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.920.030,00	49.872.025,00	(48.005,00)	99,90
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.715.000,00	15.712.200,00	(2.800,00)	99,98
5.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	128.496.052.483,00	111.433.407.370,00	(17.062.645.113,00)	86,72
5.2.07	TENAGA KERJA	10.290.440.542,00	8.214.671.639,00	(2.075.768.903,00)	79,83
5.2.07.2-07.3-31.0-00.01	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	10.290.440.542,00	8.214.671.639,00	(2.075.768.903,00)	79,83
5.2.07.2-07.3-31.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	10.176.209.186,00	8.111.554.198,00	(2.064.654.988,00)	79,71
5.2.07.2-07.3-31.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	7.781.334.018,00	6.053.911.310,00	(1.727.422.708,00)	77,80
5.2.07.2-07.3-31.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.373.661.948,00	2.038.412.888,00	(335.249.060,00)	85,88
5.2.07.2-07.3-31.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	21.213.220,00	19.230.000,00	(1.983.220,00)	90,65
5.2.07.2-07.3-31.0-00.01.2	BELANJA MODAL	114.231.356,00	103.117.441,00	(11.113.915,00)	90,27
5.2.07.2-07.3-31.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.784.521,00	67.722.541,00	(9.061.980,00)	88,20
5.2.07.2-07.3-31.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.446.835,00	20.394.900,00	(2.051.935,00)	90,86
5.2.07.2-07.3-31.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
5.2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14.792.856.788,00	11.663.779.056,00	(3.129.077.732,00)	78,85
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.792.856.788,00	11.663.779.056,00	(3.129.077.732,00)	78,85

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	13.398.329.803,00	10.402.683.372,00	(2.995.646.431,00)	77,64
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	5.128.832.656,00	4.456.804.024,00	(672.028.632,00)	86,90
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.269.497.147,00	5.945.879.348,00	(2.323.617.799,00)	71,90
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.394.526.985,00	1.261.095.684,00	(133.431.301,00)	90,43
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	624.263.167,00	568.383.684,00	(55.879.483,00)	91,05
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	770.263.818,00	692.712.000,00	(77.551.818,00)	89,93
5.2.09	PANGAN	12.530.421.310,00	11.049.504.542,00	(1.480.916.768,00)	88,18
5.2.09.2-09.3-25.0-00.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	12.530.421.310,00	11.049.504.542,00	(1.480.916.768,00)	88,18
5.2.09.2-09.3-25.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	12.476.233.302,00	11.000.159.273,00	(1.476.074.029,00)	88,17
5.2.09.2-09.3-25.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	5.357.663.716,00	4.575.674.474,00	(781.989.242,00)	85,40
5.2.09.2-09.3-25.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.897.328.773,00	4.259.737.019,00	(637.591.754,00)	86,98
5.2.09.2-09.3-25.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	680.440.813,00	623.947.780,00	(56.493.033,00)	91,70
5.2.09.2-09.3-25.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.540.800.000,00	1.540.800.000,00	0,00	100,00
5.2.09.2-09.3-25.0-00.01.2	BELANJA MODAL	54.188.008,00	49.345.269,00	(4.842.739,00)	91,06
5.2.09.2-09.3-25.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.193.008,00	18.045.269,00	(1.147.739,00)	94,02
5.2.09.2-09.3-25.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	34.995.000,00	31.300.000,00	(3.695.000,00)	89,44
5.2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.444.069.405,00	8.474.507.702,00	(969.561.703,00)	89,73
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.444.069.405,00	8.474.507.702,00	(969.561.703,00)	89,73
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	8.855.624.340,00	7.928.384.202,00	(927.240.138,00)	89,53
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.876.451.893,00	4.391.860.112,00	(484.591.781,00)	90,06
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.979.172.447,00	3.536.524.090,00	(442.648.357,00)	88,88
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	588.445.065,00	546.123.500,00	(42.321.565,00)	92,81

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.577.000,00	184.285.000,00	(16.292.000,00)	91,88
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	387.868.065,00	361.838.500,00	(26.029.565,00)	93,29
5.2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.733.605.829,00	10.205.122.919,00	(1.528.482.910,00)	86,97
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.733.605.829,00	10.205.122.919,00	(1.528.482.910,00)	86,97
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	11.556.383.267,00	10.045.170.919,00	(1.511.212.348,00)	86,92
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	5.006.343.671,00	4.227.845.815,00	(778.497.856,00)	84,45
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.550.039.596,00	5.817.325.104,00	(732.714.492,00)	88,81
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	177.222.562,00	159.952.000,00	(17.270.562,00)	90,25
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	155.222.562,00	140.952.000,00	(14.270.562,00)	90,81
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.000.000,00	19.000.000,00	(3.000.000,00)	86,36
5.2.15	PERHUBUNGAN	9.455.218.457,00	8.313.939.696,00	(1.141.278.761,00)	87,93
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan	9.455.218.457,00	8.313.939.696,00	(1.141.278.761,00)	87,93
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	8.618.041.271,00	7.490.660.696,00	(1.127.380.575,00)	86,92
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	5.802.346.407,00	4.988.792.779,00	(813.553.628,00)	85,98
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.815.694.864,00	2.501.867.917,00	(313.826.947,00)	88,85
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	837.177.186,00	823.279.000,00	(13.898.186,00)	98,34
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.877.824,00	116.980.000,00	(5.897.824,00)	95,20
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	667.669.362,00	660.499.000,00	(7.170.362,00)	98,93
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	46.630.000,00	45.800.000,00	(830.000,00)	98,22
5.2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	10.474.476.919,00	9.517.772.688,00	(956.704.231,00)	90,87
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.474.476.919,00	9.517.772.688,00	(956.704.231,00)	90,87
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1	BELANJA OPERASI	10.216.094.879,00	9.298.654.938,00	(917.439.941,00)	91,02

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.01	Belanja Pegawai	3.808.380.717,00	3.150.303.206,00	(658.077.511,00)	82,72
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.407.714.162,00	6.148.351.732,00	(259.362.430,00)	95,95
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2	BELANJA MODAL	258.382.040,00	219.117.750,00	(39.264.290,00)	84,80
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.682.040,00	110.062.750,00	(23.619.290,00)	82,33
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	124.700.000,00	109.055.000,00	(15.645.000,00)	87,45
5.2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	17.564.050.674,00	16.266.532.497,00	(1.297.518.177,00)	92,61
5.2.17.2-17.3-30.0-00.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	17.564.050.674,00	16.266.532.497,00	(1.297.518.177,00)	92,61
5.2.17.2-17.3-30.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	16.787.323.991,00	15.535.714.247,00	(1.251.609.744,00)	92,54
5.2.17.2-17.3-30.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.957.064.492,00	4.254.841.411,00	(702.223.081,00)	85,83
5.2.17.2-17.3-30.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.993.359.499,00	4.497.972.836,00	(495.386.663,00)	90,08
5.2.17.2-17.3-30.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00
5.2.17.2-17.3-30.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.336.900.000,00	6.282.900.000,00	(54.000.000,00)	99,15
5.2.17.2-17.3-30.0-00.01.2	BELANJA MODAL	776.726.683,00	730.818.250,00	(45.908.433,00)	94,09
5.2.17.2-17.3-30.0-00.01.2.01	Belanja Modal Tanah	12.500.000,00	12.490.000,00	(10.000,00)	99,92
5.2.17.2-17.3-30.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173.114.308,00	165.655.750,00	(7.458.558,00)	95,69
5.2.17.2-17.3-30.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	543.613.255,00	506.596.500,00	(37.016.755,00)	93,19
5.2.17.2-17.3-30.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	47.499.120,00	46.076.000,00	(1.423.120,00)	97,00
5.2.18	PENANAMAN MODAL	5.392.445.040,00	3.963.364.969,00	(1.429.080.071,00)	73,50
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.392.445.040,00	3.963.364.969,00	(1.429.080.071,00)	73,50
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	5.369.785.777,00	3.943.064.969,00	(1.426.720.808,00)	73,43
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.869.219.440,00	2.650.705.755,00	(1.218.513.685,00)	68,51
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.566.337,00	1.292.359.214,00	(208.207.123,00)	86,12

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	22.659.263,00	20.300.000,00	(2.359.263,00)	89,59
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.659.263,00	20.300.000,00	(2.359.263,00)	89,59
5.2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	19.721.615.955,00	18.350.988.164,00	(1.370.627.791,00)	93,05
5.2.19.2-19.0-00.0-00.01	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	19.721.615.955,00	18.350.988.164,00	(1.370.627.791,00)	93,05
5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	18.670.941.485,00	17.400.109.002,00	(1.270.832.483,00)	93,19
5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.571.072.660,00	3.213.547.050,00	(357.525.610,00)	89,99
5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.114.868.825,00	5.447.467.261,00	(667.401.564,00)	89,09
5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	8.985.000.000,00	8.739.094.691,00	(245.905.309,00)	97,26
5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.050.674.470,00	950.879.162,00	(99.795.308,00)	90,50
5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.877.940,00	100.188.750,00	(6.689.190,00)	93,74
5.2.19.2-19.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	943.796.530,00	850.690.412,00	(93.106.118,00)	90,13
5.2.23	PERPUSTAKAAN	7.096.851.564,00	5.413.223.498,00	(1.683.628.066,00)	76,28
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.096.851.564,00	5.413.223.498,00	(1.683.628.066,00)	76,28
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	6.596.969.034,00	4.946.765.198,00	(1.650.203.836,00)	74,99
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	5.006.000.370,00	3.504.037.153,00	(1.501.963.217,00)	70,00
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.590.968.664,00	1.442.728.045,00	(148.240.619,00)	90,68
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2	BELANJA MODAL	499.882.530,00	466.458.300,00	(33.424.230,00)	93,31
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	343.045.833,00	318.285.000,00	(24.760.833,00)	92,78
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	137.227.397,00	136.075.000,00	(1.152.397,00)	99,16
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.609.300,00	12.098.300,00	(7.511.000,00)	61,70
5.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	60.065.719.102,00	54.180.449.479,00	(5.885.269.623,00)	90,20
5.3.26	PARIWISATA	7.383.197.919,00	5.981.972.433,00	(1.401.225.486,00)	81,02

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
5.3.26.3-26.0-00.0-00.01	Dinas Pariwisata	7.383.197.919,00	5.981.972.433,00	(1.401.225.486,00)	81,02
5.3.26.3-26.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	6.845.042.335,00	5.674.327.840,00	(1.170.714.495,00)	82,90
5.3.26.3-26.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.641.288.486,00	3.587.820.712,00	(1.053.467.774,00)	77,30
5.3.26.3-26.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.203.753.849,00	2.086.507.128,00	(117.246.721,00)	94,68
5.3.26.3-26.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	538.155.584,00	307.644.593,00	(230.510.991,00)	57,17
5.3.26.3-26.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.972.849,00	17.781.593,00	(191.256,00)	98,94
5.3.26.3-26.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	320.182.735,00	289.863.000,00	(30.319.735,00)	90,53
5.3.26.3-26.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
5.3.27	PERTANIAN	52.682.521.183,00	48.198.477.046,00	(4.484.044.137,00)	91,49
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	42.763.638.991,00	39.255.327.876,00	(3.508.311.115,00)	91,80
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	32.124.956.282,00	29.351.253.324,00	(2.773.702.958,00)	91,37
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	23.920.647.200,00	21.685.382.936,00	(2.235.264.264,00)	90,66
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.033.488.142,00	3.801.056.388,00	(232.431.754,00)	94,24
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	4.170.820.940,00	3.864.814.000,00	(306.006.940,00)	92,66
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	10.638.682.709,00	9.904.074.552,00	(734.608.157,00)	93,09
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.758.981,00	119.776.800,00	(18.982.181,00)	86,32
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.260.545.452,00	1.194.199.752,00	(66.345.700,00)	94,74
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.239.378.276,00	8.590.098.000,00	(649.280.276,00)	92,97
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9.918.882.192,00	8.943.149.170,00	(975.733.022,00)	90,16
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	9.801.143.608,00	8.829.189.170,00	(971.954.438,00)	90,08
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	6.775.361.825,00	6.168.098.615,00	(607.263.210,00)	91,04
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.925.781.794,00	2.570.526.555,00	(355.255.239,00)	87,86

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.1.05	Belanja Hibah	99.999.989,00	90.564.000,00	(9.435.989,00)	90,56
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	117.738.584,00	113.960.000,00	(3.778.584,00)	96,79
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.537.334,00	18.280.000,00	(1.257.334,00)	93,56
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.201.250,00	95.680.000,00	(2.521.250,00)	97,43
5.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	140.202.542.449,00	121.790.318.758,00	(18.412.223.691,00)	86,87
5.4.01	SEKRETARIAT DAERAH	76.807.742.632,00	71.688.787.342,00	(5.118.955.290,00)	93,34
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01	Sekretariat Daerah	76.807.742.632,00	71.688.787.342,00	(5.118.955.290,00)	93,34
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	75.508.519.798,00	70.453.991.047,00	(5.054.528.751,00)	93,31
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	22.492.070.496,00	20.463.497.946,00	(2.028.572.550,00)	90,98
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.081.449.302,00	43.056.473.401,00	(3.024.975.901,00)	93,44
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	6.935.000.000,00	6.934.019.700,00	(980.300,00)	99,99
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.299.222.834,00	1.234.796.295,00	(64.426.539,00)	95,04
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	648.933.464,00	601.075.295,00	(47.858.169,00)	92,63
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	617.909.610,00	610.971.000,00	(6.938.610,00)	98,88
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	32.379.760,00	22.750.000,00	(9.629.760,00)	70,26
5.4.02	SEKRETARIAT DPRD	63.394.799.817,00	50.101.531.416,00	(13.293.268.401,00)	79,03
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	63.394.799.817,00	50.101.531.416,00	(13.293.268.401,00)	79,03
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	62.045.658.275,00	49.007.708.374,00	(13.037.949.901,00)	78,99
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	29.809.966.648,00	27.207.565.548,00	(2.602.401.100,00)	91,27
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.235.691.627,00	21.800.142.826,00	(10.435.548.801,00)	67,63
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.349.141.542,00	1.093.823.042,00	(255.318.500,00)	81,08
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	684.722.903,00	581.777.042,00	(102.945.861,00)	84,97

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	664.418.639,00	512.046.000,00	(152.372.639,00)	77,07
5.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	297.214.162.560,00	269.012.415.217,00	(28.201.747.343,00)	90,51
5.5.01	PERENCANAAN	9.252.058.454,00	8.440.290.985,00	(811.767.469,00)	91,23
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.252.058.454,00	8.440.290.985,00	(811.767.469,00)	91,23
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	8.916.286.578,00	8.126.826.985,00	(789.459.593,00)	91,15
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	6.279.156.390,00	6.000.364.243,00	(278.792.147,00)	95,56
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.637.130.188,00	2.126.462.742,00	(510.667.446,00)	80,64
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2	BELANJA MODAL	335.771.876,00	313.464.000,00	(22.307.876,00)	93,36
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	313.571.876,00	293.564.000,00	(20.007.876,00)	93,62
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.200.000,00	19.900.000,00	(2.300.000,00)	89,64
5.5.02	KEUANGAN	279.103.727.779,00	253.289.293.891,00	(25.814.433.888,00)	90,75
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	268.335.447.502,00	244.038.630.851,00	(24.296.816.651,00)	90,95
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	17.657.989.679,00	15.525.928.281,00	(2.132.061.398,00)	87,93
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	8.384.224.832,00	7.409.582.520,00	(974.642.312,00)	88,38
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.273.764.847,00	8.116.345.761,00	(1.157.419.086,00)	87,52
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	3.780.555.306,00	3.536.233.030,00	(244.322.276,00)	93,54
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.01	Belanja Modal Tanah	381.810.000,00	228.002.000,00	(153.808.000,00)	59,72
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.355.455.306,00	3.267.078.630,00	(88.376.676,00)	97,37
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.640.000,00	26.552.400,00	(87.600,00)	99,67
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.650.000,00	14.600.000,00	(2.050.000,00)	87,69
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.426.879.377,00	746.426.000,00	(21.680.453.377,00)	3,33
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3.01	Belanja Tidak Terduga	22.426.879.377,00	746.426.000,00	(21.680.453.377,00)	3,33

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4	BELANJA TRANSFER	224.470.023.140,00	224.230.043.540,00	(239.979.600,00)	99,89
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.895.286.950,00	4.895.286.950,00	0,00	100,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	219.574.736.190,00	219.334.756.590,00	(239.979.600,00)	99,89
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02	Badan Pendapatan Daerah	10.768.280.277,00	9.250.663.040,00	(1.517.617.237,00)	85,91
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	10.554.047.081,00	9.080.628.040,00	(1.473.419.041,00)	86,04
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	7.306.874.302,00	6.605.294.012,00	(701.580.290,00)	90,40
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.247.172.779,00	2.475.334.028,00	(771.838.751,00)	76,23
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	214.233.196,00	170.035.000,00	(44.198.196,00)	79,37
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	214.233.196,00	170.035.000,00	(44.198.196,00)	79,37
5.5.03	KEPEGAWAIAN	8.858.376.327,00	7.282.830.341,00	(1.575.545.986,00)	82,21
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.858.376.327,00	7.282.830.341,00	(1.575.545.986,00)	82,21
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	8.265.636.327,00	7.282.830.341,00	(982.805.986,00)	88,11
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.795.269.745,00	4.440.410.220,00	(354.859.525,00)	92,60
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.470.366.582,00	2.842.420.121,00	(627.946.461,00)	81,91
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2	BELANJA MODAL	592.740.000,00	0,00	(592.740.000,00)	0,00
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	592.740.000,00	0,00	(592.740.000,00)	0,00
5.6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	15.048.522.610,00	13.904.689.166,00	(1.143.833.444,00)	92,40
5.6.01	INSPEKTORAT	15.048.522.610,00	13.904.689.166,00	(1.143.833.444,00)	92,40
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01	Inspektorat Kabupaten	15.048.522.610,00	13.904.689.166,00	(1.143.833.444,00)	92,40
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	13.820.723.043,00	12.719.562.866,00	(1.101.160.177,00)	92,03
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	10.269.926.366,00	9.553.178.123,00	(716.748.243,00)	93,02
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.550.796.677,00	3.166.384.743,00	(384.411.934,00)	89,17

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.227.799.567,00	1.185.126.300,00	(42.673.267,00)	96,52
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	617.999.954,00	580.089.300,00	(37.910.654,00)	93,87
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	609.799.613,00	605.037.000,00	(4.762.613,00)	99,22
5.7	UNSUR KEWILAYAHAN	55.099.914.629,00	46.303.425.166,00	(8.796.489.463,00)	84,04
5.7.01	KECAMATAN	55.099.914.629,00	46.303.425.166,00	(8.796.489.463,00)	84,04
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01	Kantor Kecamatan Bajuin	3.434.695.515,00	2.869.535.715,00	(565.159.800,00)	83,55
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.363.248.715,00	2.804.785.715,00	(558.463.000,00)	83,40
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.546.230.609,00	2.103.171.770,00	(443.058.839,00)	82,60
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.921.106,00	483.236.945,00	(16.684.161,00)	96,66
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	317.097.000,00	218.377.000,00	(98.720.000,00)	68,87
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	71.446.800,00	64.750.000,00	(6.696.800,00)	90,63
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.446.800,00	64.750.000,00	(6.696.800,00)	90,63
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02	Kantor Kecamatan Bati-Bati	5.392.345.641,00	4.281.899.672,00	(1.110.445.969,00)	79,41
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	5.339.948.832,00	4.241.229.672,00	(1.098.719.160,00)	79,42
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	3.076.344.064,00	2.487.457.121,00	(588.886.943,00)	80,86
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.881.104.768,00	1.673.772.551,00	(207.332.217,00)	88,98
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.05	Belanja Hibah	382.500.000,00	80.000.000,00	(302.500.000,00)	20,92
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	52.396.809,00	40.670.000,00	(11.726.809,00)	77,62
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.396.809,00	40.670.000,00	(11.726.809,00)	77,62
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03	Kantor Kecamatan Batu Ampar	3.611.840.965,00	3.171.993.775,00	(439.847.190,00)	87,82
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1	BELANJA OPERASI	3.557.524.434,00	3.120.661.247,00	(436.863.187,00)	87,72
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.01	Belanja Pegawai	2.713.003.124,00	2.334.620.242,00	(378.382.882,00)	86,05

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.02	Belanja Barang dan Jasa	445.181.310,00	401.301.005,00	(43.880.305,00)	90,14
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.05	Belanja Hibah	399.340.000,00	384.740.000,00	(14.600.000,00)	96,34
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2	BELANJA MODAL	54.316.531,00	51.332.528,00	(2.984.003,00)	94,51
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.316.531,00	51.332.528,00	(2.984.003,00)	94,51
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04	Kantor Kecamatan Bumi Makmur	3.355.323.542,00	3.029.557.448,00	(325.766.094,00)	90,29
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1	BELANJA OPERASI	3.355.323.542,00	3.029.557.448,00	(325.766.094,00)	90,29
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.01	Belanja Pegawai	2.810.399.195,00	2.584.507.558,00	(225.891.637,00)	91,96
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.02	Belanja Barang dan Jasa	544.924.347,00	445.049.890,00	(99.874.457,00)	81,67
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05	Kantor Kecamatan Jorong	4.020.342.259,00	3.185.693.769,00	(834.648.490,00)	79,24
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1	BELANJA OPERASI	4.020.342.259,00	3.185.693.769,00	(834.648.490,00)	79,24
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.01	Belanja Pegawai	2.536.147.072,00	2.174.095.986,00	(362.051.086,00)	85,72
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	492.657.187,00	431.597.783,00	(61.059.404,00)	87,61
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.05	Belanja Hibah	991.538.000,00	580.000.000,00	(411.538.000,00)	58,49
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06	Kantor Kecamatan Kintap	3.964.986.548,00	3.167.389.242,00	(797.597.306,00)	79,88
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1	BELANJA OPERASI	3.939.865.749,00	3.143.339.242,00	(796.526.507,00)	79,78
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.01	Belanja Pegawai	2.365.458.270,00	1.785.506.551,00	(579.951.719,00)	75,48
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.02	Belanja Barang dan Jasa	579.403.479,00	515.189.809,00	(64.213.670,00)	88,92
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.05	Belanja Hibah	995.004.000,00	842.642.882,00	(152.361.118,00)	84,69
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2	BELANJA MODAL	25.120.799,00	24.050.000,00	(1.070.799,00)	95,74
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.120.799,00	24.050.000,00	(1.070.799,00)	95,74
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07	Kantor Kecamatan Kurau	3.429.575.371,00	2.436.769.330,00	(992.806.041,00)	71,05
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1	BELANJA OPERASI	3.365.440.968,00	2.378.069.330,00	(987.371.638,00)	70,66

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.01	Belanja Pegawai	2.834.748.170,00	1.928.421.199,00	(906.326.971,00)	68,03
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.02	Belanja Barang dan Jasa	477.942.798,00	396.898.131,00	(81.044.667,00)	83,04
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.05	Belanja Hibah	52.750.000,00	52.750.000,00	0,00	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2	BELANJA MODAL	64.134.403,00	58.700.000,00	(5.434.403,00)	91,53
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.134.403,00	58.700.000,00	(5.434.403,00)	91,53
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08	Kantor Kecamatan Pelaihari	16.002.698.476,00	13.957.604.669,00	(2.045.093.807,00)	87,22
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1	BELANJA OPERASI	14.533.344.898,00	12.620.658.009,00	(1.912.686.889,00)	86,84
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.01	Belanja Pegawai	10.129.932.257,00	8.812.276.425,00	(1.317.655.832,00)	86,99
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.851.157.641,00	3.381.001.584,00	(470.156.057,00)	87,79
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.05	Belanja Hibah	552.255.000,00	427.380.000,00	(124.875.000,00)	77,39
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.2	BELANJA MODAL	1.469.353.578,00	1.336.946.660,00	(132.406.918,00)	90,99
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	151.715.021,00	132.719.408,00	(18.995.613,00)	87,48
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	433.679.622,00	396.693.225,00	(36.986.397,00)	91,47
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	883.958.935,00	807.534.027,00	(76.424.908,00)	91,35
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09	Kantor Kecamatan Panyipatan	4.204.061.128,00	3.827.762.632,00	(376.298.496,00)	91,05
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1	BELANJA OPERASI	4.200.824.090,00	3.824.802.632,00	(376.021.458,00)	91,05
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1.01	Belanja Pegawai	2.569.736.971,00	2.366.350.809,00	(203.386.162,00)	92,09
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1.02	Belanja Barang dan Jasa	631.087.119,00	573.321.823,00	(57.765.296,00)	90,85
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1.05	Belanja Hibah	1.000.000.000,00	885.130.000,00	(114.870.000,00)	88,51
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.2	BELANJA MODAL	3.237.038,00	2.960.000,00	(277.038,00)	91,44
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.237.038,00	2.960.000,00	(277.038,00)	91,44
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10	Kantor Kecamatan Takisung	3.648.697.238,00	3.221.206.262,00	(427.490.976,00)	88,28

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1	BELANJA OPERASI	3.648.697.238,00	3.221.206.262,00	(427.490.976,00)	88,28
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1.01	Belanja Pegawai	2.577.671.099,00	2.325.964.689,00	(251.706.410,00)	90,24
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1.02	Belanja Barang dan Jasa	660.526.139,00	484.741.573,00	(175.784.566,00)	73,39
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1.05	Belanja Hibah	410.500.000,00	410.500.000,00	0,00	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	4.035.347.946,00	3.154.012.652,00	(881.335.294,00)	78,16
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1	BELANJA OPERASI	3.997.200.576,00	3.147.082.415,00	(850.118.161,00)	78,73
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1.01	Belanja Pegawai	2.643.431.647,00	2.318.944.620,00	(324.487.027,00)	87,72
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1.02	Belanja Barang dan Jasa	508.768.929,00	472.337.795,00	(36.431.134,00)	92,84
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1.05	Belanja Hibah	845.000.000,00	355.800.000,00	(489.200.000,00)	42,11
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.2	BELANJA MODAL	38.147.370,00	6.930.237,00	(31.217.133,00)	18,17
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.552.000,00	3.449.985,00	(102.015,00)	97,13
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.595.370,00	3.480.252,00	(31.115.118,00)	10,06
5.8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	11.308.319.217,00	10.652.552.319,00	(655.766.898,00)	94,20
5.8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.308.319.217,00	10.652.552.319,00	(655.766.898,00)	94,20
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.308.319.217,00	10.652.552.319,00	(655.766.898,00)	94,20
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	11.238.582.698,00	10.585.524.319,00	(653.058.379,00)	94,19
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.934.375.837,00	4.673.690.147,00	(260.685.690,00)	94,72
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.694.508.311,00	1.302.135.622,00	(392.372.689,00)	76,84
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	4.609.698.550,00	4.609.698.550,00	0,00	100,00
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	69.736.519,00	67.028.000,00	(2.708.519,00)	96,12
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.736.519,00	67.028.000,00	(2.708.519,00)	96,12
6	PEMBIAYAAN DAERAH	685.990.188.934,00	686.325.812.033,83	335.623.099,83	100,05

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
6.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	0,00	331.168.000,00	331.168.000,00	0,00
6.3.27	PERTANIAN	0,00	331.168.000,00	331.168.000,00	0,00
6.3.27.3-27.0-00.0-00.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	331.168.000,00	331.168.000,00	0,00
6.3.27.3-27.0-00.0-00.02.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	331.168.000,00	331.168.000,00	0,00
6.3.27.3-27.0-00.0-00.02.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	331.168.000,00	331.168.000,00	0,00
6.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	685.990.188.934,00	685.994.644.033,83	4.455.099,83	100,00
6.5.02	KEUANGAN	685.990.188.934,00	685.994.644.033,83	4.455.099,83	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	685.990.188.934,00	685.994.644.033,83	4.455.099,83	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	610.990.188.934,00	610.994.644.033,83	4.455.099,83	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	604.990.188.934,00	604.990.188.933,83	(0,17)	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	6.000.000.000,00	6.004.455.100,00	4.455.100,00	100,07
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	0,00	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	100,00

Pelaihari, 10 Agustus 2023

BUPATI TANAH LAUT

H. SUKAMTA

LAMPIRAN I.2

Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan
Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan

Lampiran I.2 : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Nomor : 1 Tahun 2023

Tanggal : 10 Agustus 2023



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi 2022	Realisasi 2021
4	PENDAPATAN DAERAH	1.740.032.489.864,00	2.159.239.661.099,87	1.522.901.390.516,55
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	178.390.127.793,00	193.890.015.753,87	206.135.630.695,55
4.1.01	Pajak Daerah	41.000.250.000,00	45.363.440.225,80	43.638.422.656,00
4.1.02	Retribusi Daerah	7.952.619.500,00	6.971.598.007,00	5.743.153.528,80
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.010.810.370,00	11.010.810.384,00	9.836.676.685,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	118.426.447.923,00	130.544.167.137,07	146.917.377.825,75
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.560.894.562.071,00	1.963.205.983.275,00	1.274.449.541.251,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.450.644.562.071,00	1.781.587.762.522,00	1.174.467.043.937,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.335.967.846.071,00	1.667.151.026.122,00	1.045.900.191.937,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	10.342.946.000,00	10.342.946.000,00	19.072.439.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	104.333.770.000,00	104.093.790.400,00	109.494.413.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	110.250.000.000,00	181.618.220.753,00	99.982.497.314,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	110.250.000.000,00	181.618.220.753,00	99.282.497.314,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	700.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	747.800.000,00	2.143.662.071,00	42.316.218.570,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	747.800.000,00	2.143.662.071,00	3.203.438.570,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	39.112.780.000,00

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5	BELANJA DAERAH	2.122.153.778.445,00	1.863.861.922.192,92	1.894.067.926.592,83
5.1	BELANJA OPERASI	1.439.009.698.746,00	1.241.627.856.198,92	1.214.778.642.853,00
5.1.01	Belanja Pegawai	761.383.543.055,00	653.956.945.688,00	639.840.569.796,56
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	604.326.333.840,00	520.933.208.907,92	505.996.286.092,44
5.1.05	Belanja Hibah	47.079.621.851,00	44.321.201.603,00	53.691.496.964,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	26.220.200.000,00	22.416.500.000,00	15.250.290.000,00
5.2	BELANJA MODAL	436.247.177.182,00	397.257.596.454,00	443.098.788.114,83
5.2.01	Belanja Modal Tanah	394.310.000,00	240.492.000,00	2.897.145.120,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.403.917.048,00	91.151.091.039,00	87.589.675.673,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	112.572.068.902,00	104.788.622.560,00	125.469.046.825,83
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	213.225.317.172,00	200.681.712.555,00	226.307.789.870,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	651.564.060,00	395.678.300,00	835.130.626,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.626.879.377,00	746.426.000,00	6.471.571.965,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22.626.879.377,00	746.426.000,00	6.471.571.965,00
5.4	BELANJA TRANSFER	224.270.023.140,00	224.230.043.540,00	229.718.923.660,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.895.286.950,00	4.895.286.950,00	5.183.544.470,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	219.374.736.190,00	219.334.756.590,00	224.535.379.190,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	685.990.188.934,00	686.325.812.033,83	1.016.156.725.010,11
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	610.990.188.934,00	611.325.812.033,83	996.156.725.010,11
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	604.990.188.934,00	604.990.188.933,83	990.302.466.610,11
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	6.000.000.000,00	6.004.455.100,00	5.747.184.400,00
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	331.168.000,00	107.074.000,00

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi 2022	Realisasi 2021
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	20.000.000.000,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	15.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00

Pelaihari, 10 Agustus 2023

BUPATI TANAH LAUT

H. SUKAMTA

LAMPIRAN I.3

Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Dan
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 1 Tahun 2023
Tanggal : 10 Agustus 2023



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.4	PENDAPATAN DAERAH	1.740.032.489.864,00	2.159.239.661.099,87	419.207.171.235,87	124,09
00.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	178.390.127.793,00	193.890.015.753,87	15.499.887.960,87	108,69
00.0.00.00.4.1.01	Pajak Daerah	41.000.250.000,00	45.363.440.225,80	4.363.190.225,80	110,64
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	7.952.619.500,00	6.971.598.007,00	(981.021.493,00)	87,66
00.0.00.00.4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.010.810.370,00	11.010.810.384,00	14,00	100,00
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	118.426.447.923,00	130.544.167.137,07	12.117.719.214,07	110,23
00.0.00.00.4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.560.894.562.071,00	1.963.205.983.275,00	402.311.421.204,00	125,77
00.0.00.00.4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.450.644.562.071,00	1.781.587.762.522,00	330.943.200.451,00	122,81
00.0.00.00.4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	110.250.000.000,00	181.618.220.753,00	71.368.220.753,00	164,73
00.0.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	747.800.000,00	2.143.662.071,00	1.395.862.071,00	286,66
00.0.00.00.4.3.01	Pendapatan Hibah	747.800.000,00	2.143.662.071,00	1.395.862.071,00	286,66
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	2.122.153.778.445,00	1.863.861.922.192,92	(258.291.856.252,08)	87,83
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	987.671.625.670,00	856.004.777.735,92	(131.666.847.934,08)	86,67
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	672.234.616,00	478.047.583,00	(194.187.033,00)	71,11
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	442.841.666,00	300.420.878,00	(142.420.788,00)	67,84
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	441.032.424,00	298.796.878,00	(142.235.546,00)	67,75
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	441.032.424,00	298.796.878,00	(142.235.546,00)	67,75

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	1.809.242,00	1.624.000,00	(185.242,00)	89,76
01.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.809.242,00	1.624.000,00	(185.242,00)	89,76
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	229.392.950,00	177.626.705,00	(51.766.245,00)	77,43
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	229.392.950,00	177.626.705,00	(51.766.245,00)	77,43
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.392.950,00	177.626.705,00	(51.766.245,00)	77,43
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	730.392.557.854,00	625.587.404.148,00	(104.805.153.706,00)	85,65
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	729.886.165.909,00	625.229.499.523,00	(104.656.666.386,00)	85,66
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	729.886.165.909,00	625.229.499.523,00	(104.656.666.386,00)	85,66
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	729.681.164.659,00	625.024.498.273,00	(104.656.666.386,00)	85,66
01.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.001.250,00	205.001.250,00	0.00	100,00
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	461.904.560,00	329.306.325,00	(132.598.235,00)	71,29
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	461.904.560,00	329.306.325,00	(132.598.235,00)	71,29
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	461.904.560,00	329.306.325,00	(132.598.235,00)	71,29
01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	42.687.385,00	27.598.300,00	(15.089.085,00)	64,65
01.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	42.687.385,00	27.598.300,00	(15.089.085,00)	64,65
01.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.687.385,00	27.598.300,00	(15.089.085,00)	64,65
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.800.000,00	1.000.000,00	(800.000,00)	55,56
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.000.000,00	(800.000,00)	55,56
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.000.000,00	(800.000,00)	55,56
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	89.240.000,00	45.765.000,00	(43.475.000,00)	51,28
01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	89.240.000,00	45.765.000,00	(43.475.000,00)	51,28
01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	89.240.000,00	45.765.000,00	(43.475.000,00)	51,28
01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.240.000,00	45.765.000,00	(43.475.000,00)	51,28

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.262.405.000,00	628.062.036,00	(634.342.964,00)	49,75
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	199.100.000,00	124.200.000,00	(74.900.000,00)	62,38
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	199.100.000,00	124.200.000,00	(74.900.000,00)	62,38
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.100.000,00	124.200.000,00	(74.900.000,00)	62,38
01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00
01.2.05.07.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00
01.2.05.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	236.000.000,00	47.641.250,00	(188.358.750,00)	20,19
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	236.000.000,00	47.641.250,00	(188.358.750,00)	20,19
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.000.000,00	47.641.250,00	(188.358.750,00)	20,19
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	802.305.000,00	456.220.786,00	(346.084.214,00)	56,86
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	802.305.000,00	456.220.786,00	(346.084.214,00)	56,86
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	802.305.000,00	456.220.786,00	(346.084.214,00)	56,86
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.264.532.030,00	23.374.200.290,00	(2.890.331.740,00)	89,00
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	673.471.714,00	563.544.914,00	(109.926.800,00)	83,68
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	672.732.876,00	563.544.914,00	(109.187.962,00)	83,77
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	672.732.876,00	563.544.914,00	(109.187.962,00)	83,77
01.2.06.01.5.2	BELANJA MODAL	738.838,00	0,00	(738.838,00)	0,00
01.2.06.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	738.838,00	0,00	(738.838,00)	0,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.490.202.283,00	5.032.699.910,00	(1.457.502.373,00)	77,54
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.328.878.517,00	3.615.804.038,00	(713.074.479,00)	83,53
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.328.878.517,00	3.615.804.038,00	(713.074.479,00)	83,53
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	2.161.323.766,00	1.416.895.872,00	(744.427.894,00)	65,56

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.144.673.766,00	1.418.275.872,00	(726.397.894,00)	66,13
01.2.06.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.650.000,00	14.600.000,00	(2.050.000,00)	87,69
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	109.855.642,00	96.767.482,00	(13.088.160,00)	88,09
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	81.466.254,00	69.436.450,00	(12.029.804,00)	85,23
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.466.254,00	69.436.450,00	(12.029.804,00)	85,23
01.2.06.03.5.2	BELANJA MODAL	28.389.388,00	27.331.032,00	(1.058.356,00)	96,27
01.2.06.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.389.388,00	27.331.032,00	(1.058.356,00)	96,27
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	336.037.877,00	274.139.580,00	(61.898.297,00)	81,58
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	336.037.877,00	274.139.580,00	(61.898.297,00)	81,58
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.037.877,00	274.139.580,00	(61.898.297,00)	81,58
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.586.506.650,00	1.230.077.482,00	(356.429.168,00)	77,53
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.586.506.650,00	1.230.077.482,00	(356.429.168,00)	77,53
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.586.506.650,00	1.230.077.482,00	(356.429.168,00)	77,53
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	82.993.200,00	59.222.820,00	(23.770.380,00)	71,36
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	82.993.200,00	59.222.820,00	(23.770.380,00)	71,36
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.993.200,00	59.222.820,00	(23.770.380,00)	71,36
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	224.299.073,00	174.802.741,00	(49.496.332,00)	77,93
01.2.06.07.5.1	BELANJA OPERASI	224.299.073,00	174.802.741,00	(49.496.332,00)	77,93
01.2.06.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.299.073,00	174.802.741,00	(49.496.332,00)	77,93
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	88.104.875,00	28.555.000,00	(59.549.875,00)	32,41
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	88.104.875,00	28.555.000,00	(59.549.875,00)	32,41
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.104.875,00	28.555.000,00	(59.549.875,00)	32,41
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.673.060.716,00	15.914.390.361,00	(758.670.355,00)	95,45

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	16.673.060.716,00	15.914.390.361,00	(758.670.355,00)	95,45
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.673.060.716,00	15.914.390.361,00	(758.670.355,00)	95,45
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.827.616.243,00	10.295.552.025,00	(532.064.218,00)	95,09
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	261.600.393,00	230.369.887,00	(31.230.506,00)	88,06
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	261.600.393,00	230.369.887,00	(31.230.506,00)	88,06
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	261.600.393,00	230.369.887,00	(31.230.506,00)	88,06
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	684.283.306,00	642.684.986,00	(41.598.320,00)	93,92
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	13.934.160,00	13.125.686,00	(808.474,00)	94,20
01.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.934.160,00	13.125.686,00	(808.474,00)	94,20
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	670.349.146,00	629.559.300,00	(40.789.846,00)	93,92
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	670.349.146,00	629.559.300,00	(40.789.846,00)	93,92
01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	129.999.983,00	117.374.000,00	(12.625.983,00)	90,29
01.2.07.09.5.2	BELANJA MODAL	129.999.983,00	117.374.000,00	(12.625.983,00)	90,29
01.2.07.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	129.999.983,00	117.374.000,00	(12.625.983,00)	90,29
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.529.457.651,00	1.415.775.154,00	(113.682.497,00)	92,57
01.2.07.10.5.1	BELANJA OPERASI	308.379.058,00	267.925.563,00	(40.453.495,00)	86,88
01.2.07.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.379.058,00	267.925.563,00	(40.453.495,00)	86,88
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	1.221.078.593,00	1.147.849.591,00	(73.229.002,00)	94,00
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.193.951.998,00	1.123.004.691,00	(70.947.307,00)	94,06
01.2.07.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.446.835,00	20.394.900,00	(2.051.935,00)	90,86
01.2.07.10.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.679.760,00	4.450.000,00	(229.760,00)	95,09
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.222.274.910,00	7.889.347.998,00	(332.926.912,00)	95,95
01.2.07.11.5.1	BELANJA OPERASI	24.735.257,00	22.014.480,00	(2.720.777,00)	89,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.07.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.735.257,00	22.014.480,00	(2.720.777,00)	89,00
01.2.07.11.5.2	BELANJA MODAL	8.197.539.653,00	7.867.333.518,00	(330.206.135,00)	95,97
01.2.07.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	815.265.557,00	717.620.226,00	(97.645.331,00)	88,02
01.2.07.11.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.382.274.096,00	7.149.713.292,00	(232.560.804,00)	96,85
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.914.663.364,00	52.738.723.906,00	(5.175.939.458,00)	91,06
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.272.008.586,00	9.312.517.321,00	(2.959.491.265,00)	75,88
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	12.166.004.011,00	9.237.702.869,00	(2.928.301.142,00)	75,93
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.166.004.011,00	9.237.702.869,00	(2.928.301.142,00)	75,93
01.2.08.02.5.2	BELANJA MODAL	106.004.575,00	74.814.452,00	(31.190.123,00)	70,58
01.2.08.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.774.175,00	5.749.975,00	(24.200,00)	99,58
01.2.08.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.515.400,00	53.352.277,00	(31.163.123,00)	63,13
01.2.08.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.715.000,00	15.712.200,00	(2.800,00)	99,98
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	804.034.979,00	670.551.835,00	(133.483.144,00)	83,40
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	765.851.957,00	634.586.835,00	(131.265.122,00)	82,86
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	765.851.957,00	634.586.835,00	(131.265.122,00)	82,86
01.2.08.03.5.2	BELANJA MODAL	38.183.022,00	35.965.000,00	(2.218.022,00)	94,19
01.2.08.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.183.022,00	20.965.000,00	(2.218.022,00)	90,43
01.2.08.03.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.838.619.799,00	42.755.654.750,00	(2.082.965.049,00)	95,35
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	44.465.641.873,00	42.408.266.750,00	(2.057.375.123,00)	95,37
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.465.641.873,00	42.408.266.750,00	(2.057.375.123,00)	95,37
01.2.08.04.5.2	BELANJA MODAL	372.977.926,00	347.388.000,00	(25.589.926,00)	93,14
01.2.08.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.977.926,00	22.550.000,00	(427.926,00)	98,14

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.08.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	350.000.000,00	324.838.000,00	(25.162.000,00)	92,81
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.186.204.549,00	12.632.146.874,00	(1.554.057.675,00)	89,05
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.334.608.630,00	1.121.334.440,00	(213.274.190,00)	84,02
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.334.608.630,00	1.121.334.440,00	(213.274.190,00)	84,02
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.334.608.630,00	1.121.334.440,00	(213.274.190,00)	84,02
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.229.202.208,00	6.509.860.574,00	(719.341.634,00)	90,05
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.229.202.208,00	6.509.860.574,00	(719.341.634,00)	90,05
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.229.202.208,00	6.509.860.574,00	(719.341.634,00)	90,05
01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	57.440.950,00	56.545.000,00	(895.950,00)	98,44
01.2.09.03.5.1	BELANJA OPERASI	57.440.950,00	56.545.000,00	(895.950,00)	98,44
01.2.09.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.440.950,00	56.545.000,00	(895.950,00)	98,44
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	20.000.000,00	17.910.000,00	(2.090.000,00)	89,55
01.2.09.05.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	17.910.000,00	(2.090.000,00)	89,55
01.2.09.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	17.910.000,00	(2.090.000,00)	89,55
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.112.564.867,00	846.958.630,00	(265.606.237,00)	76,13
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.112.564.867,00	846.958.630,00	(265.606.237,00)	76,13
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.112.564.867,00	846.958.630,00	(265.606.237,00)	76,13
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.137.614.663,00	2.988.350.905,00	(149.263.758,00)	95,24
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	923.360.719,00	870.647.607,00	(52.713.112,00)	94,29
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	923.360.719,00	870.647.607,00	(52.713.112,00)	94,29
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	2.214.253.944,00	2.117.703.298,00	(96.550.646,00)	95,64
01.2.09.09.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.581.798,00	10.260.398,00	(6.321.400,00)	61,88
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.197.672.146,00	2.107.442.900,00	(90.229.246,00)	95,89

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	583.347.311,00	492.465.825,00	(90.881.486,00)	84,42
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	232.591.292,00	161.264.825,00	(71.326.467,00)	69,33
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.591.292,00	161.264.825,00	(71.326.467,00)	69,33
01.2.09.10.5.2	BELANJA MODAL	350.756.019,00	331.201.000,00	(19.555.019,00)	94,42
01.2.09.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.796.410,00	1.630.000,00	(166.410,00)	90,74
01.2.09.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	348.959.609,00	329.571.000,00	(19.388.609,00)	94,44
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	711.425.920,00	598.721.500,00	(112.704.420,00)	84,16
01.2.09.11.5.1	BELANJA OPERASI	711.425.920,00	598.721.500,00	(112.704.420,00)	84,16
01.2.09.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	711.425.920,00	598.721.500,00	(112.704.420,00)	84,16
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	114.628.421.715,00	101.430.683.159,92	(13.197.738.555,08)	88,49
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	114.628.421.715,00	101.430.683.159,92	(13.197.738.555,08)	88,49
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	88.695.820.400,00	79.550.233.078,92	(9.145.587.321,08)	89,69
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.124.750.000,00	5.425.000.000,00	(699.750.000,00)	88,58
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.571.070.400,00	74.125.233.078,92	(8.445.837.321,08)	89,77
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	25.932.601.315,00	21.880.450.081,00	(4.052.151.234,00)	84,37
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.854.861.315,00	19.472.867.775,00	(3.381.993.540,00)	85,20
01.2.10.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.077.740.000,00	2.407.582.306,00	(670.157.694,00)	78,23
01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.135.372.676,00	859.783.636,00	(275.589.040,00)	75,73
01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	820.886.176,00	766.483.636,00	(54.402.540,00)	93,37
01.2.11.01.5.1	BELANJA OPERASI	820.886.176,00	766.483.636,00	(54.402.540,00)	93,37
01.2.11.01.5.1.01	Belanja Pegawai	820.886.176,00	766.483.636,00	(54.402.540,00)	93,37
01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	94.486.500,00	93.300.000,00	(1.186.500,00)	98,74
01.2.11.02.5.1	BELANJA OPERASI	94.486.500,00	93.300.000,00	(1.186.500,00)	98,74

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.11.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.486.500,00	93.300.000,00	(1.186.500,00)	98,74
01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	220.000.000,00	0,00	(220.000.000,00)	0,00
01.2.11.03.5.1	BELANJA OPERASI	220.000.000,00	0,00	(220.000.000,00)	0,00
01.2.11.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	0,00	(220.000.000,00)	0,00
01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.820.090.000,00	2.778.330.127,00	(41.759.873,00)	98,52
01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	860.375.000,00	828.412.500,00	(31.962.500,00)	96,29
01.2.12.01.5.1	BELANJA OPERASI	860.375.000,00	828.412.500,00	(31.962.500,00)	96,29
01.2.12.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	860.375.000,00	828.412.500,00	(31.962.500,00)	96,29
01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	657.555.000,00	655.336.000,00	(2.219.000,00)	99,66
01.2.12.02.5.1	BELANJA OPERASI	657.555.000,00	655.336.000,00	(2.219.000,00)	99,66
01.2.12.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	657.555.000,00	655.336.000,00	(2.219.000,00)	99,66
01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.302.160.000,00	1.294.581.627,00	(7.578.373,00)	99,42
01.2.12.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.302.160.000,00	1.294.581.627,00	(7.578.373,00)	99,42
01.2.12.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.302.160.000,00	1.294.581.627,00	(7.578.373,00)	99,42
01.2.13	Penataan Organisasi	357.827.454,00	272.899.875,00	(84.927.579,00)	76,27
01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	117.226.852,00	78.260.873,00	(38.965.979,00)	66,76
01.2.13.01.5.1	BELANJA OPERASI	117.226.852,00	78.260.873,00	(38.965.979,00)	66,76
01.2.13.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.226.852,00	78.260.873,00	(38.965.979,00)	66,76
01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	117.325.689,00	97.524.800,00	(19.800.889,00)	83,12
01.2.13.02.5.1	BELANJA OPERASI	117.325.689,00	97.524.800,00	(19.800.889,00)	83,12
01.2.13.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.325.689,00	97.524.800,00	(19.800.889,00)	83,12
01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	123.274.913,00	97.114.202,00	(26.160.711,00)	78,78
01.2.13.03.5.1	BELANJA OPERASI	105.310.813,00	79.163.202,00	(26.147.611,00)	75,17

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.13.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.310.813,00	79.163.202,00	(26.147.611,00)	75,17
01.2.13.03.5.2	BELANJA MODAL	17.964.100,00	17.951.000,00	(13.100,00)	99,93
01.2.13.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.964.100,00	17.951.000,00	(13.100,00)	99,93
01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.056.615.974,00	986.485.397,00	(70.130.577,00)	93,36
01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	299.706.344,00	283.644.476,00	(16.061.868,00)	94,64
01.2.14.01.5.1	BELANJA OPERASI	299.706.344,00	283.644.476,00	(16.061.868,00)	94,64
01.2.14.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.706.344,00	283.644.476,00	(16.061.868,00)	94,64
01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	319.752.800,00	293.624.956,00	(26.127.844,00)	91,83
01.2.14.02.5.1	BELANJA OPERASI	319.752.800,00	293.624.956,00	(26.127.844,00)	91,83
01.2.14.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.752.800,00	293.624.956,00	(26.127.844,00)	91,83
01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	437.156.830,00	409.215.965,00	(27.940.865,00)	93,61
01.2.14.03.5.1	BELANJA OPERASI	437.156.830,00	409.215.965,00	(27.940.865,00)	93,61
01.2.14.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	437.156.830,00	409.215.965,00	(27.940.865,00)	93,61
01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	25.231.545.470,00	23.124.696.679,00	(2.106.848.791,00)	91,65
01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.756.352.220,00	22.740.963.779,00	(2.015.388.441,00)	91,86
01.2.15.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.756.352.220,00	22.740.963.779,00	(2.015.388.441,00)	91,86
01.2.15.01.5.1.01	Belanja Pegawai	24.756.352.220,00	22.740.963.779,00	(2.015.388.441,00)	91,86
01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	405.193.250,00	325.775.900,00	(79.417.350,00)	80,40
01.2.15.02.5.1	BELANJA OPERASI	405.193.250,00	325.775.900,00	(79.417.350,00)	80,40
01.2.15.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	405.193.250,00	325.775.900,00	(79.417.350,00)	80,40
01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	70.000.000,00	57.957.000,00	(12.043.000,00)	82,80
01.2.15.03.5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	57.957.000,00	(12.043.000,00)	82,80
01.2.15.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	57.957.000,00	(12.043.000,00)	82,80

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	832.298.725,00	771.997.000,00	(60.301.725,00)	92,75
01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	33.554.289,00	9.423.000,00	(24.131.289,00)	28,08
01.2.16.02.5.1	BELANJA OPERASI	33.554.289,00	9.423.000,00	(24.131.289,00)	28,08
01.2.16.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.554.289,00	9.423.000,00	(24.131.289,00)	28,08
01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	798.744.436,00	762.574.000,00	(36.170.436,00)	95,47
01.2.16.03.5.1	BELANJA OPERASI	798.744.436,00	762.574.000,00	(36.170.436,00)	95,47
01.2.16.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	798.744.436,00	762.574.000,00	(36.170.436,00)	95,47
02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	125.481.965.023,00	109.421.880.207,00	(16.060.084.816,00)	87,20
02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	77.202.539.047,00	67.366.693.759,00	(9.835.845.288,00)	87,26
02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	231.056.000,00	206.333.000,00	(24.723.000,00)	89,30
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	0,00
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	0,00
02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	226.556.000,00	206.333.000,00	(20.223.000,00)	91,07
02.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	226.556.000,00	206.333.000,00	(20.223.000,00)	91,07
02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	768.471.564,00	670.699.080,00	(97.772.484,00)	87,28
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	1.200.000,00	(1.800.000,00)	40,00
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.200.000,00	(1.800.000,00)	40,00
02.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	765.471.564,00	669.499.080,00	(95.972.484,00)	87,46
02.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	765.471.564,00	669.499.080,00	(95.972.484,00)	87,46
02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	436.451.400,00	396.806.820,00	(39.644.580,00)	90,92
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	436.451.400,00	396.806.820,00	(39.644.580,00)	90,92
02.2.01.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	436.451.400,00	396.806.820,00	(39.644.580,00)	90,92
02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	804.069.640,00	742.665.210,00	(61.404.430,00)	92,36

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	804.069.640,00	742.665.210,00	(61.404.430,00)	92,36
02.2.01.05.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	804.069.640,00	742.665.210,00	(61.404.430,00)	92,36
02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	15.296.091.784,00	14.180.102.279,00	(1.115.989.505,00)	92,70
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	181.954.874,00	158.340.000,00	(23.614.874,00)	87,02
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.954.874,00	158.340.000,00	(23.614.874,00)	87,02
02.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	15.114.136.910,00	14.021.762.279,00	(1.092.374.631,00)	92,77
02.2.01.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.114.136.910,00	14.021.762.279,00	(1.092.374.631,00)	92,77
02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	5.275.649.200,00	4.891.332.657,00	(384.316.543,00)	92,72
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	9.487.500,00	990.000,00	(8.497.500,00)	10,43
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.487.500,00	990.000,00	(8.497.500,00)	10,43
02.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	5.266.161.700,00	4.890.342.657,00	(375.819.043,00)	92,86
02.2.01.08.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.266.161.700,00	4.890.342.657,00	(375.819.043,00)	92,86
02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	203.180.000,00	199.197.000,00	(3.983.000,00)	98,04
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	48.300.000,00	45.600.000,00	(2.700.000,00)	94,41
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.300.000,00	45.600.000,00	(2.700.000,00)	94,41
02.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	154.880.000,00	153.597.000,00	(1.283.000,00)	99,17
02.2.01.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	154.880.000,00	153.597.000,00	(1.283.000,00)	99,17
02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	322.231.800,00	305.906.057,00	(16.325.743,00)	94,93
02.2.01.11.5.2	BELANJA MODAL	322.231.800,00	305.906.057,00	(16.325.743,00)	94,93
02.2.01.11.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	322.231.800,00	305.906.057,00	(16.325.743,00)	94,93
02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	412.831.100,00	377.348.190,00	(35.482.910,00)	91,40
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	4.356.000,00	0,00	(4.356.000,00)	0,00
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.356.000,00	0,00	(4.356.000,00)	0,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	408.475.100,00	377.348.190,00	(31.126.910,00)	92,38
02.2.01.12.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	408.475.100,00	377.348.190,00	(31.126.910,00)	92,38
02.2.01.14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	828.245.000,00	737.402.000,00	(90.843.000,00)	89,03
02.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	596.200.000,00	531.103.000,00	(65.097.000,00)	89,08
02.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	596.200.000,00	531.103.000,00	(65.097.000,00)	89,08
02.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	232.045.000,00	206.299.000,00	(25.746.000,00)	88,90
02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	232.045.000,00	206.299.000,00	(25.746.000,00)	88,90
02.2.01.22	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.200.843.997,00	3.132.379.000,00	(68.464.997,00)	97,86
02.2.01.22.5.1	BELANJA OPERASI	3.357.200,00	2.620.000,00	(737.200,00)	78,04
02.2.01.22.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.357.200,00	2.620.000,00	(737.200,00)	78,04
02.2.01.22.5.2	BELANJA MODAL	3.197.486.797,00	3.129.759.000,00	(67.727.797,00)	97,88
02.2.01.22.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.197.486.797,00	3.129.759.000,00	(67.727.797,00)	97,88
02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	470.177.030,00	357.578.930,00	(112.598.100,00)	76,05
02.2.01.23.5.1	BELANJA OPERASI	470.177.030,00	357.578.930,00	(112.598.100,00)	76,05
02.2.01.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	470.177.030,00	357.578.930,00	(112.598.100,00)	76,05
02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	495.600.000,00	495.600.000,00	0,00	100,00
02.2.01.25.5.1	BELANJA OPERASI	495.600.000,00	495.600.000,00	0,00	100,00
02.2.01.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	495.600.000,00	495.600.000,00	0,00	100,00
02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	9.587.660.055,00	6.256.490.080,00	(3.331.169.975,00)	65,26
02.2.01.26.5.1	BELANJA OPERASI	9.587.660.055,00	6.256.490.080,00	(3.331.169.975,00)	65,26
02.2.01.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.587.660.055,00	6.256.490.080,00	(3.331.169.975,00)	65,26
02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	499.693.944,00	435.810.000,00	(63.883.944,00)	87,22
02.2.01.27.5.1	BELANJA OPERASI	499.693.944,00	435.810.000,00	(63.883.944,00)	87,22

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.01.27.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.693.944,00	435.810.000,00	(63.883.944,00)	87,22
02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	263.744.972,00	178.025.000,00	(85.719.972,00)	67,50
02.2.01.28.5.1	BELANJA OPERASI	263.744.972,00	178.025.000,00	(85.719.972,00)	67,50
02.2.01.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.744.972,00	178.025.000,00	(85.719.972,00)	67,50
02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	31.929.200.015,00	28.244.387.429,00	(3.684.812.586,00)	88,46
02.2.01.29.5.1	BELANJA OPERASI	22.703.313.279,00	20.588.375.098,00	(2.114.938.181,00)	90,68
02.2.01.29.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.703.313.279,00	20.588.375.098,00	(2.114.938.181,00)	90,68
02.2.01.29.5.2	BELANJA MODAL	9.225.886.736,00	7.656.012.331,00	(1.569.874.405,00)	82,98
02.2.01.29.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.225.886.736,00	7.656.012.331,00	(1.569.874.405,00)	82,98
02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	4.550.495.402,00	4.063.419.870,00	(487.075.532,00)	89,30
02.2.01.30.5.1	BELANJA OPERASI	4.474.122.948,00	3.994.962.870,00	(479.160.078,00)	89,29
02.2.01.30.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.474.122.948,00	3.994.962.870,00	(479.160.078,00)	89,29
02.2.01.30.5.2	BELANJA MODAL	76.372.454,00	68.457.000,00	(7.915.454,00)	89,64
02.2.01.30.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.372.454,00	68.457.000,00	(7.915.454,00)	89,64
02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.626.846.144,00	1.495.211.157,00	(131.634.987,00)	91,91
02.2.01.31.5.2	BELANJA MODAL	1.626.846.144,00	1.495.211.157,00	(131.634.987,00)	91,91
02.2.01.31.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.626.846.144,00	1.495.211.157,00	(131.634.987,00)	91,91
02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	27.069.511.857,00	22.141.757.743,00	(4.927.754.114,00)	81,80
02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	313.430.000,00	279.520.964,00	(33.909.036,00)	89,18
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.950.000,00	4.120.000,00	(830.000,00)	83,23
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	4.120.000,00	(830.000,00)	83,23
02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	308.480.000,00	275.400.964,00	(33.079.036,00)	89,28
02.2.02.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	308.480.000,00	275.400.964,00	(33.079.036,00)	89,28

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	99.900.000,00	61.527.680,00	(38.372.320,00)	61,59
02.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	99.900.000,00	61.527.680,00	(38.372.320,00)	61,59
02.2.02.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.900.000,00	61.527.680,00	(38.372.320,00)	61,59
02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	124.320.000,00	115.088.680,00	(9.231.320,00)	92,57
02.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	124.320.000,00	115.088.680,00	(9.231.320,00)	92,57
02.2.02.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	124.320.000,00	115.088.680,00	(9.231.320,00)	92,57
02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	226.440.000,00	219.682.640,00	(6.757.360,00)	97,02
02.2.02.06.5.2	BELANJA MODAL	226.440.000,00	219.682.640,00	(6.757.360,00)	97,02
02.2.02.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	226.440.000,00	219.682.640,00	(6.757.360,00)	97,02
02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.915.068.380,00	4.591.457.443,00	(323.610.937,00)	93,42
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	1.950.000,00	1.036.920,00	(913.080,00)	53,18
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.036.920,00	(913.080,00)	53,18
02.2.02.12.5.2	BELANJA MODAL	4.913.118.380,00	4.590.420.523,00	(322.697.857,00)	93,43
02.2.02.12.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.913.118.380,00	4.590.420.523,00	(322.697.857,00)	93,43
02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.158.225.400,00	1.053.497.090,00	(104.728.310,00)	90,96
02.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	4.275.000,00	2.955.000,00	(1.320.000,00)	69,12
02.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.275.000,00	2.955.000,00	(1.320.000,00)	69,12
02.2.02.14.5.2	BELANJA MODAL	1.153.950.400,00	1.050.542.090,00	(103.408.310,00)	91,04
02.2.02.14.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.153.950.400,00	1.050.542.090,00	(103.408.310,00)	91,04
02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	4.440.000,00	4.284.000,00	(156.000,00)	96,49
02.2.02.17.5.2	BELANJA MODAL	4.440.000,00	4.284.000,00	(156.000,00)	96,49
02.2.02.17.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.440.000,00	4.284.000,00	(156.000,00)	96,49
02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	546.971.790,00	511.815.520,00	(35.156.270,00)	93,57

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.02.18.5.1	BELANJA OPERASI	1.575.000,00	900.000,00	(675.000,00)	57,14
02.2.02.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.575.000,00	900.000,00	(675.000,00)	57,14
02.2.02.18.5.2	BELANJA MODAL	545.396.790,00	510.915.520,00	(34.481.270,00)	93,68
02.2.02.18.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	545.396.790,00	510.915.520,00	(34.481.270,00)	93,68
02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.165.840.413,00	2.044.357.693,00	(121.482.720,00)	94,39
02.2.02.24.5.1	BELANJA OPERASI	73.892.853,00	68.196.000,00	(5.696.853,00)	92,29
02.2.02.24.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.892.853,00	68.196.000,00	(5.696.853,00)	92,29
02.2.02.24.5.2	BELANJA MODAL	2.091.947.560,00	1.976.161.693,00	(115.785.867,00)	94,47
02.2.02.24.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.091.947.560,00	1.976.161.693,00	(115.785.867,00)	94,47
02.2.02.25	Pengadaan Mebeluer Sekolah	133.590.000,00	118.743.750,00	(14.846.250,00)	88,89
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	94.650.000,00	84.087.150,00	(10.562.850,00)	88,84
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.650.000,00	84.087.150,00	(10.562.850,00)	88,84
02.2.02.25.5.2	BELANJA MODAL	38.940.000,00	34.656.600,00	(4.283.400,00)	89,00
02.2.02.25.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.940.000,00	34.656.600,00	(4.283.400,00)	89,00
02.2.02.35	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	441.664.550,00	432.502.500,00	(9.162.050,00)	97,93
02.2.02.35.5.1	BELANJA OPERASI	376.923.800,00	376.002.500,00	(921.300,00)	99,76
02.2.02.35.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.923.800,00	376.002.500,00	(921.300,00)	99,76
02.2.02.35.5.2	BELANJA MODAL	64.740.750,00	56.500.000,00	(8.240.750,00)	87,27
02.2.02.35.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.740.750,00	56.500.000,00	(8.240.750,00)	87,27
02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	100.949.930,00	55.881.250,00	(45.068.680,00)	55,36
02.2.02.36.5.1	BELANJA OPERASI	100.949.930,00	55.881.250,00	(45.068.680,00)	55,36
02.2.02.36.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.949.930,00	55.881.250,00	(45.068.680,00)	55,36
02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	499.800.000,00	459.000.000,00	(40.800.000,00)	91,84

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.02.38.5.1	BELANJA OPERASI	499.800.000,00	459.000.000,00	(40.800.000,00)	91,84
02.2.02.38.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.800.000,00	459.000.000,00	(40.800.000,00)	91,84
02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.588.883.262,00	2.340.167.160,00	(248.716.102,00)	90,39
02.2.02.39.5.1	BELANJA OPERASI	2.588.883.262,00	2.340.167.160,00	(248.716.102,00)	90,39
02.2.02.39.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.588.883.262,00	2.340.167.160,00	(248.716.102,00)	90,39
02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	154.237.992,00	110.458.800,00	(43.779.192,00)	71,62
02.2.02.40.5.1	BELANJA OPERASI	154.237.992,00	110.458.800,00	(43.779.192,00)	71,62
02.2.02.40.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.237.992,00	110.458.800,00	(43.779.192,00)	71,62
02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	130.179.916,00	93.198.900,00	(36.981.016,00)	71,59
02.2.02.41.5.1	BELANJA OPERASI	130.179.916,00	93.198.900,00	(36.981.016,00)	71,59
02.2.02.41.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.179.916,00	93.198.900,00	(36.981.016,00)	71,59
02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	11.335.599.985,00	8.515.495.153,00	(2.820.104.832,00)	75,12
02.2.02.42.5.1	BELANJA OPERASI	9.277.244.929,00	6.939.156.307,00	(2.338.088.622,00)	74,80
02.2.02.42.5.1.01	Belanja Pegawai	390.000,00	0,00	(390.000,00)	0,00
02.2.02.42.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.276.854.929,00	6.939.156.307,00	(2.337.698.622,00)	74,80
02.2.02.42.5.2	BELANJA MODAL	2.058.355.056,00	1.576.338.846,00	(482.016.210,00)	76,58
02.2.02.42.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.058.355.056,00	1.576.338.846,00	(482.016.210,00)	76,58
02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	2.129.970.239,00	1.135.078.520,00	(994.891.719,00)	53,29
02.2.02.43.5.1	BELANJA OPERASI	2.129.970.239,00	1.135.078.520,00	(994.891.719,00)	53,29
02.2.02.43.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.129.970.239,00	1.135.078.520,00	(994.891.719,00)	53,29
02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	15.952.577.714,00	15.244.900.559,00	(707.677.155,00)	95,56
02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	234.734.000,00	207.630.000,00	(27.104.000,00)	88,45
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	234.734.000,00	207.630.000,00	(27.104.000,00)	88,45

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	1.920.000,00	(780.000,00)	71,11
02.2.03.01.5.1.05	Belanja Hibah	232.034.000,00	205.710.000,00	(26.324.000,00)	88,66
02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	235.580.000,00	207.857.000,00	(27.723.000,00)	88,23
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	235.580.000,00	207.857.000,00	(27.723.000,00)	88,23
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	1.950.000,00	(1.200.000,00)	61,90
02.2.03.03.5.1.05	Belanja Hibah	232.430.000,00	205.907.000,00	(26.523.000,00)	88,59
02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	149.920.137,00	92.584.189,00	(57.335.948,00)	61,76
02.2.03.10.5.1	BELANJA OPERASI	149.920.137,00	92.584.189,00	(57.335.948,00)	61,76
02.2.03.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.920.137,00	92.584.189,00	(57.335.948,00)	61,76
02.2.03.12	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	199.999.420,00	197.165.000,00	(2.834.420,00)	98,58
02.2.03.12.5.1	BELANJA OPERASI	199.999.420,00	197.165.000,00	(2.834.420,00)	98,58
02.2.03.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.420,00	197.165.000,00	(2.834.420,00)	98,58
02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	379.945.320,00	344.628.724,00	(35.316.596,00)	90,70
02.2.03.13.5.1	BELANJA OPERASI	357.745.320,00	326.128.724,00	(31.616.596,00)	91,16
02.2.03.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	357.745.320,00	326.128.724,00	(31.616.596,00)	91,16
02.2.03.13.5.2	BELANJA MODAL	22.200.000,00	18.500.000,00	(3.700.000,00)	83,33
02.2.03.13.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.200.000,00	18.500.000,00	(3.700.000,00)	83,33
02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	7.855.371.537,00	7.496.459.987,00	(358.911.550,00)	95,43
02.2.03.15.5.1	BELANJA OPERASI	7.855.371.537,00	7.496.459.987,00	(358.911.550,00)	95,43
02.2.03.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.855.371.537,00	7.496.459.987,00	(358.911.550,00)	95,43
02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	45.227.878,00	39.730.000,00	(5.497.878,00)	87,84
02.2.03.16.5.1	BELANJA OPERASI	45.227.878,00	39.730.000,00	(5.497.878,00)	87,84
02.2.03.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.227.878,00	39.730.000,00	(5.497.878,00)	87,84

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	6.851.799.422,00	6.658.845.659,00	(192.953.763,00)	97,18
02.2.03.18.5.1	BELANJA OPERASI	6.718.033.376,00	6.527.603.959,00	(190.429.417,00)	97,17
02.2.03.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	510.433.051,00	484.908.959,00	(25.524.092,00)	95,00
02.2.03.18.5.1.05	Belanja Hibah	6.207.600.325,00	6.042.695.000,00	(164.905.325,00)	97,34
02.2.03.18.5.2	BELANJA MODAL	133.766.046,00	131.241.700,00	(2.524.346,00)	98,11
02.2.03.18.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.766.046,00	131.241.700,00	(2.524.346,00)	98,11
02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.257.336.405,00	4.668.528.146,00	(588.808.259,00)	88,80
02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	211.136.988,00	201.080.000,00	(10.056.988,00)	95,24
02.2.04.11.5.1	BELANJA OPERASI	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	100,00
02.2.04.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	100,00
02.2.04.11.5.2	BELANJA MODAL	207.356.988,00	197.300.000,00	(10.056.988,00)	95,15
02.2.04.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	207.356.988,00	197.300.000,00	(10.056.988,00)	95,15
02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	3.499.999.605,00	2.943.170.800,00	(556.828.805,00)	84,09
02.2.04.12.5.1	BELANJA OPERASI	3.499.999.605,00	2.943.170.800,00	(556.828.805,00)	84,09
02.2.04.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.499.999.605,00	2.943.170.800,00	(556.828.805,00)	84,09
02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.546.199.812,00	1.524.277.346,00	(21.922.466,00)	98,58
02.2.04.17.5.1	BELANJA OPERASI	1.446.045.871,00	1.426.265.420,00	(19.780.451,00)	98,63
02.2.04.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.245.871,00	260.465.420,00	(19.780.451,00)	92,94
02.2.04.17.5.1.05	Belanja Hibah	1.165.800.000,00	1.165.800.000,00	0,00	100,00
02.2.04.17.5.2	BELANJA MODAL	100.153.941,00	98.011.926,00	(2.142.015,00)	97,86
02.2.04.17.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.153.941,00	98.011.926,00	(2.142.015,00)	97,86
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	166.049.979.298,00	140.873.599.513,00	(25.176.379.785,00)	84,84
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	86.454.617.550,00	71.829.669.107,00	(14.624.948.443,00)	83,08

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	3.100.005.524,00	2.841.764.585,00	(258.240.939,00)	91,67
02.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	3.100.005.524,00	2.841.764.585,00	(258.240.939,00)	91,67
02.2.01.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.100.005.524,00	2.841.764.585,00	(258.240.939,00)	91,67
02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	21.803.006.675,00	19.438.210.852,00	(2.364.795.823,00)	89,15
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	437.420.453,00	371.053.300,00	(66.367.153,00)	84,83
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	437.420.453,00	371.053.300,00	(66.367.153,00)	84,83
02.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	21.365.586.222,00	19.067.157.552,00	(2.298.428.670,00)	89,24
02.2.01.12.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.587.255.543,00	2.244.258.615,00	(342.996.928,00)	86,74
02.2.01.12.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.351.038.677,00	15.554.886.766,00	(1.796.151.911,00)	89,65
02.2.01.12.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.427.292.002,00	1.268.012.171,00	(159.279.831,00)	88,84
02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	53.688.244.473,00	42.908.850.554,00	(10.779.393.919,00)	79,92
02.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	42.380.487,00	32.169.950,00	(10.210.537,00)	75,91
02.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.380.487,00	32.169.950,00	(10.210.537,00)	75,91
02.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	53.645.863.986,00	42.876.680.604,00	(10.769.183.382,00)	79,93
02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.645.863.986,00	42.876.680.604,00	(10.769.183.382,00)	79,93
02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	5.012.695.496,00	4.098.580.048,00	(914.115.448,00)	81,76
02.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	5.012.695.496,00	4.098.580.048,00	(914.115.448,00)	81,76
02.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.012.695.496,00	4.098.580.048,00	(914.115.448,00)	81,76
02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.222.968.188,00	2.126.575.203,00	(96.392.985,00)	95,66
02.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	2.222.968.188,00	2.126.575.203,00	(96.392.985,00)	95,66
02.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.222.968.188,00	2.126.575.203,00	(96.392.985,00)	95,66
02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	481.480.000,00	272.452.000,00	(209.028.000,00)	56,59
02.2.01.20.5.1	BELANJA OPERASI	481.480.000,00	272.452.000,00	(209.028.000,00)	56,59

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.01.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	481.480.000,00	272.452.000,00	(209.028.000,00)	56,59
02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	146.217.194,00	143.235.865,00	(2.981.329,00)	97,96
02.2.01.21.5.1	BELANJA OPERASI	146.217.194,00	143.235.865,00	(2.981.329,00)	97,96
02.2.01.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.217.194,00	143.235.865,00	(2.981.329,00)	97,96
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78.958.899.822,00	68.564.286.541,00	(10.394.613.281,00)	86,84
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.385.265.552,00	1.164.371.044,00	(220.894.508,00)	84,05
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.385.265.552,00	1.164.371.044,00	(220.894.508,00)	84,05
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.385.265.552,00	1.164.371.044,00	(220.894.508,00)	84,05
02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	651.209.438,00	254.730.000,00	(396.479.438,00)	39,12
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	651.209.438,00	254.730.000,00	(396.479.438,00)	39,12
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	651.209.438,00	254.730.000,00	(396.479.438,00)	39,12
02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	235.741.296,00	173.555.000,00	(62.186.296,00)	73,62
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	235.741.296,00	173.555.000,00	(62.186.296,00)	73,62
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.741.296,00	173.555.000,00	(62.186.296,00)	73,62
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	739.762.342,00	610.955.800,00	(128.806.542,00)	82,59
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	739.762.342,00	610.955.800,00	(128.806.542,00)	82,59
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	739.762.342,00	610.955.800,00	(128.806.542,00)	82,59
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	584.720.527,00	310.607.438,00	(274.113.089,00)	53,12
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	584.720.527,00	310.607.438,00	(274.113.089,00)	53,12
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	584.720.527,00	310.607.438,00	(274.113.089,00)	53,12
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	256.276.701,00	185.475.869,00	(70.800.832,00)	72,37
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	256.276.701,00	185.475.869,00	(70.800.832,00)	72,37
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.276.701,00	185.475.869,00	(70.800.832,00)	72,37

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	254.541.852,00	176.589.000,00	(77.952.852,00)	69,38
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	254.541.852,00	176.589.000,00	(77.952.852,00)	69,38
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.541.852,00	176.589.000,00	(77.952.852,00)	69,38
02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	98.235.262,00	79.532.204,00	(18.703.058,00)	80,96
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	98.235.262,00	79.532.204,00	(18.703.058,00)	80,96
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.235.262,00	79.532.204,00	(18.703.058,00)	80,96
02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	89.744.391,00	82.169.390,00	(7.575.001,00)	91,56
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	89.744.391,00	82.169.390,00	(7.575.001,00)	91,56
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.744.391,00	82.169.390,00	(7.575.001,00)	91,56
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	88.974.176,00	64.424.176,00	(24.550.000,00)	72,41
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	88.974.176,00	64.424.176,00	(24.550.000,00)	72,41
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.974.176,00	64.424.176,00	(24.550.000,00)	72,41
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	214.840.590,00	134.859.950,00	(79.980.640,00)	62,77
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	214.840.590,00	134.859.950,00	(79.980.640,00)	62,77
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.840.590,00	134.859.950,00	(79.980.640,00)	62,77
02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	102.749.405,00	67.570.000,00	(35.179.405,00)	65,76
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	102.749.405,00	67.570.000,00	(35.179.405,00)	65,76
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.749.405,00	67.570.000,00	(35.179.405,00)	65,76
02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.842.761.564,00	436.016.230,00	(1.406.745.334,00)	23,66
02.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	1.842.761.564,00	436.016.230,00	(1.406.745.334,00)	23,66
02.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.842.761.564,00	436.016.230,00	(1.406.745.334,00)	23,66
02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	39.998.608,00	0,00	(39.998.608,00)	0,00
02.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	39.998.608,00	0,00	(39.998.608,00)	0,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.998.608,00	0,00	(39.998.608,00)	0,00
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.724.593.725,00	1.063.094.834,00	(661.498.891,00)	61,64
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	1.724.593.725,00	1.063.094.834,00	(661.498.891,00)	61,64
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.724.593.725,00	1.063.094.834,00	(661.498.891,00)	61,64
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	374.497.708,00	237.386.288,00	(137.111.420,00)	63,39
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	374.497.708,00	237.386.288,00	(137.111.420,00)	63,39
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.497.708,00	237.386.288,00	(137.111.420,00)	63,39
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.513.347.679,00	777.128.710,00	(736.218.969,00)	51,35
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	1.513.347.679,00	777.128.710,00	(736.218.969,00)	51,35
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.513.347.679,00	777.128.710,00	(736.218.969,00)	51,35
02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2.331.787.463,00	1.544.898.001,00	(786.889.462,00)	66,25
02.2.02.18.5.1	BELANJA OPERASI	2.331.787.463,00	1.544.898.001,00	(786.889.462,00)	66,25
02.2.02.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.331.787.463,00	1.544.898.001,00	(786.889.462,00)	66,25
02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	98.428.149,00	57.520.000,00	(40.908.149,00)	58,44
02.2.02.19.5.1	BELANJA OPERASI	98.428.149,00	57.520.000,00	(40.908.149,00)	58,44
02.2.02.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.428.149,00	57.520.000,00	(40.908.149,00)	58,44
02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.097.331.166,00	1.168.128.450,00	(929.202.716,00)	55,70
02.2.02.20.5.1	BELANJA OPERASI	2.092.114.166,00	1.162.911.450,00	(929.202.716,00)	55,59
02.2.02.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.092.114.166,00	1.162.911.450,00	(929.202.716,00)	55,59
02.2.02.20.5.2	BELANJA MODAL	5.217.000,00	5.217.000,00	0,00	100,00
02.2.02.20.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.217.000,00	5.217.000,00	0,00	100,00
02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	346.756.503,00	241.391.693,00	(105.364.810,00)	69,61
02.2.02.22.5.1	BELANJA OPERASI	346.756.503,00	241.391.693,00	(105.364.810,00)	69,61

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.02.22.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.756.503,00	241.391.693,00	(105.364.810,00)	69,61
02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	83.999.992,00	63.212.000,00	(20.787.992,00)	75,25
02.2.02.23.5.1	BELANJA OPERASI	83.999.992,00	63.212.000,00	(20.787.992,00)	75,25
02.2.02.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.999.992,00	63.212.000,00	(20.787.992,00)	75,25
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.611.420.818,00	1.173.708.368,00	(437.712.450,00)	72,84
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	1.611.420.818,00	1.173.708.368,00	(437.712.450,00)	72,84
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.611.420.818,00	1.173.708.368,00	(437.712.450,00)	72,84
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	56.338.288.495,00	56.122.778.305,00	(215.510.190,00)	99,62
02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	56.338.288.495,00	56.122.778.305,00	(215.510.190,00)	99,62
02.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.338.288.495,00	56.122.778.305,00	(215.510.190,00)	99,62
02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	25.945.000,00	5.900.000,00	(20.045.000,00)	22,74
02.2.02.28.5.1	BELANJA OPERASI	25.945.000,00	5.900.000,00	(20.045.000,00)	22,74
02.2.02.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.945.000,00	5.900.000,00	(20.045.000,00)	22,74
02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	134.949.572,00	111.964.000,00	(22.985.572,00)	82,97
02.2.02.30.5.2	BELANJA MODAL	134.949.572,00	111.964.000,00	(22.985.572,00)	82,97
02.2.02.30.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.949.572,00	111.964.000,00	(22.985.572,00)	82,97
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.182.265.749,00	714.170.250,00	(468.095.499,00)	60,41
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	1.182.265.749,00	714.170.250,00	(468.095.499,00)	60,41
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.182.265.749,00	714.170.250,00	(468.095.499,00)	60,41
02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.780.768.744,00	342.102.282,00	(1.438.666.462,00)	19,21
02.2.02.34.5.1	BELANJA OPERASI	1.780.768.744,00	342.102.282,00	(1.438.666.462,00)	19,21
02.2.02.34.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.780.768.744,00	342.102.282,00	(1.438.666.462,00)	19,21
02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.385.015.926,00	221.006.509,00	(1.164.009.417,00)	15,96

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.02.35.5.1	BELANJA OPERASI	1.385.015.926,00	221.006.509,00	(1.164.009.417,00)	15,96
02.2.02.35.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.385.015.926,00	221.006.509,00	(1.164.009.417,00)	15,96
02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	386.808.280,00	287.035.000,00	(99.773.280,00)	74,21
02.2.02.36.5.1	BELANJA OPERASI	386.808.280,00	287.035.000,00	(99.773.280,00)	74,21
02.2.02.36.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386.808.280,00	287.035.000,00	(99.773.280,00)	74,21
02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	181.576.295,00	67.972.500,00	(113.603.795,00)	37,43
02.2.02.37.5.1	BELANJA OPERASI	181.576.295,00	67.972.500,00	(113.603.795,00)	37,43
02.2.02.37.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.576.295,00	67.972.500,00	(113.603.795,00)	37,43
02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	776.296.854,00	624.033.250,00	(152.263.604,00)	80,39
02.2.02.39.5.1	BELANJA OPERASI	776.296.854,00	624.033.250,00	(152.263.604,00)	80,39
02.2.02.39.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	776.296.854,00	624.033.250,00	(152.263.604,00)	80,39
02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	58.898.265,00	50.060.000,00	(8.838.265,00)	84,99
02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	58.898.265,00	50.060.000,00	(8.838.265,00)	84,99
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	42.398.265,00	35.135.000,00	(7.263.265,00)	82,87
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.398.265,00	35.135.000,00	(7.263.265,00)	82,87
02.2.03.01.5.2	BELANJA MODAL	16.500.000,00	14.925.000,00	(1.575.000,00)	90,45
02.2.03.01.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.500.000,00	14.925.000,00	(1.575.000,00)	90,45
02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	577.563.661,00	429.583.865,00	(147.979.796,00)	74,38
02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	321.170.135,00	204.523.865,00	(116.646.270,00)	63,68
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	321.170.135,00	204.523.865,00	(116.646.270,00)	63,68
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321.170.135,00	204.523.865,00	(116.646.270,00)	63,68
02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	256.393.526,00	225.060.000,00	(31.333.526,00)	87,78
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	256.393.526,00	225.060.000,00	(31.333.526,00)	87,78

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.393.526,00	225.060.000,00	(31.333.526,00)	87,78
02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	34.375.119.354,00	31.606.413.916,00	(2.768.705.438,00)	91,95
02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.698.486.658,00	19.320.490.366,00	(1.377.996.292,00)	93,34
02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1.467.999.999,00	1.368.392.600,00	(99.607.399,00)	93,21
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.367.999.999,00	1.279.578.700,00	(88.421.299,00)	93,54
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.367.999.999,00	1.279.578.700,00	(88.421.299,00)	93,54
02.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	88.813.900,00	(11.186.100,00)	88,81
02.2.01.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000,00	88.813.900,00	(11.186.100,00)	88,81
02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan	2.199.996.300,00	2.107.673.300,00	(92.323.000,00)	95,80
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.399.999.100,00	1.342.702.600,00	(57.296.500,00)	95,91
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.399.999.100,00	1.342.702.600,00	(57.296.500,00)	95,91
02.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	799.997.200,00	764.970.700,00	(35.026.500,00)	95,62
02.2.01.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	799.997.200,00	764.970.700,00	(35.026.500,00)	95,62
02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.149.790.507,00	1.043.811.000,00	(105.979.507,00)	90,78
02.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	1.149.790.507,00	1.043.811.000,00	(105.979.507,00)	90,78
02.2.01.06.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.149.790.507,00	1.043.811.000,00	(105.979.507,00)	90,78
02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	6.302.919.308,00	6.171.775.000,00	(131.144.308,00)	97,92
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	13.500.000,00	6.480.000,00	(7.020.000,00)	48,00
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	6.480.000,00	(7.020.000,00)	48,00
02.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	6.289.419.308,00	6.165.295.000,00	(124.124.308,00)	98,03
02.2.01.10.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.289.419.308,00	6.165.295.000,00	(124.124.308,00)	98,03
02.2.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	399.807.537,00	396.572.000,00	(3.235.537,00)	99,19
02.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.020,00	197.952.000,00	(2.048.020,00)	98,98

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.01.18.5.1.05	Belanja Hibah	200.000.020,00	197.952.000,00	(2.048.020,00)	98,98
02.2.01.18.5.2	BELANJA MODAL	199.807.517,00	198.620.000,00	(1.187.517,00)	99,41
02.2.01.18.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.807.517,00	198.620.000,00	(1.187.517,00)	99,41
02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	799.728.198,00	763.329.000,00	(36.399.198,00)	95,45
02.2.01.21.5.1	BELANJA OPERASI	799.728.198,00	763.329.000,00	(36.399.198,00)	95,45
02.2.01.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	799.728.198,00	763.329.000,00	(36.399.198,00)	95,45
02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	6.398.534.003,00	5.789.578.266,00	(608.955.737,00)	90,48
02.2.01.46.5.1	BELANJA OPERASI	6.112.357.374,00	5.543.208.940,00	(569.148.434,00)	90,69
02.2.01.46.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.112.357.374,00	5.543.208.940,00	(569.148.434,00)	90,69
02.2.01.46.5.2	BELANJA MODAL	286.176.629,00	246.369.326,00	(39.807.303,00)	86,09
02.2.01.46.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	286.176.629,00	246.369.326,00	(39.807.303,00)	86,09
02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	1.459.921.282,00	1.309.758.200,00	(150.163.082,00)	89,71
02.2.01.53.5.1	BELANJA OPERASI	1.459.921.282,00	1.309.758.200,00	(150.163.082,00)	89,71
02.2.01.53.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.459.921.282,00	1.309.758.200,00	(150.163.082,00)	89,71
02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	419.789.624,00	269.869.000,00	(149.920.624,00)	64,29
02.2.01.61.5.1	BELANJA OPERASI	419.789.624,00	269.869.000,00	(149.920.624,00)	64,29
02.2.01.61.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	419.789.624,00	269.869.000,00	(149.920.624,00)	64,29
02.2.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	99.999.900,00	99.732.000,00	(267.900,00)	99,73
02.2.01.62.5.1	BELANJA OPERASI	99.999.900,00	99.732.000,00	(267.900,00)	99,73
02.2.01.62.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.900,00	99.732.000,00	(267.900,00)	99,73
02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah	13.676.632.696,00	12.285.923.550,00	(1.390.709.146,00)	89,83
02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	599.999.900,00	583.489.500,00	(16.510.400,00)	97,25
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	499.999.900,00	484.795.100,00	(15.204.800,00)	96,96

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.999.900,00	484.795.100,00	(15.204.800,00)	96,96
02.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	98.694.400,00	(1.305.600,00)	98,69
02.2.02.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000,00	98.694.400,00	(1.305.600,00)	98,69
02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	549.370.324,00	490.722.000,00	(58.648.324,00)	89,32
02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	549.370.324,00	490.722.000,00	(58.648.324,00)	89,32
02.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	549.370.324,00	490.722.000,00	(58.648.324,00)	89,32
02.2.02.04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	4.199.907.992,00	3.838.173.500,00	(361.734.492,00)	91,39
02.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	4.199.907.992,00	3.838.173.500,00	(361.734.492,00)	91,39
02.2.02.04.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.199.907.992,00	3.838.173.500,00	(361.734.492,00)	91,39
02.2.02.10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	4.529.747.736,00	3.764.180.500,00	(765.567.236,00)	83,10
02.2.02.10.5.2	BELANJA MODAL	4.529.747.736,00	3.764.180.500,00	(765.567.236,00)	83,10
02.2.02.10.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.529.747.736,00	3.764.180.500,00	(765.567.236,00)	83,10
02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.468.083.852,00	1.375.790.800,00	(92.293.052,00)	93,71
02.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	1.468.083.852,00	1.375.790.800,00	(92.293.052,00)	93,71
02.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.468.083.852,00	1.375.790.800,00	(92.293.052,00)	93,71
02.2.02.16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	1.674.733.909,00	1.647.410.800,00	(27.323.109,00)	98,37
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	1.674.733.909,00	1.647.410.800,00	(27.323.109,00)	98,37
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.674.733.909,00	1.647.410.800,00	(27.323.109,00)	98,37
02.2.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	654.788.983,00	586.156.450,00	(68.632.533,00)	89,52
02.2.02.27.5.1	BELANJA OPERASI	654.788.983,00	586.156.450,00	(68.632.533,00)	89,52
02.2.02.27.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	654.788.983,00	586.156.450,00	(68.632.533,00)	89,52
02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	100.000.000,00	99.525.200,00	(474.800,00)	99,53
02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.525.200,00	(474.800,00)	99,53

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	100.000.000,00	99.525.200,00	(474.800,00)	99,53
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.525.200,00	(474.800,00)	99,53
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.525.200,00	(474.800,00)	99,53
02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	951.784.433,00	897.482.948,00	(54.301.485,00)	94,29
02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	791.948.000,00	781.187.500,00	(10.760.500,00)	98,64
02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,	10.005.000,00	9.800.000,00	(205.000,00)	97,95
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.005.000,00	9.800.000,00	(205.000,00)	97,95
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.005.000,00	9.800.000,00	(205.000,00)	97,95
02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk	261.938.000,00	261.390.000,00	(548.000,00)	99,79
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	261.938.000,00	261.390.000,00	(548.000,00)	99,79
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.938.000,00	261.390.000,00	(548.000,00)	99,79
02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.005.000,00	9.997.500,00	(7.500,00)	99,93
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	10.005.000,00	9.997.500,00	(7.500,00)	99,93
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.005.000,00	9.997.500,00	(7.500,00)	99,93
02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang	510.000.000,00	500.000.000,00	(10.000.000,00)	98,04
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	510.000.000,00	500.000.000,00	(10.000.000,00)	98,04
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	510.000.000,00	500.000.000,00	(10.000.000,00)	98,04
02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	159.836.433,00	116.295.448,00	(43.540.985,00)	72,76
02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	10.003.878,00	9.383.188,00	(620.690,00)	93,80
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.003.878,00	9.383.188,00	(620.690,00)	93,80
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.003.878,00	9.383.188,00	(620.690,00)	93,80
02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	149.832.555,00	106.912.260,00	(42.920.295,00)	71,35
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	149.832.555,00	106.912.260,00	(42.920.295,00)	71,35

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.832.555,00	106.912.260,00	(42.920.295,00)	71,35
02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	530.011.340,00	471.266.097,00	(58.745.243,00)	88,92
02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	528.211.340,00	469.466.097,00	(58.745.243,00)	88,88
02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	52.887.966,00	34.790.000,00	(18.097.966,00)	65,78
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	52.887.966,00	34.790.000,00	(18.097.966,00)	65,78
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.887.966,00	34.790.000,00	(18.097.966,00)	65,78
02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	116.720.481,00	105.801.549,00	(10.918.932,00)	90,65
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	116.720.481,00	105.801.549,00	(10.918.932,00)	90,65
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.720.481,00	105.801.549,00	(10.918.932,00)	90,65
02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	358.602.893,00	328.874.548,00	(29.728.345,00)	91,71
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	358.602.893,00	328.874.548,00	(29.728.345,00)	91,71
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.602.893,00	328.874.548,00	(29.728.345,00)	91,71
02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	17.585.433,00	17.542.957,00	(42.476,00)	99,76
02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	17.585.433,00	17.542.957,00	(42.476,00)	99,76
02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	17.585.433,00	17.542.957,00	(42.476,00)	99,76
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	17.585.433,00	17.542.957,00	(42.476,00)	99,76
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.585.433,00	17.542.957,00	(42.476,00)	99,76
02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	157.501.937,00	134.845.030,00	(22.656.907,00)	85,61
02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	157.501.937,00	134.845.030,00	(22.656.907,00)	85,61

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	157.501.937,00	134.845.030,00	(22.656.907,00)	85,61
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	157.501.937,00	134.845.030,00	(22.656.907,00)	85,61
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.501.937,00	134.845.030,00	(22.656.907,00)	85,61
02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	3.195.754.898,00	2.982.983.894,00	(212.771.004,00)	93,34
02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.195.754.898,00	2.982.983.894,00	(212.771.004,00)	93,34
02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	1.745.755.330,00	1.566.264.124,00	(179.491.206,00)	89,72
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.745.755.330,00	1.566.264.124,00	(179.491.206,00)	89,72
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.322.317.798,00	1.192.314.148,00	(130.003.650,00)	90,17
02.2.01.01.5.1.05	Belanja Hibah	423.437.532,00	373.949.976,00	(49.487.556,00)	88,31
02.2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	99.999.900,00	99.999.900,00	0,00	100,00
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	99.999.900,00	99.999.900,00	0,00	100,00
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.900,00	99.999.900,00	0,00	100,00
02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1.299.999.868,00	1.268.799.870,00	(31.199.998,00)	97,60
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.299.999.868,00	1.268.799.870,00	(31.199.998,00)	97,60
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.299.999.868,00	1.268.799.870,00	(31.199.998,00)	97,60
02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	49.999.800,00	47.920.000,00	(2.079.800,00)	95,84
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	49.999.800,00	47.920.000,00	(2.079.800,00)	95,84
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.339.800,00	1.920.000,00	(1.419.800,00)	57,49
02.2.01.04.5.1.05	Belanja Hibah	46.660.000,00	46.000.000,00	(660.000,00)	98,59
02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	69.936.000,00	65.505.300,00	(4.430.700,00)	93,66
02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	69.936.000,00	65.505.300,00	(4.430.700,00)	93,66
02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	69.936.000,00	65.505.300,00	(4.430.700,00)	93,66
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	69.936.000,00	65.505.300,00	(4.430.700,00)	93,66

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.936.000,00	65.505.300,00	(4.430.700,00)	93,66
02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	370.088.205,00	325.228.255,00	(44.859.950,00)	87,88
02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	370.088.205,00	325.228.255,00	(44.859.950,00)	87,88
02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	360.207.950,00	315.348.000,00	(44.859.950,00)	87,55
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	360.207.950,00	315.348.000,00	(44.859.950,00)	87,55
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.207.950,00	315.348.000,00	(44.859.950,00)	87,55
02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	9.880.255,00	9.880.255,00	0,00	100,00
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	9.880.255,00	9.880.255,00	0,00	100,00
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.880.255,00	9.880.255,00	0,00	100,00
02	PROGRAM PENATAAN DESA	300.943.946,00	258.004.000,00	(42.939.946,00)	85,73
02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	300.943.946,00	258.004.000,00	(42.939.946,00)	85,73
02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	300.943.946,00	258.004.000,00	(42.939.946,00)	85,73
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	290.871.218,00	248.504.000,00	(42.367.218,00)	85,43
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.871.218,00	248.504.000,00	(42.367.218,00)	85,43
02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	10.072.728,00	9.500.000,00	(572.728,00)	94,31
02.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.072.728,00	9.500.000,00	(572.728,00)	94,31
02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	215.934.411,00	176.116.434,00	(39.817.977,00)	81,56
02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas	24.751.590,00	13.158.730,00	(11.592.860,00)	53,16
02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	24.751.590,00	13.158.730,00	(11.592.860,00)	53,16
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	24.751.590,00	13.158.730,00	(11.592.860,00)	53,16
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.751.590,00	13.158.730,00	(11.592.860,00)	53,16
02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	191.182.821,00	162.957.704,00	(28.225.117,00)	85,24
02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	21.027.339,00	13.300.203,00	(7.727.136,00)	63,25

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	21.027.339,00	13.300.203,00	(7.727.136,00)	63,25
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.027.339,00	13.300.203,00	(7.727.136,00)	63,25
02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	24.547.373,00	19.786.391,00	(4.760.982,00)	80,60
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	24.547.373,00	19.786.391,00	(4.760.982,00)	80,60
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.547.373,00	19.786.391,00	(4.760.982,00)	80,60
02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	7.964.204,00	7.963.407,00	(797,00)	99,99
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	7.964.204,00	7.963.407,00	(797,00)	99,99
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.964.204,00	7.963.407,00	(797,00)	99,99
02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	137.643.905,00	121.907.703,00	(15.736.202,00)	88,57
02.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	137.643.905,00	121.907.703,00	(15.736.202,00)	88,57
02.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.643.905,00	121.907.703,00	(15.736.202,00)	88,57
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	31.939.406.011,00	30.309.245.109,00	(1.630.160.902,00)	94,90
02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	34.986.500,00	5.400.000,00	(29.586.500,00)	15,43
02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	34.986.500,00	5.400.000,00	(29.586.500,00)	15,43
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	34.986.500,00	5.400.000,00	(29.586.500,00)	15,43
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.986.500,00	5.400.000,00	(29.586.500,00)	15,43
02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	30.604.280.817,00	29.092.029.194,00	(1.512.251.623,00)	95,06
02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	34.882.688,00	32.880.000,00	(2.002.688,00)	94,26
02.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	34.882.688,00	32.880.000,00	(2.002.688,00)	94,26
02.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.882.688,00	32.880.000,00	(2.002.688,00)	94,26
02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	30.539.418.575,00	29.037.252.094,00	(1.502.166.481,00)	95,08
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.883.818.458,00	13.731.331.094,00	(1.152.487.364,00)	92,26
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.883.818.458,00	13.731.331.094,00	(1.152.487.364,00)	92,26

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	15.655.600.117,00	15.305.921.000,00	(349.679.117,00)	97,77
02.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.206.599.999,00	1.055.450.000,00	(151.149.999,00)	87,47
02.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.449.000.118,00	14.250.471.000,00	(198.529.118,00)	98,63
02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	29.979.554,00	21.897.100,00	(8.082.454,00)	73,04
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	29.979.554,00	21.897.100,00	(8.082.454,00)	73,04
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.979.554,00	21.897.100,00	(8.082.454,00)	73,04
02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	34.999.800,00	31.818.000,00	(3.181.800,00)	90,91
02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	34.999.800,00	31.818.000,00	(3.181.800,00)	90,91
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	34.999.800,00	31.818.000,00	(3.181.800,00)	90,91
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.999.800,00	31.818.000,00	(3.181.800,00)	90,91
02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	692.669.172,00	683.226.100,00	(9.443.072,00)	98,64
02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	692.669.172,00	683.226.100,00	(9.443.072,00)	98,64
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	24.999.810,00	22.727.100,00	(2.272.710,00)	90,91
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.999.810,00	22.727.100,00	(2.272.710,00)	90,91
02.2.04.02.5.2	BELANJA MODAL	667.669.362,00	660.499.000,00	(7.170.362,00)	98,93
02.2.04.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	667.669.362,00	660.499.000,00	(7.170.362,00)	98,93
02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	332.820.081,00	271.748.315,00	(61.071.766,00)	81,65
02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	175.720.081,00	145.324.520,00	(30.395.561,00)	82,70
02.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	73.720.409,00	47.324.520,00	(26.395.889,00)	64,19
02.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.720.409,00	47.324.520,00	(26.395.889,00)	64,19
02.2.05.01.5.2	BELANJA MODAL	101.999.672,00	98.000.000,00	(3.999.672,00)	96,08
02.2.05.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.369.672,00	52.200.000,00	(3.169.672,00)	94,28
02.2.05.01.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	46.630.000,00	45.800.000,00	(830.000,00)	98,22

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	157.100.000,00	126.423.795,00	(30.676.205,00)	80,47
02.2.05.07.5.1	BELANJA OPERASI	157.100.000,00	126.423.795,00	(30.676.205,00)	80,47
02.2.05.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.100.000,00	126.423.795,00	(30.676.205,00)	80,47
02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	239.649.641,00	225.023.500,00	(14.626.141,00)	93,90
02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	99.981.753,00	91.989.500,00	(7.992.253,00)	92,01
02.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	99.981.753,00	91.989.500,00	(7.992.253,00)	92,01
02.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.981.753,00	91.989.500,00	(7.992.253,00)	92,01
02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	139.667.888,00	133.034.000,00	(6.633.888,00)	95,25
02.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	139.667.888,00	133.034.000,00	(6.633.888,00)	95,25
02.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.667.888,00	133.034.000,00	(6.633.888,00)	95,25
02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.420.881.290,00	2.290.440.245,00	(130.441.045,00)	94,61
02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.420.881.290,00	2.290.440.245,00	(130.441.045,00)	94,61
02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.096.250.150,00	1.980.310.000,00	(115.940.150,00)	94,47
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.085.411.000,00	1.970.610.000,00	(114.801.000,00)	94,50
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.085.411.000,00	1.970.610.000,00	(114.801.000,00)	94,50
02.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	10.839.150,00	9.700.000,00	(1.139.150,00)	89,49
02.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.839.150,00	9.700.000,00	(1.139.150,00)	89,49
02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	324.631.140,00	310.130.245,00	(14.500.895,00)	95,53
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	311.189.850,00	298.807.495,00	(12.382.355,00)	96,02
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	311.189.850,00	298.807.495,00	(12.382.355,00)	96,02
02.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	13.441.290,00	11.322.750,00	(2.118.540,00)	84,24
02.2.01.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.441.290,00	11.322.750,00	(2.118.540,00)	84,24
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.559.026.019,00	1.414.903.353,00	(144.122.666,00)	90,76

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan	764.072.808,00	634.266.953,00	(129.805.855,00)	83,01
02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	764.072.808,00	634.266.953,00	(129.805.855,00)	83,01
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	764.072.808,00	634.266.953,00	(129.805.855,00)	83,01
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	764.072.808,00	634.266.953,00	(129.805.855,00)	83,01
02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	794.953.211,00	780.636.400,00	(14.316.811,00)	98,20
02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	74.999.913,00	73.140.000,00	(1.859.913,00)	97,52
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	74.999.913,00	73.140.000,00	(1.859.913,00)	97,52
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.999.913,00	73.140.000,00	(1.859.913,00)	97,52
02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	719.953.298,00	707.496.400,00	(12.456.898,00)	98,27
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	719.953.298,00	707.496.400,00	(12.456.898,00)	98,27
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	719.953.298,00	707.496.400,00	(12.456.898,00)	98,27
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	49.805.090,00	47.370.000,00	(2.435.090,00)	95,11
02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	49.805.090,00	47.370.000,00	(2.435.090,00)	95,11
02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	49.805.090,00	47.370.000,00	(2.435.090,00)	95,11
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	29.805.090,00	29.770.000,00	(35.090,00)	99,88
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.805.090,00	29.770.000,00	(35.090,00)	99,88
02.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	17.600.000,00	(2.400.000,00)	88,00
02.2.01.01.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	17.600.000,00	(2.400.000,00)	88,00
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	49.971.151,00	37.293.750,00	(12.677.401,00)	74,63
02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49.971.151,00	37.293.750,00	(12.677.401,00)	74,63
02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49.971.151,00	37.293.750,00	(12.677.401,00)	74,63
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	16.971.151,00	8.813.750,00	(8.157.401,00)	51,93
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.971.151,00	8.813.750,00	(8.157.401,00)	51,93

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	33.000.000,00	28.480.000,00	(4.520.000,00)	86,30
02.2.01.04.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	33.000.000,00	28.480.000,00	(4.520.000,00)	86,30
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	45.999.034,00	40.242.900,00	(5.756.134,00)	87,49
02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	45.999.034,00	40.242.900,00	(5.756.134,00)	87,49
02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	45.999.034,00	40.242.900,00	(5.756.134,00)	87,49
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	45.999.034,00	40.242.900,00	(5.756.134,00)	87,49
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.999.034,00	40.242.900,00	(5.756.134,00)	87,49
02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	844.532.274,00	787.850.632,00	(56.681.642,00)	93,29
02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	844.532.274,00	787.850.632,00	(56.681.642,00)	93,29
02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	844.532.274,00	787.850.632,00	(56.681.642,00)	93,29
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	545.541.154,00	520.537.332,00	(25.003.822,00)	95,42
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	545.541.154,00	520.537.332,00	(25.003.822,00)	95,42
02.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	298.991.120,00	267.313.300,00	(31.677.820,00)	89,41
02.2.01.09.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	279.381.820,00	255.215.000,00	(24.166.820,00)	91,35
02.2.01.09.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.609.300,00	12.098.300,00	(7.511.000,00)	61,70
02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	21.960.000,00	18.600.000,00	(3.360.000,00)	84,70
02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	21.960.000,00	18.600.000,00	(3.360.000,00)	84,70
02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	21.960.000,00	18.600.000,00	(3.360.000,00)	84,70
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	21.960.000,00	18.600.000,00	(3.360.000,00)	84,70
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.960.000,00	18.600.000,00	(3.360.000,00)	84,70
02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	339.878.035,00	324.870.750,00	(15.007.285,00)	95,58
02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	42.880.000,00	42.828.750,00	(51.250,00)	99,88
02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	42.880.000,00	42.828.750,00	(51.250,00)	99,88

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	42.880.000,00	42.828.750,00	(51.250,00)	99,88
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.880.000,00	42.828.750,00	(51.250,00)	99,88
02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	296.998.035,00	282.042.000,00	(14.956.035,00)	94,96
02.2.03.04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	97.926.010,00	88.655.167,00	(9.270.843,00)	90,53
02.2.03.04.5.2	BELANJA MODAL	97.926.010,00	88.655.167,00	(9.270.843,00)	90,53
02.2.03.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97.926.010,00	88.655.167,00	(9.270.843,00)	90,53
02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	199.072.025,00	193.386.833,00	(5.685.192,00)	97,14
02.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	140.576.026,00	140.396.000,00	(180.026,00)	99,87
02.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.576.026,00	140.396.000,00	(180.026,00)	99,87
02.2.03.06.5.2	BELANJA MODAL	58.495.999,00	52.990.833,00	(5.505.166,00)	90,59
02.2.03.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.495.999,00	52.990.833,00	(5.505.166,00)	90,59
02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.505.537.697,00	1.469.524.052,00	(36.013.645,00)	97,61
02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.330.352.697,00	1.314.278.652,00	(16.074.045,00)	98,79
02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	900.000.000,00	899.982.000,00	(18.000,00)	100,00
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	900.000.000,00	899.982.000,00	(18.000,00)	100,00
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000.000,00	899.982.000,00	(18.000,00)	100,00
02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	430.352.697,00	414.296.652,00	(16.056.045,00)	96,27
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	430.352.697,00	414.296.652,00	(16.056.045,00)	96,27
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.352.697,00	414.296.652,00	(16.056.045,00)	96,27
02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	99.925.000,00	99.310.400,00	(614.600,00)	99,38
02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	99.925.000,00	99.310.400,00	(614.600,00)	99,38
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	99.925.000,00	99.310.400,00	(614.600,00)	99,38
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.925.000,00	99.310.400,00	(614.600,00)	99,38

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	27.560.000,00	18.135.000,00	(9.425.000,00)	65,80
02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	27.560.000,00	18.135.000,00	(9.425.000,00)	65,80
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	27.560.000,00	18.135.000,00	(9.425.000,00)	65,80
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.560.000,00	18.135.000,00	(9.425.000,00)	65,80
02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	47.700.000,00	37.800.000,00	(9.900.000,00)	79,25
02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	47.700.000,00	37.800.000,00	(9.900.000,00)	79,25
02.2.05.06.5.1	BELANJA OPERASI	47.700.000,00	37.800.000,00	(9.900.000,00)	79,25
02.2.05.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.700.000,00	37.800.000,00	(9.900.000,00)	79,25
02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	20.000.000,00	10.781.250,00	(9.218.750,00)	53,91
02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	10.000.000,00	783.750,00	(9.216.250,00)	7,84
02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	10.000.000,00	783.750,00	(9.216.250,00)	7,84
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	783.750,00	(9.216.250,00)	7,84
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	783.750,00	(9.216.250,00)	7,84
02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri	10.000.000,00	9.997.500,00	(2.500,00)	99,98
02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	10.000.000,00	9.997.500,00	(2.500,00)	99,98
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.997.500,00	(2.500,00)	99,98
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.997.500,00	(2.500,00)	99,98
02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	338.997.997,00	321.420.484,00	(17.577.513,00)	94,81
02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	338.997.997,00	321.420.484,00	(17.577.513,00)	94,81
02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	105.149.999,00	98.609.000,00	(6.540.999,00)	93,78
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	105.149.999,00	98.609.000,00	(6.540.999,00)	93,78
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.149.999,00	98.609.000,00	(6.540.999,00)	93,78
02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	129.286.498,00	125.701.500,00	(3.584.998,00)	97,23

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	129.286.498,00	125.701.500,00	(3.584.998,00)	97,23
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.286.498,00	125.701.500,00	(3.584.998,00)	97,23
02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	39.405.000,00	34.935.000,00	(4.470.000,00)	88,66
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	39.405.000,00	34.935.000,00	(4.470.000,00)	88,66
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.405.000,00	34.935.000,00	(4.470.000,00)	88,66
02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	61.620.000,00	58.969.984,00	(2.650.016,00)	95,70
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	61.620.000,00	58.969.984,00	(2.650.016,00)	95,70
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.620.000,00	58.969.984,00	(2.650.016,00)	95,70
02.2.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	3.536.500,00	3.205.000,00	(331.500,00)	90,63
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.536.500,00	3.205.000,00	(331.500,00)	90,63
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.536.500,00	3.205.000,00	(331.500,00)	90,63
02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	33.894.807.823,00	32.289.572.000,00	(1.605.235.823,00)	95,26
02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.507.650.564,00	1.137.238.122,00	(370.412.442,00)	75,43
02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	1.053.422.440,00	712.494.262,00	(340.928.178,00)	67,64
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.053.422.440,00	712.494.262,00	(340.928.178,00)	67,64
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.053.422.440,00	712.494.262,00	(340.928.178,00)	67,64
02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	290.131.000,00	264.455.080,00	(25.675.920,00)	91,15
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	290.131.000,00	264.455.080,00	(25.675.920,00)	91,15
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.131.000,00	264.455.080,00	(25.675.920,00)	91,15
02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	164.097.124,00	160.288.780,00	(3.808.344,00)	97,68
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	164.097.124,00	160.288.780,00	(3.808.344,00)	97,68
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.097.124,00	160.288.780,00	(3.808.344,00)	97,68
02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	30.780.351.961,00	30.009.265.192,00	(771.086.769,00)	97,49

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7.042.116.816,00	7.015.702.900,00	(26.413.916,00)	99,62
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.042.116.816,00	7.015.702.900,00	(26.413.916,00)	99,62
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.116.816,00	81.683.200,00	(25.433.616,00)	76,26
02.2.02.01.5.1.05	Belanja Hibah	6.935.000.000,00	6.934.019.700,00	(980.300,00)	99,99
02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	20.439.843.565,00	20.036.513.850,00	(403.329.715,00)	98,03
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	20.439.843.565,00	20.036.513.850,00	(403.329.715,00)	98,03
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.439.843.565,00	20.036.513.850,00	(403.329.715,00)	98,03
02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	3.298.391.580,00	2.957.048.442,00	(341.343.138,00)	89,65
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.298.391.580,00	2.957.048.442,00	(341.343.138,00)	89,65
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.298.391.580,00	2.957.048.442,00	(341.343.138,00)	89,65
02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.483.907.058,00	1.038.558.036,00	(445.349.022,00)	69,99
02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	939.963.285,00	688.762.976,00	(251.200.309,00)	73,28
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	934.463.285,00	688.762.976,00	(245.700.309,00)	73,71
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	934.463.285,00	688.762.976,00	(245.700.309,00)	73,71
02.2.03.01.5.2	BELANJA MODAL	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	0,00
02.2.03.01.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	0,00
02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	289.424.241,00	135.148.400,00	(154.275.841,00)	46,70
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	289.424.241,00	135.148.400,00	(154.275.841,00)	46,70
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.424.241,00	135.148.400,00	(154.275.841,00)	46,70
02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	254.519.532,00	214.646.660,00	(39.872.872,00)	84,33
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	254.519.532,00	214.646.660,00	(39.872.872,00)	84,33
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.519.532,00	214.646.660,00	(39.872.872,00)	84,33
02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	122.898.240,00	104.510.650,00	(18.387.590,00)	85,04

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	122.898.240,00	104.510.650,00	(18.387.590,00)	85,04
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	122.898.240,00	104.510.650,00	(18.387.590,00)	85,04
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.898.240,00	104.510.650,00	(18.387.590,00)	85,04
02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	26.231.786.316,00	16.694.223.024,00	(9.537.563.292,00)	63,64
02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	7.299.256.761,00	4.412.859.386,00	(2.886.397.375,00)	60,46
02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	85.760.449,00	3.567.000,00	(82.193.449,00)	4,16
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	85.760.449,00	3.567.000,00	(82.193.449,00)	4,16
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.760.449,00	3.567.000,00	(82.193.449,00)	4,16
02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.997.821.500,00	4.251.080.386,00	(2.746.741.114,00)	60,75
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.997.821.500,00	4.251.080.386,00	(2.746.741.114,00)	60,75
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.997.821.500,00	4.251.080.386,00	(2.746.741.114,00)	60,75
02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	9.796.309,00	2.645.800,00	(7.150.509,00)	27,01
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.796.309,00	2.645.800,00	(7.150.509,00)	27,01
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.796.309,00	2.645.800,00	(7.150.509,00)	27,01
02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	205.878.503,00	155.566.200,00	(50.312.303,00)	75,56
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	205.878.503,00	155.566.200,00	(50.312.303,00)	75,56
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.878.503,00	155.566.200,00	(50.312.303,00)	75,56
02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	94.394.280,00	38.438.200,00	(55.956.080,00)	40,72
02.2.02.03	Pembahasan APBD	94.394.280,00	38.438.200,00	(55.956.080,00)	40,72
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	94.394.280,00	38.438.200,00	(55.956.080,00)	40,72
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.394.280,00	38.438.200,00	(55.956.080,00)	40,72
02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	67.398.169,00	14.827.700,00	(52.570.469,00)	22,00
02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	67.398.169,00	14.827.700,00	(52.570.469,00)	22,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	67.398.169,00	14.827.700,00	(52.570.469,00)	22,00
02.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.398.169,00	14.827.700,00	(52.570.469,00)	22,00
02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.647.819.207,00	2.201.971.373,00	(1.445.847.834,00)	60,36
02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	2.164.425.000,00	1.126.384.097,00	(1.038.040.903,00)	52,04
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.164.425.000,00	1.126.384.097,00	(1.038.040.903,00)	52,04
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.164.425.000,00	1.126.384.097,00	(1.038.040.903,00)	52,04
02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	778.261.715,00	466.744.776,00	(311.516.939,00)	59,97
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	729.427.265,00	434.414.776,00	(295.012.489,00)	59,56
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	729.427.265,00	434.414.776,00	(295.012.489,00)	59,56
02.2.04.03.5.2	BELANJA MODAL	48.834.450,00	32.330.000,00	(16.504.450,00)	66,20
02.2.04.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.834.450,00	32.330.000,00	(16.504.450,00)	66,20
02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	405.495.000,00	336.000.000,00	(69.495.000,00)	82,86
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	405.495.000,00	336.000.000,00	(69.495.000,00)	82,86
02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	405.495.000,00	336.000.000,00	(69.495.000,00)	82,86
02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	299.637.492,00	272.842.500,00	(26.794.992,00)	91,06
02.2.04.05.5.1	BELANJA OPERASI	299.637.492,00	272.842.500,00	(26.794.992,00)	91,06
02.2.04.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.637.492,00	272.842.500,00	(26.794.992,00)	91,06
02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.074.297.701,00	682.638.800,00	(391.658.901,00)	63,54
02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.074.297.701,00	682.638.800,00	(391.658.901,00)	63,54
02.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.074.297.701,00	682.638.800,00	(391.658.901,00)	63,54
02.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.074.297.701,00	682.638.800,00	(391.658.901,00)	63,54
02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	14.048.620.198,00	9.343.487.565,00	(4.705.132.633,00)	66,51
02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	14.048.620.198,00	9.343.487.565,00	(4.705.132.633,00)	66,51

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.048.620.198,00	9.343.487.565,00	(4.705.132.633,00)	66,51
02.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.048.620.198,00	9.343.487.565,00	(4.705.132.633,00)	66,51
02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	650.126.753,00	423.886.098,00	(226.240.655,00)	65,20
02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	476.606.753,00	274.961.098,00	(201.645.655,00)	57,69
02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	476.606.753,00	274.961.098,00	(201.645.655,00)	57,69
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	476.606.753,00	274.961.098,00	(201.645.655,00)	57,69
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	476.606.753,00	274.961.098,00	(201.645.655,00)	57,69
02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000,00	98.645.000,00	(1.355.000,00)	98,65
02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000,00	98.645.000,00	(1.355.000,00)	98,65
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	98.645.000,00	(1.355.000,00)	98,65
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	98.645.000,00	(1.355.000,00)	98,65
02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	73.520.000,00	50.280.000,00	(23.240.000,00)	68,39
02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	73.520.000,00	50.280.000,00	(23.240.000,00)	68,39
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	73.520.000,00	50.280.000,00	(23.240.000,00)	68,39
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.520.000,00	50.280.000,00	(23.240.000,00)	68,39
02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	248.473.769.391,00	226.321.562.768,00	(22.152.206.623,00)	91,08
02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	493.820.953,00	351.397.878,00	(142.423.075,00)	71,16
02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	17.931.205,00	15.186.000,00	(2.745.205,00)	84,69
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.931.205,00	15.186.000,00	(2.745.205,00)	84,69
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.931.205,00	15.186.000,00	(2.745.205,00)	84,69
02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	16.896.788,00	13.508.800,00	(3.387.988,00)	79,95
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	16.896.788,00	13.508.800,00	(3.387.988,00)	79,95
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.896.788,00	13.508.800,00	(3.387.988,00)	79,95

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	10.771.605,00	9.417.200,00	(1.354.405,00)	87,43
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.771.605,00	9.417.200,00	(1.354.405,00)	87,43
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.771.605,00	9.417.200,00	(1.354.405,00)	87,43
02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	7.338.590,00	6.935.000,00	(403.590,00)	94,50
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	7.338.590,00	6.935.000,00	(403.590,00)	94,50
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.338.590,00	6.935.000,00	(403.590,00)	94,50
02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	4.373.255,00	935.000,00	(3.438.255,00)	21,38
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.373.255,00	935.000,00	(3.438.255,00)	21,38
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.373.255,00	935.000,00	(3.438.255,00)	21,38
02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	3.215.643,00	600.000,00	(2.615.643,00)	18,66
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.215.643,00	600.000,00	(2.615.643,00)	18,66
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.215.643,00	600.000,00	(2.615.643,00)	18,66
02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	325.088.251,00	223.565.878,00	(101.522.373,00)	68,77
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	325.088.251,00	223.565.878,00	(101.522.373,00)	68,77
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.088.251,00	223.565.878,00	(101.522.373,00)	68,77
02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100.316.723,00	80.689.000,00	(19.627.723,00)	80,43
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	100.316.723,00	80.689.000,00	(19.627.723,00)	80,43
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.316.723,00	80.689.000,00	(19.627.723,00)	80,43
02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2.774.775,00	561.000,00	(2.213.775,00)	20,22
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	2.774.775,00	561.000,00	(2.213.775,00)	20,22
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.774.775,00	561.000,00	(2.213.775,00)	20,22
02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5.114.118,00	0,00	(5.114.118,00)	0,00
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	5.114.118,00	0,00	(5.114.118,00)	0,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.114.118,00	0,00	(5.114.118,00)	0,00
02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	183.974.010,00	157.619.500,00	(26.354.510,00)	85,67
02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2.676.549,00	1.318.000,00	(1.358.549,00)	49,24
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.676.549,00	1.318.000,00	(1.358.549,00)	49,24
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.676.549,00	1.318.000,00	(1.358.549,00)	49,24
02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	53.137.425,00	46.912.500,00	(6.224.925,00)	88,29
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	53.137.425,00	46.912.500,00	(6.224.925,00)	88,29
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.137.425,00	46.912.500,00	(6.224.925,00)	88,29
02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4.500.000,00	1.350.000,00	(3.150.000,00)	30,00
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	1.350.000,00	(3.150.000,00)	30,00
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	1.350.000,00	(3.150.000,00)	30,00
02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang	38.400.000,00	37.400.000,00	(1.000.000,00)	97,40
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	38.400.000,00	37.400.000,00	(1.000.000,00)	97,40
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	37.400.000,00	(1.000.000,00)	97,40
02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	6.480.000,00	2.400.000,00	(4.080.000,00)	37,04
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	6.480.000,00	2.400.000,00	(4.080.000,00)	37,04
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.480.000,00	2.400.000,00	(4.080.000,00)	37,04
02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan	37.400.000,00	33.920.000,00	(3.480.000,00)	90,70
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	37.400.000,00	33.920.000,00	(3.480.000,00)	90,70
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.400.000,00	33.920.000,00	(3.480.000,00)	90,70
02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	41.380.036,00	34.319.000,00	(7.061.036,00)	82,94
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	41.380.036,00	34.319.000,00	(7.061.036,00)	82,94
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.380.036,00	34.319.000,00	(7.061.036,00)	82,94

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	899.071.911,00	836.075.850,00	(62.996.061,00)	92,99
02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	105.977.031,00	99.752.496,00	(6.224.535,00)	94,13
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	105.977.031,00	99.752.496,00	(6.224.535,00)	94,13
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.977.031,00	99.752.496,00	(6.224.535,00)	94,13
02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	77.218.325,00	74.228.184,00	(2.990.141,00)	96,13
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	77.218.325,00	74.228.184,00	(2.990.141,00)	96,13
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.218.325,00	74.228.184,00	(2.990.141,00)	96,13
02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	108.981.846,00	98.683.928,00	(10.297.918,00)	90,55
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	108.981.846,00	98.683.928,00	(10.297.918,00)	90,55
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.981.846,00	98.683.928,00	(10.297.918,00)	90,55
02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	234.457.251,00	229.932.652,00	(4.524.599,00)	98,07
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	234.457.251,00	229.932.652,00	(4.524.599,00)	98,07
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.457.251,00	229.932.652,00	(4.524.599,00)	98,07
02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan	266.564.461,00	239.816.450,00	(26.748.011,00)	89,97
02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	266.564.461,00	239.816.450,00	(26.748.011,00)	89,97
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.564.461,00	239.816.450,00	(26.748.011,00)	89,97
02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	18.763.850,00	17.882.240,00	(881.610,00)	95,30
02.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	18.763.850,00	17.882.240,00	(881.610,00)	95,30
02.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.763.850,00	17.882.240,00	(881.610,00)	95,30
02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	87.109.147,00	75.779.900,00	(11.329.247,00)	86,99
02.2.03.11.5.1	BELANJA OPERASI	87.109.147,00	75.779.900,00	(11.329.247,00)	86,99
02.2.03.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.109.147,00	75.779.900,00	(11.329.247,00)	86,99
02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	246.896.902.517,00	224.976.469.540,00	(21.920.432.977,00)	91,12

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	224.470.023.140,00	224.230.043.540,00	(239.979.600,00)	99,89
02.2.04.08.5.4	BELANJA TRANSFER	224.470.023.140,00	224.230.043.540,00	(239.979.600,00)	99,89
02.2.04.08.5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.895.286.950,00	4.895.286.950,00	0,00	100,00
02.2.04.08.5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	219.574.736.190,00	219.334.756.590,00	(239.979.600,00)	99,89
02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	22.426.879.377,00	746.426.000,00	(21.680.453.377,00)	3,33
02.2.04.09.5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.426.879.377,00	746.426.000,00	(21.680.453.377,00)	3,33
02.2.04.09.5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22.426.879.377,00	746.426.000,00	(21.680.453.377,00)	3,33
02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.314.990.175,00	951.548.074,00	(363.442.101,00)	72,36
02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	389.300.007,00	198.652.925,00	(190.647.082,00)	51,03
02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	8.052.902,00	5.024.925,00	(3.027.977,00)	62,40
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.052.902,00	5.024.925,00	(3.027.977,00)	62,40
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.052.902,00	5.024.925,00	(3.027.977,00)	62,40
02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	223.526.794,00	41.885.000,00	(181.641.794,00)	18,74
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	223.526.794,00	41.885.000,00	(181.641.794,00)	18,74
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.526.794,00	41.885.000,00	(181.641.794,00)	18,74
02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	157.720.311,00	151.743.000,00	(5.977.311,00)	96,21
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	157.720.311,00	151.743.000,00	(5.977.311,00)	96,21
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.720.311,00	151.743.000,00	(5.977.311,00)	96,21
02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	460.888.156,00	313.214.749,00	(147.673.407,00)	67,96
02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	224.457.443,00	120.081.749,00	(104.375.694,00)	53,50
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	224.457.443,00	120.081.749,00	(104.375.694,00)	53,50
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.457.443,00	120.081.749,00	(104.375.694,00)	53,50
02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	114.940.713,00	108.358.000,00	(6.582.713,00)	94,27

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	114.940.713,00	108.358.000,00	(6.582.713,00)	94,27
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.940.713,00	108.358.000,00	(6.582.713,00)	94,27
02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	121.490.000,00	84.775.000,00	(36.715.000,00)	69,78
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	121.490.000,00	84.775.000,00	(36.715.000,00)	69,78
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.490.000,00	84.775.000,00	(36.715.000,00)	69,78
02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	440.140.000,00	419.406.400,00	(20.733.600,00)	95,29
02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	125.140.000,00	122.856.400,00	(2.283.600,00)	98,18
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	125.140.000,00	122.856.400,00	(2.283.600,00)	98,18
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.140.000,00	122.856.400,00	(2.283.600,00)	98,18
02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	315.000.000,00	296.550.000,00	(18.450.000,00)	94,14
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	315.000.000,00	296.550.000,00	(18.450.000,00)	94,14
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.000.000,00	296.550.000,00	(18.450.000,00)	94,14
02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	24.662.012,00	20.274.000,00	(4.388.012,00)	82,21
02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	24.662.012,00	20.274.000,00	(4.388.012,00)	82,21
02.2.04.07.5.1	BELANJA OPERASI	24.662.012,00	20.274.000,00	(4.388.012,00)	82,21
02.2.04.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.662.012,00	20.274.000,00	(4.388.012,00)	82,21
02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	979.324.244,00	846.592.740,00	(132.731.504,00)	86,45
02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	979.324.244,00	846.592.740,00	(132.731.504,00)	86,45
02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	979.324.244,00	846.592.740,00	(132.731.504,00)	86,45
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	979.324.244,00	846.592.740,00	(132.731.504,00)	86,45
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	979.324.244,00	846.592.740,00	(132.731.504,00)	86,45
02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	44.236.413,00	32.210.600,00	(12.025.813,00)	72,81
02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	15.010.000,00	5.286.600,00	(9.723.400,00)	35,22

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	15.010.000,00	5.286.600,00	(9.723.400,00)	35,22
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	15.010.000,00	5.286.600,00	(9.723.400,00)	35,22
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.010.000,00	5.286.600,00	(9.723.400,00)	35,22
02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	29.226.413,00	26.924.000,00	(2.302.413,00)	92,12
02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	29.226.413,00	26.924.000,00	(2.302.413,00)	92,12
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.026.413,00	7.024.000,00	(2.413,00)	99,97
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.026.413,00	7.024.000,00	(2.413,00)	99,97
02.2.04.01.5.2	BELANJA MODAL	22.200.000,00	19.900.000,00	(2.300.000,00)	89,64
02.2.04.01.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.200.000,00	19.900.000,00	(2.300.000,00)	89,64
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	574.979.700,00	454.963.250,00	(120.016.450,00)	79,13
02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	406.979.700,00	337.648.250,00	(69.331.450,00)	82,96
02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	20.850.000,00	15.105.000,00	(5.745.000,00)	72,45
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.850.000,00	15.105.000,00	(5.745.000,00)	72,45
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.850.000,00	15.105.000,00	(5.745.000,00)	72,45
02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	6.915.000,00	6.915.000,00	0,00	100,00
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.915.000,00	6.915.000,00	0,00	100,00
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.915.000,00	6.915.000,00	0,00	100,00
02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	34.055.000,00	34.050.000,00	(5.000,00)	99,99
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	34.055.000,00	34.050.000,00	(5.000,00)	99,99
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.055.000,00	34.050.000,00	(5.000,00)	99,99
02.2.01.05	Pengawasan Desa	201.464.700,00	143.487.000,00	(57.977.700,00)	71,22
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	201.464.700,00	143.487.000,00	(57.977.700,00)	71,22
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.464.700,00	143.487.000,00	(57.977.700,00)	71,22

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	143.695.000,00	138.091.250,00	(5.603.750,00)	96,10
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	143.695.000,00	138.091.250,00	(5.603.750,00)	96,10
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.695.000,00	138.091.250,00	(5.603.750,00)	96,10
02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	168.000.000,00	117.315.000,00	(50.685.000,00)	69,83
02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	168.000.000,00	117.315.000,00	(50.685.000,00)	69,83
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	168.000.000,00	117.315.000,00	(50.685.000,00)	69,83
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.000.000,00	117.315.000,00	(50.685.000,00)	69,83
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	41.028.879,00	28.684.000,00	(12.344.879,00)	69,91
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	41.028.879,00	28.684.000,00	(12.344.879,00)	69,91
02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	41.028.879,00	28.684.000,00	(12.344.879,00)	69,91
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.860.463,00	13.434.000,00	(2.426.463,00)	84,70
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.860.463,00	13.434.000,00	(2.426.463,00)	84,70
02.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	25.168.416,00	15.250.000,00	(9.918.416,00)	60,59
02.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.168.416,00	15.250.000,00	(9.918.416,00)	60,59
02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	219.458.136,00	160.279.695,00	(59.178.441,00)	73,03
02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	219.458.136,00	160.279.695,00	(59.178.441,00)	73,03
02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	144.535.305,00	109.808.809,00	(34.726.496,00)	75,97
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	144.535.305,00	109.808.809,00	(34.726.496,00)	75,97
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.535.305,00	109.808.809,00	(34.726.496,00)	75,97
02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	74.922.831,00	50.470.886,00	(24.451.945,00)	67,36
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	74.922.831,00	50.470.886,00	(24.451.945,00)	67,36
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.922.831,00	50.470.886,00	(24.451.945,00)	67,36
03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	34.212.567.449,00	21.859.968.620,00	(12.352.598.829,00)	63,89

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	34.061.617.635,00	21.760.453.220,00	(12.301.164.415,00)	63,89
03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	34.001.617.635,00	21.720.703.220,00	(12.280.914.415,00)	63,88
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	34.001.617.635,00	21.720.703.220,00	(12.280.914.415,00)	63,88
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.001.617.635,00	21.720.703.220,00	(12.280.914.415,00)	63,88
03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	60.000.000,00	39.750.000,00	(20.250.000,00)	66,25
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	39.750.000,00	(20.250.000,00)	66,25
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	39.750.000,00	(20.250.000,00)	66,25
03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.949.814,00	99.515.400,00	(51.434.414,00)	65,93
03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.949.814,00	99.515.400,00	(51.434.414,00)	65,93
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	150.949.814,00	99.515.400,00	(51.434.414,00)	65,93
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.949.814,00	99.515.400,00	(51.434.414,00)	65,93
03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	38.221.067.443,00	34.543.639.080,00	(3.677.428.363,00)	90,38
03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	38.221.067.443,00	34.543.639.080,00	(3.677.428.363,00)	90,38
03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	400.000.000,00	384.700.000,00	(15.300.000,00)	96,18
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	309.181.820,00	297.400.000,00	(11.781.820,00)	96,19
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.181.820,00	297.400.000,00	(11.781.820,00)	96,19
03.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	90.818.180,00	87.300.000,00	(3.518.180,00)	96,13
03.2.01.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	90.818.180,00	87.300.000,00	(3.518.180,00)	96,13
03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	399.999.997,00	278.780.000,00	(121.219.997,00)	69,70
03.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	399.999.997,00	278.780.000,00	(121.219.997,00)	69,70
03.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	399.999.997,00	278.780.000,00	(121.219.997,00)	69,70
03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	21.813.413.997,00	18.636.005.400,00	(3.177.408.597,00)	85,43
03.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	21.813.413.997,00	18.636.005.400,00	(3.177.408.597,00)	85,43

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
03.2.01.04.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.813.413.997,00	18.636.005.400,00	(3.177.408.597,00)	85,43
03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.410.995.449,00	4.248.130.000,00	(162.865.449,00)	96,31
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.828.999.994,00	3.672.280.000,00	(156.719.994,00)	95,91
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	27.900.000,00	(1.100.000,00)	96,21
03.2.01.06.5.1.05	Belanja Hibah	3.799.999.994,00	3.644.380.000,00	(155.619.994,00)	95,90
03.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	581.995.455,00	575.850.000,00	(6.145.455,00)	98,94
03.2.01.06.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	581.995.455,00	575.850.000,00	(6.145.455,00)	98,94
03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	11.196.658.000,00	10.996.023.680,00	(200.634.320,00)	98,21
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	120.605.000,00	90.194.680,00	(30.410.320,00)	74,79
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.605.000,00	90.194.680,00	(30.410.320,00)	74,79
03.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	11.076.053.000,00	10.905.829.000,00	(170.224.000,00)	98,46
03.2.01.07.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	91.510.000,00	(8.490.000,00)	91,51
03.2.01.07.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.976.053.000,00	10.814.319.000,00	(161.734.000,00)	98,53
03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	14.302.206.776,00	14.229.757.870,00	(72.448.906,00)	99,49
03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	14.302.206.776,00	14.229.757.870,00	(72.448.906,00)	99,49
03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	4.050.186.776,00	3.977.737.870,00	(72.448.906,00)	98,21
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.050.186.776,00	3.977.737.870,00	(72.448.906,00)	98,21
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.186.776,00	417.737.870,00	(72.448.906,00)	85,22
03.2.03.02.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.560.000.000,00	3.560.000.000,00	0,00	100,00
03.2.03.08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	10.252.020.000,00	10.252.020.000,00	0,00	100,00
03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	10.252.020.000,00	10.252.020.000,00	0,00	100,00
03.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.977.020.000,00	5.977.020.000,00	0,00	100,00
03.2.03.08.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.275.000.000,00	4.275.000.000,00	0,00	100,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	682.785.776,00	373.032.325,00	(309.753.451,00)	54,63
03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	682.785.776,00	373.032.325,00	(309.753.451,00)	54,63
03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	318.490.000,00	52.010.000,00	(266.480.000,00)	16,33
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	318.490.000,00	52.010.000,00	(266.480.000,00)	16,33
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.490.000,00	52.010.000,00	(266.480.000,00)	16,33
03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	364.295.776,00	321.022.325,00	(43.273.451,00)	88,12
03.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	86.260.929,00	59.832.000,00	(26.428.929,00)	69,36
03.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.260.929,00	59.832.000,00	(26.428.929,00)	69,36
03.2.03.04.5.2	BELANJA MODAL	278.034.847,00	261.190.325,00	(16.844.522,00)	93,94
03.2.03.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	278.034.847,00	261.190.325,00	(16.844.522,00)	93,94
03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	359.546.040,00	257.126.720,00	(102.419.320,00)	71,51
03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	340.633.448,00	243.749.128,00	(96.884.320,00)	71,56
03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	309.627.686,00	216.529.156,00	(93.098.530,00)	69,93
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	309.627.686,00	216.529.156,00	(93.098.530,00)	69,93
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.627.686,00	216.529.156,00	(93.098.530,00)	69,93
03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	9.792.542,00	7.989.972,00	(1.802.570,00)	81,59
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	9.792.542,00	7.989.972,00	(1.802.570,00)	81,59
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.792.542,00	7.989.972,00	(1.802.570,00)	81,59
03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	21.213.220,00	19.230.000,00	(1.983.220,00)	90,65
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	21.213.220,00	19.230.000,00	(1.983.220,00)	90,65
03.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	21.213.220,00	19.230.000,00	(1.983.220,00)	90,65
03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	11.981.944,00	8.916.944,00	(3.065.000,00)	74,42
03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	11.981.944,00	8.916.944,00	(3.065.000,00)	74,42

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.981.944,00	8.916.944,00	(3.065.000,00)	74,42
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.981.944,00	8.916.944,00	(3.065.000,00)	74,42
03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	6.930.648,00	4.460.648,00	(2.470.000,00)	64,36
03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	6.930.648,00	4.460.648,00	(2.470.000,00)	64,36
03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.930.648,00	4.460.648,00	(2.470.000,00)	64,36
03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.930.648,00	4.460.648,00	(2.470.000,00)	64,36
03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	291.711.210,00	97.903.525,00	(193.807.685,00)	33,56
03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	45.391.972,00	21.450.000,00	(23.941.972,00)	47,26
03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	45.391.972,00	21.450.000,00	(23.941.972,00)	47,26
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	45.391.972,00	21.450.000,00	(23.941.972,00)	47,26
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.391.972,00	21.450.000,00	(23.941.972,00)	47,26
03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	95.768.111,00	23.261.525,00	(72.506.586,00)	24,29
03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	95.768.111,00	23.261.525,00	(72.506.586,00)	24,29
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	95.768.111,00	23.261.525,00	(72.506.586,00)	24,29
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.768.111,00	23.261.525,00	(72.506.586,00)	24,29
03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.551.127,00	53.192.000,00	(97.359.127,00)	35,33
03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	38.276.358,00	1.660.000,00	(36.616.358,00)	4,34
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	38.276.358,00	1.660.000,00	(36.616.358,00)	4,34
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.276.358,00	1.660.000,00	(36.616.358,00)	4,34
03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	112.274.769,00	51.532.000,00	(60.742.769,00)	45,90
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	112.274.769,00	51.532.000,00	(60.742.769,00)	45,90
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.274.769,00	51.532.000,00	(60.742.769,00)	45,90
03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	442.791.918,00	316.034.856,00	(126.757.062,00)	71,37

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi	79.815.074,00	62.735.000,00	(17.080.074,00)	78,60
03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	49.995.000,00	40.115.000,00	(9.880.000,00)	80,24
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	49.995.000,00	40.115.000,00	(9.880.000,00)	80,24
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.995.000,00	40.115.000,00	(9.880.000,00)	80,24
03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	29.820.074,00	22.620.000,00	(7.200.074,00)	75,85
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	29.820.074,00	22.620.000,00	(7.200.074,00)	75,85
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.820.074,00	22.620.000,00	(7.200.074,00)	75,85
03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	119.986.502,00	83.858.200,00	(36.128.302,00)	69,89
03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	119.986.502,00	83.858.200,00	(36.128.302,00)	69,89
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	116.832.869,00	80.833.200,00	(35.999.669,00)	69,19
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.832.869,00	80.833.200,00	(35.999.669,00)	69,19
03.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	3.153.633,00	3.025.000,00	(128.633,00)	95,92
03.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.153.633,00	3.025.000,00	(128.633,00)	95,92
03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	242.990.342,00	169.441.656,00	(73.548.686,00)	69,73
03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	15.000.000,00	7.620.612,00	(7.379.388,00)	50,80
03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	7.620.612,00	(7.379.388,00)	50,80
03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	7.620.612,00	(7.379.388,00)	50,80
03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	150.635.427,00	120.501.044,00	(30.134.383,00)	80,00
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	150.635.427,00	120.501.044,00	(30.134.383,00)	80,00
03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.635.427,00	120.501.044,00	(30.134.383,00)	80,00
03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	77.354.915,00	41.320.000,00	(36.034.915,00)	53,42
03.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	77.354.915,00	41.320.000,00	(36.034.915,00)	53,42
03.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.354.915,00	41.320.000,00	(36.034.915,00)	53,42

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.797.675.167,00	2.643.323.984,00	(154.351.183,00)	94,48
03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.731.009.325,00	2.580.808.984,00	(150.200.341,00)	94,50
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	1.489.813.493,00	1.379.818.409,00	(109.995.084,00)	92,62
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	189.822.493,00	88.693.409,00	(101.129.084,00)	46,72
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.822.493,00	88.693.409,00	(101.129.084,00)	46,72
03.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	1.299.991.000,00	1.291.125.000,00	(8.866.000,00)	99,32
03.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.299.991.000,00	1.291.125.000,00	(8.866.000,00)	99,32
03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	67.290.000,00	66.916.250,00	(373.750,00)	99,44
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	67.290.000,00	66.916.250,00	(373.750,00)	99,44
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.290.000,00	66.916.250,00	(373.750,00)	99,44
03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.173.905.832,00	1.134.074.325,00	(39.831.507,00)	96,61
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	408.098.975,00	386.506.552,00	(21.592.423,00)	94,71
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	408.098.975,00	386.506.552,00	(21.592.423,00)	94,71
03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	765.806.857,00	747.567.773,00	(18.239.084,00)	97,62
03.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	765.806.857,00	747.567.773,00	(18.239.084,00)	97,62
03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	66.665.842,00	62.515.000,00	(4.150.842,00)	93,77
03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	66.665.842,00	62.515.000,00	(4.150.842,00)	93,77
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	66.665.842,00	62.515.000,00	(4.150.842,00)	93,77
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.665.842,00	62.515.000,00	(4.150.842,00)	93,77
03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	146.199.310,00	107.936.400,00	(38.262.910,00)	73,83
03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	146.199.310,00	107.936.400,00	(38.262.910,00)	73,83
03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	20.165.795,00	0,00	(20.165.795,00)	0,00
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.165.795,00	0,00	(20.165.795,00)	0,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.165.795,00	0,00	(20.165.795,00)	0,00
03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	126.033.515,00	107.936.400,00	(18.097.115,00)	85,64
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	126.033.515,00	107.936.400,00	(18.097.115,00)	85,64
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.033.515,00	107.936.400,00	(18.097.115,00)	85,64
03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	141.854.554,00	122.188.000,00	(19.666.554,00)	86,14
03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	141.854.554,00	122.188.000,00	(19.666.554,00)	86,14
03.2.01.01	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	141.854.554,00	122.188.000,00	(19.666.554,00)	86,14
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	141.854.554,00	122.188.000,00	(19.666.554,00)	86,14
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.854.554,00	122.188.000,00	(19.666.554,00)	86,14
03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.723.341.676,00	4.134.166.576,00	(589.175.100,00)	87,53
03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	826.268.532,00	691.717.212,00	(134.551.320,00)	83,72
03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.374.800,00	4.266.800,00	(108.000,00)	97,53
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.374.800,00	4.266.800,00	(108.000,00)	97,53
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.374.800,00	4.266.800,00	(108.000,00)	97,53
03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	24.980.236,00	24.100.424,00	(879.812,00)	96,48
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	24.980.236,00	24.100.424,00	(879.812,00)	96,48
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.980.236,00	24.100.424,00	(879.812,00)	96,48
03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	145.318.968,00	97.937.265,00	(47.381.703,00)	67,39
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	145.318.968,00	97.937.265,00	(47.381.703,00)	67,39
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.318.968,00	97.937.265,00	(47.381.703,00)	67,39
03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan	166.100.000,00	131.295.000,00	(34.805.000,00)	79,05
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	166.100.000,00	131.295.000,00	(34.805.000,00)	79,05
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.100.000,00	131.295.000,00	(34.805.000,00)	79,05

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
03.2.01.07	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	445.494.528,00	413.317.723,00	(32.176.805,00)	92,78
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	445.494.528,00	413.317.723,00	(32.176.805,00)	92,78
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	445.494.528,00	413.317.723,00	(32.176.805,00)	92,78
03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	40.000.000,00	20.800.000,00	(19.200.000,00)	52,00
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	20.800.000,00	(19.200.000,00)	52,00
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	20.800.000,00	(19.200.000,00)	52,00
03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.084.574.005,00	2.067.064.141,00	(17.509.864,00)	99,16
03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.084.574.005,00	2.067.064.141,00	(17.509.864,00)	99,16
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.084.574.005,00	2.067.064.141,00	(17.509.864,00)	99,16
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.084.574.005,00	2.067.064.141,00	(17.509.864,00)	99,16
03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	1.434.099.139,00	1.089.300.223,00	(344.798.916,00)	75,96
03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	9.889.770,00	9.880.000,00	(9.770,00)	99,90
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.889.770,00	9.880.000,00	(9.770,00)	99,90
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.889.770,00	9.880.000,00	(9.770,00)	99,90
03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	431.050.571,00	217.147.127,00	(213.903.444,00)	50,38
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	431.050.571,00	217.147.127,00	(213.903.444,00)	50,38
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	431.050.571,00	217.147.127,00	(213.903.444,00)	50,38
03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	892.301.016,00	770.762.000,00	(121.539.016,00)	86,38
03.2.03.06.5.2	BELANJA MODAL	892.301.016,00	770.762.000,00	(121.539.016,00)	86,38
03.2.03.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.799.998,00	82.500.000,00	(44.299.998,00)	65,06
03.2.03.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	765.501.018,00	688.262.000,00	(77.239.018,00)	89,91
03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	59.750.000,00	57.760.000,00	(1.990.000,00)	96,67
03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	59.750.000,00	57.760.000,00	(1.990.000,00)	96,67

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
03.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.750.000,00	57.760.000,00	(1.990.000,00)	96,67
03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	41.107.782,00	33.751.096,00	(7.356.686,00)	82,10
03.2.03.09.5.1	BELANJA OPERASI	41.107.782,00	33.751.096,00	(7.356.686,00)	82,10
03.2.03.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.107.782,00	33.751.096,00	(7.356.686,00)	82,10
03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan	378.400.000,00	286.085.000,00	(92.315.000,00)	75,60
03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	378.400.000,00	286.085.000,00	(92.315.000,00)	75,60
03.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	378.400.000,00	286.085.000,00	(92.315.000,00)	75,60
03.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378.400.000,00	286.085.000,00	(92.315.000,00)	75,60
03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	59.484.433,00	44.721.784,00	(14.762.649,00)	75,18
03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan	13.519.711,00	11.705.284,00	(1.814.427,00)	86,58
03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang	13.519.711,00	11.705.284,00	(1.814.427,00)	86,58
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	13.519.711,00	11.705.284,00	(1.814.427,00)	86,58
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.519.711,00	11.705.284,00	(1.814.427,00)	86,58
03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	19.914.722,00	18.046.500,00	(1.868.222,00)	90,62
03.2.07.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan	19.914.722,00	18.046.500,00	(1.868.222,00)	90,62
03.2.07.02.5.1	BELANJA OPERASI	19.914.722,00	18.046.500,00	(1.868.222,00)	90,62
03.2.07.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.914.722,00	18.046.500,00	(1.868.222,00)	90,62
03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	6.160.000,00	3.240.000,00	(2.920.000,00)	52,60
03.2.12.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	6.160.000,00	3.240.000,00	(2.920.000,00)	52,60
03.2.12.04.5.1	BELANJA OPERASI	6.160.000,00	3.240.000,00	(2.920.000,00)	52,60
03.2.12.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.160.000,00	3.240.000,00	(2.920.000,00)	52,60
03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	19.890.000,00	11.730.000,00	(8.160.000,00)	58,97
03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	19.890.000,00	11.730.000,00	(8.160.000,00)	58,97

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
03.2.13.03.5.1	BELANJA OPERASI	19.890.000,00	11.730.000,00	(8.160.000,00)	58,97
03.2.13.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.890.000,00	11.730.000,00	(8.160.000,00)	58,97
03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.952.853.600,00	2.850.226.000,00	(102.627.600,00)	96,52
03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.881.153.600,00	2.787.251.000,00	(93.902.600,00)	96,74
03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.881.153.600,00	2.787.251.000,00	(93.902.600,00)	96,74
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.771.752.000,00	2.698.211.000,00	(73.541.000,00)	97,35
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.771.752.000,00	2.698.211.000,00	(73.541.000,00)	97,35
03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	109.401.600,00	89.040.000,00	(20.361.600,00)	81,39
03.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.401.600,00	89.040.000,00	(20.361.600,00)	81,39
03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	71.700.000,00	62.975.000,00	(8.725.000,00)	87,83
03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	71.700.000,00	62.975.000,00	(8.725.000,00)	87,83
03.2.02.07.5.2	BELANJA MODAL	71.700.000,00	62.975.000,00	(8.725.000,00)	87,83
03.2.02.07.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	71.700.000,00	62.975.000,00	(8.725.000,00)	87,83
03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	86.918.315,00	83.640.250,00	(3.278.065,00)	96,23
03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	86.918.315,00	83.640.250,00	(3.278.065,00)	96,23
03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	86.918.315,00	83.640.250,00	(3.278.065,00)	96,23
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	86.918.315,00	83.640.250,00	(3.278.065,00)	96,23
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.918.315,00	83.640.250,00	(3.278.065,00)	96,23
03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	12.142.932.655,00	11.535.233.209,00	(607.699.446,00)	95,00
03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.034.834.067,00	930.530.162,00	(104.303.905,00)	89,92
03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1.034.834.067,00	930.530.162,00	(104.303.905,00)	89,92
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	50.722.537,00	42.889.750,00	(7.832.787,00)	84,56
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.722.537,00	42.889.750,00	(7.832.787,00)	84,56

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	984.111.530,00	887.640.412,00	(96.471.118,00)	90,20
03.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.315.000,00	36.950.000,00	(3.365.000,00)	91,65
03.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	943.796.530,00	850.690.412,00	(93.106.118,00)	90,13
03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	599.875.234,00	539.102.570,00	(60.772.664,00)	89,87
03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	599.875.234,00	539.102.570,00	(60.772.664,00)	89,87
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	599.875.234,00	539.102.570,00	(60.772.664,00)	89,87
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	599.875.234,00	539.102.570,00	(60.772.664,00)	89,87
03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.198.223.354,00	1.843.875.500,00	(354.347.854,00)	83,88
03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	153.496.874,00	125.627.500,00	(27.869.374,00)	81,84
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	153.496.874,00	125.627.500,00	(27.869.374,00)	81,84
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.496.874,00	125.627.500,00	(27.869.374,00)	81,84
03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	2.044.726.480,00	1.718.248.000,00	(326.478.480,00)	84,03
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.044.726.480,00	1.718.248.000,00	(326.478.480,00)	84,03
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.044.726.480,00	1.718.248.000,00	(326.478.480,00)	84,03
03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	8.310.000.000,00	8.221.724.977,00	(88.275.023,00)	98,94
03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	8.310.000.000,00	8.221.724.977,00	(88.275.023,00)	98,94
03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.310.000.000,00	8.221.724.977,00	(88.275.023,00)	98,94
03.2.04.02.5.1.05	Belanja Hibah	8.310.000.000,00	8.221.724.977,00	(88.275.023,00)	98,94
03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.335.927.973,00	1.243.816.255,00	(92.111.718,00)	93,11
03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.335.927.973,00	1.243.816.255,00	(92.111.718,00)	93,11
03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1.335.927.973,00	1.243.816.255,00	(92.111.718,00)	93,11
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.335.927.973,00	1.243.816.255,00	(92.111.718,00)	93,11
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.085.927.973,00	993.816.255,00	(92.111.718,00)	91,52

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
03.2.01.01.5.1.05	Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00
03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.066.309.223,00	1.963.768.082,00	(102.541.141,00)	95,04
03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah	48.675.000,00	36.360.000,00	(12.315.000,00)	74,70
03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	48.675.000,00	36.360.000,00	(12.315.000,00)	74,70
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.680.000,00	5.060.000,00	(8.620.000,00)	36,99
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.680.000,00	5.060.000,00	(8.620.000,00)	36,99
03.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	34.995.000,00	31.300.000,00	(3.695.000,00)	89,44
03.2.01.01.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	34.995.000,00	31.300.000,00	(3.695.000,00)	89,44
03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.017.634.223,00	1.927.408.082,00	(90.226.141,00)	95,53
03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	2.017.634.223,00	1.927.408.082,00	(90.226.141,00)	95,53
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.017.634.223,00	1.927.408.082,00	(90.226.141,00)	95,53
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	476.834.223,00	386.608.082,00	(90.226.141,00)	81,08
03.2.02.01.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.540.800.000,00	1.540.800.000,00	0,00	100,00
03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	488.761.957,00	250.418.488,00	(238.343.469,00)	51,24
03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	488.761.957,00	250.418.488,00	(238.343.469,00)	51,24
03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	396.675.411,00	161.542.062,00	(235.133.349,00)	40,72
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	196.675.411,00	161.542.062,00	(35.133.349,00)	82,14
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.675.411,00	161.542.062,00	(35.133.349,00)	82,14
03.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
03.2.01.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	92.086.546,00	88.876.426,00	(3.210.120,00)	96,51
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	92.086.546,00	88.876.426,00	(3.210.120,00)	96,51
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.086.546,00	88.876.426,00	(3.210.120,00)	96,51

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	14.598.659.882,00	13.599.572.850,00	(999.087.032,00)	93,16
03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	57.886.000,00	42.029.550,00	(15.856.450,00)	72,61
03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	57.886.000,00	42.029.550,00	(15.856.450,00)	72,61
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	57.886.000,00	42.029.550,00	(15.856.450,00)	72,61
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.886.000,00	42.029.550,00	(15.856.450,00)	72,61
03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	14.540.773.882,00	13.557.543.300,00	(983.230.582,00)	93,24
03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00	100,00
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00	100,00
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00	100,00
03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	14.083.273.893,00	13.127.852.000,00	(955.421.893,00)	93,22
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.843.895.617,00	4.537.754.000,00	(306.141.617,00)	93,68
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	673.074.677,00	672.940.000,00	(134.677,00)	99,98
03.2.02.03.5.1.05	Belanja Hibah	4.170.820.940,00	3.864.814.000,00	(306.006.940,00)	92,66
03.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	9.239.378.276,00	8.590.098.000,00	(649.280.276,00)	92,97
03.2.02.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.239.378.276,00	8.590.098.000,00	(649.280.276,00)	92,97
03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	299.999.989,00	272.191.300,00	(27.808.689,00)	90,73
03.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	299.999.989,00	272.191.300,00	(27.808.689,00)	90,73
03.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	181.627.300,00	(18.372.700,00)	90,81
03.2.02.09.5.1.05	Belanja Hibah	99.999.989,00	90.564.000,00	(9.435.989,00)	90,56
03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	739.301.821,00	626.076.750,00	(113.225.071,00)	84,68
03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	656.159.520,00	573.491.000,00	(82.668.520,00)	87,40
03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	589.389.520,00	512.718.500,00	(76.671.020,00)	86,99
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	103.807.728,00	56.662.000,00	(47.145.728,00)	54,58

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.807.728,00	56.662.000,00	(47.145.728,00)	54,58
03.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	485.581.792,00	456.056.500,00	(29.525.292,00)	93,92
03.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	161.968.520,00	156.500.000,00	(5.468.520,00)	96,62
03.2.01.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	323.613.272,00	299.556.500,00	(24.056.772,00)	92,57
03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	66.770.000,00	60.772.500,00	(5.997.500,00)	91,02
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	66.770.000,00	60.772.500,00	(5.997.500,00)	91,02
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.770.000,00	60.772.500,00	(5.997.500,00)	91,02
03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	83.142.301,00	52.585.750,00	(30.556.551,00)	63,25
03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	45.182.301,00	27.453.250,00	(17.729.051,00)	60,76
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	45.182.301,00	27.453.250,00	(17.729.051,00)	60,76
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.182.301,00	27.453.250,00	(17.729.051,00)	60,76
03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	37.960.000,00	25.132.500,00	(12.827.500,00)	66,21
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	37.960.000,00	25.132.500,00	(12.827.500,00)	66,21
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.960.000,00	25.132.500,00	(12.827.500,00)	66,21
03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	11.890.000,00	5.987.500,00	(5.902.500,00)	50,36
03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	11.890.000,00	5.987.500,00	(5.902.500,00)	50,36
03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional	6.425.000,00	2.915.000,00	(3.510.000,00)	45,37
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.425.000,00	2.915.000,00	(3.510.000,00)	45,37
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.425.000,00	2.915.000,00	(3.510.000,00)	45,37
03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis	5.465.000,00	3.072.500,00	(2.392.500,00)	56,22
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.465.000,00	3.072.500,00	(2.392.500,00)	56,22
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.465.000,00	3.072.500,00	(2.392.500,00)	56,22
03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.636.958.144,00	1.455.753.288,00	(181.204.856,00)	88,93

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	446.275.476,00	402.063.900,00	(44.211.576,00)	90,09
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	241.839.150,00	199.106.900,00	(42.732.250,00)	82,33
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	241.839.150,00	199.106.900,00	(42.732.250,00)	82,33
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.839.150,00	199.106.900,00	(42.732.250,00)	82,33
03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	204.436.326,00	202.957.000,00	(1.479.326,00)	99,28
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	204.436.326,00	202.957.000,00	(1.479.326,00)	99,28
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.436.326,00	202.957.000,00	(1.479.326,00)	99,28
03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	162.840.082,00	151.229.000,00	(11.611.082,00)	92,87
03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	162.840.082,00	151.229.000,00	(11.611.082,00)	92,87
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	162.840.082,00	151.229.000,00	(11.611.082,00)	92,87
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.840.082,00	151.229.000,00	(11.611.082,00)	92,87
03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.027.842.586,00	902.460.388,00	(125.382.198,00)	87,80
03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	360.007.634,00	323.443.651,00	(36.563.983,00)	89,84
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	360.007.634,00	323.443.651,00	(36.563.983,00)	89,84
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.007.634,00	323.443.651,00	(36.563.983,00)	89,84
03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	281.683.800,00	261.865.500,00	(19.818.300,00)	92,96
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	204.538.800,00	194.190.000,00	(10.348.800,00)	94,94
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.538.800,00	194.190.000,00	(10.348.800,00)	94,94
03.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	77.145.000,00	67.675.500,00	(9.469.500,00)	87,73
03.2.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.945.000,00	49.375.500,00	(5.569.500,00)	89,86
03.2.03.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.200.000,00	18.300.000,00	(3.900.000,00)	82,43
03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	386.151.152,00	317.151.237,00	(68.999.915,00)	82,13
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	386.151.152,00	317.151.237,00	(68.999.915,00)	82,13

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386.151.152,00	317.151.237,00	(68.999.915,00)	82,13
03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	146.476.998,00	98.905.010,00	(47.571.988,00)	67,52
03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	29.085.036,00	20.607.600,00	(8.477.436,00)	70,85
03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4.121.889,00	3.383.500,00	(738.389,00)	82,09
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.121.889,00	3.383.500,00	(738.389,00)	82,09
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.121.889,00	3.383.500,00	(738.389,00)	82,09
03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	7.439.775,00	4.986.900,00	(2.452.875,00)	67,03
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	7.439.775,00	4.986.900,00	(2.452.875,00)	67,03
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.439.775,00	4.986.900,00	(2.452.875,00)	67,03
03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4.999.954,00	3.923.300,00	(1.076.654,00)	78,47
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.999.954,00	3.923.300,00	(1.076.654,00)	78,47
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.954,00	3.923.300,00	(1.076.654,00)	78,47
03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12.523.418,00	8.313.900,00	(4.209.518,00)	66,39
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	12.523.418,00	8.313.900,00	(4.209.518,00)	66,39
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.523.418,00	8.313.900,00	(4.209.518,00)	66,39
03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	80.373.231,00	46.774.610,00	(33.598.621,00)	58,20
03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	52.711.600,00	37.084.610,00	(15.626.990,00)	70,35
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	52.711.600,00	37.084.610,00	(15.626.990,00)	70,35
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.711.600,00	37.084.610,00	(15.626.990,00)	70,35
03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8.905.813,00	7.005.000,00	(1.900.813,00)	78,66
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	8.905.813,00	7.005.000,00	(1.900.813,00)	78,66
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.905.813,00	7.005.000,00	(1.900.813,00)	78,66
03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3.764.611,00	2.025.000,00	(1.739.611,00)	53,79

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
03.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.764.611,00	2.025.000,00	(1.739.611,00)	53,79
03.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.764.611,00	2.025.000,00	(1.739.611,00)	53,79
03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	14.991.207,00	660.000,00	(14.331.207,00)	4,40
03.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	14.991.207,00	660.000,00	(14.331.207,00)	4,40
03.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.991.207,00	660.000,00	(14.331.207,00)	4,40
03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	37.018.731,00	31.522.800,00	(5.495.931,00)	85,15
03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.999.472,00	1.800.000,00	(199.472,00)	90,02
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.999.472,00	1.800.000,00	(199.472,00)	90,02
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.999.472,00	1.800.000,00	(199.472,00)	90,02
03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	13.879.472,00	9.415.000,00	(4.464.472,00)	67,83
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	13.879.472,00	9.415.000,00	(4.464.472,00)	67,83
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.879.472,00	9.415.000,00	(4.464.472,00)	67,83
03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16.389.647,00	15.883.400,00	(506.247,00)	96,91
03.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	16.389.647,00	15.883.400,00	(506.247,00)	96,91
03.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.389.647,00	15.883.400,00	(506.247,00)	96,91
03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4.750.140,00	4.424.400,00	(325.740,00)	93,14
03.2.03.07.5.1	BELANJA OPERASI	4.750.140,00	4.424.400,00	(325.740,00)	93,14
03.2.03.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.750.140,00	4.424.400,00	(325.740,00)	93,14
03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	9.588.994.567,00	8.581.056.686,00	(1.007.937.881,00)	89,49
03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	9.588.994.567,00	8.581.056.686,00	(1.007.937.881,00)	89,49
03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	39.951.796,00	30.479.000,00	(9.472.796,00)	76,29
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	39.951.796,00	30.479.000,00	(9.472.796,00)	76,29
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.951.796,00	30.479.000,00	(9.472.796,00)	76,29

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	5.106.563.399,00	4.439.889.461,00	(666.673.938,00)	86,94
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.106.563.399,00	4.439.889.461,00	(666.673.938,00)	86,94
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.106.563.399,00	4.439.889.461,00	(666.673.938,00)	86,94
03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	20.746.298,00	15.880.000,00	(4.866.298,00)	76,54
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	20.746.298,00	15.880.000,00	(4.866.298,00)	76,54
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.746.298,00	15.880.000,00	(4.866.298,00)	76,54
03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	271.942.850,00	261.999.500,00	(9.943.350,00)	96,34
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	271.942.850,00	261.999.500,00	(9.943.350,00)	96,34
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.942.850,00	261.999.500,00	(9.943.350,00)	96,34
03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	70.815.000,00	53.708.000,00	(17.107.000,00)	75,84
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	70.815.000,00	53.708.000,00	(17.107.000,00)	75,84
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.815.000,00	53.708.000,00	(17.107.000,00)	75,84
03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	465.630.149,00	286.882.575,00	(178.747.574,00)	61,61
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	83.820.149,00	58.880.575,00	(24.939.574,00)	70,25
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.820.149,00	58.880.575,00	(24.939.574,00)	70,25
03.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	381.810.000,00	228.002.000,00	(153.808.000,00)	59,72
03.2.01.07.5.2.01	Belanja Modal Tanah	381.810.000,00	228.002.000,00	(153.808.000,00)	59,72
03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	75.686.919,00	71.831.975,00	(3.854.944,00)	94,91
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	75.686.919,00	71.831.975,00	(3.854.944,00)	94,91
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.686.919,00	71.831.975,00	(3.854.944,00)	94,91
03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.381.191.731,00	3.284.840.825,00	(96.350.906,00)	97,15
03.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	87.591.850,00	74.690.825,00	(12.901.025,00)	85,27
03.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.591.850,00	74.690.825,00	(12.901.025,00)	85,27

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
03.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	3.293.599.881,00	3.210.150.000,00	(83.449.881,00)	97,47
03.2.01.09.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.293.599.881,00	3.210.150.000,00	(83.449.881,00)	97,47
03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	64.944.850,00	52.188.600,00	(12.756.250,00)	80,36
03.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	64.944.850,00	52.188.600,00	(12.756.250,00)	80,36
03.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.944.850,00	52.188.600,00	(12.756.250,00)	80,36
03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	44.536.600,00	44.534.000,00	(2.600,00)	99,99
03.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	44.536.600,00	44.534.000,00	(2.600,00)	99,99
03.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.536.600,00	44.534.000,00	(2.600,00)	99,99
03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	46.984.975,00	38.822.750,00	(8.162.225,00)	82,63
03.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	46.984.975,00	38.822.750,00	(8.162.225,00)	82,63
03.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.984.975,00	38.822.750,00	(8.162.225,00)	82,63
03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	467.737.810,00	417.981.832,00	(49.755.978,00)	89,36
03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	467.737.810,00	417.981.832,00	(49.755.978,00)	89,36
03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	174.409.500,00	160.741.000,00	(13.668.500,00)	92,16
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	174.409.500,00	160.741.000,00	(13.668.500,00)	92,16
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.409.500,00	160.741.000,00	(13.668.500,00)	92,16
03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	293.328.310,00	257.240.832,00	(36.087.478,00)	87,70
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	293.328.310,00	257.240.832,00	(36.087.478,00)	87,70
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.328.310,00	257.240.832,00	(36.087.478,00)	87,70
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.685.636.442,00	3.252.767.232,00	(432.869.210,00)	88,26
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	80.531.707,00	47.116.366,00	(33.415.341,00)	58,51
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.109.713,00	7.110.000,00	(4.999.713,00)	58,71
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.109.713,00	7.110.000,00	(4.999.713,00)	58,71

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.109.713,00	7.110.000,00	(4.999.713,00)	58,71
03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	37.162.589,00	29.473.866,00	(7.688.723,00)	79,31
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	37.162.589,00	29.473.866,00	(7.688.723,00)	79,31
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.162.589,00	29.473.866,00	(7.688.723,00)	79,31
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	31.259.405,00	10.532.500,00	(20.726.905,00)	33,69
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	31.259.405,00	10.532.500,00	(20.726.905,00)	33,69
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.259.405,00	10.532.500,00	(20.726.905,00)	33,69
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.605.104.735,00	3.205.650.866,00	(399.453.869,00)	88,92
03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	19.995.957,00	16.870.000,00	(3.125.957,00)	84,37
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	19.995.957,00	16.870.000,00	(3.125.957,00)	84,37
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.995.957,00	16.870.000,00	(3.125.957,00)	84,37
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.520.550.444,00	1.393.544.160,00	(127.006.284,00)	91,65
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	164.882.562,00	161.881.000,00	(3.001.562,00)	98,18
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.882.562,00	161.881.000,00	(3.001.562,00)	98,18
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	1.355.667.882,00	1.231.663.160,00	(124.004.722,00)	90,85
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.029.325,00	27.435.908,00	(10.593.417,00)	72,14
03.2.02.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	433.679.622,00	396.693.225,00	(36.986.397,00)	91,47
03.2.02.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	883.958.935,00	807.534.027,00	(76.424.908,00)	91,35
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.314.081.714,00	1.055.957.106,00	(258.124.608,00)	80,36
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.314.081.714,00	1.055.957.106,00	(258.124.608,00)	80,36
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.314.081.714,00	1.055.957.106,00	(258.124.608,00)	80,36
03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	750.476.620,00	739.279.600,00	(11.197.020,00)	98,51

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	750.476.620,00	739.279.600,00	(11.197.020,00)	98,51
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.476.620,00	739.279.600,00	(11.197.020,00)	98,51
03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA	1.587.111.014,00	1.575.021.900,00	(12.089.114,00)	99,24
03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan	1.587.111.014,00	1.575.021.900,00	(12.089.114,00)	99,24
03.2.01.03	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan	1.587.111.014,00	1.575.021.900,00	(12.089.114,00)	99,24
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.587.111.014,00	1.575.021.900,00	(12.089.114,00)	99,24
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.412.464,00	110.323.350,00	(12.089.114,00)	90,12
03.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	1.464.698.550,00	1.464.698.550,00	0,00	100,00
04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	179.934.482,00	41.562.000,00	(138.372.482,00)	23,10
04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	179.934.482,00	41.562.000,00	(138.372.482,00)	23,10
04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	179.934.482,00	41.562.000,00	(138.372.482,00)	23,10
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	163.434.482,00	26.612.000,00	(136.822.482,00)	16,28
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.434.482,00	26.612.000,00	(136.822.482,00)	16,28
04.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	16.500.000,00	14.950.000,00	(1.550.000,00)	90,61
04.2.01.01.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.500.000,00	14.950.000,00	(1.550.000,00)	90,61
04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	322.592.700,00	317.544.654,00	(5.048.046,00)	98,44
04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	322.592.700,00	317.544.654,00	(5.048.046,00)	98,44
04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	322.592.700,00	317.544.654,00	(5.048.046,00)	98,44
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	274.896.000,00	269.859.054,00	(5.036.946,00)	98,17
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.896.000,00	269.859.054,00	(5.036.946,00)	98,17
04.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	47.696.700,00	47.685.600,00	(11.100,00)	99,98
04.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.696.700,00	47.685.600,00	(11.100,00)	99,98
04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.712.818.176,00	972.879.755,00	(3.739.938.421,00)	20,64

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	4.712.818.176,00	972.879.755,00	(3.739.938.421,00)	20,64
04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	4.434.850.000,00	739.850.000,00	(3.695.000.000,00)	16,68
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.434.850.000,00	739.850.000,00	(3.695.000.000,00)	16,68
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	3.050.000,00	(2.000.000,00)	60,40
04.2.01.01.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.429.800.000,00	736.800.000,00	(3.693.000.000,00)	16,63
04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	72.359.995,00	55.888.350,00	(16.471.645,00)	77,24
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	72.359.995,00	55.888.350,00	(16.471.645,00)	77,24
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.359.995,00	55.888.350,00	(16.471.645,00)	77,24
04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	205.608.181,00	177.141.405,00	(28.466.776,00)	86,15
04.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	58.753.546,00	41.324.076,00	(17.429.470,00)	70,33
04.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.753.546,00	41.324.076,00	(17.429.470,00)	70,33
04.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	146.854.635,00	135.817.329,00	(11.037.306,00)	92,48
04.2.01.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.854.635,00	135.817.329,00	(11.037.306,00)	92,48
04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	120.333.024,00	115.749.343,00	(4.583.681,00)	96,19
04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	95.813.148,00	92.658.764,00	(3.154.384,00)	96,71
04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	51.393.481,00	49.831.284,00	(1.562.197,00)	96,96
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	51.393.481,00	49.831.284,00	(1.562.197,00)	96,96
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.393.481,00	49.831.284,00	(1.562.197,00)	96,96
04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	9.406.515,00	8.504.972,00	(901.543,00)	90,42
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.406.515,00	8.504.972,00	(901.543,00)	90,42
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.406.515,00	8.504.972,00	(901.543,00)	90,42
04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	35.013.152,00	34.322.508,00	(690.644,00)	98,03
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	35.013.152,00	34.322.508,00	(690.644,00)	98,03

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.013.152,00	34.322.508,00	(690.644,00)	98,03
04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.490.000,00	2.400.000,00	(90.000,00)	96,39
04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	2.490.000,00	2.400.000,00	(90.000,00)	96,39
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.490.000,00	2.400.000,00	(90.000,00)	96,39
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.490.000,00	2.400.000,00	(90.000,00)	96,39
04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	22.029.876,00	20.690.579,00	(1.339.297,00)	93,92
04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	22.029.876,00	20.690.579,00	(1.339.297,00)	93,92
04.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	22.029.876,00	20.690.579,00	(1.339.297,00)	93,92
04.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.029.876,00	20.690.579,00	(1.339.297,00)	93,92
04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	51.918.551,00	32.191.000,00	(19.727.551,00)	62,00
04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	51.918.551,00	32.191.000,00	(19.727.551,00)	62,00
04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	51.918.551,00	32.191.000,00	(19.727.551,00)	62,00
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	51.918.551,00	32.191.000,00	(19.727.551,00)	62,00
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.918.551,00	32.191.000,00	(19.727.551,00)	62,00
04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	660.776.487,00	603.909.494,00	(56.866.993,00)	91,39
04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.	660.776.487,00	603.909.494,00	(56.866.993,00)	91,39
04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	44.430.000,00	22.650.000,00	(21.780.000,00)	50,98
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	44.430.000,00	22.650.000,00	(21.780.000,00)	50,98
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.430.000,00	22.650.000,00	(21.780.000,00)	50,98
04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	616.346.487,00	581.259.494,00	(35.086.993,00)	94,31
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	527.979.590,00	504.297.494,00	(23.682.096,00)	95,51
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	527.979.590,00	504.297.494,00	(23.682.096,00)	95,51
04.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	88.366.897,00	76.962.000,00	(11.404.897,00)	87,09

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
04.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.166.897,00	58.662.000,00	(7.504.897,00)	88,66
04.2.01.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.200.000,00	18.300.000,00	(3.900.000,00)	82,43
04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	11.596.474.919,00	11.275.609.156,00	(320.865.763,00)	97,23
04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	11.596.474.919,00	11.275.609.156,00	(320.865.763,00)	97,23
04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	11.596.474.919,00	11.275.609.156,00	(320.865.763,00)	97,23
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	664.932.331,00	594.690.350,00	(70.241.981,00)	89,44
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	664.932.331,00	594.690.350,00	(70.241.981,00)	89,44
04.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	10.931.542.588,00	10.680.918.806,00	(250.623.782,00)	97,71
04.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.925.634,00	110.055.000,00	(12.870.634,00)	89,53
04.2.01.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.905.942.266,00	7.698.023.805,00	(207.918.461,00)	97,37
04.2.01.04.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.902.674.688,00	2.872.840.001,00	(29.834.687,00)	98,97
04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	276.170.566,00	250.335.736,00	(25.834.830,00)	90,65
04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	23.156.664,00	22.738.400,00	(418.264,00)	98,19
04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	23.156.664,00	22.738.400,00	(418.264,00)	98,19
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	23.156.664,00	22.738.400,00	(418.264,00)	98,19
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.156.664,00	22.738.400,00	(418.264,00)	98,19
04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	253.013.902,00	227.597.336,00	(25.416.566,00)	89,95
04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	253.013.902,00	227.597.336,00	(25.416.566,00)	89,95
04.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	253.013.902,00	227.597.336,00	(25.416.566,00)	89,95
04.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.013.902,00	227.597.336,00	(25.416.566,00)	89,95
04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.446.540.758,00	2.915.472.445,00	(531.068.313,00)	84,59
04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	3.446.540.758,00	2.915.472.445,00	(531.068.313,00)	84,59
04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	67.587.350,00	58.773.000,00	(8.814.350,00)	86,96

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	45.587.350,00	39.773.000,00	(5.814.350,00)	87,25
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.587.350,00	39.773.000,00	(5.814.350,00)	87,25
04.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	22.000.000,00	19.000.000,00	(3.000.000,00)	86,36
04.2.01.01.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.000.000,00	19.000.000,00	(3.000.000,00)	86,36
04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	66.665.473,00	25.201.800,00	(41.463.673,00)	37,80
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	66.665.473,00	25.201.800,00	(41.463.673,00)	37,80
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.665.473,00	25.201.800,00	(41.463.673,00)	37,80
04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2.544.374.609,00	2.197.321.345,00	(347.053.264,00)	86,36
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.544.374.609,00	2.197.321.345,00	(347.053.264,00)	86,36
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.544.374.609,00	2.197.321.345,00	(347.053.264,00)	86,36
04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	159.992.317,00	136.311.844,00	(23.680.473,00)	85,20
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	159.992.317,00	136.311.844,00	(23.680.473,00)	85,20
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.992.317,00	136.311.844,00	(23.680.473,00)	85,20
04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	393.072.414,00	302.039.700,00	(91.032.714,00)	76,84
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	376.051.429,00	286.567.700,00	(89.483.729,00)	76,20
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.051.429,00	286.567.700,00	(89.483.729,00)	76,20
04.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	17.020.985,00	15.472.000,00	(1.548.985,00)	90,90
04.2.01.08.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.020.985,00	15.472.000,00	(1.548.985,00)	90,90
04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	154.882.072,00	149.434.756,00	(5.447.316,00)	96,48
04.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	154.882.072,00	149.434.756,00	(5.447.316,00)	96,48
04.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.882.072,00	149.434.756,00	(5.447.316,00)	96,48
04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	18.817.946,00	17.270.000,00	(1.547.946,00)	91,77
04.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	18.817.946,00	17.270.000,00	(1.547.946,00)	91,77

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
04.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.817.946,00	17.270.000,00	(1.547.946,00)	91,77
04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	41.148.577,00	29.120.000,00	(12.028.577,00)	70,77
04.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	41.148.577,00	29.120.000,00	(12.028.577,00)	70,77
04.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.148.577,00	29.120.000,00	(12.028.577,00)	70,77
04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.481.507.100,00	1.294.974.801,00	(1.186.532.299,00)	52,19
04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.481.507.100,00	1.294.974.801,00	(1.186.532.299,00)	52,19
04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	374.999.992,00	373.395.000,00	(1.604.992,00)	99,57
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.560.000,00	3.495.000,00	(65.000,00)	98,17
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.560.000,00	3.495.000,00	(65.000,00)	98,17
04.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	371.439.992,00	369.900.000,00	(1.539.992,00)	99,59
04.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	371.439.992,00	369.900.000,00	(1.539.992,00)	99,59
04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	115.901.357,00	104.744.301,00	(11.157.056,00)	90,37
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	115.901.357,00	104.744.301,00	(11.157.056,00)	90,37
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.901.357,00	104.744.301,00	(11.157.056,00)	90,37
04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	159.998.550,00	147.277.048,00	(12.721.502,00)	92,05
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	159.998.550,00	147.277.048,00	(12.721.502,00)	92,05
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.998.550,00	147.277.048,00	(12.721.502,00)	92,05
04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	1.728.220.000,00	588.347.502,00	(1.139.872.498,00)	34,04
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.728.220.000,00	588.347.502,00	(1.139.872.498,00)	34,04
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.728.220.000,00	588.347.502,00	(1.139.872.498,00)	34,04
04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	102.387.201,00	81.210.950,00	(21.176.251,00)	79,32
04.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	102.387.201,00	81.210.950,00	(21.176.251,00)	79,32
04.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.387.201,00	81.210.950,00	(21.176.251,00)	79,32

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	115.856.646,00	87.437.750,00	(28.418.896,00)	75,47
04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	115.856.646,00	87.437.750,00	(28.418.896,00)	75,47
04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	42.380.700,00	40.938.750,00	(1.441.950,00)	96,60
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	42.380.700,00	40.938.750,00	(1.441.950,00)	96,60
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.380.700,00	40.938.750,00	(1.441.950,00)	96,60
04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	51.990.000,00	25.062.500,00	(26.927.500,00)	48,21
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	51.990.000,00	25.062.500,00	(26.927.500,00)	48,21
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.990.000,00	25.062.500,00	(26.927.500,00)	48,21
04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	21.485.946,00	21.436.500,00	(49.446,00)	99,77
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	21.485.946,00	21.436.500,00	(49.446,00)	99,77
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.485.946,00	21.436.500,00	(49.446,00)	99,77
04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	675.000.000,00	517.369.714,00	(157.630.286,00)	76,65
04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	675.000.000,00	517.369.714,00	(157.630.286,00)	76,65
04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	675.000.000,00	517.369.714,00	(157.630.286,00)	76,65
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	675.000.000,00	517.369.714,00	(157.630.286,00)	76,65
04.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	675.000.000,00	517.369.714,00	(157.630.286,00)	76,65
04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	341.750.110,00	301.913.158,00	(39.836.952,00)	88,34
04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	341.750.110,00	301.913.158,00	(39.836.952,00)	88,34
04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	341.750.110,00	301.913.158,00	(39.836.952,00)	88,34
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	341.750.110,00	301.913.158,00	(39.836.952,00)	88,34
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.750.110,00	301.913.158,00	(39.836.952,00)	88,34
04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	328.306.687,00	285.096.540,00	(43.210.147,00)	86,84
04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	29.866.610,00	25.587.800,00	(4.278.810,00)	85,67

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	29.866.610,00	25.587.800,00	(4.278.810,00)	85,67
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	29.866.610,00	25.587.800,00	(4.278.810,00)	85,67
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.866.610,00	25.587.800,00	(4.278.810,00)	85,67
04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	24.901.530,00	17.870.600,00	(7.030.930,00)	71,77
04.2.03.01	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.901.530,00	17.870.600,00	(7.030.930,00)	71,77
04.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.901.530,00	17.870.600,00	(7.030.930,00)	71,77
04.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.901.530,00	17.870.600,00	(7.030.930,00)	71,77
04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	273.538.547,00	241.638.140,00	(31.900.407,00)	88,34
04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	273.538.547,00	241.638.140,00	(31.900.407,00)	88,34
04.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	273.538.547,00	241.638.140,00	(31.900.407,00)	88,34
04.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.520.266,00	89.924.600,00	(31.595.666,00)	74,00
04.2.04.02.5.1.05	Belanja Hibah	152.018.281,00	151.713.540,00	(304.741,00)	99,80
04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	619.160.328,00	483.425.992,00	(135.734.336,00)	78,08
04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	555.782.579,00	442.896.450,00	(112.886.129,00)	79,69
04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	36.796.990,00	34.255.750,00	(2.541.240,00)	93,09
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	36.796.990,00	34.255.750,00	(2.541.240,00)	93,09
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.796.990,00	34.255.750,00	(2.541.240,00)	93,09
04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	518.985.589,00	408.640.700,00	(110.344.889,00)	78,74
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	420.784.339,00	312.960.700,00	(107.823.639,00)	74,38
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.784.339,00	312.960.700,00	(107.823.639,00)	74,38
04.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	98.201.250,00	95.680.000,00	(2.521.250,00)	97,43
04.2.01.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.201.250,00	95.680.000,00	(2.521.250,00)	97,43
04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	20.963.000,00	14.470.000,00	(6.493.000,00)	69,03

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
04.2.02.03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20.963.000,00	14.470.000,00	(6.493.000,00)	69,03
04.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	20.963.000,00	14.470.000,00	(6.493.000,00)	69,03
04.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.963.000,00	14.470.000,00	(6.493.000,00)	69,03
04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner	42.414.749,00	26.059.542,00	(16.355.207,00)	61,44
04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	42.414.749,00	26.059.542,00	(16.355.207,00)	61,44
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	42.414.749,00	26.059.542,00	(16.355.207,00)	61,44
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.414.749,00	26.059.542,00	(16.355.207,00)	61,44
04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	329.600.268,00	323.832.250,00	(5.768.018,00)	98,25
04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	319.600.268,00	313.857.250,00	(5.743.018,00)	98,20
04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.797.500,00	(202.500,00)	97,98
04.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.797.500,00	(202.500,00)	97,98
04.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.797.500,00	(202.500,00)	97,98
04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	309.600.268,00	304.059.750,00	(5.540.518,00)	98,21
04.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	309.600.268,00	304.059.750,00	(5.540.518,00)	98,21
04.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.600.268,00	304.059.750,00	(5.540.518,00)	98,21
04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.975.000,00	(25.000,00)	99,75
04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	10.000.000,00	9.975.000,00	(25.000,00)	99,75
04.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.975.000,00	(25.000,00)	99,75
04.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.975.000,00	(25.000,00)	99,75
04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	69.598.532,00	46.514.600,00	(23.083.932,00)	66,83
04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	69.598.532,00	46.514.600,00	(23.083.932,00)	66,83
04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi	69.598.532,00	46.514.600,00	(23.083.932,00)	66,83
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	69.598.532,00	46.514.600,00	(23.083.932,00)	66,83

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.598.532,00	46.514.600,00	(23.083.932,00)	66,83
04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.676.730.461,00	1.044.747.964,00	(631.982.497,00)	62,31
04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.676.730.461,00	1.044.747.964,00	(631.982.497,00)	62,31
04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	62.985.110,00	26.671.344,00	(36.313.766,00)	42,35
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	62.985.110,00	26.671.344,00	(36.313.766,00)	42,35
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.985.110,00	26.671.344,00	(36.313.766,00)	42,35
04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	414.701.402,00	151.262.977,00	(263.438.425,00)	36,48
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	414.701.402,00	151.262.977,00	(263.438.425,00)	36,48
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	414.701.402,00	151.262.977,00	(263.438.425,00)	36,48
04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	309.322.801,00	243.148.293,00	(66.174.508,00)	78,61
04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	309.322.801,00	243.148.293,00	(66.174.508,00)	78,61
04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.322.801,00	243.148.293,00	(66.174.508,00)	78,61
04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	51.270.000,00	3.300.000,00	(47.970.000,00)	6,44
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	51.270.000,00	3.300.000,00	(47.970.000,00)	6,44
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.270.000,00	3.300.000,00	(47.970.000,00)	6,44
04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	190.017.356,00	143.205.000,00	(46.812.356,00)	75,36
04.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	190.017.356,00	143.205.000,00	(46.812.356,00)	75,36
04.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.017.356,00	143.205.000,00	(46.812.356,00)	75,36
04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	23.355.000,00	11.325.000,00	(12.030.000,00)	48,49
04.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	23.355.000,00	11.325.000,00	(12.030.000,00)	48,49
04.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.355.000,00	11.325.000,00	(12.030.000,00)	48,49
04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	540.295.657,00	391.751.600,00	(148.544.057,00)	72,51
04.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	540.295.657,00	391.751.600,00	(148.544.057,00)	72,51

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
04.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	540.295.657,00	391.751.600,00	(148.544.057,00)	72,51
04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	34.780.000,00	30.403.750,00	(4.376.250,00)	87,42
04.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	34.780.000,00	30.403.750,00	(4.376.250,00)	87,42
04.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.780.000,00	30.403.750,00	(4.376.250,00)	87,42
04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	50.003.135,00	43.680.000,00	(6.323.135,00)	87,35
04.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	50.003.135,00	43.680.000,00	(6.323.135,00)	87,35
04.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.003.135,00	43.680.000,00	(6.323.135,00)	87,35
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	57.117.234,00	42.637.500,00	(14.479.734,00)	74,65
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	57.117.234,00	42.637.500,00	(14.479.734,00)	74,65
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	45.117.293,00	31.803.000,00	(13.314.293,00)	70,49
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	45.117.293,00	31.803.000,00	(13.314.293,00)	70,49
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.117.293,00	31.803.000,00	(13.314.293,00)	70,49
04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	11.999.941,00	10.834.500,00	(1.165.441,00)	90,29
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	11.999.941,00	10.834.500,00	(1.165.441,00)	90,29
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.999.941,00	10.834.500,00	(1.165.441,00)	90,29
04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	100,00
04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	100,00
04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	100,00
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	100,00
04.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	100,00
05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.727.000.000,00	2.658.620.000,00	(68.380.000,00)	97,49
05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.727.000.000,00	2.658.620.000,00	(68.380.000,00)	97,49
05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2.727.000.000,00	2.658.620.000,00	(68.380.000,00)	97,49

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.133.000.000,00	2.118.620.000,00	(14.380.000,00)	99,33
05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.133.000.000,00	2.118.620.000,00	(14.380.000,00)	99,33
05.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	594.000.000,00	540.000.000,00	(54.000.000,00)	90,91
05.2.01.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	594.000.000,00	540.000.000,00	(54.000.000,00)	90,91
05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	25.928.996.288,00	24.114.011.626,00	(1.814.984.662,00)	93,00
05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	25.928.996.288,00	24.114.011.626,00	(1.814.984.662,00)	93,00
05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	25.928.996.288,00	24.114.011.626,00	(1.814.984.662,00)	93,00
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	199.240.400,00	(759.600,00)	99,62
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.240.400,00	(759.600,00)	99,62
05.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	25.728.996.288,00	23.914.771.226,00	(1.814.225.062,00)	92,95
05.2.01.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.728.996.288,00	23.914.771.226,00	(1.814.225.062,00)	92,95
05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	6.898.821.492,00	6.713.860.206,00	(184.961.286,00)	97,32
05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	82.610.000,00	45.600.000,00	(37.010.000,00)	55,20
05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	82.610.000,00	45.600.000,00	(37.010.000,00)	55,20
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	82.610.000,00	45.600.000,00	(37.010.000,00)	55,20
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.610.000,00	45.600.000,00	(37.010.000,00)	55,20
05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	6.816.211.492,00	6.668.260.206,00	(147.951.286,00)	97,83
05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	438.772.405,00	367.078.983,00	(71.693.422,00)	83,66
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	438.772.405,00	367.078.983,00	(71.693.422,00)	83,66
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	438.772.405,00	367.078.983,00	(71.693.422,00)	83,66
05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	228.999.900,00	214.782.723,00	(14.217.177,00)	93,79
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	228.999.900,00	214.782.723,00	(14.217.177,00)	93,79
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.999.900,00	214.782.723,00	(14.217.177,00)	93,79

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6.148.439.187,00	6.086.398.500,00	(62.040.687,00)	98,99
05.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.148.439.187,00	6.086.398.500,00	(62.040.687,00)	98,99
05.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.739.187,00	65.398.500,00	(5.340.687,00)	92,45
05.2.02.03.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.077.700.000,00	6.021.000.000,00	(56.700.000,00)	99,07
05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	48.085.000,00	43.567.500,00	(4.517.500,00)	90,61
05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah	31.735.000,00	29.005.000,00	(2.730.000,00)	91,40
05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	15.175.000,00	12.445.000,00	(2.730.000,00)	82,01
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.175.000,00	12.445.000,00	(2.730.000,00)	82,01
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.175.000,00	12.445.000,00	(2.730.000,00)	82,01
05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	16.560.000,00	16.560.000,00	0,00	100,00
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	16.560.000,00	16.560.000,00	0,00	100,00
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.560.000,00	16.560.000,00	0,00	100,00
05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	16.350.000,00	14.562.500,00	(1.787.500,00)	89,07
05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	16.350.000,00	14.562.500,00	(1.787.500,00)	89,07
05.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	16.350.000,00	14.562.500,00	(1.787.500,00)	89,07
05.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.350.000,00	14.562.500,00	(1.787.500,00)	89,07
05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	83.279.858,00	69.968.427,00	(13.311.431,00)	84,02
05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	83.279.858,00	69.968.427,00	(13.311.431,00)	84,02
05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	41.249.595,00	34.696.887,00	(6.552.708,00)	84,11
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	41.249.595,00	34.696.887,00	(6.552.708,00)	84,11
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.249.595,00	34.696.887,00	(6.552.708,00)	84,11
05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	42.030.263,00	35.271.540,00	(6.758.723,00)	83,92
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	42.030.263,00	35.271.540,00	(6.758.723,00)	83,92

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.030.263,00	35.271.540,00	(6.758.723,00)	83,92
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.596.082.342,00	1.522.116.405,00	(73.965.937,00)	95,37
05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta	1.596.082.342,00	1.522.116.405,00	(73.965.937,00)	95,37
05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,	61.586.961,00	57.978.100,00	(3.608.861,00)	94,14
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	61.586.961,00	57.978.100,00	(3.608.861,00)	94,14
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.586.961,00	57.978.100,00	(3.608.861,00)	94,14
05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	677.953.812,00	654.764.000,00	(23.189.812,00)	96,58
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	677.953.812,00	654.764.000,00	(23.189.812,00)	96,58
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	677.953.812,00	654.764.000,00	(23.189.812,00)	96,58
05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	75.436.900,00	66.501.400,00	(8.935.500,00)	88,16
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	75.436.900,00	66.501.400,00	(8.935.500,00)	88,16
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.436.900,00	66.501.400,00	(8.935.500,00)	88,16
05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	249.989.764,00	236.440.600,00	(13.549.164,00)	94,58
05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	249.989.764,00	236.440.600,00	(13.549.164,00)	94,58
05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.989.764,00	236.440.600,00	(13.549.164,00)	94,58
05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	531.114.905,00	506.432.305,00	(24.682.600,00)	95,35
05.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	480.371.106,00	461.602.305,00	(18.768.801,00)	96,09
05.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.371.106,00	461.602.305,00	(18.768.801,00)	96,09
05.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	50.743.799,00	44.830.000,00	(5.913.799,00)	88,35
05.2.01.09.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.743.799,00	44.830.000,00	(5.913.799,00)	88,35
05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	424.167.701,00	348.570.500,00	(75.597.201,00)	82,18
05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	202.110.671,00	169.911.250,00	(32.199.421,00)	84,07
05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	202.110.671,00	169.911.250,00	(32.199.421,00)	84,07

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	202.110.671,00	169.911.250,00	(32.199.421,00)	84,07
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.110.671,00	169.911.250,00	(32.199.421,00)	84,07
05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	222.057.030,00	178.659.250,00	(43.397.780,00)	80,46
05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	222.057.030,00	178.659.250,00	(43.397.780,00)	80,46
05.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	222.057.030,00	178.659.250,00	(43.397.780,00)	80,46
05.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.057.030,00	178.659.250,00	(43.397.780,00)	80,46
05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	419.903.600,00	297.118.873,00	(122.784.727,00)	70,76
05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	419.903.600,00	297.118.873,00	(122.784.727,00)	70,76
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	358.189.800,00	291.248.873,00	(66.940.927,00)	81,31
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	358.189.800,00	291.248.873,00	(66.940.927,00)	81,31
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.189.800,00	291.248.873,00	(66.940.927,00)	81,31
05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	61.713.800,00	5.870.000,00	(55.843.800,00)	9,51
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	61.713.800,00	5.870.000,00	(55.843.800,00)	9,51
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.713.800,00	5.870.000,00	(55.843.800,00)	9,51
05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	248.544.967,00	217.435.800,00	(31.109.167,00)	87,48
05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	248.544.967,00	217.435.800,00	(31.109.167,00)	87,48
05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	248.544.967,00	217.435.800,00	(31.109.167,00)	87,48
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	23.995.367,00	15.100.800,00	(8.894.567,00)	62,93
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.995.367,00	15.100.800,00	(8.894.567,00)	62,93
05.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	224.549.600,00	202.335.000,00	(22.214.600,00)	90,11
05.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.132.600,00	5.100.000,00	(32.600,00)	99,36
05.2.02.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	219.417.000,00	197.235.000,00	(22.182.000,00)	89,89
05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	99.898.026,00	13.055.000,00	(86.843.026,00)	13,07

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam	99.898.026,00	13.055.000,00	(86.843.026,00)	13,07
05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam	99.898.026,00	13.055.000,00	(86.843.026,00)	13,07
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	99.898.026,00	13.055.000,00	(86.843.026,00)	13,07
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.898.026,00	13.055.000,00	(86.843.026,00)	13,07
05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	89.892.611,00	89.323.670,00	(568.941,00)	99,37
05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	44.979.825,00	44.885.500,00	(94.325,00)	99,79
05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	44.979.825,00	44.885.500,00	(94.325,00)	99,79
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	44.979.825,00	44.885.500,00	(94.325,00)	99,79
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.979.825,00	44.885.500,00	(94.325,00)	99,79
05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	44.912.786,00	44.438.170,00	(474.616,00)	98,94
05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	44.912.786,00	44.438.170,00	(474.616,00)	98,94
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	44.912.786,00	44.438.170,00	(474.616,00)	98,94
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.912.786,00	44.438.170,00	(474.616,00)	98,94
05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	154.509.542,00	133.855.500,00	(20.654.042,00)	86,63
05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	154.509.542,00	133.855.500,00	(20.654.042,00)	86,63
05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	154.509.542,00	133.855.500,00	(20.654.042,00)	86,63
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	154.509.542,00	133.855.500,00	(20.654.042,00)	86,63
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.509.542,00	133.855.500,00	(20.654.042,00)	86,63
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.915.119.392,00	6.068.095.994,00	(1.847.023.398,00)	76,66
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.915.119.392,00	6.068.095.994,00	(1.847.023.398,00)	76,66
05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar	158.588.595,00	153.607.184,00	(4.981.411,00)	96,86
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	158.588.595,00	153.607.184,00	(4.981.411,00)	96,86
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.588.595,00	153.607.184,00	(4.981.411,00)	96,86

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,	7.756.530.797,00	5.914.488.810,00	(1.842.041.987,00)	76,25
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	7.756.530.797,00	5.914.488.810,00	(1.842.041.987,00)	76,25
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.810.546.797,00	1.677.168.928,00	(133.377.869,00)	92,63
05.2.01.04.5.1.05	Belanja Hibah	5.945.984.000,00	4.237.319.882,00	(1.708.664.118,00)	71,26
05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	247.145.879,00	197.735.292,00	(49.410.587,00)	80,01
05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	247.145.879,00	197.735.292,00	(49.410.587,00)	80,01
05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	247.145.879,00	197.735.292,00	(49.410.587,00)	80,01
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	247.145.879,00	197.735.292,00	(49.410.587,00)	80,01
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.145.879,00	197.735.292,00	(49.410.587,00)	80,01
06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	13.564.829.000,00	12.363.991.100,00	(1.200.837.900,00)	91,15
06.2.01	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	13.564.829.000,00	12.363.991.100,00	(1.200.837.900,00)	91,15
06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	360.380.000,00	331.308.800,00	(29.071.200,00)	91,93
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.090.000,00	500.800,00	(9.589.200,00)	4,96
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.090.000,00	500.800,00	(9.589.200,00)	4,96
06.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	350.290.000,00	330.808.000,00	(19.482.000,00)	94,44
06.2.01.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	350.290.000,00	330.808.000,00	(19.482.000,00)	94,44
06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	200.000.000,00	177.702.000,00	(22.298.000,00)	88,85
06.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	177.702.000,00	(22.298.000,00)	88,85
06.2.01.07.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	177.702.000,00	(22.298.000,00)	88,85
06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	13.004.449.000,00	11.854.980.300,00	(1.149.468.700,00)	91,16
06.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	100,00
06.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	100,00
06.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	13.002.679.000,00	11.853.210.300,00	(1.149.468.700,00)	91,16

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
06.2.01.12.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.002.679.000,00	11.853.210.300,00	(1.149.468.700,00)	91,16
06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	195.076.408,00	170.846.500,00	(24.229.908,00)	87,58
06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	195.076.408,00	170.846.500,00	(24.229.908,00)	87,58
06.2.01.01	Penyediaan Makanan	149.967.853,00	136.156.500,00	(13.811.353,00)	90,79
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	149.967.853,00	136.156.500,00	(13.811.353,00)	90,79
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.967.853,00	136.156.500,00	(13.811.353,00)	90,79
06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	45.108.555,00	34.690.000,00	(10.418.555,00)	76,90
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	198.305,00	180.000,00	(18.305,00)	90,77
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.305,00	180.000,00	(18.305,00)	90,77
06.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	44.910.250,00	34.510.000,00	(10.400.250,00)	76,84
06.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.910.250,00	34.510.000,00	(10.400.250,00)	76,84
06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	171.170.679,00	108.100.816,00	(63.069.863,00)	63,15
06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	171.170.679,00	108.100.816,00	(63.069.863,00)	63,15
06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	171.170.679,00	108.100.816,00	(63.069.863,00)	63,15
06.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	171.170.679,00	108.100.816,00	(63.069.863,00)	63,15
06.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.170.679,00	108.100.816,00	(63.069.863,00)	63,15
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	81.789.669,00	78.844.600,00	(2.945.069,00)	96,40
06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	81.789.669,00	78.844.600,00	(2.945.069,00)	96,40
06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	24.829.850,00	22.855.000,00	(1.974.850,00)	92,05
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.829.850,00	22.855.000,00	(1.974.850,00)	92,05
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.829.850,00	22.855.000,00	(1.974.850,00)	92,05
06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	56.959.819,00	55.989.600,00	(970.219,00)	98,30

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	56.959.819,00	55.989.600,00	(970.219,00)	98,30
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.959.819,00	55.989.600,00	(970.219,00)	98,30
06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	70.543.892,00	68.096.800,00	(2.447.092,00)	96,53
06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.543.892,00	68.096.800,00	(2.447.092,00)	96,53
06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	70.543.892,00	68.096.800,00	(2.447.092,00)	96,53
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	70.543.892,00	68.096.800,00	(2.447.092,00)	96,53
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.543.892,00	68.096.800,00	(2.447.092,00)	96,53
06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	132.983.236,00	125.131.468,00	(7.851.768,00)	94,10
06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	24.999.003,00	24.135.000,00	(864.003,00)	96,54
06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.999.003,00	24.135.000,00	(864.003,00)	96,54
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.999.003,00	24.135.000,00	(864.003,00)	96,54
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.999.003,00	24.135.000,00	(864.003,00)	96,54
06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	107.984.233,00	100.996.468,00	(6.987.765,00)	93,53
06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	107.984.233,00	100.996.468,00	(6.987.765,00)	93,53
06.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	107.984.233,00	100.996.468,00	(6.987.765,00)	93,53
06.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.659.233,00	48.712.204,00	(947.029,00)	98,09
06.2.02.01.5.1.05	Belanja Hibah	58.325.000,00	52.284.264,00	(6.040.736,00)	89,64
06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	16.721.679,00	16.594.000,00	(127.679,00)	99,24
06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.721.679,00	16.594.000,00	(127.679,00)	99,24
06.2.01.01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	16.721.679,00	16.594.000,00	(127.679,00)	99,24
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.721.679,00	16.594.000,00	(127.679,00)	99,24
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.721.679,00	16.594.000,00	(127.679,00)	99,24
06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	43.822.408,00	35.957.000,00	(7.865.408,00)	82,05

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	43.822.408,00	35.957.000,00	(7.865.408,00)	82,05
06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	43.822.408,00	35.957.000,00	(7.865.408,00)	82,05
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	43.822.408,00	35.957.000,00	(7.865.408,00)	82,05
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.822.408,00	35.957.000,00	(7.865.408,00)	82,05
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	91.353.480,00	54.374.888,00	(36.978.592,00)	59,52
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	91.353.480,00	54.374.888,00	(36.978.592,00)	59,52
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24.289.537,00	16.750.000,00	(7.539.537,00)	68,96
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	24.289.537,00	16.750.000,00	(7.539.537,00)	68,96
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.289.537,00	16.750.000,00	(7.539.537,00)	68,96
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	4.843.061,00	0,00	(4.843.061,00)	0,00
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.843.061,00	0,00	(4.843.061,00)	0,00
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.843.061,00	0,00	(4.843.061,00)	0,00
06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	62.220.882,00	37.624.888,00	(24.595.994,00)	60,47
06.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	62.220.882,00	37.624.888,00	(24.595.994,00)	60,47
06.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.220.882,00	37.624.888,00	(24.595.994,00)	60,47
06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.449.997.296,00	3.281.106.610,00	(168.890.686,00)	95,10
06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3.449.997.296,00	3.281.106.610,00	(168.890.686,00)	95,10
06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	3.249.957.296,00	3.248.216.610,00	(1.740.686,00)	99,95
06.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.249.957.296,00	3.248.216.610,00	(1.740.686,00)	99,95
06.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.957.296,00	248.216.610,00	(1.740.686,00)	99,30
06.2.01.04.5.1.05	Belanja Hibah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00
06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	200.040.000,00	32.890.000,00	(167.150.000,00)	16,44
06.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	200.040.000,00	32.890.000,00	(167.150.000,00)	16,44

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
06.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.040.000,00	32.890.000,00	(167.150.000,00)	16,44
07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	27.566.450,00	22.418.194,00	(5.148.256,00)	81,32
07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	27.566.450,00	22.418.194,00	(5.148.256,00)	81,32
07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	27.566.450,00	22.418.194,00	(5.148.256,00)	81,32
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	27.566.450,00	22.418.194,00	(5.148.256,00)	81,32
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.566.450,00	22.418.194,00	(5.148.256,00)	81,32
07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	497.807.295,00	230.717.619,00	(267.089.676,00)	46,35
07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	64.982.422,00	41.924.000,00	(23.058.422,00)	64,52
07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	64.982.422,00	41.924.000,00	(23.058.422,00)	64,52
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	64.982.422,00	41.924.000,00	(23.058.422,00)	64,52
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.982.422,00	41.924.000,00	(23.058.422,00)	64,52
07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	394.474.317,00	162.719.088,00	(231.755.229,00)	41,25
07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	229.356.724,00	116.063.500,00	(113.293.224,00)	50,60
07.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	229.356.724,00	116.063.500,00	(113.293.224,00)	50,60
07.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.356.724,00	116.063.500,00	(113.293.224,00)	50,60
07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	165.117.593,00	46.655.588,00	(118.462.005,00)	28,26
07.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	165.117.593,00	46.655.588,00	(118.462.005,00)	28,26
07.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.117.593,00	46.655.588,00	(118.462.005,00)	28,26
07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.350.556,00	26.074.531,00	(12.276.025,00)	67,99
07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat	38.350.556,00	26.074.531,00	(12.276.025,00)	67,99
07.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	38.350.556,00	26.074.531,00	(12.276.025,00)	67,99
07.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.350.556,00	26.074.531,00	(12.276.025,00)	67,99
07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	7.262.351.324,00	7.071.965.400,00	(190.385.924,00)	97,38

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para	7.262.351.324,00	7.071.965.400,00	(190.385.924,00)	97,38
07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	7.262.351.324,00	7.071.965.400,00	(190.385.924,00)	97,38
07.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	7.112.352.204,00	6.923.733.400,00	(188.618.804,00)	97,35
07.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.452.204,00	140.833.400,00	(134.618.804,00)	51,13
07.2.01.04.5.1.05	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00
07.2.01.04.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.336.900.000,00	6.282.900.000,00	(54.000.000,00)	99,15
07.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	149.999.120,00	148.232.000,00	(1.767.120,00)	98,82
07.2.01.04.5.2.01	Belanja Modal Tanah	12.500.000,00	12.490.000,00	(10.000,00)	99,92
07.2.01.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.000.000,00	89.666.000,00	(334.000,00)	99,63
07.2.01.04.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	47.499.120,00	46.076.000,00	(1.423.120,00)	97,00
07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.634.699.687,00	1.462.796.852,00	(171.902.835,00)	89,48
07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.634.699.687,00	1.462.796.852,00	(171.902.835,00)	89,48
07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	77.916.301,00	61.678.500,00	(16.237.801,00)	79,16
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	77.916.301,00	61.678.500,00	(16.237.801,00)	79,16
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.916.301,00	61.678.500,00	(16.237.801,00)	79,16
07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	107.176.139,00	72.257.150,00	(34.918.989,00)	67,42
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	107.176.139,00	72.257.150,00	(34.918.989,00)	67,42
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.176.139,00	72.257.150,00	(34.918.989,00)	67,42
07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1.398.833.847,00	1.313.389.752,00	(85.444.095,00)	93,89
07.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.193.414,00	1.800.000,00	(393.414,00)	82,06
07.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.193.414,00	1.800.000,00	(393.414,00)	82,06
07.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	1.396.640.433,00	1.311.589.752,00	(85.050.681,00)	93,91
07.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.094.981,00	117.390.000,00	(18.704.981,00)	86,26

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
07.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.260.545.452,00	1.194.199.752,00	(66.345.700,00)	94,74
07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	50.773.400,00	15.471.450,00	(35.301.950,00)	30,47
07.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	50.773.400,00	15.471.450,00	(35.301.950,00)	30,47
07.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.773.400,00	15.471.450,00	(35.301.950,00)	30,47
07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	468.999.456,00	431.631.847,00	(37.367.609,00)	92,03
07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	468.999.456,00	431.631.847,00	(37.367.609,00)	92,03
07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	468.999.456,00	431.631.847,00	(37.367.609,00)	92,03
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	461.090.706,00	424.476.097,00	(36.614.609,00)	92,06
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	461.090.706,00	424.476.097,00	(36.614.609,00)	92,06
07.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	7.908.750,00	7.155.750,00	(753.000,00)	90,48
07.2.01.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.908.750,00	7.155.750,00	(753.000,00)	90,48
08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	31.548.655.137,00	30.020.728.114,00	(1.527.927.023,00)	95,16
08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi	31.548.655.137,00	30.020.728.114,00	(1.527.927.023,00)	95,16
08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	31.548.655.137,00	30.020.728.114,00	(1.527.927.023,00)	95,16
08.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.784.694.486,00	1.625.235.014,00	(159.459.472,00)	91,07
08.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	684.694.486,00	555.166.014,00	(129.528.472,00)	81,08
08.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	1.100.000.000,00	1.070.069.000,00	(29.931.000,00)	97,28
08.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	29.763.960.651,00	28.395.493.100,00	(1.368.467.551,00)	95,40
08.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.417.382,00	41.900.000,00	(1.517.382,00)	96,51
08.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.720.543.269,00	28.353.593.100,00	(1.366.950.169,00)	95,40
09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	59.999.400,00	36.397.878,00	(23.601.522,00)	60,66
09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	59.999.400,00	36.397.878,00	(23.601.522,00)	60,66
09.2.01.05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	59.999.400,00	36.397.878,00	(23.601.522,00)	60,66

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
09.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	59.999.400,00	36.397.878,00	(23.601.522,00)	60,66
09.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.999.400,00	36.397.878,00	(23.601.522,00)	60,66
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	156.636.096.471,00	150.051.466.661,00	(6.584.629.810,00)	95,80
10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	156.636.096.471,00	150.051.466.661,00	(6.584.629.810,00)	95,80
10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	3.534.199.974,00	3.479.018.530,00	(55.181.444,00)	98,44
10.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.134.199.989,00	1.095.023.250,00	(39.176.739,00)	96,55
10.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.134.199.989,00	1.095.023.250,00	(39.176.739,00)	96,55
10.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	2.399.999.985,00	2.383.995.280,00	(16.004.705,00)	99,33
10.2.01.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.399.999.985,00	2.383.995.280,00	(16.004.705,00)	99,33
10.2.01.05	Pembangunan Jalan	25.507.155.528,00	24.246.586.050,00	(1.260.569.478,00)	95,06
10.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	24.982.200,00	12.390.000,00	(12.592.200,00)	49,60
10.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.982.200,00	12.390.000,00	(12.592.200,00)	49,60
10.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	25.482.173.328,00	24.234.196.050,00	(1.247.977.278,00)	95,10
10.2.01.05.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.482.173.328,00	24.234.196.050,00	(1.247.977.278,00)	95,10
10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	817.870.000,00	783.898.850,00	(33.971.150,00)	95,85
10.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	817.870.000,00	783.898.850,00	(33.971.150,00)	95,85
10.2.01.06.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	817.870.000,00	783.898.850,00	(33.971.150,00)	95,85
10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	33.545.011.165,00	32.426.223.100,00	(1.118.788.065,00)	96,66
10.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	26.854.000,00	10.350.000,00	(16.504.000,00)	38,54
10.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.854.000,00	10.350.000,00	(16.504.000,00)	38,54
10.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	33.518.157.165,00	32.415.873.100,00	(1.102.284.065,00)	96,71
10.2.01.08.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.518.157.165,00	32.415.873.100,00	(1.102.284.065,00)	96,71
10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	46.998.804.877,00	44.608.995.650,00	(2.389.809.227,00)	94,92

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
10.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	46.998.804.877,00	44.608.995.650,00	(2.389.809.227,00)	94,92
10.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.998.804.877,00	44.608.995.650,00	(2.389.809.227,00)	94,92
10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	7.393.684.347,00	7.238.986.095,00	(154.698.252,00)	97,91
10.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	7.393.684.347,00	7.238.986.095,00	(154.698.252,00)	97,91
10.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.393.684.347,00	7.238.986.095,00	(154.698.252,00)	97,91
10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	10.333.822.121,00	9.990.942.550,00	(342.879.571,00)	96,68
10.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	21.600.000,00	2.345.000,00	(19.255.000,00)	10,86
10.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	2.345.000,00	(19.255.000,00)	10,86
10.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	10.312.222.121,00	9.988.597.550,00	(323.624.571,00)	96,86
10.2.01.12.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.312.222.121,00	9.988.597.550,00	(323.624.571,00)	96,86
10.2.01.16	Penggantian Jembatan	21.008.788.680,00	20.087.776.400,00	(921.012.280,00)	95,62
10.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	39.900.000,00	2.295.000,00	(37.605.000,00)	5,75
10.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.900.000,00	2.295.000,00	(37.605.000,00)	5,75
10.2.01.16.5.2	BELANJA MODAL	20.968.888.680,00	20.085.481.400,00	(883.407.280,00)	95,79
10.2.01.16.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.968.888.680,00	20.085.481.400,00	(883.407.280,00)	95,79
10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	7.496.759.779,00	7.189.039.436,00	(307.720.343,00)	95,90
10.2.01.19.5.1	BELANJA OPERASI	7.496.759.779,00	7.189.039.436,00	(307.720.343,00)	95,90
10.2.01.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.496.759.779,00	7.189.039.436,00	(307.720.343,00)	95,90
10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	2.582.353.615,00	2.202.371.000,00	(379.982.615,00)	85,29
10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	2.582.353.615,00	2.202.371.000,00	(379.982.615,00)	85,29
10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	2.582.353.615,00	2.202.371.000,00	(379.982.615,00)	85,29
10.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.582.353.615,00	2.202.371.000,00	(379.982.615,00)	85,29
10.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	638.753.615,00	282.371.000,00	(356.382.615,00)	44,21

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
10.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	1.943.600.000,00	1.920.000.000,00	(23.600.000,00)	98,79
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	19.999.619,00	18.793.000,00	(1.206.619,00)	93,97
10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	19.999.619,00	18.793.000,00	(1.206.619,00)	93,97
10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	19.999.619,00	18.793.000,00	(1.206.619,00)	93,97
10.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	19.999.619,00	18.793.000,00	(1.206.619,00)	93,97
10.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.619,00	18.793.000,00	(1.206.619,00)	93,97
11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	562.651.387,00	372.070.300,00	(190.581.087,00)	66,13
11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	395.353.831,00	207.302.300,00	(188.051.531,00)	52,43
11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	108.453.831,00	25.000.000,00	(83.453.831,00)	23,05
11.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	108.453.831,00	25.000.000,00	(83.453.831,00)	23,05
11.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.453.831,00	25.000.000,00	(83.453.831,00)	23,05
11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	286.900.000,00	182.302.300,00	(104.597.700,00)	63,54
11.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	286.900.000,00	182.302.300,00	(104.597.700,00)	63,54
11.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.900.000,00	182.302.300,00	(104.597.700,00)	63,54
11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	167.297.556,00	164.768.000,00	(2.529.556,00)	98,49
11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	167.297.556,00	164.768.000,00	(2.529.556,00)	98,49
11.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	125.297.556,00	123.298.000,00	(1.999.556,00)	98,40
11.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.297.556,00	123.298.000,00	(1.999.556,00)	98,40
11.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	42.000.000,00	41.470.000,00	(530.000,00)	98,74
11.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	1.970.000,00	(30.000,00)	98,50
11.2.02.01.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	40.000.000,00	39.500.000,00	(500.000,00)	98,75
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.479.243.172,00	4.351.192.796,00	(1.128.050.376,00)	79,41
11.2.01	Pengelolaan Sampah	5.479.243.172,00	4.351.192.796,00	(1.128.050.376,00)	79,41

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA	5.390.883.172,00	4.265.097.796,00	(1.125.785.376,00)	79,12
11.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	4.656.884.728,00	3.565.484.296,00	(1.091.400.432,00)	76,56
11.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.656.884.728,00	3.565.484.296,00	(1.091.400.432,00)	76,56
11.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	733.998.444,00	699.613.500,00	(34.384.944,00)	95,32
11.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	380.984.997,00	361.761.000,00	(19.223.997,00)	94,95
11.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	353.013.447,00	337.852.500,00	(15.160.947,00)	95,71
11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	88.360.000,00	86.095.000,00	(2.265.000,00)	97,44
11.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	38.860.000,00	38.765.000,00	(95.000,00)	99,76
11.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.860.000,00	38.765.000,00	(95.000,00)	99,76
11.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	49.500.000,00	47.330.000,00	(2.170.000,00)	95,62
11.2.01.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.500.000,00	47.330.000,00	(2.170.000,00)	95,62
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.499.999.429,00	2.819.528.772,00	(680.470.657,00)	80,56
12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	3.384.999.678,00	2.768.467.522,00	(616.532.156,00)	81,79
12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	994.999.748,00	791.868.418,00	(203.131.330,00)	79,58
12.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	994.999.748,00	791.868.418,00	(203.131.330,00)	79,58
12.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	994.999.748,00	791.868.418,00	(203.131.330,00)	79,58
12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2.389.999.930,00	1.976.599.104,00	(413.400.826,00)	82,70
12.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.389.999.930,00	1.976.599.104,00	(413.400.826,00)	82,70
12.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.389.999.930,00	1.976.599.104,00	(413.400.826,00)	82,70
12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	114.999.751,00	51.061.250,00	(63.938.501,00)	44,40
12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	114.999.751,00	51.061.250,00	(63.938.501,00)	44,40
12.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	114.999.751,00	51.061.250,00	(63.938.501,00)	44,40
12.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.999.751,00	51.061.250,00	(63.938.501,00)	44,40

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	(Rp)	(%)
00.0.00.00.6	PEMBIAYAAN DAERAH	535.990.188.934,00	536.325.812.033,83	335.623.099,83	100,06
00.0.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	610.990.188.934,00	611.325.812.033,83	335.623.099,83	100,05
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	604.990.188.934,00	604.990.188.933,83	(0,17)	100,00
00.0.00.00.6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	6.000.000.000,00	6.004.455.100,00	4.455.100,00	100,07
00.0.00.00.6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	331.168.000,00	331.168.000,00	100,00
00.0.00.00.6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	0,00	100,00
00.0.00.00.6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	100,00
00.0.00.00.6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	100,00
00.0.00.00.6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	100,00



LAMPIRAN I.4

Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Lampiran I.4 : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 1 Tahun 2023
Tanggal : 10 Agustus 2023



KABUPATEN TANAH LAUT
REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	980.136.881.602,00	841.141.642.398,92	378.781.774.486,00	343.362.812.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	PENDIDIKAN	469.952.573.842,00	395.433.584.237,00	50.647.262.904,00	45.875.536.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	394.257.751.493,00	331.221.663.673,00	680.185.748,00	624.014.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	169.935.403,00	122.970.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	81.111.050,00	60.656.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.824.353,00	62.314.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	390.255.467.454,00	327.693.133.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	390.087.680.197,00	327.579.648.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	167.787.257,00	113.485.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	89.240.000,00	45.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	89.240.000,00	45.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	725.689.655,00	667.669.233,00	232.966.748,00	217.921.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.651.292,00	39.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	277.373.859,00	273.060.000,00	232.966.748,00	217.921.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	101.370.139,00	72.796.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	32.894.365,00	22.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	274.400.000,00	259.822.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.685.600.507,00	2.406.111.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	356.643.225,00	221.050.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.328.957.282,00	2.185.061.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	331.818.474,00	286.013.519,00	447.219.000,00	406.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	221.068.474,00	190.523.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.750.000,00	95.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	447.219.000,00	406.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	75.531.387.867,00	64.185.308.564,00	49.950.577.156,00	45.236.571.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	39.345.467.802,00	33.046.694.978,00	37.857.071.245,00	34.319.998.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	4.500.000,00	0,00	226.556.000,00	206.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3.000.000,00	1.200.000,00	765.471.564,00	669.499.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	0,00	436.451.400,00	396.806.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0,00	0,00	804.069.640,00	742.665.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	181.954.874,00	158.340.000,00	15.114.136.910,00	14.021.762.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	9.487.500,00	990.000,00	5.266.161.700,00	4.890.342.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	48.300.000,00	45.600.000,00	154.880.000,00	153.597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0,00	0,00	322.231.800,00	305.906.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.356.000,00	0,00	408.475.100,00	377.348.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	596.200.000,00	531.103.000,00	232.045.000,00	206.299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.357.200,00	2.620.000,00	3.197.486.797,00	3.129.759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	470.177.030,00	357.578.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	495.600.000,00	495.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	9.587.660.055,00	6.256.490.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	499.693.944,00	435.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	263.744.972,00	178.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	22.703.313.279,00	20.588.375.098,00	9.225.886.736,00	7.656.012.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	4.474.122.948,00	3.994.962.870,00	76.372.454,00	68.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	0,00	0,00	1.626.846.144,00	1.495.211.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	15.439.482.921,00	11.670.238.507,00	11.630.028.936,00	10.471.519.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	4.950.000,00	4.120.000,00	308.480.000,00	275.400.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	0,00	99.900.000,00	61.527.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	0,00	124.320.000,00	115.088.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	0,00	0,00	226.440.000,00	219.682.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.950.000,00	1.036.920,00	4.913.118.380,00	4.590.420.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.275.000,00	2.955.000,00	1.153.950.400,00	1.050.542.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0,00	0,00	4.440.000,00	4.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.575.000,00	900.000,00	545.396.790,00	510.915.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	73.892.853,00	68.196.000,00	2.091.947.560,00	1.976.161.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebeluer Sekolah	94.650.000,00	84.087.150,00	38.940.000,00	34.656.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1.01.02.2.02.35	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	376.923.800,00	376.002.500,00	64.740.750,00	56.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	100.949.930,00	55.881.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	499.800.000,00	459.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.588.883.262,00	2.340.167.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	154.237.992,00	110.458.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	130.179.916,00	93.198.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	9.277.244.929,00	6.939.156.307,00	2.058.355.056,00	1.576.338.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	2.129.970.239,00	1.135.078.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	15.796.611.668,00	15.095.158.859,00	155.966.046,00	149.741.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	234.734.000,00	207.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	235.580.000,00	207.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	149.920.137,00	92.584.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.12	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	199.999.420,00	197.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	357.745.320,00	326.128.724,00	22.200.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	7.855.371.537,00	7.496.459.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	45.227.878,00	39.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	6.718.033.376,00	6.527.603.959,00	133.766.046,00	131.241.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.949.825.476,00	4.373.216.220,00	307.510.929,00	295.311.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.11	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	3.780.000,00	3.780.000,00	207.356.988,00	197.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	3.499.999.605,00	2.943.170.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.446.045.871,00	1.426.265.420,00	100.153.941,00	98.011.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	163.434.482,00	26.612.000,00	16.500.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	163.434.482,00	26.612.000,00	16.500.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	163.434.482,00	26.612.000,00	16.500.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	KESEHATAN	338.477.094.295,00	289.234.181.280,92	111.643.126.815,00	94.113.841.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	216.482.669.852,00	191.418.321.888,92	33.375.004.511,00	29.196.132.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.694.449,00	39.401.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.694.449,00	39.401.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	112.467.460.614,00	99.242.274.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	112.367.941.806,00	99.172.213.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	99.518.808,00	70.061.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.155.000,00	44.836.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	71.000.000,00	24.191.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28.155.000,00	20.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.749.436.185,00	1.461.975.662,00	18.022.120,00	13.949.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	194.808.074,00	145.489.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	427.742.993,00	370.787.597,00	3.207.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.649.144,00	43.169.500,00	14.814.245,00	13.949.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	221.325.974,00	154.594.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	33.000.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	819.910.000,00	727.434.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	7.074.381.076,00	6.976.895.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	205.081.075,00	201.448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	6.869.300.001,00	6.775.447.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.284.625.397,00	10.252.195.024,00	350.000.000,00	324.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.667.407.072,00	4.666.092.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.617.218.325,00	5.586.102.944,00	350.000.000,00	324.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.105.477.807,00	827.405.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.250.000,00	25.990.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	695.191.740,00	541.419.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	329.516.067,00	246.706.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.520.000,00	13.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	88.695.820.400,00	79.550.233.078,92	25.932.601.315,00	21.880.450.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	88.695.820.400,00	79.550.233.078,92	25.932.601.315,00	21.880.450.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	87.781.856.994,00	75.955.890.772,00	78.268.122.304,00	64.917.708.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	8.343.161.818,00	7.044.066.366,00	78.111.455.732,00	64.785.602.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	0,00	0,00	3.100.005.524,00	2.841.764.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	437.420.453,00	371.053.300,00	21.365.586.222,00	19.067.157.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	42.380.487,00	32.169.950,00	53.645.863.986,00	42.876.680.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	5.012.695.496,00	4.098.580.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.222.968.188,00	2.126.575.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	481.480.000,00	272.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	146.217.194,00	143.235.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78.818.733.250,00	68.447.105.541,00	140.166.572,00	117.181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.385.265.552,00	1.164.371.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	651.209.438,00	254.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	235.741.296,00	173.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	739.762.342,00	610.955.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	584.720.527,00	310.607.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	256.276.701,00	185.475.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	254.541.852,00	176.589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	98.235.262,00	79.532.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	89.744.391,00	82.169.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	88.974.176,00	64.424.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	214.840.590,00	134.859.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	102.749.405,00	67.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.842.761.564,00	436.016.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	39.998.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.724.593.725,00	1.063.094.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	374.497.708,00	237.386.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.513.347.679,00	777.128.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2.331.787.463,00	1.544.898.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	98.428.149,00	57.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.092.114.166,00	1.162.911.450,00	5.217.000,00	5.217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	346.756.503,00	241.391.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	83.999.992,00	63.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.611.420.818,00	1.173.708.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	56.338.288.495,00	56.122.778.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	25.945.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	134.949.572,00	111.964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.182.265.749,00	714.170.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.780.768.744,00	342.102.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.385.015.926,00	221.006.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	386.808.280,00	287.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	181.576.295,00	67.972.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	776.296.854,00	624.033.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	42.398.265,00	35.135.000,00	16.500.000,00	14.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	42.398.265,00	35.135.000,00	16.500.000,00	14.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	577.563.661,00	429.583.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	321.170.135,00	204.523.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	256.393.526,00	225.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	34.212.567.449,00	21.859.968.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	34.061.617.635,00	21.760.453.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	34.001.617.635,00	21.720.703.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	60.000.000,00	39.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.949.814,00	99.515.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.949.814,00	99.515.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	105.458.758.860,00	98.149.218.640,00	189.679.674.764,00	178.470.535.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13.882.080.011,00	12.090.503.175,00	60.935.992,00	56.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.908.200,00	35.154.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.832.100,00	22.000.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.076.100,00	13.154.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.290.290.970,00	8.227.980.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.263.780.970,00	8.208.619.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26.510.000,00	19.360.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.291.647.905,00	1.022.132.435,00	60.935.992,00	56.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41.366.768,00	25.470.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	244.684.025,00	211.175.750,00	60.935.992,00	56.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	176.644.230,00	125.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	13.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	812.472.882,00	648.118.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.719.295.874,00	2.399.481.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	494.685.210,00	226.285.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.914.258,00	4.524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.214.696.406,00	2.168.672.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	513.937.062,00	386.754.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	331.691.112,00	252.278.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	57.440.950,00	56.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	124.805.000,00	77.930.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	16.170.902.141,00	14.906.763.590,00	18.204.217.213,00	16.699.650.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.873.295.497,00	10.812.610.440,00	8.825.191.161,00	8.507.879.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1.367.999.999,00	1.279.578.700,00	100.000.000,00	88.813.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	1.399.999.100,00	1.342.702.600,00	799.997.200,00	764.970.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	0,00	0,00	1.149.790.507,00	1.043.811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	13.500.000,00	6.480.000,00	6.289.419.308,00	6.165.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	200.000.020,00	197.952.000,00	199.807.517,00	198.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	799.728.198,00	763.329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	6.112.357.374,00	5.543.208.940,00	286.176.629,00	246.369.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	1.459.921.282,00	1.309.758.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	419.789.624,00	269.869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	99.999.900,00	99.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.297.606.644,00	4.094.153.150,00	9.379.026.052,00	8.191.770.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	499.999.900,00	484.795.100,00	100.000.000,00	98.694.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	0,00	0,00	549.370.324,00	490.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1.03.02.2.02.04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	0,00	0,00	4.199.907.992,00	3.838.173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	0,00	0,00	4.529.747.736,00	3.764.180.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.468.083.852,00	1.375.790.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	1.674.733.909,00	1.647.410.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	654.788.983,00	586.156.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.258.786.814,00	4.059.874.680,00	33.962.280.629,00	30.483.764.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.258.786.814,00	4.059.874.680,00	33.962.280.629,00	30.483.764.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	309.181.820,00	297.400.000,00	90.818.180,00	87.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	0,00	0,00	399.999.997,00	278.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	0,00	0,00	21.813.413.997,00	18.636.005.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.828.999.994,00	3.672.280.000,00	581.995.455,00	575.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	120.605.000,00	90.194.680,00	11.076.053.000,00	10.905.829.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.133.000.000,00	2.118.620.000,00	594.000.000,00	540.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.133.000.000,00	2.118.620.000,00	594.000.000,00	540.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2.133.000.000,00	2.118.620.000,00	594.000.000,00	540.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	11.860.000,00	2.270.800,00	13.552.969.000,00	12.361.720.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.860.000,00	2.270.800,00	13.552.969.000,00	12.361.720.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	10.090.000,00	500.800,00	350.290.000,00	330.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	0,00	0,00	200.000.000,00	177.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1.770.000,00	1.770.000,00	13.002.679.000,00	11.853.210.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.784.694.486,00	1.625.235.014,00	29.763.960.651,00	28.395.493.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.784.694.486,00	1.625.235.014,00	29.763.960.651,00	28.395.493.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1.784.694.486,00	1.625.235.014,00	29.763.960.651,00	28.395.493.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	59.999.400,00	36.397.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	59.999.400,00	36.397.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.09.2.01.05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	59.999.400,00	36.397.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	63.136.785.192,00	60.159.424.431,00	93.499.311.279,00	89.892.042.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	63.136.785.192,00	60.159.424.431,00	93.499.311.279,00	89.892.042.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.134.199.989,00	1.095.023.250,00	2.399.999.985,00	2.383.995.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	24.982.200,00	12.390.000,00	25.482.173.328,00	24.234.196.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	0,00	0,00	817.870.000,00	783.898.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	26.854.000,00	10.350.000,00	33.518.157.165,00	32.415.873.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	46.998.804.877,00	44.608.995.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	7.393.684.347,00	7.238.986.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	21.600.000,00	2.345.000,00	10.312.222.121,00	9.988.597.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	39.900.000,00	2.295.000,00	20.968.888.680,00	20.085.481.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	7.496.759.779,00	7.189.039.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	520.651.387,00	330.600.300,00	42.000.000,00	41.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	395.353.831,00	207.302.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	108.453.831,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	286.900.000,00	182.302.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	125.297.556,00	123.298.000,00	42.000.000,00	41.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	125.297.556,00	123.298.000,00	42.000.000,00	41.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.499.999.429,00	2.819.528.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	3.384.999.678,00	2.768.467.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	994.999.748,00	791.868.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2.389.999.930,00	1.976.599.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	114.999.751,00	51.061.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	114.999.751,00	51.061.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	29.915.898.416,00	29.553.197.082,00	26.149.463.911,00	24.285.165.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	15.313.691.640,00	15.024.673.612,00	420.467.623,00	370.394.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.200.000,00	14.497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.000.000,00	11.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.200.000,00	2.847.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.859.203.298,00	7.746.535.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.840.203.298,00	7.730.847.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.000.000,00	15.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	595.112.290,00	556.472.400,00	286.757.560,00	257.750.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148.146.663,00	127.632.900,00	286.757.560,00	257.750.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.994.670,00	18.785.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.975.957,00	49.969.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375.995.000,00	360.084.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	133.710.063,00	112.644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	133.710.063,00	112.644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.365.881.640,00	6.251.662.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	325.246.710,00	245.430.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.980.396,00	19.576.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.020.654.534,00	5.986.655.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	476.294.412,00	455.505.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	339.944.412,00	332.527.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.350.000,00	15.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000.000,00	107.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	100.000.000,00	99.525.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.525.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	100.000.000,00	99.525.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	14.302.206.776,00	14.229.757.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	14.302.206.776,00	14.229.757.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	4.050.186.776,00	3.977.737.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03.08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	10.252.020.000,00	10.252.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	200.000.000,00	199.240.400,00	25.728.996.288,00	23.914.771.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	200.000.000,00	199.240.400,00	25.728.996.288,00	23.914.771.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	200.000.000,00	199.240.400,00	25.728.996.288,00	23.914.771.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	17.841.695.831,00	16.061.694.397,00	403.036.935,00	380.198.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	16.210.264.469,00	14.782.510.395,00	77.305.388,00	71.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.735.145,00	12.463.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.089.413,00	7.410.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.645.732,00	5.053.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.865.635.766,00	7.726.560.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.858.561.565,00	7.721.925.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.074.201,00	4.635.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	199.100.000,00	124.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	199.100.000,00	124.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	443.778.509,00	428.019.280,00	55.014.739,00	51.183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.234.501,00	4.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.931.272,00	70.858.858,00	55.014.739,00	51.183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.152.736,00	10.907.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	341.980.000,00	338.353.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.872.540.049,00	5.681.240.478,00	22.290.649,00	20.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.320.952,00	110.820.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.517.776,00	34.623.046,00	22.290.649,00	20.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.661.701.321,00	5.535.797.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	815.475.000,00	810.026.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.500.000,00	49.915.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	745.750.000,00	743.536.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.225.000,00	16.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	951.784.433,00	897.482.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	791.948.000,00	781.187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	10.005.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	261.938.000,00	261.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.005.000,00	9.997.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	510.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	159.836.433,00	116.295.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	10.003.878,00	9.383.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	149.832.555,00	106.912.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	404.750.929,00	111.842.000,00	278.034.847,00	261.190.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	404.750.929,00	111.842.000,00	278.034.847,00	261.190.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	318.490.000,00	52.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	86.260.929,00	59.832.000,00	278.034.847,00	261.190.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	274.896.000,00	269.859.054,00	47.696.700,00	47.685.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	274.896.000,00	269.859.054,00	47.696.700,00	47.685.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	274.896.000,00	269.859.054,00	47.696.700,00	47.685.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	SOSIAL	18.490.860.358,00	12.709.766.762,00	259.209.157,00	237.535.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.318.331.377,00	4.528.823.339,00	67.444.272,00	67.208.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.221.975,00	22.821.775,00	1.809.242,00	1.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.884.683,00	12.505.875,00	1.809.242,00	1.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.337.292,00	10.315.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.270.420.574,00	3.634.166.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.263.260.574,00	3.634.166.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.160.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	227.478.644,00	213.861.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.309.986,00	9.757.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.361.353,00	35.533.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.887.305,00	10.190.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	14.430.000,00	14.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.490.000,00	143.949.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	543.523.844,00	424.753.988,00	65.635.030,00	65.584.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.731.729,00	28.975.936,00	65.635.030,00	65.584.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	424.792.115,00	395.778.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.686.340,00	233.219.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	22.745.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	210.000.000,00	195.881.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.286.340,00	2.276.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.400.000,00	12.317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	530.011.340,00	471.266.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	528.211.340,00	469.466.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	52.887.966,00	34.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	116.720.481,00	105.801.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	358.602.893,00	328.874.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.565.963.541,00	837.062.426,00	146.854.635,00	135.817.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	4.565.963.541,00	837.062.426,00	146.854.635,00	135.817.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	4.434.850.000,00	739.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	72.359.995,00	55.888.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	58.753.546,00	41.324.076,00	146.854.635,00	135.817.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	6.898.821.492,00	6.713.860.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	82.610.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	82.610.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	6.816.211.492,00	6.668.260.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	438.772.405,00	367.078.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	228.999.900,00	214.782.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6.148.439.187,00	6.086.398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	150.166.158,00	136.336.500,00	44.910.250,00	34.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	150.166.158,00	136.336.500,00	44.910.250,00	34.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	149.967.853,00	136.156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	198.305,00	180.000,00	44.910.250,00	34.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	27.566.450,00	22.418.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	27.566.450,00	22.418.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	27.566.450,00	22.418.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	144.651.248.027,00	125.436.616.951,00	34.994.986.109,00	33.887.747.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	TENAGA KERJA	9.755.722.657,00	7.737.631.614,00	114.231.356,00	103.117.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.210.173.160,00	7.303.645.094,00	114.231.356,00	103.117.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.200.671,00	9.274.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.084.256,00	3.713.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.116.415,00	5.560.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.786.802.243,00	6.058.978.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.781.334.018,00	6.053.911.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.468.225,00	5.066.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	280.227.738,00	260.210.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.988.972,00	8.916.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.968.415,00	38.942.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.737.910,00	32.894.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,00	2.427.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.134.875,00	10.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.917.566,00	166.125.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.160.500,00	5.550.000,00	67.798.638,00	62.152.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	23.116.225,00	21.767.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.07.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.160.500,00	5.550.000,00	44.682.413,00	40.385.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	945.029.518,00	821.335.809,00	31.291.548,00	31.074.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	249.237.063,00	135.043.559,00	5.774.175,00	5.749.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.999.007,00	40.270.000,00	15.892.373,00	15.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	649.793.448,00	646.022.250,00	9.625.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.752.490,00	148.296.750,00	15.141.170,00	9.890.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.000.000,00	78.009.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.300.000,00	8.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.447.995,00	45.382.950,00	13.344.760,00	8.260.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.004.495,00	16.349.200,00	1.796.410,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	17.585.433,00	17.542.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	17.585.433,00	17.542.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	17.585.433,00	17.542.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	359.546.040,00	257.126.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	340.633.448,00	243.749.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	309.627.686,00	216.529.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	9.792.542,00	7.989.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	21.213.220,00	19.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	11.981.944,00	8.916.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	11.981.944,00	8.916.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	6.930.648,00	4.460.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	6.930.648,00	4.460.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	120.333.024,00	115.749.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	95.813.148,00	92.658.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	51.393.481,00	49.831.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	9.406.515,00	8.504.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	35.013.152,00	34.322.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.490.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	2.490.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	22.029.876,00	20.690.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	22.029.876,00	20.690.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	48.085.000,00	43.567.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.735.000,00	29.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	15.175.000,00	12.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	16.560.000,00	16.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	16.350.000,00	14.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	16.350.000,00	14.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.241.287.624,00	5.938.087.561,00	130.785.977,00	120.433.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.123.096.503,00	5.366.520.571,00	130.785.977,00	120.433.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.128.832.656,00	4.456.804.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.128.832.656,00	4.456.804.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	324.276.874,00	295.479.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.173.848,00	7.467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.468.932,00	74.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.535.311,00	12.034.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	12.994.708,00	12.179.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.624.075,00	186.958.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	126.023.177,00	115.983.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	16.703.114,00	13.479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	109.320.063,00	102.504.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	512.336.973,00	499.011.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.292.518,00	57.142.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	451.044.455,00	441.868.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.650.000,00	115.225.780,00	4.762.800,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	24.188.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.000.000,00	82.497.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.650.000,00	8.540.000,00	4.762.800,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	157.501.937,00	134.845.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	157.501.937,00	134.845.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	157.501.937,00	134.845.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	291.711.210,00	97.903.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	45.391.972,00	21.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	45.391.972,00	21.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	95.768.111,00	23.261.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	95.768.111,00	23.261.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.551.127,00	53.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	38.276.358,00	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	112.274.769,00	51.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	171.170.679,00	108.100.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	171.170.679,00	108.100.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	171.170.679,00	108.100.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	497.807.295,00	230.717.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	64.982.422,00	41.924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	64.982.422,00	41.924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	394.474.317,00	162.719.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	229.356.724,00	116.063.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	165.117.593,00	46.655.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.350.556,00	26.074.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.350.556,00	26.074.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	PANGAN	9.883.731.130,00	8.644.408.183,00	19.193.008,00	18.045.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.113.139.538,00	5.246.255.006,00	16.039.375,00	15.020.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.885.221,00	10.029.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.884.618,00	6.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.603,00	3.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.357.663.716,00	4.575.674.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.357.663.716,00	4.575.674.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.574.621,00	178.107.250,00	16.039.375,00	15.020.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.357.793,00	4.831.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.112.858,00	29.972.600,00	16.039.375,00	15.020.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.758.970,00	7.408.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.345.000,00	135.894.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	462.199.980,00	433.915.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.733.180,00	21.274.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	414.466.800,00	412.640.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.816.000,00	48.528.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000,00	24.320.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.816.000,00	19.808.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	3.195.754.898,00	2.982.983.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.195.754.898,00	2.982.983.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	1.745.755.330,00	1.566.264.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.02.2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	99.999.900,00	99.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1.299.999.868,00	1.268.799.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	49.999.800,00	47.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	439.638.285,00	313.009.856,00	3.153.633,00	3.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	79.815.074,00	62.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	49.995.000,00	40.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	29.820.074,00	22.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	116.832.869,00	80.833.200,00	3.153.633,00	3.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	116.832.869,00	80.833.200,00	3.153.633,00	3.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	242.990.342,00	169.441.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	15.000.000,00	7.620.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	150.635.427,00	120.501.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	77.354.915,00	41.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	51.918.551,00	32.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	51.918.551,00	32.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	51.918.551,00	32.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	83.279.858,00	69.968.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	83.279.858,00	69.968.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	41.249.595,00	34.696.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	42.030.263,00	35.271.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	PERTANAHAN	3.154.763.205,00	2.729.318.494,00	88.366.897,00	76.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	572.409.590,00	526.947.494,00	88.366.897,00	76.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.	572.409.590,00	526.947.494,00	88.366.897,00	76.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	44.430.000,00	22.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	527.979.590,00	504.297.494,00	88.366.897,00	76.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	2.582.353.615,00	2.202.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	2.582.353.615,00	2.202.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	2.582.353.615,00	2.202.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.11	LINGKUNGAN HIDUP	6.264.279.657,00	4.966.713.757,00	13.780.838.889,00	13.466.555.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	69.936.000,00	65.505.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	69.936.000,00	65.505.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	69.936.000,00	65.505.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	731.877.310,00	604.631.211,00	2.065.797.857,00	2.038.692.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	665.211.468,00	542.116.211,00	2.065.797.857,00	2.038.692.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	189.822.493,00	88.693.409,00	1.299.991.000,00	1.291.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	67.290.000,00	66.916.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	408.098.975,00	386.506.552,00	765.806.857,00	747.567.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	66.665.842,00	62.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	66.665.842,00	62.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	664.932.331,00	594.690.350,00	10.931.542.588,00	10.680.918.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	664.932.331,00	594.690.350,00	10.931.542.588,00	10.680.918.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	664.932.331,00	594.690.350,00	10.931.542.588,00	10.680.918.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	81.789.669,00	78.844.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	81.789.669,00	78.844.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	24.829.850,00	22.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	56.959.819,00	55.989.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	19.999.619,00	18.793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	19.999.619,00	18.793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	19.999.619,00	18.793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.695.744.728,00	3.604.249.296,00	783.498.444,00	746.943.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	4.695.744.728,00	3.604.249.296,00	783.498.444,00	746.943.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	4.656.884.728,00	3.565.484.296,00	733.998.444,00	699.613.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	38.860.000,00	38.765.000,00	49.500.000,00	47.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	8.855.624.340,00	7.928.384.202,00	588.445.065,00	546.123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.063.166.259,00	7.244.883.811,00	588.445.065,00	546.123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00	996.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	996.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.878.451.893,00	4.393.841.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.876.451.893,00	4.391.860.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.000.000,00	1.981.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.693.794.252,00	1.542.459.893,00	200.577.000,00	184.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.432.978,00	5.392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	911.570.906,00	779.866.700,00	200.577.000,00	184.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	94.198.885,00	81.360.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	681.591.483,00	675.841.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.241.674.109,00	1.094.942.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	246.189.333,00	120.261.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	995.484.776,00	974.680.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	248.246.005,00	212.643.295,00	387.868.065,00	361.838.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.995.703,00	28.022.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.000.000,00	53.850.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.200.000,00	38.000.000,00	195.115.800,00	174.497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	108.050.302,00	92.769.750,00	192.752.265,00	187.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	370.088.205,00	325.228.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	370.088.205,00	325.228.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	360.207.950,00	315.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	9.880.255,00	9.880.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	146.199.310,00	107.936.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	146.199.310,00	107.936.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	20.165.795,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	126.033.515,00	107.936.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	276.170.566,00	250.335.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	23.156.664,00	22.738.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	23.156.664,00	22.738.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	253.013.902,00	227.597.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	253.013.902,00	227.597.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.556.383.267,00	10.045.170.919,00	177.222.562,00	159.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.170.799.179,00	5.316.192.069,00	77.385.050,00	71.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.545.567,00	7.228.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.003.879,00	3.472.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.541.688,00	3.755.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.013.204.564,00	4.233.832.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.006.343.671,00	4.227.845.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.860.893,00	5.986.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	415.828.341,00	388.905.179,00	77.385.050,00	71.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.742.281,00	5.511.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.025.643,00	45.713.005,00	77.385.050,00	71.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.218.978,00	4.886.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.313.439,00	6.168.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	342.528.000,00	326.625.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	580.738.557,00	543.659.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.056.134,00	22.645.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.750.000,00	17.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	510.932.423,00	503.942.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.482.150,00	142.566.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	24.977.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.482.150,00	117.589.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	290.871.218,00	248.504.000,00	10.072.728,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	290.871.218,00	248.504.000,00	10.072.728,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	290.871.218,00	248.504.000,00	10.072.728,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	141.854.554,00	122.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	141.854.554,00	122.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	141.854.554,00	122.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.407.519.773,00	2.881.000.445,00	39.020.985,00	34.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	3.407.519.773,00	2.881.000.445,00	39.020.985,00	34.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	45.587.350,00	39.773.000,00	22.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	66.665.473,00	25.201.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2.544.374.609,00	2.197.321.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	159.992.317,00	136.311.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	376.051.429,00	286.567.700,00	17.020.985,00	15.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	154.882.072,00	149.434.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	18.817.946,00	17.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	41.148.577,00	29.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.545.338.543,00	1.477.286.405,00	50.743.799,00	44.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum	1.545.338.543,00	1.477.286.405,00	50.743.799,00	44.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	61.586.961,00	57.978.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	677.953.812,00	654.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	75.436.900,00	66.501.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	249.989.764,00	236.440.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	480.371.106,00	461.602.305,00	50.743.799,00	44.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.157.042.179,00	4.464.595.811,00	1.263.741.008,00	1.140.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	215.934.411,00	176.116.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	24.751.590,00	13.158.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	24.751.590,00	13.158.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	191.182.821,00	162.957.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	21.027.339,00	13.300.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	24.547.373,00	19.786.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	7.964.204,00	7.963.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	137.643.905,00	121.907.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.831.040.660,00	3.363.404.576,00	892.301.016,00	770.762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	826.268.532,00	691.717.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.374.800,00	4.266.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	24.980.236,00	24.100.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	145.318.968,00	97.937.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	166.100.000,00	131.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	445.494.528,00	413.317.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	40.000.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.084.574.005,00	2.067.064.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.084.574.005,00	2.067.064.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	541.798.123,00	318.538.223,00	892.301.016,00	770.762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	9.889.770,00	9.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	431.050.571,00	217.147.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0,00	0,00	892.301.016,00	770.762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	59.750.000,00	57.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	41.107.782,00	33.751.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	378.400.000,00	286.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	378.400.000,00	286.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.110.067.108,00	925.074.801,00	371.439.992,00	369.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.110.067.108,00	925.074.801,00	371.439.992,00	369.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.560.000,00	3.495.000,00	371.439.992,00	369.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	115.901.357,00	104.744.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	159.998.550,00	147.277.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.728.220.000,00	588.347.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	102.387.201,00	81.210.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	PERHUBUNGAN	23.501.859.729,00	21.221.991.790,00	16.492.777.303,00	16.129.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.963.121.124,00	6.965.324.897,00	32.625.464,00	31.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.803.346.407,00	4.989.564.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.802.346.407,00	4.988.792.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.000.000,00	771.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	399.934.293,00	362.007.166,00	32.625.464,00	31.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.640,00	7.951.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.006.853,00	69.230.000,00	32.625.464,00	31.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	8.342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.932.800,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	13.000.000,00	12.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.995.000,00	261.388.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.327.490.424,00	1.197.127.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.470.424,00	75.035.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.219.020.000,00	1.122.091.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	432.350.000,00	416.626.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	23.889.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	357.500.000,00	348.720.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.850.000,00	44.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	15.479.254.172,00	14.211.945.109,00	16.460.151.839,00	16.097.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	34.986.500,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	34.986.500,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	14.913.798.012,00	13.753.228.194,00	15.690.482.805,00	15.338.801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	34.882.688,00	32.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	14.883.818.458,00	13.731.331.094,00	15.655.600.117,00	15.305.921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	29.979.554,00	21.897.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	34.999.800,00	31.818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	34.999.800,00	31.818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	24.999.810,00	22.727.100,00	667.669.362,00	660.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	24.999.810,00	22.727.100,00	667.669.362,00	660.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	230.820.409,00	173.748.315,00	101.999.672,00	98.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	73.720.409,00	47.324.520,00	101.999.672,00	98.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	157.100.000,00	126.423.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	239.649.641,00	225.023.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	99.981.753,00	91.989.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	139.667.888,00	133.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	59.484.433,00	44.721.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha	13.519.711,00	11.705.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia	13.519.711,00	11.705.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	19.914.722,00	18.046.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.07.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	19.914.722,00	18.046.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	6.160.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.15.03.2.12.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	6.160.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	19.890.000,00	11.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	19.890.000,00	11.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	10.169.318.638,00	9.260.071.188,00	205.382.040,00	173.037.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.000.965.788,00	4.292.442.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.420.000,00	9.227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.900.000,00	5.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.520.000,00	3.702.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.812.860.717,00	3.153.626.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.808.380.717,00	3.150.303.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.480.000,00	3.322.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	267.088.059,00	252.910.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.339.079,00	4.713.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.939.516,00	27.195.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.809.464,00	15.898.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196.000.000,00	192.102.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	719.522.121,00	698.357.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.925.151,00	115.727.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	594.596.970,00	582.629.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.074.891,00	178.321.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.983.593,00	56.214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.674.298,00	108.157.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.417.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.396.600.850,00	2.269.417.495,00	24.280.440,00	21.022.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.396.600.850,00	2.269.417.495,00	24.280.440,00	21.022.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.085.411.000,00	1.970.610.000,00	10.839.150,00	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	311.189.850,00	298.807.495,00	13.441.290,00	11.322.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.771.752.000,00	2.698.211.000,00	181.101.600,00	152.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.771.752.000,00	2.698.211.000,00	109.401.600,00	89.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.771.752.000,00	2.698.211.000,00	109.401.600,00	89.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	71.700.000,00	62.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	0,00	0,00	71.700.000,00	62.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.679.090.580,00	14.570.647.400,00	283.236.141,00	267.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.142.570.675,00	7.298.343.500,00	133.237.021,00	119.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.366.677,00	8.765.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.311.230,00	6.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.055.447,00	2.575.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.960.939.310,00	4.258.467.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.957.064.492,00	4.254.841.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.874.818,00	3.626.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	478.973.420,00	433.297.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.968.969,00	4.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.921.844,00	36.640.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	101.602.607,00	73.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	326.000.000,00	316.061.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	129.999.983,00	117.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	129.999.983,00	117.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.492.622.850,00	2.427.684.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.791.600,00	42.488.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.935.619,00	4.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.427.895.631,00	2.380.555.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.668.418,00	170.127.660,00	3.237.038,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.000.000,00	143.326.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.400.000,00	3.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.268.418,00	23.116.000,00	3.237.038,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	424.167.701,00	348.570.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	202.110.671,00	169.911.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	202.110.671,00	169.911.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	222.057.030,00	178.659.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	222.057.030,00	178.659.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	7.112.352.204,00	6.923.733.400,00	149.999.120,00	148.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	7.112.352.204,00	6.923.733.400,00	149.999.120,00	148.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	7.112.352.204,00	6.923.733.400,00	149.999.120,00	148.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	PENANAMAN MODAL	5.369.785.777,00	3.943.064.969,00	22.659.263,00	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.676.563.324,00	3.406.771.296,00	22.659.263,00	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.672.222,00	5.237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.672.222,00	5.237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.872.459.451,00	2.653.542.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.869.219.440,00	2.650.705.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.240.011,00	2.836.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	239.011.630,00	208.636.895,00	22.659.263,00	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.880.035,00	5.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.532.395,00	39.113.000,00	22.659.263,00	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.959.200,00	31.462.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.640.000,00	120.036.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	453.520.021,00	441.368.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.468.950,00	71.836.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	374.051.071,00	369.531.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.900.000,00	97.986.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00	92.086.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	86.918.315,00	83.640.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	86.918.315,00	83.640.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	86.918.315,00	83.640.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	115.856.646,00	87.437.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	115.856.646,00	87.437.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	42.380.700,00	40.938.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	51.990.000,00	25.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	21.485.946,00	21.436.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	419.903.600,00	297.118.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	419.903.600,00	297.118.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	358.189.800,00	291.248.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	61.713.800,00	5.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	70.543.892,00	68.096.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.543.892,00	68.096.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	70.543.892,00	68.096.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAAH RAGA	18.670.941.485,00	17.400.109.002,00	1.050.674.470,00	950.879.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.278.094.341,00	4.820.243.138,00	66.562.940,00	63.238.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.684.492,00	12.495.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.371.906,00	5.411.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.312.586,00	7.084.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.580.855.341,00	3.220.469.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.571.072.660,00	3.213.547.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.782.681,00	6.922.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.184.277,00	246.076.213,00	27.881.799,00	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.588.217,00	1.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.531.038,00	35.898.000,00	27.881.799,00	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.585.022,00	4.347.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,00	2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196.000.000,00	188.463.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.595.005,00	34.663.000,00	38.681.141,00	38.638.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.19.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.595.005,00	34.663.000,00	38.681.141,00	38.638.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.292.275.226,00	1.237.988.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	157.579.765,00	131.196.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.526.894,00	20.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.111.168.567,00	1.086.526.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.500.000,00	68.550.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000,00	46.325.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.000.000,00	6.014.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.500.000,00	16.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.559.026.019,00	1.414.903.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota. Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda	764.072.808,00	634.266.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	764.072.808,00	634.266.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	794.953.211,00	780.636.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	74.999.913,00	73.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	719.953.298,00	707.496.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	11.158.821.125,00	10.647.592.797,00	984.111.530,00	887.640.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.722.537,00	42.889.750,00	984.111.530,00	887.640.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	50.722.537,00	42.889.750,00	984.111.530,00	887.640.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	599.875.234,00	539.102.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	599.875.234,00	539.102.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.198.223.354,00	1.843.875.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	153.496.874,00	125.627.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	2.044.726.480,00	1.718.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	8.310.000.000,00	8.221.724.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	8.310.000.000,00	8.221.724.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	675.000.000,00	517.369.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	675.000.000,00	517.369.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	675.000.000,00	517.369.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	STATISTIK	29.805.090,00	29.770.000,00	20.000.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	29.805.090,00	29.770.000,00	20.000.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	29.805.090,00	29.770.000,00	20.000.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	29.805.090,00	29.770.000,00	20.000.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	PERSANDIAN	16.971.151,00	8.813.750,00	33.000.000,00	28.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	16.971.151,00	8.813.750,00	33.000.000,00	28.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.971.151,00	8.813.750,00	33.000.000,00	28.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.971.151,00	8.813.750,00	33.000.000,00	28.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	KEBUDAYAAN	1.747.672.484,00	1.601.073.113,00	224.549.600,00	202.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	45.999.034,00	40.242.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	45.999.034,00	40.242.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	45.999.034,00	40.242.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.335.927.973,00	1.243.816.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.335.927.973,00	1.243.816.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1.335.927.973,00	1.243.816.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	341.750.110,00	301.913.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	341.750.110,00	301.913.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	341.750.110,00	301.913.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	23.995.367,00	15.100.800,00	224.549.600,00	202.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	23.995.367,00	15.100.800,00	224.549.600,00	202.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	23.995.367,00	15.100.800,00	224.549.600,00	202.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	PERPUSTAKAAN	6.575.009.034,00	4.928.165.198,00	499.882.530,00	466.458.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.029.467.880,00	4.407.627.866,00	200.891.410,00	199.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.006.000.370,00	3.504.037.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.006.000.370,00	3.504.037.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	261.094.928,00	236.955.569,00	51.127.637,00	50.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.456.510,00	11.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.662.463,00	38.900.000,00	51.127.637,00	50.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.990.955,00	23.932.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.985.000,00	162.295.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	621.301.103,00	527.801.194,00	12.536.376,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.783.738,00	70.083.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	469.517.365,00	457.717.380,00	12.536.376,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.071.479,00	138.833.950,00	137.227.397,00	136.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.983.979,00	68.382.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	71.087.500,00	70.451.000,00	137.227.397,00	136.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	545.541.154,00	520.537.332,00	298.991.120,00	267.313.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	545.541.154,00	520.537.332,00	298.991.120,00	267.313.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	545.541.154,00	520.537.332,00	298.991.120,00	267.313.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	KEARSIPAN	21.960.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	21.960.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	21.960.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	21.960.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	52.892.364.337,00	47.549.510.855,00	11.823.062.419,00	10.820.191.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.592.502.172,00	2.355.751.090,00	34.995.000,00	31.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.031.314.223,00	1.932.468.082,00	34.995.000,00	31.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	13.680.000,00	5.060.000,00	34.995.000,00	31.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	13.680.000,00	5.060.000,00	34.995.000,00	31.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.017.634.223,00	1.927.408.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	2.017.634.223,00	1.927.408.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	328.306.687,00	285.096.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	29.866.610,00	25.587.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	29.866.610,00	25.587.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	24.901.530,00	17.870.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.03.01	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.901.530,00	17.870.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	273.538.547,00	241.638.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	273.538.547,00	241.638.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	99.898.026,00	13.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	99.898.026,00	13.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	99.898.026,00	13.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	132.983.236,00	125.131.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	24.999.003,00	24.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.999.003,00	24.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	107.984.233,00	100.996.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	107.984.233,00	100.996.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	PARIWISATA	6.845.042.335,00	5.674.327.840,00	538.155.584,00	307.644.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.282.931.741,00	5.151.360.932,00	181.733.575,00	165.998.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.855.298,00	9.696.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.594.535,00	6.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.260.763,00	3.236.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.641.288.486,00	3.587.820.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.641.288.486,00	3.587.820.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	406.491.562,00	378.817.432,00	17.972.849,00	17.781.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.944.413,00	6.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.146.932,00	72.205.395,00	17.972.849,00	17.781.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.850.378,00	42.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	258.069.839,00	254.802.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.067.846.395,00	1.017.813.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.720.678,00	103.306.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.344.760,00	13.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	922.780.957,00	901.320.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.450.000,00	157.212.400,00	163.760.726,00	148.217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	24.921.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.950.000,00	112.940.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.500.000,00	19.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	163.760.726,00	148.217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	183.456.026,00	183.224.750,00	156.422.009,00	141.646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	42.880.000,00	42.828.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	42.880.000,00	42.828.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	140.576.026,00	140.396.000,00	156.422.009,00	141.646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	97.926.010,00	88.655.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	140.576.026,00	140.396.000,00	58.495.999,00	52.990.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	288.761.957,00	250.418.488,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	288.761.957,00	250.418.488,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	196.675.411,00	161.542.062,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	92.086.546,00	88.876.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	89.892.611,00	89.323.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	44.979.825,00	44.885.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	44.979.825,00	44.885.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	44.912.786,00	44.438.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	44.912.786,00	44.438.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	PERTANIAN	41.926.099.890,00	38.180.442.494,00	10.756.421.293,00	10.018.034.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	34.131.031.034,00	31.012.041.000,00	22.201.334,00	20.666.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.743.164,00	24.171.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.908.000,00	14.578.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.835.164,00	9.592.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.706.363.985,00	27.862.892.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.696.009.025,00	27.853.481.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.354.960,00	9.411.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	707.600.557,00	608.568.821,00	19.314.246,00	17.786.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.523.571,00	19.701.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	192.611.880,00	122.803.900,00	19.314.246,00	17.786.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.344.706,00	50.001.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.290.400,00	17.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.830.000,00	398.851.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	2.887.088,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	2.887.088,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.261.739.628,00	2.135.980.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	348.420.535,00	240.050.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.913.319.093,00	1.895.930.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	428.583.700,00	380.427.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	124.383.700,00	102.140.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	265.000.000,00	248.280.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.200.000,00	30.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.505.537.697,00	1.469.524.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.330.352.697,00	1.314.278.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	900.000.000,00	899.982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	430.352.697,00	414.296.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	99.925.000,00	99.310.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	99.925.000,00	99.310.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	27.560.000,00	18.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	27.560.000,00	18.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	47.700.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	47.700.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.359.281.606,00	5.009.474.850,00	9.239.378.276,00	8.590.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	57.886.000,00	42.029.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	57.886.000,00	42.029.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	5.301.395.606,00	4.967.445.300,00	9.239.378.276,00	8.590.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	4.843.895.617,00	4.537.754.000,00	9.239.378.276,00	8.590.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	299.999.989,00	272.191.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	520.959.078,00	387.745.992,00	98.201.250,00	95.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	457.581.329,00	347.216.450,00	98.201.250,00	95.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	36.796.990,00	34.255.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	420.784.339,00	312.960.700,00	98.201.250,00	95.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	20.963.000,00	14.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.02.03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20.963.000,00	14.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner	42.414.749,00	26.059.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	42.414.749,00	26.059.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	154.509.542,00	133.855.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	154.509.542,00	133.855.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	154.509.542,00	133.855.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	16.721.679,00	16.594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.721.679,00	16.594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.06.2.01.01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	16.721.679,00	16.594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	238.059.254,00	151.207.100,00	1.396.640.433,00	1.311.589.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	238.059.254,00	151.207.100,00	1.396.640.433,00	1.311.589.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	77.916.301,00	61.678.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	107.176.139,00	72.257.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2.193.414,00	1.800.000,00	1.396.640.433,00	1.311.589.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	50.773.400,00	15.471.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	PERDAGANGAN	1.108.233.411,00	965.066.847,00	493.490.542,00	463.212.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	20.000.000,00	10.781.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	10.000.000,00	783.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	10.000.000,00	783.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri	10.000.000,00	9.997.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	10.000.000,00	9.997.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	253.720.029,00	170.020.250,00	485.581.792,00	456.056.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	170.577.728,00	117.434.500,00	485.581.792,00	456.056.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	103.807.728,00	56.662.000,00	485.581.792,00	456.056.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	66.770.000,00	60.772.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	83.142.301,00	52.585.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	45.182.301,00	27.453.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	37.960.000,00	25.132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	329.600.268,00	323.832.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	319.600.268,00	313.857.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.797.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	309.600.268,00	304.059.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	10.000.000,00	9.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	43.822.408,00	35.957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	43.822.408,00	35.957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	43.822.408,00	35.957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	461.090.706,00	424.476.097,00	7.908.750,00	7.155.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	461.090.706,00	424.476.097,00	7.908.750,00	7.155.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	461.090.706,00	424.476.097,00	7.908.750,00	7.155.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	PERINDUSTRIAN	420.486.529,00	373.922.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	338.997.997,00	321.420.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	338.997.997,00	321.420.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	105.149.999,00	98.609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	129.286.498,00	125.701.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	39.405.000,00	34.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	61.620.000,00	58.969.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	3.536.500,00	3.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	11.890.000,00	5.987.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan	11.890.000,00	5.987.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem	6.425.000,00	2.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional	5.465.000,00	3.072.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	69.598.532,00	46.514.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	69.598.532,00	46.514.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	69.598.532,00	46.514.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	137.554.178.073,00	119.461.699.421,00	2.648.364.376,00	2.328.619.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	75.508.519.798,00	70.453.991.047,00	1.299.222.834,00	1.234.796.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	40.059.398.831,00	36.776.341.259,00	1.216.577.834,00	1.167.120.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.389.072,00	16.085.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.039.362,00	7.917.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.349.710,00	8.168.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.680.184.065,00	19.705.155.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.671.184.320,00	19.697.014.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.999.745,00	8.141.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	107.000.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	82.000.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.775.605.062,00	3.562.320.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	119.123.795,00	111.428.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157.879.941,00	136.285.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	336.037.877,00	274.139.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	96.363.449,00	90.657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	39.980.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	74.970.000,00	17.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.951.250.000,00	2.914.160.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	247.315.288,00	218.292.563,00	580.704.124,00	538.198.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	247.315.288,00	218.292.563,00	580.704.124,00	538.198.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.829.069.948,00	5.385.035.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.687.079.048,00	1.403.273.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	528.530.500,00	441.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.613.460.400,00	3.540.470.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.047.893.392,00	3.006.052.828,00	617.909.610,00	610.971.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	233.930.347,00	232.944.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.806.241.019,00	1.801.801.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	20.000.000,00	17.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	613.196.826,00	604.999.648,00	617.909.610,00	610.971.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	374.525.200,00	348.396.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.135.372.676,00	859.783.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	820.886.176,00	766.483.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	94.486.500,00	93.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	220.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.820.090.000,00	2.778.330.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	860.375.000,00	828.412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	657.555.000,00	655.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.302.160.000,00	1.294.581.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	339.863.354,00	254.948.875,00	17.964.100,00	17.951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	117.226.852,00	78.260.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	117.325.689,00	97.524.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	105.310.813,00	79.163.202,00	17.964.100,00	17.951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.056.615.974,00	986.485.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	299.706.344,00	283.644.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	319.752.800,00	293.624.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	437.156.830,00	409.215.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	33.889.307.823,00	32.289.572.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.507.650.564,00	1.137.238.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	1.053.422.440,00	712.494.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	290.131.000,00	264.455.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	164.097.124,00	160.288.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	30.780.351.961,00	30.009.265.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7.042.116.816,00	7.015.702.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	20.439.843.565,00	20.036.513.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	3.298.391.580,00	2.957.048.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.478.407.058,00	1.038.558.036,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	934.463.285,00	688.762.976,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	289.424.241,00	135.148.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	254.519.532,00	214.646.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	122.898.240,00	104.510.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	122.898.240,00	104.510.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.559.813.144,00	1.388.077.788,00	77.145.000,00	67.675.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	446.275.476,00	402.063.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	241.839.150,00	199.106.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	204.436.326,00	202.957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	162.840.082,00	151.229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	162.840.082,00	151.229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	950.697.586,00	834.784.888,00	77.145.000,00	67.675.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	360.007.634,00	323.443.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	204.538.800,00	194.190.000,00	77.145.000,00	67.675.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	386.151.152,00	317.151.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	SEKRETARIAT DPRD	62.045.658.275,00	49.007.708.374,00	1.349.141.542,00	1.093.823.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	35.862.706.409,00	32.345.815.350,00	1.300.307.092,00	1.061.493.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.272.104,00	26.984.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.272.104,00	26.984.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.111.188.711,00	4.504.633.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.053.614.428,00	4.466.601.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.586.898,00	13.133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.987.385,00	24.898.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	323.500.000,00	101.948.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	323.500.000,00	101.948.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.206.241.489,00	2.117.189.457,00	738.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.566.101,00	10.308.332,00	738.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.586.745,00	14.301.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.591.393,00	17.328.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.141.497.250,00	2.075.250.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.735.257,00	22.014.480,00	1.148.123.710,00	923.713.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.735.257,00	22.014.480,00	1.148.123.710,00	923.713.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.301.499.412,00	1.192.546.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	311.290.912,00	258.810.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.241.100,00	14.034.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	973.967.400,00	919.702.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	759.425.241,00	483.804.326,00	151.444.544,00	137.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	234.833.680,00	166.848.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215.925.851,00	153.256.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.670.000,00	33.519.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.494.990,00	0,00	151.444.544,00	137.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	202.500.720,00	130.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	25.231.545.470,00	23.124.696.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.756.352.220,00	22.740.963.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	405.193.250,00	325.775.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	70.000.000,00	57.957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	832.298.725,00	771.997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	33.554.289,00	9.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	798.744.436,00	762.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	26.182.951.866,00	16.661.893.024,00	48.834.450,00	32.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	7.299.256.761,00	4.412.859.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	85.760.449,00	3.567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.997.821.500,00	4.251.080.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	9.796.309,00	2.645.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	205.878.503,00	155.566.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	94.394.280,00	38.438.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	94.394.280,00	38.438.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	67.398.169,00	14.827.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	67.398.169,00	14.827.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.598.984.757,00	2.169.641.373,00	48.834.450,00	32.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	2.164.425.000,00	1.126.384.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	729.427.265,00	434.414.776,00	48.834.450,00	32.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	405.495.000,00	336.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	299.637.492,00	272.842.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.074.297.701,00	682.638.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.074.297.701,00	682.638.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	14.048.620.198,00	9.343.487.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	14.048.620.198,00	9.343.487.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	45.393.959.665,00	40.016.213.647,00	4.923.300.378,00	4.019.732.030,00	22.426.879.377,00	746.426.000,00	224.470.023.140,00	224.230.043.540,00
5.01	PERENCANAAN	8.894.250.165,00	8.114.516.385,00	313.571.876,00	293.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.097.646.414,00	7.591.725.277,00	313.571.876,00	293.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.501,00	8.991.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.501,00	4.172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.290.154.465,00	6.010.993.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.279.156.390,00	6.000.364.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.998.075,00	10.629.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.140.021.316,00	1.020.566.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.655.959,00	22.798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.286.519,00	88.532.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.608.838,00	50.362.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	939.990.000,00	845.513.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.308.265,00	9.420.000,00	313.571.876,00	293.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.308.265,00	9.420.000,00	313.571.876,00	293.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	469.277.417,00	434.253.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.352.500,00	84.658.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	350.924.917,00	349.594.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.885.450,00	106.901.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.048.716,00	13.658.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.236.734,00	60.720.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.600.000,00	32.522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	650.126.753,00	423.886.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	476.606.753,00	274.961.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	476.606.753,00	274.961.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000,00	98.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000,00	98.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	73.520.000,00	50.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	73.520.000,00	50.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	146.476.998,00	98.905.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	29.085.036,00	20.607.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4.121.889,00	3.383.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	7.439.775,00	4.986.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4.999.954,00	3.923.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12.523.418,00	8.313.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	80.373.231,00	46.774.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	52.711.600,00	37.084.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8.905.813,00	7.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3.764.611,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	14.991.207,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	37.018.731,00	31.522.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.999.472,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	13.879.472,00	9.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16.389.647,00	15.883.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4.750.140,00	4.424.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	KEUANGAN	28.212.036.760,00	24.606.556.321,00	3.994.788.502,00	3.706.268.030,00	22.426.879.377,00	746.426.000,00	224.470.023.140,00	224.230.043.540,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	19.044.854.739,00	17.073.810.443,00	319.378.621,00	268.116.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.371.672,00	22.927.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.493.870,00	11.915.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.877.802,00	11.011.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.913.247.170,00	14.231.296.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.896.100.384,00	14.219.877.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.146.786,00	11.418.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.779.303.599,00	1.663.324.939,00	275.241.121,00	224.113.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.957.063,00	12.859.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.908.038,00	128.109.730,00	275.241.121,00	224.113.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	83.924.864,00	60.370.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.491.033.634,00	1.446.105.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	17.497.500,00	17.449.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	17.497.500,00	17.449.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.092.437.761,00	1.014.913.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	271.635.634,00	200.221.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.831.405,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	818.970.722,00	814.092.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.494.537,00	141.348.053,00	26.640.000,00	26.552.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.991.780,00	21.720.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129.106.940,00	74.807.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.345.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.110.817,00	8.520.000,00	26.640.000,00	26.552.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.940.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.576.866.874,00	1.345.093.228,00	0,00	0,00	22.426.879.377,00	746.426.000,00	224.470.023.140,00	224.230.043.540,00
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	493.820.953,00	351.397.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	17.931.205,00	15.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	16.896.788,00	13.508.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	10.771.605,00	9.417.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	7.338.590,00	6.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	4.373.255,00	935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	3.215.643,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	325.088.251,00	223.565.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100.316.723,00	80.689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2.774.775,00	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5.114.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	183.974.010,00	157.619.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2.676.549,00	1.318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	53.137.425,00	46.912.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4.500.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	38.400.000,00	37.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	6.480.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	37.400.000,00	33.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	41.380.036,00	34.319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	899.071.911,00	836.075.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	105.977.031,00	99.752.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	77.218.325,00	74.228.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	108.981.846,00	98.683.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	234.457.251,00	229.932.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	266.564.461,00	239.816.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	18.763.850,00	17.882.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	87.109.147,00	75.779.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	22.426.879.377,00	746.426.000,00	224.470.023.140,00	224.230.043.540,00
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.470.023.140,00	224.230.043.540,00
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	0,00	0,00	22.426.879.377,00	746.426.000,00	0,00	0,00
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.913.584.686,00	5.142.904.686,00	3.675.409.881,00	3.438.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.913.584.686,00	5.142.904.686,00	3.675.409.881,00	3.438.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	39.951.796,00	30.479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	5.106.563.399,00	4.439.889.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	20.746.298,00	15.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	271.942.850,00	261.999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	70.815.000,00	53.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	83.820.149,00	58.880.575,00	381.810.000,00	228.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	75.686.919,00	71.831.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	87.591.850,00	74.690.825,00	3.293.599.881,00	3.210.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	64.944.850,00	52.188.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	44.536.600,00	44.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	46.984.975,00	38.822.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.676.730.461,00	1.044.747.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.676.730.461,00	1.044.747.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	62.985.110,00	26.671.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	414.701.402,00	151.262.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	309.322.801,00	243.148.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	51.270.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	190.017.356,00	143.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	23.355.000,00	11.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	540.295.657,00	391.751.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	34.780.000,00	30.403.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	50.003.135,00	43.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	KEPEGAWAIAN	7.286.312.083,00	6.436.237.601,00	592.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.971.321.908,00	5.484.689.527,00	592.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.029.435,00	7.656.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.981.240,00	4.446.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.048.195,00	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.803.525.947,00	4.447.256.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.795.269.745,00	4.440.410.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.256.202,00	6.846.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	474.830.730,00	409.647.171,00	592.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.467.245,00	2.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	143.788.326,00	91.248.000,00	592.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	86.624.159,00	75.577.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.951.000,00	240.473.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.845.817,00	511.643.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.114.201,00	129.449.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	388.731.616,00	382.194.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.089.979,00	108.485.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.160.000,00	37.057.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.134.200,00	27.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.795.779,00	44.413.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.314.990.175,00	951.548.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	389.300.007,00	198.652.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	8.052.902,00	5.024.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	223.526.794,00	41.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	157.720.311,00	151.743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	460.888.156,00	313.214.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	224.457.443,00	120.081.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	114.940.713,00	108.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	121.490.000,00	84.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	440.140.000,00	419.406.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	125.140.000,00	122.856.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	315.000.000,00	296.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	24.662.012,00	20.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	24.662.012,00	20.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	979.324.244,00	846.592.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	979.324.244,00	846.592.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	979.324.244,00	846.592.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	979.324.244,00	846.592.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	22.036.413,00	12.310.600,00	22.200.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	22.036.413,00	12.310.600,00	22.200.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	15.010.000,00	5.286.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	15.010.000,00	5.286.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	7.026.413,00	7.024.000,00	22.200.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	7.026.413,00	7.024.000,00	22.200.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	13.820.723.043,00	12.719.562.866,00	1.227.799.567,00	1.185.126.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	INSPEKTORAT	13.820.723.043,00	12.719.562.866,00	1.227.799.567,00	1.185.126.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12.778.005.533,00	11.846.617.784,00	1.227.799.567,00	1.185.126.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.664.700,00	12.413.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.962.700,00	3.505.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.702.000,00	8.908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.269.926.366,00	9.553.178.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.269.926.366,00	9.553.178.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	430.650.000,00	318.627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	430.650.000,00	318.627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.649.506.317,00	1.582.199.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.252.338,00	9.317.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.906.027,00	100.598.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.452.437,00	45.315.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,00	3.345.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.470.415.515,00	1.423.621.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.445.238,00	12.775.686,00	617.999.954,00	580.089.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.445.238,00	12.775.686,00	617.999.954,00	580.089.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.221.092,00	274.015.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.495.858,00	63.117.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	225.725.234,00	210.897.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.591.820,00	93.408.716,00	609.799.613,00	605.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.941.820,00	71.873.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.650.000,00	21.535.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	609.799.613,00	605.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	574.979.700,00	454.963.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	406.979.700,00	337.648.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	20.850.000,00	15.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	6.915.000,00	6.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	34.055.000,00	34.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	201.464.700,00	143.487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	143.695.000,00	138.091.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	168.000.000,00	117.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	168.000.000,00	117.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	467.737.810,00	417.981.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	467.737.810,00	417.981.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	174.409.500,00	160.741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	293.328.310,00	257.240.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	53.321.761.301,00	44.717.085.741,00	1.778.153.328,00	1.586.339.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	KECAMATAN	53.321.761.301,00	44.717.085.741,00	1.778.153.328,00	1.586.339.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	42.912.342.172,00	36.517.439.286,00	397.317.030,00	339.426.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.630.406,00	36.933.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.941.306,00	28.587.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.689.100,00	8.345.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.832.407.478,00	31.240.997.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.803.102.478,00	31.221.316.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.805.000,00	15.980.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.842.396.066,00	1.601.741.018,00	132.715.672,00	122.292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	78.323.203,00	65.324.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	633.756.666,00	526.140.587,00	119.140.529,00	108.910.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.603.462,00	2.594.900,00	13.575.143,00	13.381.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	113.473.263,00	61.968.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.720.000,00	12.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	997.519.472,00	933.073.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	488.922,00	350.000,00	229.189.438,00	212.903.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	67.686.403,00	62.149.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	488.922,00	350.000,00	52.349.192,00	49.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	38.357.964,00	35.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	70.795.879,00	65.668.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.141.105.452,00	2.760.103.413,00	35.411.920,00	4.230.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	524.203.502,00	355.524.536,00	34.595.370,00	3.480.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.408.037,00	2.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.610.493.913,00	2.401.772.877,00	816.550,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.017.313.848,00	862.314.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	280.500.000,00	240.211.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	578.278.699,00	492.780.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.452.600,00	90.126.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.151.044,00	13.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.931.505,00	25.515.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.860.463,00	13.434.000,00	25.168.416,00	15.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	15.860.463,00	13.434.000,00	25.168.416,00	15.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.860.463,00	13.434.000,00	25.168.416,00	15.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.329.968.560,00	2.021.104.073,00	1.355.667.882,00	1.231.663.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	80.531.707,00	47.116.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.109.713,00	7.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	37.162.589,00	29.473.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	31.259.405,00	10.532.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.249.436.853,00	1.973.987.707,00	1.355.667.882,00	1.231.663.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	19.995.957,00	16.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	164.882.562,00	161.881.000,00	1.355.667.882,00	1.231.663.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.314.081.714,00	1.055.957.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	750.476.620,00	739.279.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	57.117.234,00	42.637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	57.117.234,00	42.637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	45.117.293,00	31.803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	11.999.941,00	10.834.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.915.119.392,00	6.068.095.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.915.119.392,00	6.068.095.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	158.588.595,00	153.607.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.756.530.797,00	5.914.488.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	91.353.480,00	54.374.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	91.353.480,00	54.374.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24.289.537,00	16.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	4.843.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	62.220.882,00	37.624.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	11.238.582.698,00	10.585.524.319,00	69.736.519,00	67.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.238.582.698,00	10.585.524.319,00	69.736.519,00	67.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.589.870.373,00	5.226.380.822,00	69.736.519,00	67.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.934.375.837,00	4.673.690.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.934.375.837,00	4.673.690.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	240.951.719,00	230.421.809,00	69.736.519,00	67.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.620.245,00	1.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.026.415,00	30.858.215,00	69.736.519,00	67.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.425.059,00	14.868.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.250.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.630.000,00	181.729.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.276.726,00	215.613.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.128.389,00	37.898.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.872.205,00	21.698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	161.276.132,00	156.017.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.266.091,00	106.655.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.191.111,00	16.618.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.074.980,00	77.221.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	12.815.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	219.458.136,00	160.279.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	219.458.136,00	160.279.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	144.535.305,00	109.808.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	74.922.831,00	50.470.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.587.111.014,00	1.575.021.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan	1.587.111.014,00	1.575.021.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	1.587.111.014,00	1.575.021.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	247.145.879,00	197.735.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	247.145.879,00	197.735.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	247.145.879,00	197.735.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.449.997.296,00	3.281.106.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan APBD	Realisasi
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3.449.997.296,00	3.281.106.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	3.249.957.296,00	3.248.216.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	200.040.000,00	32.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pelatihari, 10 Agustus 2023

BUPATI TANAH LAUT

H. SUKAMTA

LAMPIRAN II

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

NO	Uraian	CaLK	TAHUN ANGGARAN 2022	TAHUN ANGGARAN 2021
1	2	3	4	4
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.1.2.1	604.990.188.933,83	990.302.466.610,11
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.1.2.2	604.990.188.933,83	990.302.466.610,11
3	Sub Total		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.1.2.3	831.703.550.940,78	604.990.188.933,83
5	Sub Total		831.703.550.940,78	604.990.188.933,83
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.1.2.4	831.703.550.940,78	604.990.188.933,83

BUPATI TANAH LAUT
SUKAMTA

LAMPIRAN III

Laporan Operasional

III. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CaLK	TAHUN ANGGARAN 2022	TAHUN ANGGARAN 2021
1	2	3	4	4
1	PENDAPATAN - LO	5.1.4.1.1	2.311.644.285.066,64	1.458.713.084.561,91
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.1.4.1.2	168.093.093.620,29	240.672.417.322,89
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO		46.699.782.029,57	44.529.530.973,03
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO		7.288.904.007,00	5.720.388.528,80
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO		12.538.157.208,28	10.377.693.163,20
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LO		101.566.250.375,44	180.044.804.657,86
7	PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.1.4.1.3	2.138.379.085.769,35	1.167.194.767.400,02
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO		1.957.255.861.925,00	1.053.696.441.233,00
9	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		181.123.223.844,35	113.498.326.167,02
10	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.1.4.1.4	5.172.105.677,00	50.845.899.839,00
11	Pendapatan Hibah-LO		5.172.105.677,00	11.733.119.839,00
12	Dana Darurat-LO		0,00	0,00
13	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		0,00	39.112.780.000,00
14	BEBAN	5.1.4.2	1.614.801.880.693,39	1.645.313.309.106,82
15	Beban Pegawai - LO	5.1.4.2.1	653.956.945.688,00	639.840.569.796,56
16	Beban Persediaan	5.1.4.2.2	67.714.598.060,22	39.430.197.101,75
17	Beban Jasa	5.1.4.2.3	343.585.705.542,38	251.028.713.222,98
18	Beban Pemeliharaan	5.1.4.2.4	67.165.991.058,00	44.795.963.221,00
19	Beban Perjalanan Dinas	5.1.4.2.5	45.122.102.741,00	40.228.425.279,00
20	Beban Barang	5.1.4.2.6	0,00	130.879.395.307,41
21	Beban Hibah	5.1.4.2.7	44.321.201.603,00	53.691.496.964,00
22	Beban Bantuan Sosial	5.1.4.2.8	22.416.500.000,00	15.250.290.000,00
23	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.1.4.2.9	242.528.344.798,91	303.077.833.023,09
24	Beban Penyisihan Piutang	5.1.4.2.10	3.796.434.962,30	2.344.293.329,47
25	Beban Lain-lain	5.1.4.2.11	4.057.803.099,58	4.521.621.201,56
26	Beban Transfer	5.1.4.2.12	0,00	0,00
27	Beban Bagi Hasil		4.895.286.950,00	5.183.544.470,00
28	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00

NO	URAIAN	CaLK	TAHUN ANGGARAN 2022	TAHUN ANGGARAN 2021
1	2	3	4	4
29	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
30	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		115.240.966.190,00	115.040.966.190,00
31	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	0,00
32	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa		0,00	0,00
33	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		696.842.404.373,25	(186.600.224.544,91)
34	KEGIATAN NON OPERASIONAL			
35	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO		0,00	0,00
36	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00
37	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		0,00	0,00
38	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO		0,00	0,00
39	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00
40	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.1.4.3	9.651.798.009,56	0,00
41	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		9.651.798.009,56	0,00
42	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		687.190.606.363,69	(186.600.224.544,91)
43	POS LUAR BIASA			
44	Pendapatan Luar Biasa - LO		0,00	0,00
45	Beban Tak Terduga	5.1.4.4	746.426.000,00	6.471.571.965,00
46	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		(746.426.000,00)	(6.471.571.965,00)
47	SURPLUS/DEFISIT-LO		686.444.180.363,69	(193.071.796.509,91)


BUPATI TANAH LAUT
H. SUKAMTA

LAMPIRAN IV

Laporan Perubahan Ekuitas

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CaLK	TAHUN ANGGARAN 2022	TAHUN ANGGARAN 2021
1	2	3	4	4
1	EKUITAS AWAL	5.1.6.1	4.230.967.002.274,38	4.356.301.170.846,20
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.1.6.2	686.444.180.363,69	(193.071.796.509,91)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.1.6.3	73.721.130.756,88	67.737.627.938,09
4	Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
5	Koreksi Ekuitas - Penyusutan dan Amortisasi		282,00	0,00
6	Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang		24.562.414,50	0,00
7	Koreksi Ekuitas -Ekstrakomtabel		0,00	0,00
8	Koreksi Ekuitas -Aset Tetap		22.156.838.543,97	72.738.706.474,39
9	Koreksi Ekuitas -Aset lainnya		837.319.999,93	(10.224.005.230,91)
10	Koreksi Ekuitas -Mutasi Antar SKPD		0,00	0,00
11	Koreksi Ekuitas - Lainnya		(4.760.500,00)	5.222.926.694,61
12	Koreksi Ekuitas - Jasa Giro JKN		0,00	0,00
13	koreksi ekuitas utang PFK		0,00	0,00
14	Koreksi ekuitas utang beban		0,00	0,00
15	Koreksi ekuitas -Kewajiban jangka pendek lainnya		47.005.094.283,21	0,00
16	Koreksi ekuitas -Perubahan Regulasi		0,00	0,00
17	Transfer Antar Entitas		0,00	0,00
18	Koreksi ekuitas -Investasi Jangka Panjang		2.777.835.329,48	0,00
19	Koreksi ekuitas -Pendapatan di Terima di Muka		(4.169.512,00)	0,00
20	Koreksi ekuitas -Piutang		928.409.915,79	0,00
21	EKUITAS AKHIR		4.991.132.313.394,95	4.230.967.002.274,38

BUPATI TANAH LAUT
H. SURAMTA

LAMPIRAN V

Neraca

V. NERACA KOMPARATIF




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT NERACA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CaLK	TAHUN ANGGARAN 2022	TAHUN ANGGARAN 2021
1	2	3	4	4
1	ASET			
2	ASET LANCAR			
3	Kas di Kas Daerah	5.1.3.1	762.266.975.672,06	541.773.574.626,45
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.1.3.2	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.1.3.3	0,00	0,00
6	Kas di BLUD	5.1.3.4	65.761.548.698,67	59.162.059.397,36
7	Kas Lainnya	5.1.3.5	48.431.995,00	0,00
8	Kas di Dana BOS	5.1.3.6	3.626.594.575,05	4.054.554.910,02
9	Setara Kas	5.1.3.8	0,00	0,00
10	Piutang Pajak Daerah	5.1.3.9.1	17.671.672.015,00	16.310.176.319,00
11	Piutang Retribusi Daerah	5.1.3.9.2	745.347.500,00	428.041.500,00
12	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.3.9.3	30.678.546.590,64	57.002.494.023,12
13	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.1.3.9.4	0,00	24.817.804.050,00
14	Piutang Transfer Antar Daerah	5.1.3.9.5	50.656.124.065,67	49.896.491.243,53
15	Piutang Lainnya	5.1.3.9.6	771.850.000,00	816.850.000,00
16	Penyisihan Piutang	5.1.3.9.7	(26.067.607.198,26)	(22.295.734.650,46)
17	Persediaan	5.1.3.10	22.842.008.750,19	27.714.368.100,41
18	Jumlah Aset Lancar		929.001.492.664,02	759.680.679.519,43
19	INVESTASI JANGKA PANJANG			
20	Investasi Non Permanen			
21	Pinjaman Jangka Panjang			
22	Investasi dalam Surat Utang Negara			
23	Investasi dalam Proyek Pembangunan			
24	Investasi Non Permanen Lainnya	5.1.3.11	1.856.677.500,00	2.519.656.250,00
25	Jumlah Investasi Non Permanen		1.856.677.500,00	2.519.656.250,00
26	Investasi Permanen			
27	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.3.12	144.405.364.828,06	117.587.676.158,88
28	Investasi Permanen Lainnya			
29	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		144.405.364.828,06	117.587.676.158,88
30	Jumlah Investasi Jangka Panjang		146.262.042.328,06	120.107.332.408,88
31	ASET TETAP	5.1.3.13		
32	Tanah	5.1.3.13.1	836.235.257.191,35	808.616.413.726,52
33	Peralatan dan Mesin	5.1.3.13.2	656.530.372.042,31	570.096.134.486,45
34	Gedung dan Bangunan	5.1.3.13.3	1.329.095.131.735,75	1.234.545.603.141,78
35	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.3.13.4	2.533.893.026.483,34	2.334.275.258.255,78
36	Aset Tetap Lainnya	5.1.3.13.5	4.830.380.283,00	4.796.764.345,00
37	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.1.3.13.6	16.586.988.476,40	24.530.347.182,50
38	Akumulasi Penyusutan	5.1.3.13.7	(1.814.296.220.981,51)	(1.578.848.367.158,06)
39	Jumlah Aset Tetap		3.562.874.935.230,64	3.398.012.153.979,96

NO	URAIAN	CaLK	TAHUN ANGGARAN 2022	TAHUN ANGGARAN 2021
1	2	3	4	4
40	DANA CADANGAN	5.1.3.14	56.160.390.391,32	15.000.000.000,00
41	Dana Cadangan		56.160.390.391,32	15.000.000.000,00
42	Jumlah Dana Cadangan		56.160.390.391,32	15.000.000.000,00
43	ASET LAINNYA	5.1.3.15		
44	Tagihan Penjualan Angsuran			
45	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran			
46	Tagihan Penjualan Angsuran Netto			
47	Tuntutan Ganti Rugi			
48	Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
49	Aset Tak Berwujud	5.1.3.15.1	5.206.658.805,52	7.556.204.010,52
50	Amortisasi Aset Tak Berwujud		(2.834.236.121,39)	(5.526.751.385,32)
51	Aset Tak Berwujud Netto		2.372.422.684,13	2.029.452.625,20
52	Aset Lain-Lain	5.1.3.15.2	349.666.114.158,06	27.764.661.333,35
53	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		(10.200.895.666,82)	(13.971.547.000,94)
54	Aset Lain-Lain Netto		339.465.218.491,24	13.793.114.332,41
55	Jumlah Aset Lainnya		341.837.641.175,37	15.822.566.957,61
56	JUMLAH ASET		5.036.136.501.789,41	4.308.622.732.865,88
57	KEWAJIBAN			
58	Kewajiban Jangka Pendek	5.1.3.16		
59	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
60	Kewajiban - Penerimaan Dana Jaminan			
61	Utang Bunga			
62	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang			
63	Pendapatan Diterima Dimuka	5.1.3.16.1	346.108.795,96	218.646.756,26
64	Utang Beban	5.1.3.16.2	3.509.128.545,50	5.599.125.149,25
65	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.1.3.16.3	41.148.951.053,00	71.837.958.686,00
66	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		45.004.188.394,46	77.655.730.591,51
67	Kewajiban Jangka Panjang			
68	Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan			
69	Utang Dalam Negeri-Obligasi			
70	Premium (Diskonto) Obligasi			
71	Utang Jangka Panjang Lainnya			
72	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang			
73	Jumlah Kewajiban		45.004.188.394,46	77.655.730.591,51
74	EKUITAS		4.991.132.313.394,95	4.230.967.002.274,38
75	JUMLAH EKUITAS	5.1.3.17	4.991.132.313.394,95	4.230.967.002.274,38
76	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.036.136.501.789,41	4.308.622.732.865,89


 BUPATI TANAH LAUT
 H. SUKAMTA

LAMPIRAN VI

Laporan Arus Kas

VI. LAPORAN ARUS KAS

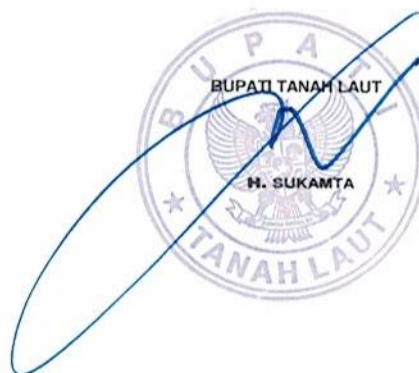

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 Metode Langsung

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	CaLK	TAHUN ANGGARAN 2022	TAHUN ANGGARAN 2021
1	2	3	4	4
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
2	Arus Masuk Kas	5.1.5.2		
3	Penerimaan Pajak Daerah		45.363.440.225,80	43.638.422.656,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		6.971.598.007,00	5.743.153.528,80
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		11.010.810.384,00	9.836.676.685,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		130.373.140.712,07	146.646.076.076,75
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		936.789.879.264,00	360.227.578.392,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		491.839.636.893,00	494.306.446.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		238.521.509.965,00	191.366.167.545,00
10	Penerimaan Dana Insentif Daerah		10.342.946.000,00	19.072.439.000,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Desa		104.093.790.400,00	109.494.413.000,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Pajak		181.618.220.753,00	99.282.497.314,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan		0,00	700.000.000,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
15	Penerimaan Hibah		2.143.662.071,00	3.203.438.570,00
16	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan-undangan		0,00	39.112.780.000,00
17	Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
18	Penerimaan Lainnya		0,00	0,00
19	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
20	Jumlah Arus Masuk Kas		2.159.068.634.674,87	1.522.630.088.767,55
21	Arus Keluar Kas	5.1.1.1		
22	Pembayaran Pegawai		653.956.945.688,00	639.840.569.796,56
23	Pembayaran Barang		520.933.208.907,92	505.996.286.092,44
24	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
25	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
26	Pembayaran Hibah		44.321.201.603,00	53.691.496.964,00
27	Pembayaran Bantuan Sosial		22.416.500.000,00	15.250.290.000,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan		219.334.756.590,00	224.535.379.190,00
29	Pembayaran Tak Terduga		746.426.000,00	6.471.571.965,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		4.100.025.000,00	5.183.544.470,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		795.261.950,00	0,00
32	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
33	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
34	Jumlah Arus Keluar Kas		1.466.604.325.738,92	1.450.969.138.478,00
35	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		692.464.308.935,95	71.660.950.289,55
36	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI ASET NON KEUANGAN			
37	Arus Masuk Kas	5.1.1.2		
38	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
39	Penjualan Atas Tanah		0,00	0,00
40	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin		171.026.425,00	271.301.749,00

No.	URAIAN	CaLK	TAHUN ANGGARAN 2022	TAHUN ANGGARAN 2021
1	2	3	4	4
41	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
42	Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
43	Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
44	Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
45	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
46	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	95.180.000,00
47	Jumlah Arus Masuk Kas		171.026.425,00	366.481.749,00
48	Arus Keluar Kas	5.1.1.3		
49	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	15.000.000.000,00
50	Perolehan Tanah		240.492.000,00	2.897.145.120,00
51	Perolehan Peralatan dan Mesin		91.151.091.039,00	87.589.675.673,00
52	Perolehan Gedung dan Bangunan		104.788.622.560,00	125.469.046.825,83
53	Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi		200.681.712.555,00	226.307.789.870,00
54	Perolehan Aset Tetap Lainnya		395.678.300,00	835.130.626,00
55	Perolehan Aset Tetap BLUD		0,00	0,00
56	Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
57	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
58	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
59	Jumlah Arus Keluar Kas		397.257.596.454,00	458.098.788.114,83
60	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan		(397.086.570.029,00)	(457.732.306.365,83)
61	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN			
62	Arus Masuk Kas			
63	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat		0,00	0,00
64	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
65	Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
66	Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
67	Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi		0,00	0,00
68	Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya		0,00	0,00
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		6.004.455.100,00	5.747.184.400,00
71	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
72	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya		331.168.000,00	11.894.000,00
73	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
75	Jumlah Arus Masuk Kas	5.1.1.4	6.335.623.100,00	5.759.078.400,00
76	Arus Keluar Kas			
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat		0,00	0,00
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi		0,00	0,00
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya		0,00	0,00
83	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
84	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		10.000.000.000,00	5.000.000.000,00
85	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00

No.	URAIAN	CaLK	TAHUN ANGGARAN 2022	TAHUN ANGGARAN 2021
1	2	3	4	4
86	Pembentukan Dana Cadangan		40.000.000.000,00	0,00
87	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		25.000.000.000,00	0,00
88	Jumlah Arus Keluar Kas	5.1.1.5	75.000.000.000,00	5.000.000.000,00
89	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		(68.664.376.900,00)	759.078.400,00
90	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN			
91	Arus Masuk Kas	5.1.1.6		
92	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		95.613.172.096,80	107.164.053.516,98
93	Koreksi SILPA		0,00	0,00
94	Saldo Sisa UP		0,00	0,00
95	Jumlah Arus Masuk Kas		95.613.172.096,80	107.164.053.516,98
96	Arus Keluar Kas	5.1.1.7		
97	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		95.613.172.096,80	107.164.053.516,98
98	Koreksi SILPA		0,00	0,00
99	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		0,00	0,00
100	Jumlah Arus Keluar Kas		95.613.172.096,80	107.164.053.516,98
101	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran		0,00	0,00
102	Kenaikan/Penurunan Kas		226.713.362.006,95	(385.312.277.676,28)
103	Saldo Awal Kas	5.1.1.9	604.990.188.933,83	990.302.466.610,11
104	Kas di RKUD		762.266.976.672,06	541.773.574.626,45
105	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
106	Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
107	Kas di Dana Kapitasi JKN		0,00	0,00
108	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
109	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah		65.761.548.698,67	59.162.059.397,36
110	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, Kas JKN dan BLUD		0,00	0,00
111	Kas di Dana BOS		3.626.594.575,05	4.054.554.910,02
112	Kas Lainnya		48.431.995,00	0,00
113	Kas setara kas		0,00	0,00
114	Saldo Akhir Kas	5.1.1.10	831.703.550.940,78	604.990.188.933,83


 BUPATI TANAH LAUT
 H. SUKAMTA

LAMPIRAN VII

Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I

PENDAHULUAN

DATA UMUM

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yang didirikan pada tahun 1965 berdasarkan Undang-Undang No. 08 Tahun 1965 tanggal 2 Desember 1965, dengan Ibukota Kabupaten di Pelaihari.

LETAK GEOGRAFIS

Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah 3.631,35 Km² atau 9,71% dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan, 135 desa/kelurahan. Daerah yang paling luas yaitu Kecamatan Jorong dengan luas 628,00 Km², kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas 548,10 Km² dan Kecamatan Kintap dengan luas 537,00 Km², sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas 127,00 Km².

Adapun batas administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru;
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu;
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.

PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk pada Tahun 2022 sebanyak 350.007 jiwa dengan rasio jenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan perempuan adalah 106,4 yaitu jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan, dimana dari 100 orang penduduk perempuan terdapat 105 orang penduduk laki-laki. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 sebesar 889 orang. Latar belakang pendidikan dari pencari kerja ini sebagian besar adalah lulusan SMA/Sederajat yakni 307 jiwa, disusul lulusan SMK sebesar 301 jiwa.

Jumlah angkatan kerja yang tersedia berdasarkan data BPS tahun 2022 adalah sebanyak 67,97 persen dimana tingkat partisipasi Angkatan kerja sebanyak 72,27% dan 3,52% tingkat pengangguran terbuka. Lapangan pekerjaan utama adalah pada sektor pertanian yang mencapai 48,82% disusul sektor perdagangan sebesar 19,54% dan sektor jasa kemasyarakatan, social dan perumahan yang mencapai 13,05%.

SUMBER DAYA LAHAN

Tahun 2022 luasan lahan di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari lahan sawah seluas 71.174 Ha dan lahan kering menurut jenis penggunaannya seluas 24.175 Ha serta bukan tanah seluas 47.351 Ha. Jagung merupakan tanaman pangan yang memiliki luas panen terbanyak di Kabupaten Tanah Laut, yaitu seluas 20.014 hektar. Jenis tanaman perkebunan yang potensial untuk menjadi tanaman andalan Kabupaten Tanah Laut adalah tanaman kelapa sawit dan karet. Luas areal tanaman kelapa sawit pada tahun 2022 mencapai 12.622 ha. Sementara untuk tanaman karet, pada tahun 2022 sebesar 14.894.

SUMBER DAYA HUTAN

Luas hutan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 adalah sebesar 127.101,73 Ha. Bila dirinci menurut fungsinya, kawasan hutan lindung memiliki luas 13.849,98 Ha, kawasan hutan produksi 85.802,01 Ha, dan kawasan hutan konservasi 27.449,74 Ha. Kawasan hutan lindung yang memiliki lahan dengan kondisi lahan kritis seluas 4.719,88 Ha dan kondisi lahan sangat kritis 5.053,28 Ha.

SUMBER DAYA AIR

Temperatur maksimum di daerah Tanah Laut pada Tahun 2022 berkisar antara 33,4°C sampai 34,7°C, temperatur minimum berkisar antara 21,1°C sampai 22,9°C dan rata-rata temperatur udara tiap bulan berkisar antara 27,9°C sampai 29,0°C.

Intensitas jumlah curah hujan dari 113,6 mm sampai 407,3 mm dengan jumlah hari hujan antara 12 sampai 25 hari setiap bulan. Musim kemarau/kering terjadi pada bulan Juli hingga September, sebaliknya musim hujan/basah terjadi pada bulan Oktober hingga Juni, meskipun beberapa waktu kebelakang musim panas dan hujan kadang berubah mengikuti perubahan iklim kawasan sekitar.

SUMBER DAYA MINERAL

Sektor pertambangan, khususnya pertambangan batubara, beberapa tahun terakhir berperan penting dalam perekonomian Tanah Laut. Meskipun harus diakui pula lesunya perekonomian global juga berdampak pada lesunya sektor pertambangan yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Tanah Laut. Selain batubara masih banyak potensi pertambangan yang belum digali secara optimal seperti bijih besi, bijih nikel, mangan, dan batu kromit, walaupun secara regional hanya sektor pertambangan batu bara dan bijih besi yang masih berkontribusi terhadap ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

STRUKTUR ORGANISASI

Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang bupati dan didampingi seorang wakil bupati. Sejak Tahun 1966 telah terjadi tiga belas kali pergantian jabatan bupati. Saat ini Bupati Tanah Laut dipimpin oleh Drs. H. Sukamta, M.A.P dengan wakilnya H. Abdi Rahman yang dilantik pada tanggal 5 September 2018. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah membentuk lembaga-lembaga pemerintahan berupa Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor Kecamatan, dan Kantor Kelurahan serta unit kerja lainnya sesuai kebutuhan Pemerintahan Kabupaten.

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Kabupaten Tanah Laut telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya pada Tahun 2010 juga telah terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 dimana terjadi perubahan pada SKPD Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Kemudian di Tahun 2013 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tersebut diatas terjadi perubahan kembali dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah

Laut dimana terjadi perubahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selanjutnya, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut diubah menjadi Inspektorat Kabupaten, serta kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, begitu juga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Perlindungan Masyarakat diubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang semula dihapus kemudian disisipkan kembali dengan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut, dan terakhir kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, mengikuti arah dan pedoman sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga penataan organisasi dapat efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Pada tahun 2021 diterbitkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Adapun Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari:

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3) Inspektorat Kabupaten;
- 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5) Dinas Kesehatan;
- 6) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 7) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
- 8) Dinas Sosial;
- 9) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- 10) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- 11) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 13) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 14) Dinas Perhubungan;
- 15) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 16) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
- 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 18) Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 19) Dinas Perpustakaan dan Arsip;
- 20) Dinas Pariwisata;
- 21) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- 22) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 23) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 24) Badan Pendapatan Daerah;
- 25) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 26) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- 27) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 28) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 29) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 30) Kecamatan Pelaihari;
- 31) Kecamatan Tambang Ulang;
- 32) Kecamatan Kurau;
- 33) Kecamatan Bati Bati;
- 34) Kecamatan Batu Ampar;
- 35) Kecamatan Panyipatan;
- 36) Kecamatan Takisung;
- 37) Kecamatan Jorong;
- 38) Kecamatan Kintap;
- 39) Kecamatan Bajuin;
- 40) Kecamatan Bumi Makmur.

Pada tahun 2021 terdapat perubahan pola tata kelola di 15 (lima belas) Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu pada UPT Puskesmas Asam-Asam, UPT Puskesmas Batakan, UPT Puskesmas Bumi Makmur, UPT Puskesmas Jorong, UPT Puskesmas Kait-Kait, UPT Puskesmas Kintap, UPT Puskesmas Padang Luas, UPT Puskesmas Panyipatan, UPT Puskesmas Pelaihari, UPT Puskesmas Sungai Cuka, UPT Puskesmas Sungai Riam, UPT Puskesmas Tambang Ulang, UPT Puskesmas Takisung, UPT Puskesmas Tanjung Habulu, UPT Puskesmas Tirta Jaya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/944-KUM/2020 tanggal 30 Desember 2020 namun efektif pada tanggal 1 April 2021. Pada tahun 2022 terdapat lagi Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/437-KUM/2022 tentang Penetapan 2 (dua) unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat dan 1 (satu) unit pelaksana teknis laboratorium kesehatan daerah untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada tanggal 14 Januari 2022, yaitu UPT Puskesmas Bentok Kampung, UPT Puskesmas Durian Bungkok dan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 tahun 2018 terdapat perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut yaitu pada 236 (dua ratus tiga puluh enam) Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan pada 48 (empat puluh delapan) Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berlaku efektif paling lambat 1 Januari 2020. Kemudian di tahun 2019 telah didirikan satuan pendidikan baru SMPN 6 Kintap di Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/606-KUM/2019. .

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi Pendapatan dan Belanja dengan Anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi Laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi Keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, Transfer, Pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, Saldo Anggaran Lebih, Surplus/Defisit-Laporan Operasional, Aset, Kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas pemerintah daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong;
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 8) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut;



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

- 21) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 serta Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022;
- 22) Peraturan Bupati Nomor 140 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- 23) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 141 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMRINTAH DAERAH

PENDAHULUAN	
BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah
BAB II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
	2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
	2.2 Kebijakan keuangan
	2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
	3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
	3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV	Kebijakan akuntansi
	4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah
	4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pemerintah daerah
	4.5 Kebijakan akuntansi tertentu
BAB V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
	5.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keaunagn pemerintah daerah
	5.1.1 Pendapatan-LRA
	5.1.2 Belanja
	5.1.3 Pembiayaan
	5.1.4 Pendapatan-LO
	5.1.5 Beban
	5.1.6 Aset
	5.1.7 Kewajiban
	5.1.8 Ekuitas Dana
	5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB VI	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
BAB VII	Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 EKONOMI MAKRO/EKONOMI REGIONAL

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi Tanah Laut Tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut yaitu:

- 1) Tingkat Kemiskinan sebesar 3,86%;
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,17%.
- 3) Gini Ratio sebesar 0,26%;
- 4) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,35%;
- 5) Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,12%;
- 6) Tingkat Inflasi sebesar 6,98%;
- 7) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp19.019.180.

2.1.1 TINGKAT KEMISKINAN

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanah Laut

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Kab/Kota (%)	4,57	3,86	(0,71)
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	15,86	13,54	(2,32)
3	Provinsi (%)	7,62	4,49	3,13
4	Nasional (%)	9,22	9,57	0,35
5	Peringkat Provinsi	9,00	11,00	turun
6	Peringkat Nasional	480,00	409,00	naik

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Persentase penduduk miskin Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2022 sebesar 3,86% mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 4,57% Persentase penduduk miskin Kabupaten Tanah Laut masih di bawah provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan pengangguran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tanah Laut

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,68	0,37	(0,31)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,67	0,63	(0,04)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,67	1,56	(0,11)
4	Peringkat Provinsi	4,00	9,00	turun

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Tabel 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tanah Laut

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,14	0,06	(0,08)
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,13	0,15	(0,02)
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,42	0,38	(0,04)
4	Peringkat Provinsi	3,00	11,00	turun

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

2.1.2 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 adalah sebesar 4,17%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	3,52	4,17	(0,65)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,95	4,74	(0,21)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49	5,90	0,59
4	Peringkat Provinsi	10,00	17,00	turun

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,17%, sedangkan TPT pada Tahun 2021 adalah sebesar 3,52%, atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2021.

Namun demikian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut masih lebih rendah dibandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.

2.1.3 INDEKS GINI (GINI RATIO)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- 1) Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- 2) Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut. Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 adalah sebesar 0,26 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 5 Gini Ratio Kabupaten Tanah Laut

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kab/ Kota	0,22	0,26	0,04
2	Tingkat Provinsi	0,33	0,31	(0,02)
3	Tingkat Nasional	0,38	0,38	0
4	Peringkat Provinsi	5	11	turun
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Pada Tahun 2022, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Tanah yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,26 Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2021 yang sebesar 0,22 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan Nasional.

2.1.4 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- 1) Rendah (< 60)
- 2) Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- 3) Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- 4) Sangat Tinggi (> 80)

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 adalah sebesar 70,35 dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanah Laut

No.	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Kabupaten/Kota	69,87	70,35	0,48
2	Provinsi	71,28	71,84	0,56
3	Indonesia/Nasional	72,29	72,91	0,62
4	Peringkat Provinsi	7,00	7,00	tetap
5	Peringkat Nasional	245,00	251,00	turun

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Tanah Laut

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 70,35 poin, dibandingkan Tahun 2021 sebesar 69,87 poin mengalami kenaikan sebesar 0,48 poin. Peningkatan/penurunan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita .

IPM di Kabupaten Tanah Laut pada saat ini berada pada urutan 7 dari 13 Kab/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dan berada pada urutan 251 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 514 Kab/Kota yang ada di Indonesia, sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan berada pada peringkat 21 dari 34 Provinsi di Indonesia.

2.1.5 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut

No.	IPM (Tingkat)	Kabupaten/Kota			Provinsi Tahun 2022	Nasional Tahun 2022
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	PDRB Menurut Jenis Pengeluaran (harga konstan 2010) (Rp)	10.370.457,25	179.151.113,73	179.151.113,73	179.151.113,73	15.434,20
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	(1,95)	3,47	5,12	5,11	5,31
3	Peringkat Provinsi	10,00	3,00	6,00	3,00	-
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-	-	-	-

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Tanah Laut

Selama kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 perekonomian Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan 5,12%. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kab Tanah Laut menempati urutan 3 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

2.1.6 INFLASI

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*galloping inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*high inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Kemudian (iv) Hiperinflasi (*hyper inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut Tingkat Inflasi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 adalah sebesar 6,98% dengan kategori rendah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8 Tingkat Inflasi Kabupaten Tanah Laut

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Tanah Laut (%)	3,07 (Banjarmasin)	6,98 (Banjarmasin)	3,91
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	3,07	6,99	3,92
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,72	5,51	2,79

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Tingkat inflasi di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 6,99%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2021 adalah sebesar 3,07%. Dengan demikian inflasi Kabupaten Tanah Laut sama dengan tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Selatan namun lebih tinggi dari tingkat inflasi nasional yang sebesar 5,51%.

2.1.7 STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN TANAH LAUT

Struktur perekonomian Kabupaten Tanah Laut dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Dalam Milyaran

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	2 765,38	2.962,56
2	Pertambangan dan Penggalian	3.340,95	6.523,43
3	Industri Pengolahan	1.853,92	1.997,87
4	Pengadaan Listrik dan Gas	15,36	16,69
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	28,58	30,30
6	Konstruksi	1.115,35	1.211,29
7	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.675,99	1.986,70

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
8	Transportasi dan Pergudangan	886,18	1.054,81
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	232,79	254,80
10	Informasi dan Komunikasi	475,90	513,58
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	222,40	235,49
12	<i>Real Estate</i>	309,27	327,41
13	Jasa Perusahaan	53,25	59,16
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	869,54	882,21
15	Jasa Pendidikan	655,13	643,16
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	180,22	192,62
17	Jasa Lainnya	115,50	127,10
18	Produk Domestik Bruto	115,50	19.019,18

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

2.2.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah meliputi:

- 1) Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
 - 2) Pendapatan Transfer terdiri dari:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:
 1. Dana Perimbangan terdiri dari:
 - a. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;
 - b. Dana Transfer Khusus terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
 2. Dana Insentif Daerah
 3. Dana Otonomi Khusus
 4. Dana Keistimewaan
 5. Dana Desa
 - b. Transfer Antar Daerah terdiri dari:
 1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak;
 2. Bantuan Keuangan.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari 3 jenis pendapatan yaitu:
 - a. Hibah berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
 - b. Dana Darurat;
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi;
 - d. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan anggaran pendapatan yang dilaksanakan Tahun 2022 meliputi:

- 1) Melakukan review atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terhadap pendapatan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi saat ini;
- 2) Melakukan pemetaan potensi Pendapatan Asli Daerah khususnya yang terkait dengan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3) Meningkatkan manajemen pendapatan daerah;
- 4) Meningkatkan koordinasi eksternal maupun internal dengan para pengelola pendapatan.

2.2.2 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah meliputi:

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah;
 - f. Belanja Bantuan Sosial;
2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja Aset Tetap Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Selain itu, perubahan yang terjadi adalah dikenalkannya sub kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari kegiatan yang direncanakan dan dibiayai melalui APBD.

Terkait dengan adanya sub kegiatan yang sifatnya *close list*, maka saat ini masih dilakukan pemutakhiran nomenklatur sub kegiatan oleh Kementerian Dalam Negeri RI, sesuai dengan hasil pemetaan yang telah dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Sambil menunggu hasil pemutakhiran maka beberapa sub kegiatan yang belum bisa dicantumkan dalam PPAS untuk sementara indikator dan alokasi dananya disematkan ke sub kegiatan yang sudah ada, untuk kemudian disesuaikan dan dimasukkan dalam kesepakatan rancangan KUA dan rancangan PPAS APBD tahun Anggaran 2022.

Kebijakan Belanja Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan harus berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran dan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi *money follow program* berbasis *money follow function* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok SKPD.

Pada tahun 2022, belanja daerah akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kebijakan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

- a. Memprioritaskan belanja wajib yang harus dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa, bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, belanja hibah kepada Partai Politik dan belanja barang dan jasa yang wajib/mengikat berkaitan dengan kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan, serta program/kegiatan wajib/mengikat yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan untuk dikeluarkan pada tahun berkenaan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja lainnya di setiap SKPD.
- b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dianggarkan pada SKPD terkait.
- c. Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan pada program penguatan pembangunan perdesaan.
- e. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga terutama untukantisipasi dan penanganan bencana alam/non alam maupun bencana sosial.
- f. Belanja daerah setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- g. Belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
- h. Belanja daerah mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah.
- i. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pengendalian dan pemulihan pasca COVID-19.

2.2.3 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Berkaitan dengan arah kebijakan pembiayaan daerah tentunya harus meliputi dua hal tersebut, baik dari sisi penerimaannya maupun dari sudut pengeluarannya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus pada tahun anggaran bersangkutan.

Pembiayaan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. SiLPA
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan daerah terkait dengan penerimaan pembiayaan daerah dikarenakan proyeksi pendapatan untuk tahun 2022 lebih kecil dari proyeksi belanja, sehingga anggaran yang disusun mengalami defisit. Artinya pengeluaran akan lebih besar dari pendapatan. Atas dasar itu maka kebijakan yang ditempuh adalah bagaimana mengamankan belanja yang lebih besar dari pendapatan agar tetap tersedia dananya melalui penerimaan pembiayaan.

Dari 6 (enam) jenis penerimaan pembiayaan, yaitu; SiLPA (sisanya lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang paling memungkinkan dapat mengamankan proyeksi belanja daerah agar tetap terbiayai adalah melalui SiLPA.

Pilihan kebijakan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit dari SiLPA adalah yang paling tepat, karena SiLPA yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, baik karena kelebihan target pendapatan, terjadinya penghematan belanja maupun masih adanya akumulasi dari SiLPA tahun-tahun sebelumnya yang terus terbawa sampai sekarang karena masih belum digunakan cukup signifikan dan dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

2.2.4 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sedangkan Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode Akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode Akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Berdasarkan PSAP 13 pada paragraf 119 disebutkan bahwa Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas Unit yang mempunyai fungsi

perbendaharaan. Adapun untuk Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) merupakan laporan yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan Entitas Pelaporan yang menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Asumsi indikator pencapaian kinerja keuangan dalam APBD tahun 2022 seperti telah dijabarkan pada Kebijakan Keuangan diatas, dalam pelaksanaannya terjadi perkembangan yang menyebabkan perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022:

Tabel 10 Indikator Pencapaian Kinerja APBD dan APBD Perubahan Tahun 2022

Kode	Uraian	APBD 2022	APBD-P 2022
4	PENDAPATAN	1.494.508.572.035,00	1.740.032.489.864,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	168.281.561.435,00	178.390.127.793,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.326.227.010.600,00	1.560.894.562.071,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	747.800.000,00
5	BELANJA	1.635.547.777.496,00	2.122.153.778.445,00
5.1	Belanja Operasi	1.201.672.073.029,00	1.439.029.698.746,00
5.2	Belanja Modal	187.422.954.350,00	436.247.177.182,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	22.626.879.377,00	22.406.879.377,00
5.4	Belanja Transfer	223.825.870.740,00	224.470.023.140,00
	Total Surplus/(Defisit)	(141.039.205.461,00)	(382.121.288.581,00)

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Tanah Laut telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 09 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.

APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (murni) ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp1.494.508.572.035,00 dan anggaran belanja sebesar Rp1.635.547.777.496,00 sehingga dianggarkan terjadi defisit anggaran sebesar Rp141.039.205.461,00.

Kemudian dengan adanya kondisi yang memungkinkan dan terpenuhinya persyaratan dilakukan perubahan APBD melalui Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tanggal 21 Oktober 2022 ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.

APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp1.740.032.489.864,00 dan anggaran belanja sebesar Rp2.122.153.778.445,00 sehingga dianggarkan terjadi defisit anggaran sebesar Rp382.121.288.581,00.

Defisit anggaran tersebut ditutupi dengan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp610.990.188.934,00. Penerimaan pembiayaan juga dipergunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan sebesar Rp75.000.000.000,00.

Realisasi APBD Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2022 terdiri dari realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp2.159.239.661.099,87 dan belanja sebesar Rp1.639.631.878.652,92 serta belanja transfer sebesar Rp224.230.043.540,00 sehingga terjadi surplus anggaran sebesar Rp295.377.738.906,95.

Realisasi Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp611.325.812.033,83 dikurangi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp75.000.000.000,00 maka sisa Pembiayaan Netto sebesar Rp536.325.812.033,83.

Sehingga posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 (SILPA) adalah jumlah surplus sebesar Rp295.377.738.906,95 ditambah sisa atas Pembiayaan Netto sebesar Rp536.325.812.033,83, maka jumlah akumulasi SILPA Tahun Anggaran 2022 posisi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp831.703.550.940,78.

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam hal pencapaian kinerja Keuangan diketahui bersama bahwa target realisasi pendapatan tercapai sesuai dengan yang diharapkan, dimana pencapaiannya diatas 100 persen, hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh *stakeholder* dan SKPD yang bekerja keras dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun diketahui bersama bahwa perlambatan ekonomi regional cukup mempengaruhi komponen penerimaan pendapatan secara keseluruhan, namun dengan berbagai metode baik dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi berbagai sumber penerimaan daerah yang dilaksanakan berhasil meningkatkan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan perencanaan yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2022.

Pencapaian realisasi belanja diketahui bersama bahwa tingkat serapan anggaran tahun 2022 mencapai 87,83 persen, hal ini cukup menggembirakan dalam hal persentasenya dimana pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut dapat menggenjot realisasi belanja yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022, meskipun masih belum mencapai target dari yang dianggarkan hal ini dikarenakan efisiensi yang dilaksanakan oleh seluruh *stakeholder* dan SKPD untuk dapat merealisasikan kegiatan yang benar-benar prioritas.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Kebijakan Akuntansi adalah sebagai berikut.

4.1 IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PERTAMA KALI

Mulai tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos Ekuitas Dana pada Neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) pada tahun 2015 direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali baru mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Tahun 2022 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut disajikan dengan basis akrual sama dengan tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2021.

4.2 ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 dibuat berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, adapun yang membuat Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Tanah Laut.

4.3 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PELAPORAN KEUANGAN

Dalam penyajian Laporan Keuangan, basis akuntansi yang digunakan yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer serta pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, serta ekuitas dana, dengan uraian berikut:

- 1) Basis Kas untuk perkiraan-perkiraan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas yang berarti bahwa pendapatan/penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di kas daerah, dan belanja/transfer/pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah;
- 2) Basis Akrual untuk perkiraan-perkiraan laporan operasional dan neraca yang berarti bahwa pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat timbulnya hak dan kewajiban atau saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.4 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

4.4.1 AKUNTANSI PENDAPATAN – LRA / LO

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

- 1) Pendapatan LRA diakui saat kas telah diterima/masuk ke rekening Kas Umum Daerah;
- 2) Pendapatan LO diakui pada saat munculnya hak tanpa melihat diterima/masuknya kas di Rekening Kas Umum Daerah;
- 3) Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan;
- 4) Pendapatan Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Pengukuran

Seluruh komponen pendapatan LRA dan LO disajikan berdasarkan azas:

- 1) Pendapatan LRA dan Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan Pengeluaran);
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LO dan pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan;
- 3) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Pendapatan LO disajikan dalam laporan Operasional (LO) dengan basis akrual sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari pendapatan LRA dan pendapatan LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

4.4.2 AKUNTANSI BELANJA - BEBAN

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

- 1) Belanja diakui pada saat munculnya kewajiban dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD berupa SP2D GU/SP2D LS/SP2D GU Nihil/SP2D TU Nihil dan nota debit Bank;
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- 3) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
- 4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu;
- 5) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen surat perintah pencairan dana SP2D LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode Akuntansi;
- 6) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban yang telah disahkan oleh pengguna anggaran pada saat pertanggungjawaban (SPJ) atau

diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode Akuntansi.

Batasan Minimal Nilai Kapitalisasi suatu Belanja Menjadi Aset Tetap

Realisasi Belanja dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap atau aset lainnya melalui penetapan batas minimal (*threshold capitalization*). Pengeluaran pengadaan dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi dikapitalisasi untuk persatuan jenis aset tetap sesuai kebijakan akuntansi belanja, sebagai berikut.

1. Tidak ada batasan perolehan untuk tanah, berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi;
2. Perolehan untuk peralatan dan mesin dikapitalisasi dari nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) keatas;
3. Perolehan untuk gedung dan bangunan dikapitalisasi dari nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) keatas;
4. Tidak ada batasan perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi;
5. Pengeluaran untuk aset tetap lainnya dikapitalisasi dari nilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pengukuran

Seluruh komponen belanja dinilai berdasarkan nilai perolehan yaitu nilai historis (*historical cost*) atau nilai pengeluaran kas atas belanja atau nilai wajar pada saat perolehan.

Penilaian

Seluruh komponen belanja diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai belanja maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi atau pada saat pengakuan belanja.

4.4.3 AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima/timbulnya hak pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA;
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan/munculnya kewajiban dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Seluruh komponen penerimaan pembiayaan disajikan berdasarkan:

- 1) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah di kompensasi dengan pengeluaran);
- 2) Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Penilaian

Seluruh komponen pembiayaan diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau

mengurangi nilai pembiayaan maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi atau pada saat pengakuan pembiayaan.

4.4.4 AKUNTANSI ANGGARAN, AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT DAN AKUNTANSI NON ANGGARAN

Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

Akuntansi Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

Akuntansi Non Anggaran

Akuntansi non anggaran merupakan teknik pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, dimana dalam beberapa hal dapat terkait dengan pengakuan pos-pos aset, utang dan ekuitas dana. Akuntansi non anggaran diselenggarakan dengan menggunakan pos-pos diluar struktur anggaran seperti pos pendapatan, pos belanja, dan pos pembiayaan.

Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos:

- 1) Ekuitas Awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan;
- 4) Ekuitas Akhir;

Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4.5 AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai. Setara Kas Pemerintah Daerah ditujukan

untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa adanya resiko perubahan nilai yang signifikan.

4.4.6 AKUNTANSI PIUTANG

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat di realisasi (*net realized value*). Alat untuk menyesuaikannya adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih.

Pengakuan Piutang

Pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang.

Pengukuran Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Prosedur akuntansi piutang meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

Terhadap semua piutang baik yang telah diatur oleh peraturan daerah seperti pajak dan retribusi maupun yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh pemerintah misalnya piutang BLUD, perikatan, penjualan, kerjasama, dan lain-lain untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai perolehan awal dengan pengurang berupa penyisihan untuk piutang yang diragukan dapat ditagih serta benar-benar tidak tertagih ditentukan dengan menggunakan umur piutang yang ditentukan berdasarkan umur piutang sejak jatuh tempo sebagai berikut.

Tabel 11 Penyisihan Piutang

No.	Umur Piutang	Kategori	Penyisihan Piutang (%)
1	0 < 1 Tahun	Lancar	0,50
2	1 – 2 Tahun	Kurang Lancar	30
3	>2 -3 Tahun	Diragukan	50
4	>3 Tahun	Macet	100

4.4.7 AKUNTANSI PERSEDIAAN

1. Persediaan merupakan aset yang berwujud, yang dapat dirumuskan sebagai:
2. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam angka kegiatan operasional pemerintah;
3. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
4. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
5. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki secara swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Pengukuran

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Penilaian

Seluruh komponen persediaan dinilai dengan menggunakan mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai persediaan maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan persediaan.

4.4.8 AKUNTANSI INVESTASI

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Investasi jangka pendek diakui apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1) dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- 2) investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- 3) berisiko rendah.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengakuan Investasi

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- 1) kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran Investasi

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh aset tersebut.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen seperti penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah berupa penerimaan pembiayaan yang dikorolari sebagai pengurangan nilai investasi dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen terdiri dari, Pembelian Surat Utang Negara, Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan Investasi Non Permanen lainnya.

Pengukuran Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat serta tujuan lainnya. Dana Bergulir ini dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan, untuk pengembalian pokok Dana Bergulir dicatat pada Penerimaan Pembiayaan pos penerimaan kembali pinjaman dan bagi hasil usaha Dana Bergulir dicatat pada Pendapatan Asli Daerah - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Penyajian Dana Bergulir di Neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan, tetapi secara periodik harus dilakukan penyesuaian nilai terhadap dana bergulir di Neraca dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dan Tidak Tertagih sehingga menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Pengukuran Dana Bergulir dalam bentuk perguliran ternak (sapi) dari hasil perhitungan jumlah ternak dikalikan harga standar atau harga pasar pada akhir periode akuntansi yang ada pada SKPD pengelola perguliran ternak tersebut.

Piutang bunga yang timbul dari perguliran ternak sapi betina jika ada diperlakukan menambah nilai dana bergulir (investasi non permanen) dan merupakan jumlah yang akan ditagihkan sesuai perjanjian. Untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai perolehan awal dengan pengurang berupa penyisihan untuk dana bergulir yang diragukan dapat ditagih serta benar-benar tidak tertagih yang ditentukan dengan menggunakan umur tunggakan dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 12 Tarif Penyisihan Investasi Non Permanen

No.	Umur Dana Bergulir	Kategori	Penyisihan Dana Bergulir (%)
1	0 – 4 tahun	Lancar	0
2	> 4 – 5 tahun	Ragu Tertagih	50
3	> 5 tahun	Macet	100

Pengukuran pengelolaan kapal kepada nelayan diukur sebesar nilai aset beserta alat tangkap dan kelengkapan yang diserahkan kepada nelayan berdasarkan perjanjian sewa pakai kapal antara nelayan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini SKPD yang menangani.

Pengakuan nilai investasi non permanen lainnya atas pengelolaan kapal kepada nelayan dihitung berdasarkan nilai kapal beserta alat tangkap dan kelengkapannya oleh nelayan

berdasarkan perjanjian/kontrak yang dibuat oleh SKPD terkait dengan nelayan/kelompok nelayan.

Besaran penyisihan investasi non permanen lainnya atas pengelolaan kapal nelayan mengikuti kebijakan akuntansi piutang. Apabila perjanjian/kontrak sewa pakai kapal telah berakhir maka kapal wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Kapal yang telah diserahkan oleh nelayan kepada Pemerintah Daerah dapat dibuat perjanjian/kontrak sewa pakai baru dengan nelayan dan dapat menambah nilai investasi non permanen lainnya. Kapal yang telah diserahkan oleh nelayan kepada Pemerintah Daerah apabila tidak dibuat perjanjian/kontrak sewa pakai kapal yang baru akan dicatat sebagai aset lain-lain. Pengukuran atas nilai aset kapal yang tidak digunakan lagi dengan perpanjangan kontrak baru mengikuti kebijakan akuntansi aset

4.4.9 AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, komputer, alat keselamatan kerja.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung, rambu-rambu, dan tugu titik kontrol/pasti.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai dilaksanakan seluruhnya.

7) Aset Lainnya

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai bukunya.

Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan metode tersebut tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Apabila aset tetap telah habis disusutkan, namun aset tersebut masih bisa dimanfaatkan maka akan dilakukan penilaian kembali dan akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus dengan pendekatan bulanan dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- 1) aset yang di peroleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya, dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai sisa masa manfaatnya;
- 2) aset yang diperoleh setelah neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.

Penambahan masa manfaat atas aset tetap renovasi dan *overhaul* pada tabel masa manfaat dilakukan untuk aset tetap renovasi dan *overhaul* yang diperoleh setelah tahun anggaran 2014. Pengeluaran modal yang menambah masa manfaat ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan, artinya pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan.

Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

Perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan pendekatan bulanan, dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh.

Aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya, dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya.

Aset Donasi

Aset donasi didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perolehan aset donasi.

Perolehan aset donasi diakui sebagai pendapatan pemerintah dan juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang, dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan jaringan dan irigasi, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan jenis asetnya. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

- 1) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

- 1) Tagihan piutang penjualan angsuran;
- 2) Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
- 3) Kemitraan dengan pihak ketiga;
- 4) Aset tidak berwujud;
- 5) Aset lain-lain.

Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan.

Aset tidak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 (lima) tahun.

5.1.1 AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

5.1.2 BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

5.1.3 AKUNTANSI EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode- periode sebelumnya;
 - b. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB VI

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 RINCIAN DARI PENJELASAN DARI MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

6.1.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

6.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA Tahun 2022 sebesar Rp193.890.015.753,87 dari Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA sebesar Rp178.390.127.793,00 atau realisasi sebesar 108,69%. Pendapatan Asli Daerah-LRA ini mengalami penurunan sebesar Rp12.245.614.941,68 atau sebesar 5,94% dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA tahun 2021 sebesar Rp206.135.630.695,55.

Grafik 1 Realisasi PAD 2022



6.1.1.1.1 PAJAK DAERAH

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
41.000.250.000,00	45.363.440.225,80	43.638.422.656,00

Jumlah realisasi Pendapatan Pajak Daerah selama Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp45.363.440.225,80 sedangkan di Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp43.638.422.656,00 terdiri atas:

Tabel 13 Rincian Pendapatan Pajak Daerah

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Pajak Hotel	85.000.000,00	88.001.904,00	103,53	48.977.500,00	79,68
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	435.000.000,00	487.100.153,00	111,98	236.774.452,00	105,72

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
3	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.465.000.000,00	4.305.161.295,80	124,25	4.037.420.782,00	6,63
4	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	60.000.000,00	65.345.000,00	108,91	46.790.000,00	39,66
5	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	449.624.800,00	515.078.891,00	114,56	443.495.864,00	16,14
6	Pajak Reklame Kain	66.412.160,00	46.717.875,00	70,35	54.153.945,00	(13,73)
7	Pajak Reklame Melekat/Stiker	18.087.840,00	18.087.840,00	100,00	17.359.920,00	4,19
8	Pajak Reklame Berjalan	5.875.200,00	5.875.200,00	100,00	5.875.200,00	0,00
9	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	24.450.000.000,00	24.887.516.287,00	101,79	21.009.663.614,00	18,46
10	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	50.000.000,00	52.972.952,00	105,95	60.867.925,00	(12,97)
11	Pajak Parkir	105.250.000,00	118.382.800,00	112,48	37.651.000,00	214,42
12	Pajak Air Tanah	1.250.000.000,00	1.357.979.711,00	108,64	1.222.482.059,00	11,08
13	Pajak Sarang Burung walet	60.000.000,00	75.090.000,00	125,15	93.364.500,00	(19,57)
14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.000.000.000,00	1.630.843.755,00	163,08	1.305.156.468,00	24,95
15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	4.500.000.000,00	5.249.042.846,00	116,65	5.390.241.149,00	(2,62)
16	BPHTB-Pemindahan Hak	4.000.000.000,00	5.448.746.032,00	136,22	2.858.475.687,00	90,62
17	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.000.000.000,00	1.011.497.684,00	101,15	6.769.672.591,00	(85,06)
	Jumlah	41.000.250.000,00	45.363.440.225,80	110,64	43.638.422.656,00	3,95

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.725.017.569,80 atau 3,95% dari tahun sebelumnya. Kenaikan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah ini yang paling dominan disebabkan oleh kenaikan pendapatan pada Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri.

6.1.1.1.2 RETRIBUSI DAERAH

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
7.952.619.500,00	6.971.598.007,00	5.743.153.528,80

Jumlah realisasi pendapatan Retribusi Daerah selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.971.598.007,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.743.153.528,80. Pendapatan Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Retribusi daerah pengelolaannya dilaksanakan oleh SKPD pengelola penerimaan. Anggaran dan realisasi pada TA 2022 untuk masing-masing jenis retribusi serta perbandingannya dengan realisasi pada TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Pendapatan Retribusi

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
	Retribusi Jasa Umum					
1	Retribusi Pelayanan kesehatan	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	375.650.000,00	223.380.000,00	59,46	324.077.500,00	(31,07)
3	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	25.000.000,00	82.700.000,00	330,80	48.147.000,00	71,77
4	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	727.936.000,00	236.403.000,00	32,48	479.718.000,00	(50,72)
5	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	203.294.000,00	425.476.000,00	209,29	182.373.000,00	133,30
6	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	266.890.000,00	739.232.000,00	276,98	234.103.000,00	215,77
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	434.115.000,00	306.330.500,00	70,56	437.562.500,00	(29,99)
8	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.800.000,00	22.330.000,00	206,76	14.240.000,00	56,81
9	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	300.000.000,00	314.499.500,00	104,83	190.478.950,00	65,11
10	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	555.056.000,00	562.424.000,00	101,33	564.880.000,00	(0,43)
	Jumlah	2.898.741.000,00	2.912.775.000,00	100,48	2.476.699.950,00	17,61
	Retribusi Jasa Usaha					
1	Retribusi Penyewaan Bangunan	554.134.000,00	337.995.000,00	61,00	343.956.000,00	(1,73)
2	Retribusi Pemakaian Laboratorium	488.450.000,00	495.792.500,00	101,50	542.789.600,00	(8,66)
3	Retribusi Pemakaian Ruangan	36.800.000,00	46.214.000,00	125,58	29.745.000,00	55,37
4	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	72.915.000,00	97,22	52.485.000,00	38,93
5	Retribusi Pemakaian Alat	311.750.000,00	448.916.500,00	144,00	177.875.000,00	152,38
6	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	238.800.000,00	189.442.000,00	79,33	223.661.500,00	(15,30)
7	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	85.000.000,00	81.700.500,00	96,12	88.465.500,00	(7,65)
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir	565.743.000,00	492.663.000,00	87,08	445.135.500,00	10,68
9	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	61.200.000,00	59.796.000,00	97,71	56.844.000,00	5,19
10	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.220.573.000,00	899.829.000,00	73,72	544.346.500,00	65,30
	Jumlah	3.637.450.000,00	3.125.263.500,00	85,92	2.505.303.600,00	24,75
	Retribusi Perizinan Tertentu					
1	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan bangunan	1.416.428.500,00	933.559.507,00	65,91	761.149.978,80	22,65
	Jumlah	1.416.428.500,00	933.559.507,00	65,91	761.149.978,80	22,65
	Jumlah Total	7.952.619.500,00	6.971.598.007,00	87,66	5.743.153.528,80	21,39

Pendapatan Retribusi sebesar Rp6.971.598.007,00 ini terdiri dari Pendapatan Retribusi Jasa Umum sebesar Rp2.912.775.000,00, Pendapatan Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp3.125.263.500,00 dan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp933.559.507,00. Pendapatan retribusi daerah di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.228.444.478,20 atau 21,39% dari tahun sebelumnya. Kenaikan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah paling dominan disebabkan oleh kenaikan pendapatan pada Retribusi Pelayanan Pasar-Kios.

6.1.1.1.3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
11.010.810.370,00	11.010.810.384,00	9.836.676.685,00

Jumlah realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selama Tahun Anggaran 2022 adalah Rp11.010.810.384,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.836.676.685,00 terdiri atas:

Tabel 15 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Kalsel	10.425.528.033,00	10.425.528.033,00	100,00	9.461.741.668,00	10,19
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank BPR	106.005.337,00	106.005.337,00	100,00	0,00	100,00
3	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. Baratala	479.277.000,00	479.277.014,00	100,00	374.935.017,00	27,83
	Jumlah	11.010.810.370,00	11.010.810.384,00	100,00	9.836.676.685,00	11,94

Pada tahun 2022 pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp1.174.133.699,00 atau 11,94%. Bagian Laba atas Penyertaan Modal BUMN adalah bagian laba dari penyertaan modal di Bank Kalsel, dan Bagian Laba atas penyertaan modal BUMD adalah bagian laba dari penyertaan modal pada PD. Baratala.

6.1.1.1.4 LAIN-LAIN PAD YANG SAH

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
118.426.447.923,00	130.544.167.137,07	146.917.377.825,75

Jumlah realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp130.544.167.137,07 dan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp146.917.377.825,75 terdiri atas:

Tabel 16 Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan	0,00	171.026.425,0	100,00	271.301.749,00	(36,96)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Sewa BMD	481.900.000,00	544.032.742,00	112,89	172.120.382,00	216,08
4	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	119.750.000,00	(37,37)
5	Jasa Giro pada Kas Daerah	11.682.000.000,00	18.071.530.348,14	154,70	17.153.845.293,13	5,35
6	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	318.000.000,00	383.838.274,83	120,70	144.973.481,26	164,76
7	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	0,00	0,00	10.671.270,00	(100,00)
8	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	800.000.000,00	0,00	0,00	16.808.219.172,75	(100,00)
10	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	7.897.950,00	100,00	17.200.000,00	(54,08)
11	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	318.000.000,00	486.442.982,00	152,97	163.569.620,00	197,39
12	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	410.225,00	100.410.125,00	24.476,84	71.427.500,00	40,58
13	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.362.000.000,00	1.622.030.176,84	119,09	530.479.990,94	205,77
14	Pendapatan Denda PBBP2	163.925.000,00	308.410.195,00	188,14	461.266.133,00	(33,14)
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	528.292.202,20	(99,62)
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	241.380.000,00	401.587.962,00	166,37	0,00	100,00
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK	161.499.510,00	161.499.510,00	100,00	0,00	100,00
18	Pendapatan BLUD	102.620.333,188	108.030.172.461,23	105,27	110.394.661.504,47	(2,14)

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	68.950.000,00	(100,00)
20	Lain - Lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	178.287.985,03	100,00	649.527,00	27.348,90
	Jumlah	118.426.447.923,00	130.544.167.137,07	110,23	146.917.377.825,75	(11,14)

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah pada tahun 2022 ini mengalami Penurunan sebesar Rp16.373.210.688,68 atau 11,14% dari tahun sebelumnya. Penurunan Realisasi Lain-lain PAD yang sah ini yang paling dominan disebabkan oleh Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

6.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

6.1.1.2.1 PENDAPATAN TRANSFER

Realisasi Pendapatan Transfer-LRA Tahun 2022 sebesar Rp1.963.205.983.275,00 dari Anggaran Pendapatan Transfer-LRA sebesar Rp1.560.894.562.071,00 atau realisasi sebesar 125,77%. Pendapatan Transfer-LRA ini mengalami kenaikan sebesar Rp688.756.442.024,00 atau sebesar 54,05% dari Realisasi Pendapatan Transfer-LRA tahun 2021 sebesar Rp1.274.449.541.251,00.

Grafik 2 Pendapatan Transfer 2022



Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp1.667.151.026.122,00, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp114.676.716.000 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp181.618.220.753,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Insentif Daerah sebesar Rp10.342.946.000,00 dan Dana Desa sebesar Rp104.093.790.400,00. Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp181.618.220.753,00 dan Bantuan Keuangan sebesar Rp0,00.

6.1.1.2.2 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.335.967.846.071,00	1.667.151.026.122,00	1.045.900.191.937,00

Jumlah realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.667.151.026.122,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.045.900.191.937,00 terdiri atas:

Tabel 17 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No.	Uraian	TA 2022			TA 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Dana Perimbangan	1.335.967.846.071,00	1.667.151.026.122,00	124,79	1.045.900.191.937,00	59,40
	Jumlah	1.335.967.846.071,00	1.667.151.026.122,00	124,79	1.045.900.191.937,00	59,40

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp621.250.834.185,00 atau 59,40% dari tahun sebelumnya. Realisasi Dana Insentif Daerah tahun 2022 dan tahun 2021 sebesar Rp10.342.946.000,00 dan Rp19.072.439.000,00. Realisasi Dana Desa tahun 2022 dan tahun 2021 sebesar Rp104.093.790.400,00 dan sebesar Rp109.494.413.000,00.

1. Dana Perimbangan

Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah realisasi Dana Perimbangan selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.667.151.026.122,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.045.900.191.937,00 terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil

Merupakan pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak/sumber daya alam dari Pemerintah Pusat, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	21.079.690.500,00	37.468.975.202,00	177,75	40.900.148.473,00	(8,39)
2	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	7.344.297.750,00	9.792.397.000,00	133,33	9.229.801.000,00	6,10

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
3	Dana Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND	177.717.750,00	191.211.600,00	107,59	222.713.000,00	(14,14)
4	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	230.250,00	9.810,00	4,26	624,00	1.472,12
5	Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi	60.678.750,00	363.567.992,00	599,17	731.880.700,00	(50,32)
6	Dana Bagi Hasil SDA Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	542.721.600,00	(100,00)
7	Dana Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara (<i>Landrent</i>)	0,00	0,00	0,00	765.343.498,00	(100,00)
8	Dana Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara (<i>Royalty</i>)	543.063.436.500,00	886.407.324.498,00	163,22	306.096.178.297,00	189,58
9	Dana Bagi Hasil SDA Provisi Sumber Daya Hutan	124.891.500,00	608.082.162,00	486,89	381.172.050,00	59,53
10	Dana Bagi Hasil SDA Perikanan	1.468.733.250,00	1.958.311.000,00	133,33	1.357.619.150,00	44,25
	Jumlah	573.319.676.250,00	936.789.879.264,00	163,40	360.227.578.392,00	160,06

Dana Bagi Hasil pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.576.562.300.872,00 atau 160,06%. Kenaikan Dana Bagi Hasil ini yang paling dominan disebabkan oleh Dana Bagi Hasil SDA Mineral dan Batu Bara (*Royalty*) sebesar Rp580.311.146.201,00.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, rincian Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai berikut:

Tabel 19 Dana Alokasi Umum (DAU)

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	492.392.036.893,00	491.839.636.893,00	99,89	494.306.446.000,00	(0,50)
	Jumlah	492.392.036.893,00	491.839.636.893,00	99,89	494.306.446.000,00	(0,50)

Jumlah realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp491.839.636.893,00. Dana Alokasi Umum mengalami penurunan sebesar Rp2.466.809.107,00 dari tahun sebelumnya.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp89.691.850.759,00 sebagai berikut:

Tabel 20 Dana Alokasi Khusus (DAK)

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	DAK Bidang Pendidikan PAUD	200.000.000,00	198.515.000,00	99,26	161.699.500,00	22,77
2	DAK Bidang Pendidikan SD	9.592.503.000,00	8.895.453.690,00	92,73	6.307.404.287,00	41,03
3	DAK Bidang Pendidikan SMP	1.868.130.000,00	1.769.934.990,00	94,74	3.113.373.075,00	(43,15)
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	211.182.000,00	201.080.000,00	95,22	13.635.873.013,00	(98,53)
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	199.921.000,00	177.539.000,00	88,80	0,00	100,00
6	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kesehatan Kefarmasian	3.958.663.000,00	3.441.079.653,00	86,93	3.312.537.670,00	3,88
7	DAK Bidang Kesehatan dan KB - KB	1.267.805.800,00	1.144.157.000,00	90,25	685.072.172,00	67,01
8	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan-Penurunan Stunting	99.135.000,00	77.055.000,00	77,73	219.600.000,00	(64,91)
9	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	8.075.943.773,00	(100,00)
10	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	1.487.567.075,00	(100,00)
11	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	5.977.024.000,00	5.977.020.000,00	100,00	2.793.665.000,00	113,95
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-	17.868.896.367,00	15.733.906.340,00	88,05	0,00	100,00

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
	Reguler-Penurunan AKI dan AKB					
13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	313.852.000,00	296.883.840,00	94,59	0,00	100,00
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	653.000.000,00	398.774.460,00	61,07	0,00	100,00
15	DAK Industri Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	495.376.000,00	(100,00)
16	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	5.423.950.000,00	5.256.882.750,00	96,92	2.910.617.416,00	80,61
17	DAK Kelautan dan Perikanan	407.941.000,00	357.771.036,00	87,70	290.630.000,00	23,10
18	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	11.177.440.000,00	10.762.859.500,00	96,29	15.243.807.735,00	(29,40)
19	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	16.838.902.000,00	16.454.105.000,00	97,71	0,00	100,00
20	DAK Air Minum	11.196.658.000,00	11.033.469.000,00	98,54	6.951.313.000,00	58,72
21	DAK Sanitasi	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	100,00	2.631.288.000,00	(25,89)
22	DAK Irigasi	4.529.999.761,00	4.274.239.500,00	94,35	8.383.048.000,00	(49,01)
23	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.300.000.000,00	1.291.125.000,00	99,32	1.357.310.000,00	(4,88)
	Jumlah	95.035.002.928,00	89.691.850.759,00	94,38	78.056.125.716,00	14,91

Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami kenaikan sebesar Rp11.635.725.043,00 atau 14,91%. Kenaikan paling dominan terdapat pada DAK Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB sebesar Rp15.733.906.340,00.

d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp148.829.659.206,00 sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	41.824.800.000,00	34.913.634.262,00	83,48	0,00	100,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.440.000.000,00	1.240.000.000,00	86,11	0,00	100,00
3	Tunjangan Profesi Guru PNSD	96.698.212.000,00	87.015.173.489,00	89,99	99.243.920.000,00	(12,32)
4	Tambahan penghasilan Guru PNSD	1.572.000.000,00	1.485.145.500,00	94,47	615.467.000,00	141,30



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.088.648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bantuan Operasional PAUD	7.086.600.000,00	6.659.495.000,00	93,97	7.156.218.625,00	(6,94)
7	Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan	1.546.200.000,00	1.546.200.000,00	100,00	1.869.270.400,00	(17,28)
8	BOKKB -Bantuan Operasional Kesehatan	5.929.880.000,00	12.601.997.531,00	212,52	0,00	100,00
9	Bantuan Operasional Kesehatan KB Akreditasi Puskesmas	15.650.774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bantuan Operasional Kesehatan KB Jaminan Persalinan	400.743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Bantuan Operasional Kesehatan KB	605.259.000,00	2.381.946.870,00	393,54	2.615.635.945,00	(8,93)
12	Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM	404.200.000,00	293.245.149,00	72,55	242.878.040,00	20,74
13	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	1.566.651.819,00	(100,00)
14	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	383.914.000,00	244.776.000,00	63,76	0,00	100,00
15	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000,00	354.013.405,00	78,36	0,00	100,00
16	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	138.100.000,00	94.032.000,00	68,09	0,00	100,00
	Jumlah	175.221.130.000,00	148.829.659.206,00	84,94	113.310.041.829,00	31,35

Dana Alokasi Khusus Non Fisik mengalami kenaikan sebesar Rp35.519.617.377,00 atau 31,35%. Kenaikan paling dominan terdapat pada DAK Non Fisik- BOS sebesar Rp36.153.634.262,00.

Pada tahun 2022 ini Pendapatan Dana BOS SD dan SMP masuk dalam Pendapatan Transfer DAK Non Fisik sedangkan tahun 2021 masuk dalam Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Realisasi Dana BOS SD dan SMP tahun 2022 adalah sebesar Rp36.153.634.262,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp39.112.780.000,00.

6.1.1.2.3 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA

Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
(Rp)	(Rp)	(Rp)
114.676.716.000,00	114.436.736.400,00	128.566.852.000,00

Jumlah realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp114.436.736.400,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp128.566.852,00 terdiri atas:

Tabel 22 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

No.	Uraian	TA 2022			TA 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Dana Insentif Daerah (DID)	10.342.946.000,00	10.342.946.000,00	100,00	19.072.439.000,00	(45,77)
2	Dana Desa	104.333.770.000,00	104.093.790.400,00	99,77	109.494.413.000,00	(4,93)
	Jumlah	114.676.716.000,00	114.436.736.400,00	99,79	128.566.852.000,00	(10,99)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp14.130.115.600,00 atau 10,99% dari tahun sebelumnya. Realisasi Dana Insentif Daerah tahun 2022 dan tahun 2021 sebesar Rp10.342.946.000,00 dan Rp19.072.439.000,00. Realisasi Dana Desa tahun 2022 dan tahun 2021 sebesar Rp104.093.790.400,00 dan sebesar Rp109.494.413.000,00.

1. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari pendapatan APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria kategori tertentu yang dialokasikan dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan atau pencapaian kinerja tertentu dibidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. Rincian Dana Insentif Daerah (DID) sebagai berikut:

Tabel 23 Dana Insentif Daerah

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Dana Insentif Daerah	10.342.946.000,00	10.342.946.000,00	100,00	19.072.439.000,00	(45,77)
	Jumlah	10.342.946.000,00	10.342.946.000,00	100,00	19.072.439.000,00	(45,77)

Jumlah realisasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.342.946.000,00. sedangkan realisasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp19.072.439.000,00.

2. Dana Desa

Dana Desa adalah bagian dari dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Rincian Dana Desa sebagai berikut:

Tabel 24 Dana Desa

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Dana Desa	104.333.770.000,00	104.093.790.400,00	99,77	109.494.413.000,00	(4,93)
	Jumlah	104.333.770.000,00	104.093.790.400,00	99,77	109.494.413.000,00	(4,93)

Jumlah realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp104.093.790.400,00, sedangkan realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp109.494.413.000,00.

6.1.1.2.4 PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
110.250.000.000,00	181.618.220.753,00	99.982.497.314,00

Jumlah realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp181.618.220.753,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp99.982.497.314,00 terdiri atas:

Tabel 25 Pendapatan Transfer Antar Daerah

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Pendapatan Dana Bagi Hasil	110.250.000.000,00	181.618.220.753,00	164,73	99.282.497.314,00	82,93
2	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	(100,00)
	Jumlah	110.250.000.000,00	181.618.220.753,00	164,73	99.982.497.314,00	81,65

Selama tahun 2022 Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp81.635.723.439,00 atau 81,65%. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagai berikut:

Tabel 26 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	11.930.000.000,00	22.554.874.481,00	189,06	18.607.709.984,00	21,21
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.750.000.000,00	12.669.510.340,00	75,64	7.216.466.548,00	75,56
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	65.400.000.000,00	127.866.382.092,00	195,51	57.108.906.590,00	123,90
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	160.000.000,00	432.495.949,00	270,31	156.323.166,00	176,67
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	16.010.000.000,00	18.094.957.891,00	113,02	16.193.091.026,00	11,74
	Jumlah	110.250.000.000,00	181.618.220.753,00	164,73	99.282.497.314,00	82,93

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp82.335.723.439,00 atau 82,93% dari tahun sebelumnya. Kenaikan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak paling dominan disebabkan oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp70.757.475.502,00.

Tabel 27 Bantuan Keuangan

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	(100,00)
2	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	(100,00)
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	(100,00)

Bantuan Keuangan Umum pada tahun 2022 sebesar Rp0,00. Jumlah realisasi Bantuan Keuangan Umum pada TA 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp700.000.000,00 atau 100%.

6.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA Tahun 2022 sebesar Rp2.143.662.071,00 sedangkan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2021 sebesar Rp42.316.218.570,00. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 2022



6.1.1.3.1 PENDAPATAN HIBAH

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
747.800.000,00	2.143.662.071,00	3.203.438.570,00

Realisasi Pendapatan Hibah selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.143.662.071,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.203.438.570,00 merupakan Pendapatan Hibah yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Lainnya, Sumbangan Pihak Ketiga Sejenis, Pendapatan Hibah Dana BOS dan Pendapatan atas Pengembalian Hibah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28 Pendapatan Hibah

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	747.800.000,00	2.143.662.071,00	286,66	3.203.438.570,00	(49,44)
	Jumlah	747.800.000,00	2.143.662.071,00	286,66	3.203.438.570,00	(49,44)

Pendapatan Hibah dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Pendapatan Hibah

No.	Pemberi Hibah	Jumlah	Keterangan
1	Pemerintah Pusat	1.288.000.000,00	Hibah Air Minum Pedesaan
2	Sumbangan Pihak Ketiga:		
	PT. Charoend Phokpand	21.000.000,00	Sumbangan Pihak Ketiga Bidang Peternakan
	PT. Pugung Raya	130.216.656,00	Sumbangan Pihak Ketiga Bidang Perkebunan
	PT. Patriot Intan AB	22.200.000,00	Sumbangan Pihak Ketiga Bidang Peternakan
	PT. Adhom Farm Indonesia	10.000.000,00	Sumbangan Pihak Ketiga Bidang Peternakan
	PT. Arutmin	620.456.982,00	Sumbangan Pihak Ketiga Bidang Pertambangan
	PT. Ciomas Adisatwa	2.500.000,00	Sumbangan Pihak Ketiga Bidang Peternakan
	PT. Prima Media Selaras	2.456.000,00	Sumbangan Pihak Ketiga Bidang Surat Kabar dan Iklan
	PT. Sumber Graha Sejahtera	5.934.100,00	Sumbangan Pihak Ketiga Bidang Pengolahan Kayu
	Bank BJB	1.318.333,00	Sumbangan Pihak Ketiga Bank BJB
	BAPOPSI KALSEL	27.600.000,00	Sumbangan Pihak Ketiga Bidang Olahraga
	Sumbangan Masyarakat	11.980.000,00	Sumbangan Masyarakat
	Jumlah Pendapatan Hibah	2.143.662.071,00	

6.1.1.3.2 LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
(Rp)	(Rp)	(Rp)
0,00	0,00	39.112.780.000,00

Jumlah realisasi Lain - Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp39.112.780.000,00 merupakan Lain-Lain Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Hibah Dana BOS dan Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Lain – Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	39.112.780.000,00	(100,00)
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	39.112.780.000,00	(100,00)

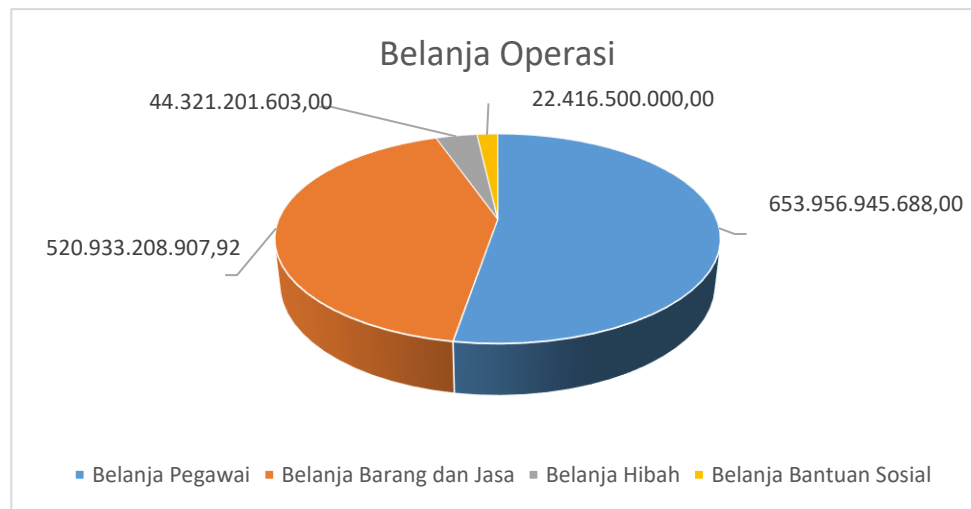
Pada tahun 2022 ini Pendapatan Dana BOS SD dan SMP masuk dalam Pendapatan Transfer DAK Non Fisik sedangkan tahun 2021 masuk dalam Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Realisasi Dana BOS SD dan SMP tahun 2022 adalah sebesar Rp36.153.634.262,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp39.112.780.000,00.

6.1.1.4 BELANJA OPERASI

Belanja operasi untuk tahun anggaran 2022 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp653.956.945.688,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp520.933.208.907,92, Belanja Hibah sebesar Rp44.321.201.603,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp22.416.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp26.849.213.345,92 atau sebesar 2,21% dari tahun sebelumnya.

Grafik 4 Realisasi Belanja Operasi 2022



6.1.1.4.1 BELANJA PEGAWAI

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
761.383.543.055,00	653.956.945.688,00	639.840.569.796,56

Jumlah realisasi Belanja Pegawai selama Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 masing-masing sebesar Rp653.956.945.688,00 dan Rp639.840.569.796,56 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31 Rincian Belanja Pegawai

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	424.884.190.581,00	344.136.034.135,00	81,00	336.808.828.556,00	2,18
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	203.217.769.191,00	193.043.112.050,00	94,99	272.824.841.973,56	(29,24)
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	100.997.548.491,00	87.285.442.015,00	86,42	0,00	100,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24.443.872.220,00	22.428.513.779,00	91,76	0,00	100,00

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	802.542.572,00	726.393.709,00	90,51	0,00	100,00
6	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000,00	912.450.000,00	100,00	23.839.886.856,00	(96,17)
7	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	1.534.915.000,00	(100,00)
8	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	171.739.411,00	(100,00)
9	Belanja Pegawai BOS	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Pegawai BLUD	6.124.750.000,00	5.425.000.000,00	88,58	4.660.358.000,00	16,41
	Jumlah	761.383.543.055,00	653.956.945.688,00	85,89	639.840.569.796,56	2,21

Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp14.116.375.891,44 atau sebesar 2,21% dari tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp344.136.034.135,00 pada tabel di atas terdiri dari:

Tabel 32 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	239.111.599.623,00	194.280.632.131,00	81,25
2	Dinas Kesehatan	72.765.225.337,00	60.274.959.998,00	82,83
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	4.773.784.878,00	3.996.955.132,00	83,73
4	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup	3.872.522.467,00	3.779.085.452,00	97,59
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.306.527.098,00	2.805.109.602,00	84,84
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.518.010.491,00	1.034.651.311,00	68,16
7	Dinas Sosial	3.332.533.990,00	1.738.964.121,00	52,18
8	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4.425.443.238,00	2.861.109.611,00	64,65
9	Dinas Pengendalian Masyarakat, KB, P3A	2.668.832.656,00	2.051.674.162,00	76,88
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.760.421.996,00	2.125.635.065,00	77,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.315.697.893,00	1.943.727.774,00	83,94
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.598.386.729,00	1.965.911.553,00	75,66
13	Dinas Perhubungan	2.950.351.967,00	2.314.655.029,00	78,45
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.679.611.378,00	1.262.914.187,00	75,19
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perdagangan	2.561.342.102,00	1.930.187.507,00	75,36
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.147.219.440,00	1.181.079.694,00	55,01
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.758.600.152,00	1.401.074.542,00	79,67
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.923.304.178,00	1.630.379.568,00	55,77



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
19	Dinas Pariwisata	2.468.243.786,00	1.574.454.690,00	63,79
20	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	12.309.715.397,00	11.085.215.639,00	90,05
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.347.564.325,00	2.818.248.673,00	84,19
22	Sekretariat Daerah	9.410.286.798,00	7.464.044.594,00	79,32
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.568.179.321,00	2.170.472.422,00	84,51
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.484.072.570,00	2.312.642.134,00	93,10
38	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.694.261.460,00	2.883.483.731,00	78,05
39	Badan Pendapatan Daerah	2.212.067.475,00	1.919.741.646,00	86,78
40	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2.086.149.747,00	1.959.691.661,00	93,94
36	Inspektorat Kabupaten	3.864.564.597,00	3.392.446.839,00	87,78
34	Kantor Kecamatan Bajuin	1.379.164.258,00	1.002.041.214,00	72,66
28	Kantor Kecamatan Bati-Bati	1.795.102.860,00	1.254.593.050,00	69,89
29	Kantor Kecamatan Batu Ampar	1.473.003.124,00	1.159.502.198,00	78,72
35	Kantor Kecamatan Bumi Makmur	1.502.135.784,00	1.353.961.011,00	90,14
32	Kantor Kecamatan Jorong	1.352.647.576,00	1.052.180.023,00	77,79
33	Kantor Kecamatan Kintap	1.296.326.787,00	812.251.833,00	62,66
27	Kantor Kecamatan Kurau	1.656.052.958,00	890.428.476,00	53,77
25	Kantor Kecamatan Pelaihari	5.980.382.347,00	4.670.587.533,00	78,10
30	Kantor Kecamatan Panyipatan	1.345.207.068,00	1.189.829.415,00	88,45
31	Kantor Kecamatan Takisung	1.349.500.218,00	1.174.268.650,00	87,02
26	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	1.416.940.675,00	1.165.541.964,00	82,26
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.423.205.837,00	2.251.700.300,00	92,92
	Jumlah	424.884.190.581,00	344.136.034.135,00	81,00

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp193.043.112.050,00 pada tabel di atas terdiri dari:

Tabel 33 Rincian Belanja Tambahan Penghasilan PNS

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	51.617.220.574,00	47.581.621.225,00	92,18
2	Dinas Kesehatan	39.602.716.469,00	38.897.253.247,00	98,22
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	4.489.996.092,00	4.211.664.826,00	93,80
4	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup	3.967.680.831,00	3.951.762.102,00	99,60
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.940.176.252,00	2.842.116.886,00	96,66
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.093.847.724,00	1.040.047.281,00	95,08
7	Dinas Sosial	1.930.726.584,00	1.895.202.593,00	98,16



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
8	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	3.355.890.780,00	3.192.801.699,00	95,14
9	Dinas Pengendalian Masyarakat, KB, P3A	2.460.000.000,00	2.405.129.862,00	97,77
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.597.241.720,00	2.450.039.409,00	94,33
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.560.754.000,00	2.448.132.338,00	95,60
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.407.956.942,00	2.261.934.262,00	93,94
13	Dinas Perhubungan	2.851.994.440,00	2.674.137.750,00	93,76
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.128.769.339,00	1.887.389.019,00	88,66
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perdagangan	2.395.722.390,00	2.324.653.904,00	97,03
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.722.000.000,00	1.469.626.061,00	85,34
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.812.472.508,00	1.812.472.508,00	100,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.082.696.192,00	1.873.657.585,00	89,96
19	Dinas Pariwisata	2.173.044.700,00	2.013.366.022,00	92,65
20	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	11.610.931.803,00	10.600.167.297,00	91,29
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.427.797.500,00	3.349.849.942,00	97,73
22	Sekretariat Daerah	12.260.897.522,00	12.232.969.716,00	99,77
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.485.435.107,00	2.296.129.347,00	92,38
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.795.083.820,00	3.687.722.109,00	97,17
38	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.689.963.372,00	4.526.098.789,00	96,51
39	Badan Pendapatan Daerah	2.874.461.940,00	2.557.594.978,00	88,98
40	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2.709.119.998,00	2.480.718.559,00	91,57
36	Inspektorat Kabupaten	6.405.361.769,00	6.160.731.284,00	96,18
34	Kantor Kecamatan Bajuin	1.167.066.351,00	1.101.130.556,00	94,35
28	Kantor Kecamatan Bati-Bati	1.281.241.204,00	1.232.864.071,00	96,22
29	Kantor Kecamatan Batu Ampar	1.240.000.000,00	1.175.118.044,00	94,77
35	Kantor Kecamatan Bumi Makmur	1.308.263.411,00	1.230.546.547,00	94,06
32	Kantor Kecamatan Jorong	1.183.499.496,00	1.121.915.963,00	94,80
33	Kantor Kecamatan Kintap	1.069.131.483,00	973.254.718,00	91,03
27	Kantor Kecamatan Kurau	1.178.695.212,00	1.037.992.723,00	88,06
25	Kantor Kecamatan Pelaihari	4.149.549.910,00	4.141.688.892,00	99,81
30	Kantor Kecamatan Panyipatan	1.224.529.903,00	1.176.521.394,00	96,08
31	Kantor Kecamatan Takisung	1.228.170.881,00	1.151.696.039,00	93,77
26	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	1.226.490.972,00	1.153.402.656,00	94,04
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.511.170.000,00	2.421.989.847,00	96,45
Jumlah		203.217.769.191,00	193.043.112.050,00	94,99

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPR serta KDH/WKDH sebesar Rp912.450.000,00 pada tabel di atas terdiri dari:

Tabel 34 Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	312.480.000,00	312.450.000,00	99,99
2	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00
	Jumlah	912.480.000,00	912.450.000,00	100,00

Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp1.845.011.250,00 pada tabel di atas terdiri dari:

Tabel 35 Rincian Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
1	Badan Pendapatan Daerah	1.845.011.250,00	1.845.011.250,00	100,00
	Jumlah	1.845.011.250,00	1.845.011.250,00	100,00

Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp282.946.138,00 pada tabel di atas terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
1	Badan Pendapatan Daerah	375.333.637,00	282.946.138,00	75,39
	Jumlah	375.333.637,00	282.946.138,00	75,39

Realisasi Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp5.425.000.000,00 pada tabel di atas merupakan Belanja Pegawai BLUD RSUD H. Boejasin, sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Belanja Pegawai BLUD

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
1	BLUD RSUD H. Boejasin	6.124.750.000,00	5.425.000.000,00	88,58
	Jumlah	6.124.750.000,00	5.425.000.000,00	88,58

7.1.1.1.1 BELANJA BARANG DAN JASA

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
604.326.334.462,00	520.933.208.907,92	505.996.286.092,44

Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa selama Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 masing-masing sebesar Rp520.933.208.907,92 dan Rp505.996.286.092,44 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 38 Rincian Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	76.378.260.779,00	62.820.064.710,00	82,25	68.964.784.786,00	(8,91)
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	24.728.284,00	22.174.000,00	89,67	251.370.000,00	(91,18)
3	Belanja Jasa Kantor	179.770.554.359,00	150.075.772.330,00	83,48	167.853.266.085,00	(10,59)
4	Belanja Premi Asuransi	62.451.560.452,00	60.926.358.860,00	97,56	60.370.090.875,98	0,92
5	Belanja Sewa Tanah	29.500.000,00	1.500.000,00	5,08	0,00	100,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.103.027.903,00	5.156.888.641,00	84,50	4.496.256.100,00	14,69
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.635.468.103,00	1.159.430.400,00	70,89	1.108.573.650,00	4,59
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	59.422.500,00	56.430.000,00	94,96	317.610.500,00	(82,23)
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.854.931.672,00	4.513.046.000,00	92,96	6.737.281.365,00	(33,01)
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.685.803.685,00	3.419.761.062,00	92,78	6.830.656.100,00	(49,94)
11	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	49.980.000,00	46.742.150,00	93,52	0,00	100,00
12	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	280.000.000,00	280.000.000,00	100,00	0,00	100,00
13	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.798.263.800,00	3.940.592.024,00	82,13	2.548.173.174,00	54,64
14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	205.001.250,00	205.001.250,00	100,00	0,00	100,00
15	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	158.502.000,00	(100,00)
16	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.134.725.282,00	10.387.510.351,00	85,60	11.094.752.426,00	(6,37)
17	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.466.183.418,00	1.257.145.157,00	85,74	6.218.522.092,00	(79,78)
18	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	58.887.015.918,00	55.518.935.550,00	94,28	25.985.149.261,00	113,66
19	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	2.750.000,00	(12,73)
20	Belanja Perjalanan Dinas	62.018.718.751,00	45.122.842.241,00	72,76	40.228.425.279,00	12,17
21	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.889.549.698,00	14.367.849.698,00	96,50	4.351.990.976,00	230,14

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
22	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50.000.000,00	0,00	0,00	120.502.800,00	(100,00)
23	Belanja Barang dan Jasa BOS	31.980.168.208,00	27.527.531.405,00	86,08	32.532.379.983,00	(15,38)
24	Belanja Barang dan Jasa BLUD	82.571.070.400,00	74.125.233.078,92	89,77	65.825.248.639,46	12,61
	Jumlah	604.326.334.462,00	520.933.208.907,92	86,20	505.996.286.092,44	2,95

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp14.936.922.815,48 atau sebesar 2,95% dari tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp74.125.233.078,92 pada tabel di atas terdiri dari:

Tabel 39 Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD

No.	Uraian	Nilai
1	Belanja Persediaan	2.083.033.112,00
2	Belanja Jasa	43.586.453.376,92
3	Belanja Pemeliharaan	1.056.048.924,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	3.256.803.136,00
5	Belanja Barang	24.142.894.530,00
	Jumlah	74.125.233.078,92

7.1.1.1.2 BELANJA HIBAH

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
47.079.621.851,00	44.321.201.603,00	53.691.496.964,00

Jumlah realisasi Belanja Hibah selama Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 masing-masing sebesar Rp44.321.201.603,00 dan Rp53.691.496.964,00 terdiri atas:

Tabel 40 Belanja Hibah

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Dana BOP Kesetaraan	1.546.199.812,00	1.524.277.346,00	99,12	2.191.935.000,00	(30,08)
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.243.600.020,00	3.188.021.000,00	98,29	9.779.072.300,00	(67,40)
3	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	897.000.000,00	(100,00)

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
4	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	33.973.324.047,00	31.511.219.048,00	92,75	32.846.697.364,00	(4,07)
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.464.698.550,00	1.464.698.550,00	100,00	1.464.698.550,00	0,00
6	Belanja Hibah Dana BOP PAUD	6.851.799.422,00	6.632.985.659,00	96,69	6.512.093.750,00	1,73
	Jumlah	47.079.621.851,00	44.321.201.603,00	94,14	53.691.496.964,00	(17,45)

Realisasi Belanja Hibah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp9.370.295.361,00 atau sebesar 17,45% dari tahun sebelumnya.

Adapun penjelasan secara rinci atas Hibah sebesar Rp44.321.201.603,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Belanja Hibah Per SKPD

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.087.864.325,00	7.870.112.000,00	97,31
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	7.043.600.014,00	6.832.401.000,00	97,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	21.213.220,00	19.230.000,00	90,65
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	680.440.813,00	623.947.780,00	91,70
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perdagangan	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
6	Dinas Pemuda dan Olahraga	8.985.000.000,00	8.739.094.691,00	97,26
7	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	4.170.820.940,00	3.864.814.000,00	92,66
8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	99.999.989,00	90.564.000,00	90,56
9	Sekretariat Daerah	6.935.000.000,00	6.934.019.700,00	99,99
10	Kantor Kecamatan Bajuin	317.097.000,00	218.377.000,00	68,87
11	Kantor Kecamatan Bati-Bati	382.500.000,00	80.000.000,00	20,92
12	Kantor Kecamatan Batu Ampar	399.340.000,00	384.740.000,00	96,34
13	Kantor Kecamatan Jorong	991.538.000,00	580.000.000,00	58,49
14	Kantor Kecamatan Kintap	995.004.000,00	842.642.882,00	84,69
15	Kantor Kecamatan Kurau	52.750.000,00	52.750.000,00	100,00
16	Kantor Kecamatan Pelaihari	552.255.000,00	427.380.000,00	77,39
17	Kantor Kecamatan Panyipatan	1.000.000.000,00	885.130.000,00	88,51
18	Kantor Kecamatan Takisung	410.500.000,00	410.500.000,00	100,00
19	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	845.000.000,00	355.800.000,00	42,11
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.609.698.550,00	4.609.698.550,00	100,00
	Jumlah	47.079.621.851,00	44.321.201.603,00	94,14

Adapun penjelasan secara rinci atas Hibah Dana BOP PAUD dapat dijelaskan pada **Lampiran 14.**

7.1.1.1.3 BELANJA BANTUAN SOSIAL

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
26.220.200.000,00	22.416.500.000,00	15.250.290.000,00

Jumlah realisasi Belanja Bantuan Sosial selama Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 masing-masing sebesar Rp22.416.500.000,00 dan Rp15.250.290.000,00 dimana realisasi Tahun Anggaran 2022 ini merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat.

Tabel 42 Rincian Belanja Bantuan Sosial

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	15.250.290.000,00	(100,00)
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	23.205.440.000,00	22.416.500.000,00	96,60	0,00	100,00
3	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	3.014.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	26.220.200.000,00	22.416.500.000,00	85,49	15.250.290.000,00	46,99

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp7.166.210.000,00 atau sebesar 46,99% dari tahun sebelumnya.

Disamping itu penjelasan secara rinci atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp22.416.500.000,00 adalah sebagai berikut:

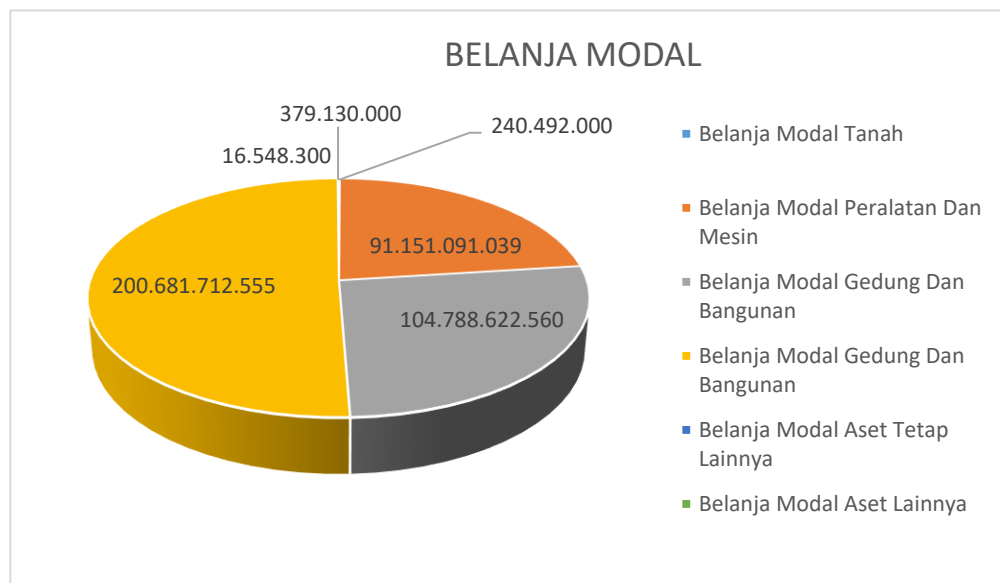
Tabel 43 Rincian Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu

	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu (DAK Fisik Bedah Rumah)	7.835.000.000,00	7.835.000.000,00	100,00	2.793.665.000,00	180,46
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	15.370.440.000,00	14.581.500.000,00	94,87	10.856.625.000,00	34,31
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	1.600.000.000,00	(100,00)
	Jumlah	23.205.440.000,00	22.416.500.000,00	96,60	15.250.290.000,00	46,99

7.1.1.2 BELANJA MODAL

Belanja Modal untuk tahun 2022 terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp240.492.000,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp91.151.091.039,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp104.788.622.560,00, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp200.681.712.555,00, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp395.678.300,00.

Grafik 5 Realisasi Belanja Modal 2022



7.1.1.2.1 BELANJA MODAL TANAH

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
394.310.000,00	240.492.000,00	2.897.145.120,00

Jumlah realisasi Belanja Modal Tanah selama Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 masing-masing sebesar Rp240.492.000,00 dan Rp2.897.145.120,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Belanja Modal Tanah

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	2.675.255.000,00	(100,00)
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	12.500.000,00	12.490.000,00	99,92	0,00	100,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	381.810.000,00	228.002.000,00	59,72	221.890.120,00	2,75
	Jumlah	394.310.000,00	240.492.000,00	60,99	2.897.145.120,00	(91,70)

Realisasi Belanja Modal Tanah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.656.653.120,00 atau sebesar 91,70% dari tahun sebelumnya.

7.1.1.2.2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
109.403.917.048,00	91.151.091.039,00	87.589.675.673,00

Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 masing-masing sebesar Rp91.151.091.039,00 dan Rp87.589.675.673,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	750.869.000,00	(100,00)
2	Pengadaan Alat-alat Bantu	91.373.927,00	75.571.037,00	82,71	123.095.687,00	(38,61)
3	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	6.020.598.789,00	5.562.700.000,00	92,39	10.766.550.700,00	(48,33)
4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	439.462.492,00	437.601.000,00	99,58	158.114.500,00	176,76
5	Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	40.139.265,00	40.100.000,00	99,90	0,00	100,00
6	Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	37.539.242,00	33.862.869,00	90,21	99.648.040,00	(66,02)
7	Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	97.036.900,00	(98,76)
8	Pengadaan Alat Ukur	165.253.455,00	133.017.397,00	80,49	1.516.681.260,00	(91,23)
9	Pengadaan Alat Pengolahan	4.012.760,00	3.660.000,00	91,21	458.208.000,00	(99,20)
10	Pengadaan Alat Kantor	1.160.234.639,00	1.046.812.161,00	90,22	2.405.291.432,00	(56,48)
11	Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.590.543.589,00	11.211.566.881,00	82,50	13.525.580.155,00	(17,11)
12	Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	89.514.655,00	81.655.275,00	91,22	1.424.604.208,00	(94,27)
13	Pengadaan Alat Studio	428.833.647,00	364.940.725,00	85,10	1.330.275.477,00	(72,57)
14	Pengadaan Alat Komunikasi	91.398.928,00	87.536.000,00	95,77	181.801.363,00	(51,85)
15	Pengadaan Peralatan Pemancar	82.720.035,00	79.550.000,00	96,17	556.165.127,00	(85,70)
16	Pengadaan Alat Kedokteran	49.092.836.592,00	39.251.146.725,00	79,95	25.123.422.359,00	56,23
17	Pengadaan Alat Kesehatan Umum	25.495.068.198,00	21.538.777.025,00	84,48	244.952.420,00	8.693,05
18	Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	2.025.129.079,00	1.631.084.554,00	80,54	13.410.804.943,00	(87,84)
19	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	144.407.329,00	120.053.750,00	83,14	0,00	100,00
20	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.915.825.358,00	1.895.533.000,00	98,94	0,00	100,00
21	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	110.000.000,00	109.500.000,00	99,55	0,00	100,00
22	Pengadaan Komputer Unit	6.582.410.221,00	5.784.885.623,00	87,88	14.297.887.247,00	(59,54)

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
23	Belanja Modal Peralatan Komputer	919.898.388,00	823.978.817,00	89,57	0,00	100,00
24	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	170.844.300,00	168.300.000,00	98,51	0,00	100,00
25	Belanja Modal Alat Pelindung	69.734.500,00	69.508.200,00	99,68	0,00	100,00
26	Belanja Modal Alat SAR	153.162.077,00	130.870.000,00	85,45	0,00	100,00
27	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	359.999.992,00	358.600.000,00	99,61	0,00	100,00
28	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	25.663.000,00	25.530.000,00	99,48	472.309.000,00	(94,59)
29	Belanja Modal Peralatan Olahraga	96.112.591,00	83.550.000,00	86,93	594.546.000,00	(85,95)
30	Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	0,00	51.831.855,00	(100,00)
	Jumlah	109.403.917.048,00	91.151.091.039,00	83,32	87.589.675.673,00	4,07

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.561.415.366,00 atau sebesar 4,07% dari tahun sebelumnya.

7.1.1.2.3 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
112.572.068.902,00	104.788.622.560,00	125.469.046.825,83

Jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 masing-masing sebesar Rp104.788.622.560,00 dan Rp125.469.046.825,83, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	103.211.117.944,00	96.021.771.688,00	93,03	110.535.638.888,83	(13,13)
2	Pengadaan Bangunan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	199.320.000,00	179.161.000,00	89,89	7.685.029.000,00	(97,67)
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	9.161.630.958,00	8.587.689.872,00	93,74	5.444.423.937,00	57,73
4	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	220.100.000,00	(100,00)
5	Pengadaan Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	1.583.855.000,00	(100,00)
	Jumlah	112.572.068.902,00	104.788.622.560,00	93,09	125.469.046.825,83	(16,48)

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp20.680.424.265,83 atau sebesar 16,48% dari tahun sebelumnya.

7.1.1.2.4 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
213.225.317.172,00	200.681.712.555,00	226.307.789.870,00

Jumlah realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan untuk Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 masing-masing sebesar Rp200.681.712.555,00 dan Rp226.307.789.870,00 terdiri atas:

Tabel 47 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Pengadaan Jalan	97.352.523.848,00	92.430.628.008,00	94,94	129.487.456.023,00	(28,62)
2	Pengadaan Jembatan	33.281.084.875,00	31.903.296.930,00	95,86	29.751.184.500,00	7,23
3	Pengadaan Bangunan Air Irigasi	5.079.742.467,00	4.264.206.800,00	83,95	7.804.146.000,00	(45,36)
4	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	2.999.741.429,00	2.804.942.000,00	93,51	0,00	100,00
5	Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10.426.563.663,00	10.205.464.917,00	97,88	12.158.781.000,00	(16,07)
6	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.429.038.200,00	1.290.087.000,00	90,28	0,00	100,00
7	Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	31.660.553.360,00	28.522.227.400,00	90,09	22.634.985.000,00	26,01
8	Pengadaan Bangunan Air Kotor	13.130.751.000,00	11.964.112.300,00	91,12	12.061.776.000,00	(0,81)
9	Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	2.029.941.982,00	1.796.364.300,00	88,49	1.527.700.000,00	17,59
10	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.263.701.250,00	1.128.421.000,00	89,29	1.181.634.000,00	(4,50)
11	Pengadaan Jaringan Listrik	14.571.675.098,00	14.371.961.900,00	98,63	8.489.587.000,00	69,29
12	Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	1.196.097.000,00	(100,00)
13	Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	14.443.347,00	(100,00)
	Jumlah	213.225.317.172,00	200.681.712.555,00	94,12	226.307.789.870,00	(11,32)

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp25.626.077.315,00 atau sebesar 11,32% dari tahun sebelumnya.

7.1.1.2.5 BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
24.289.060,00	16.548.300,00	835.130.626,00

Jumlah realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 masing-masing sebesar Rp16.548.300,00 dan Rp835.130.626,00 terdiri atas:

Tabel 48 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	19.609.300,00	12.098.300,00	61,70	119.739.500,00	(89,90)
2	Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	4.679.760,00	4.450.000,00	95,09	43.915.126,00	(89,87)
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	529.324.000,00	(100,00)
4	Pengadaan Tanaman	0,00	0,00	0,00	17.880.000,00	(100,00)
6	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	124.272.000,00	(100,00)
	Jumlah	24.289.060,00	16.548.300,00	68,13	835.130.626,00	(98,02)

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp818.582.326,00 atau sebesar 98,02% dari tahun sebelumnya.

7.1.1.2.6 BELANJA MODAL ASET LAINNYA

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
627.275.000,00	379.130.000,00	0,00

Jumlah realisasi Belanja Modal Aset Lainnya selama Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 masing-masing sebesar Rp379.130.000,00 dan Rp0,00. Rincian Belanja Aset lainnya sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Software	627.275.000,00	379.130.000,00	60,44	0,00	100,00
	Jumlah	627.275.000,00	379.130.000,00	60,44	0,00	100,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp379.130.000,00 atau sebesar 100,00% dari tahun sebelumnya.

7.1.1.3 BELANJA TIDAK TERDUGA

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
<u>22.426.879.377,00</u>	<u>746.426.000,00</u>	<u>6.471.571.965,00</u>

Belanja Tak Terduga adalah Belanja yang dialokasikan untuk keadaan darurat, keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan/atau bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Belanja Tak Terduga pada Tahun 2022 digunakan untuk bantuan tidak terencana sebesar Rp746.426.000,00. Rincian Belanja Tak Terduga adalah sebagai berikut:

Tabel 50 Rincian Belanja Tak Terduga

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Tak Terduga	22.426.879.377,00	746.426.000,00	3,33	6.471.571.965,00	(88,47)
	Jumlah	22.426.879.377,00	746.426.000,00	3,30	6.471.571.965,00	(88,47)

Realisasi Belanja Tak Terduga Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp5.725.145.965,00 atau sebesar 88,47% dari tahun sebelumnya

7.1.1.4 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN

Transfer Bagi Hasil Pendapatan untuk tahun 2022 dan 2021 terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp4.100.025.000,00 dan Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp795.261.950,00.

Grafik 6 Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan 2022



7.1.1.4.1 TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
<u>4.100.025.000,00</u>	<u>4.100.025.000,00</u>	<u>4.161.500.000,00</u>

Jumlah realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah selama Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 masing-masing sebesar Rp4.100.025.000,00 dan Rp4.161.500.000,00.

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp61.475.000,00 atau sebesar 1,48% dari tahun sebelumnya.

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan bagi hasil yang disalurkan kepada Pemerintahan Desa yang bersumber dari Pendapatan Pajak Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

7.1.1.4.2 TRANSFER BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
795.261.950,00	795.261.950,00	1.022.044.470,00

Jumlah realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah selama Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp795.261.950,00 dan Rp1.022.044.470,00. Transfer bagi hasil retribusi daerah ini merupakan bagi hasil yang disalurkan kepada Pemerintah Desa.

Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp226.782.500,00 atau sebesar 22,19% dari tahun sebelumnya.

7.1.1.5 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
219.574.736.190,00	219.334.756.590,00	224.535.379.190,00

Jumlah realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah Rp219.334.756.590,00 dan Rp224.535.379.190,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51 Rincian Transfer Bantuan Keuangan

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	219.574.736.190,00	219.334.756.590,00	99,89	224.535.379.190,00	(2,32)
	Jumlah	219.574.736.190,00	219.334.756.590,00	99,89	224.535.379.190,00	(2,32)

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp5.200.622.600,00 atau sebesar 2,32% dari tahun sebelumnya.

Adapun transfer bantuan ke desa dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 52 Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa (Alokasi Dana Desa)	115.240.966.190,00	115.240.966.190,00	100,00	115.040.966.190,00	0,17

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
2	Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Dari Pemerintah Pusat	104.333.770.000,00	104.093.790.400,00	99,77	109.494.413.000,00	(4,93)
	Jumlah	219.574.736.190,00	219.334.756.590,00	99,89	224.535.379.190,00	(2,32)

7.1.1.6 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
610.990.188.934,00	611.325.812.033,83	996.156.725.010,11

Realisasi Penerimaan dari Pembiayaan Daerah TA 2022 sebesar Rp611.325.812.033,83 atau 100,05% dari total anggaran sebesar Rp610.990.188.934,00. Penerimaan pembiayaan mencakup penerimaan Kas Daerah yang berasal dari Penggunaan SiLPA tahun lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 53 Rincian Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah	TA. 2022		TA. 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Penggunaan SiLPA	604.990.188.934,00	604.990.188.933,83	990.302.466.610,11
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dari BPR Tanah Laut	6.000.000.000,00	6.004.455.100,00	5.747.184.400,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,00	112.018.000,00	11.894.000,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	219.150.000,00	95.180.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	610.990.188.934,00	611.325.812.033,83	996.156.725.010,11

Penerimaan pembiayaan sebesar Rp611.325.812.033,83 pada tahun 2022 terdiri atas realisasi penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp604.990.188.933,83, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp6.004.455.100,00 dari BPR Tanah Laut dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebesar Rp331.168.000,00 berasal dari penerimaan kembali pinjaman daerah sebesar Rp112.018.000,00 dan penerimaan kembali Piutang Daerah sebesar Rp219.150.000,00.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp384.830.912.976,11 atau sebesar 38,63% dari tahun sebelumnya.

7.1.1.7 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	20.000.000.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2022 sebesar Rp75.000.000.000,00 atau 100% dari total anggaran sebesar Rp75.000.000.000,00. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan pemberian investasi daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 54 Rincian Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah	TA. 2022		TA. 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	15.000.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Penyertaan Modal Investasi Daerah	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	20.000.000.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp55.000.000.000,00 atau sebesar 275% dari tahun sebelumnya. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 sebagai berikut:

- Pengeluaran Pembiayaan untuk Dana Cadangan sebesar Rp40.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2021 dan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/519-KUM/2022 Tanggal 23 Februari 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023.
- Pengeluaran Pembiayaan berupa Pinjaman Pinjaman Modal Usaha dan Penyaluran Dana yang ditempatkan kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut sebesar Rp10.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/466-KUM/2022 Tanggal 8 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Realisasi Investasi Daerah Berupa Penempatan Penyaluran Dana Investasi kepada Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dan Telaahan Staf Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan tanggal 25 Januari 2022 Nomor 500/55/I/EKO/2022 perihal permohonan realisasi investasi daerah berupa pinjaman modal usaha dengan Program Gapura Karomah kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.
- Pengeluaran Pembiayaan berupa Penyertaan Modal ke Bank Kalsel sebesar Rp25.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tanggal 30 September 2022 tentang Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 122 Tahun 2022 Tanggal 17 November 2022 tentang Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

7.1.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

7.1.2.1 SALDO AWAL SAL

Saldo Awal Sisa Anggaran Lebih tahun 2022 adalah sebesar Rp604.990.188.933,83 merupakan sisa SAL tahun 2021.

7.1.2.2 PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp604.990.188.933,83 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. Jumlah SAL tersebut telah direalisasikan sebagai penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2022..

7.1.2.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Surplus Anggaran tahun 2022 sebesar Rp295.377.738.906,95 dan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp536.325.812.033,83 sebagaimana diuraikan diatas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp831.703.550.940,78 SiLPA Tahun Anggaran 2022 tersebut berasal dari kelebihan penerimaan pendapatan, sisa anggaran belanja dan transfer, sebagaimana diuraikan berikut ini:

- 1) Dari target pendapatan sebesar Rp1.740.032.489.864,00 realisasinya sebesar Rp2.159.239.661.099,87 sehingga terdapat pencapaian diatas target pendapatan sebesar Rp419.207.171.235,87. Pelampauan target pendapatan terutama pada Pendapatan Transfer terlampaui sebesar Rp402.311.421.204,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.560.894.562.071,00 dan terealisasi sebesar Rp1.963.205.983.275,00, untuk Pendapatan Asli Daerah terlampaui sebesar Rp15.499.887.960,87 dari target Rp Rp178.390.127.793,00 realisasi sebesar Rp193.890.015.753,87 serta pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terlampaui sebesar Rp1.395.862.071,00 dari target Rp747.800.000,00 berhasil realisasi sebesar Rp2.143.662.071,00.
- 2) Dari anggaran belanja sebesar Rp2.122.153.778.445,00 realisasinya sebesar Rp1.863.861.922.192,92 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp258.291.856.252,08. Sisa belanja tersebut terdiri atas rincian sebagai berikut:
 - a. Selisih kurang anggaran Belanja Operasi sebesar Rp197.381.842.547,08 yang terdiri atas:
 - selisih kurang anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp107.426.597.367,00;
 - selisih kurang anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp83.393.124.932,08;
 - selisih kurang anggaran Belanja Hibah sebesar Rp2.758.420.248,00;
 - selisih kurang anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 3.803.700.000,00.
 - b. Selisih kurang anggaran Belanja Modal sebesar Rp 38.989.580.728,00 yang terdiri atas:
 - selisih kurang Belanja Modal Tanah sebesar Rp 153.818.000,00;
 - selisih kurang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp18.252.826.009,00;
 - selisih kurang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp7.783.446.342,00;
 - selisih kurang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp12.543.604.617,00;
 - selisih kurang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp255.885.760,00;
 - c. Selisih kurang anggaran Belanja Tak Terduga sebesar Rp21.680.453.377,00.
 - d. Tidak ada selisih kurang atau lebih pada Belanja Bagi Hasil.
 - e. Selisih kurang anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp239.979.600,00.
- 3) Dari anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp610.990.188.934,00 realisasinya sebesar Rp611.325.812.033,83 dengan rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dengan anggaran sebesar Rp604.990.188.934,00 terealisasi sebesar Rp604.990.188.933,83, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp6.004.455.100,00. Untuk Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan realisasi sebesar Rp331.168.000,00 melebihi anggaran sebesar nilai tersebut.
- 4) Dari anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp75.000.000.000,00 realisasi sebesar Rp75.000.000.000,00 terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp40.000.000.000,00, Penyertaan Modal sebesar Rp25.000.000.000,00 dan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan anggaran sesuai dengan realisasinya.

7.1.2.4 SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (SAL)

Jumlah SAL per 31 Desember 2022 sebesar Rp831.703.550.940,78 terdiri atas saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp762.266.975.672,06, Kas di BLUD sebesar Rp65.761.548.698,67, Kas di Dana BOS sebesar Rp3.626.594.575,05, dan Kas Lainnya Rp48.431.995,00.

7.1.3 NERACA

7.1.3.1 KAS DI KAS DAERAH

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
762.266.975.672,06	541.773.574.626,45

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp762.266.975.672,06 dan Rp541.773.574.626,45 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 55 Saldo Kas Daerah

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Kas Umum Daerah Bank Kalsel No. 007.00.03.00003.8	762.266.975.672,06	541.773.574.626,45	220.493.401.045,61	40,70
	Jumlah	762.266.975.672,06	541.773.574.626,45	220.493.401.045,61	40,70

Pada saldo Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2022 terdiri atas saldo kas terikat (yang dibatasi penggunaannya) dan saldo kas murni (saldo kas yang bersumber dari pendapatan daerah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 56 Rincian Saldo Kas Umum Daerah Tahun 2022

No.	Uraian	Nilai (Rp)
	Saldo Kas Terikat	
1	Sisa DAK Fisik	694.643.326,00
2	Sisa DAK Non Fisik	19.758.636.719,00
3	Sisa DID Murni	1.248.786.633,00
4	Sisa Kas Murni	740.564.908.994,06
	Total Saldo Kas	762.266.975.672,06

Sisa saldo kas pada rekening kas umum secara terinci dapat dijelaskan dengan uraian sebagai berikut:

1) Sisa DAK Fisik

Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang berada pada Kas Umum Daerah pada tahun 2022 adalah sebesar Rp694.643.326,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 57 Sisa DAK Fisik

No.	Tahun	PAGU	Pagu Total Yang Diterima RKUD	Total Realisasi Pembayaran dari RKUD melalui SP2D Daerah	Sisa DAK di Rekening Kas Umum Daerah
1	2018	126.882.632.000,00	120.284.900.729,00	120.004.071.872,60	280.828.857,40
2	2019	109.209.362.000,00	103.104.915.132,00	102.741.731.482,00	363.183.650,00
3	2020	55.434.498.910,00	53.583.533.126,00	52.688.357.923,00	895.175.203,00
4	2021	81.530.572.000,00	77.929.750.716,00	77.628.520.725,00	301.229.991,00
5	2022	95.035.002.928,00	89.691.850.759,00	88.997.207.433,00	694.643.326,00

Mutasi penggunaan Dana Alokasi Khusus pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 58 Penggunaan DAK Fisik 2022

No	Bidang	Penyaluran	Realisasi	sis
REGULER		62.057.727.473,00	61.889.757.584,00	167.969.889,00
1	Pendidikan	11.242.522.680,00	11.231.507.680,00	11.015.000,00
	Subbid PAUD	198.515.000,00	197.165.000,00	1.350.000,00
	Subbid SD	8.895.453.690,00	8.895.453.690,00	-
	Subbid SMP	1.769.934.990,00	1.760.269.990,00	9.665.000,00
	Subbid SKB	201.080.000,00	201.080.000,00	-
	Subbid perpustakaan daerah	177.539.000,00	177.539.000,00	-
2	Kesehatan	21.091.856.293,00	20.998.089.780,00	93.766.513,00
	subbid Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	15.733.906.340,00	15.733.906.340,00	-
	Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	77.055.000,00	77.055.000,00	-
	Pengendalian Penyakit	296.883.840,00	296.883.840,00	-
	Penguatan Sistem Kesehatan	398.774.460,00	372.669.447,00	26.105.013,00
	Kefarmasian	3.441.079.653,00	3.373.418.153,00	67.661.500,00
	Keluarga Berencana	1.144.157.000,00	1.144.157.000,00	-
3	Jalan	10.762.859.500,00	10.762.859.500,00	-
	Subbid Jalan (Reguler)	10.762.859.500,00	10.762.859.500,00	-
4	Air Minum	11.033.469.000,00	10.970.280.624,00	63.188.376,00
	Subbid Air Minum	11.033.469.000,00	10.970.280.624,00	63.188.376,00
5	Sanitasi	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	-
	Subbid Sanitasi	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	-
6	Perumahan dan Permukiman	5.977.020.000,00	5.977.020.000,00	-
	Subbid Perumahan dan Permukiman	5.977.020.000,00	5.977.020.000,00	-
PENUGASAN		27.634.123.286,00	27.107.449.849,00	526.673.437,00
7	Jalan	16.454.105.000,00	16.454.105.000,00	-
	Subbid Jalan	16.454.105.000,00	16.454.105.000,00	-
8	Lingkungan Hidup	1.291.125.000,00	1.291.125.000,00	-
	Subbid Lingkungan Hidup	1.291.125.000,00	1.291.125.000,00	-
9	Pertanian	5.256.882.750,00	5.249.288.749,00	7.594.001,00

No	Bidang	Penyaluran	Realisasi	sisa
	Subbid Pertanian (Ketahanan Pangan)	5.256.882.750,00	5.249.288.749,00	7.594.001,00
10	Irigasi	4.274.239.500,00	3.764.180.500,00	510.059.000,00
	Subbid Irigasi	4.274.239.500,00	3.764.180.500,00	510.059.000,00
11	Kelautan dan Perikanan	357.771.036,00	348.750.600,00	9.020.436,00
	Subbid Kelautan dan Perikanan	357.771.036,00	348.750.600,00	9.020.436,00
	TOTAL	89.691.850.759,00	88.997.207.433,00	694.643.326,00

2) Sisa DAK Non Fisik

Sisa DAK Non Fisik yang berada pada Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp19.758.636.719,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 59 Sisa DAK Non Fisik 2022

NO	URAIAN	Prog / Kegiatan	PENYALURAN	REALISASI	SISA	KET	sisa tahun lalu
1	Tunjangan Profesi Guru	02.01	91.597.659.700,00	83.948.591.100	7.649.068.600,00		
2	Tambahan Penghasilan Guru	02.01	1.542.250.000,00	1.503.097.500,00	39.152.500,00		
3	Tunjangan Khusus Guru	02.01	2.773.343.900,00	269.775.000,00	2.503.568.900,00		
4	Bantuan Operasional Kesehatan		18.803.100.000,00	11.159.112.003,00	7.643.987.997,00		
5	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	20.03, 17.03, 17.07, 18.04,	3.783.556.000,00	2.361.255.108,00	1.422.300.892,00		
6	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak	19.01, 19.03, 21.06	451.800.000,00	163.795.644,00	288.004.356,00		
7	Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	19.02	138.100.000,00	120.413.416,00	17.686.584,00		
8	Dana Fasilitas Penanaman Modal	19.02	383.914.000,00	297.118.873,00	86.795.127,00		
9	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi Dan Ukm		404.200.000,00	331.579.250,00	72.620.750,00		
10	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	01.02, 05.10, 06.02, 06.09, 08.04	225.781.013,00	190.330.000,00	35.451.013,00		
			120.103.704.613,00	100.345.067.894,00	19.758.636.719,00		

Adapun rincian mutasi penggunaan Dana DAK Non fisik Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a) Tunjangan Profesi Guru PNSD

Sisa Tunjangan Profesi Guru pada tahun 2022 adalah sebesar Rp7.649.068.600,00. Berikut perkembangan saldo sisa tunjangan Profesi Guru PNSD dari tahun ke tahun pada Rekening Kas Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut:

Tabel 60 Sisa Dana Tunjangan Profesi Guru

No.	Tahun	Realisasi Penyaluran ke RKUD	Realisasi Pembayaran	Pengembalian	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
1	2010	11.694.415.200,00	11.764.110.700,00	0,00	-69.695.500,00
2	2011	27.685.533.980,00	27.542.301.400,00	0,00	143.232.580,00
3	2012	49.538.180.580,00	49.006.722.810,00	0,00	531.457.770,00
4	2013	64.711.039.770,00	57.501.575.600,00	0,00	7.209.464.170,00
5	2014	89.572.005.170,00	82.510.141.760,00	41.192.400,00	7.020.671.010,00
6	2015	102.215.322.010,00	88.075.520.700,00	248.534.304,00	13.891.267.006,00
7	2016	94.253.946.464,00	93.237.421.740,00	32.980.285,00	983.544.439,00
8	2017	86.963.796.585,00	85.086.206.030,00	18.807.170,00	1.858.783.385,00
9	2018	93.173.587.000,00	88.309.157.300,00	0,00	4.864.429.700,00
10	2019	95.585.044.200,00	94.047.384.240,00	0,00	1.537.659.960,00
11	2020	92.572.521.960,00	87.318.826.687,00	0,00	5.253.695.273,00
12	2021	104.497.615.273,00	99.904.970.184,00	10.158.878,00	4.582.486.211,00
13	2022	91.597.659.700,00	83.948.591.100,00	0,00	7.649.068.600,00

b) Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD

Sisa Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp39.152.500,00. Berikut perkembangan saldo Sisa Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dari tahun ke tahun pada rekening Kas Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut:

Tabel 61 Sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD

No.	Tahun	Realisasi Penyaluran ke RKUD	Realisasi Pembayaran	Pengembalian	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
1	2011	6.329.252.000,00	5.994.752.000,00	0,00	334.500.000,00
2	2012	4.891.500.000,00	4.269.500.000,00	0,00	622.000.000,00
3	2013	4.867.000.000,00	3.519.500.000,00	0,00	1.347.500.000,00
4	2014	3.650.500.000,00	2.608.000.000,00	0,00	1.042.500.000,00
5	2015	2.839.000.000,00	2.673.000.000,00	86.400.000,00	252.400.000,00
6	2016	2.568.400.000,00	2.363.500.000,00	0,00	204.900.000,00
7	2017	2.093.400.000,00	1.440.000.000,00	0,00	653.400.000,00
8	2018	1.452.000.000,00	776.250.000,00	0,00	675.750.000,00

No.	Tahun	Realisasi Penyaluran ke RKUD	Realisasi Pembayaran	Pengembalian	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
9	2019	1.140.770.000,00	532.250.000,00	0,00	608.520.000,00
10	2020	747.000.000,00	715.500.000,00	0,00	31.500.000,00
11	2021	646.967.000,00	592.000.000,00	2.137.500,00	57.104.500,00
12	2022	1.542.250.000,00	1.503.097.500,00	0,00	39.152.500,00

c) Tunjangan Khusus Guru

Sisa Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD pada tahun 2022 adalah sebesar Rp2.503.568.900,00. Berikut perkembangan saldo Sisa Tunjangan Khusus Guru dari tahun ke tahun pada rekening Kas Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut:

Tabel 62 Sisa Dana Tunjangan Khusus Guru

No.	Tahun	Pagu Tahun Anggaran	Penyaluran ke RKUD TA. 2022	Realisasi	Sisa Penyaluran TA. 2022
1	s/d 2018	0,00	0,00	0,00	3.035.117.400,00
2	2019	4.750.197.000,00	1.425.059.000,00	1.185.727.200,00	3.274.449.200,00
3	2020	0,00	0,00	262.428.900,00	3.012.020.300,00
4	2021	0,00	3.012.020.300,00	238.676.400,00	2.773.343.900,00
5	2022	1.088.648.000,00	2.773.343.900,00	269.775.000,00	2.503.568.900,00

Data sebelum tahun 2019 tidak dapat disajikan karena adanya keterbatasan sumber data yang diperlukan.

d) Bantuan Operasional Kesehatan

Sisa Bantuan Operasional Kesehatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp7.643.987.997,00. Berikut perkembangan saldo Sisa bantuan Operasional Kesehatan dari tahun ke tahun pada rekening Kas Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut:

Tabel 63 Sisa Dana Bantuan Operasional Kesehatan

No.	Tahun	Pagu Tahun Anggaran	Penyaluran ke RKUD TA. 2022	Realisasi	Sisa Penyaluran TA. 2022
1	2	3	4	5	6
1	s/d 2018	0,00	0,00	0,00	4.999.852.235,00
2	2019	21.521.860.000,00	21.521.860.000,00	14.695.933.460,00	6.825.926.540,00
3	2020	16.147.306.000,00	29.987.232.540,00	12.442.731.749,00	17.544.500.791,00
4	2021	19.191.751.000,00	17.544.500.791,00	11.339.560.465,00	6.204.940.326,00
5	2022	18.803.100.000,00	18.803.100.000,00	11.159.112.003,00	7.643.987.997,00

Data sebelum tahun 2019 tidak dapat disajikan karena adanya keterbatasan sumber data yang diperlukan.

e) Bantuan Operasional Keluarga Berencana

Sisa Bantuan Operasional Keluarga Berencana pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1.422.300.892,00. Berikut perkembangan saldo Sisa Bantuan Operasional Keluarga Berencana dari tahun ke tahun pada rekening Kas Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut:

Tabel 64 Sisa Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana

No.	Tahun	Pagu Tahun Anggaran	Penyaluran ke RKUD TA. 2022	Realisasi	Sisa Penyaluran TA. 2022
1	s/d 2018	0,00	0,00	0,00	566.703.170,00
2	2019	2.365.615.000,00	2.365.615.000,00	1.534.262.380,00	831.352.620,00
3	2020	3.136.358.000,00	3.136.358.000,00	2.319.579.945,00	816.778.055,00
4	2021	3.432.414.000,00	3.432.414.000,00	2.030.804.870,00	1.401.609.130,00
5	2022	3.783.556.000,00	3.783.556.000,00	2.361.255.108,00	1.422.300.892,00

Data sebelum tahun 2019 tidak dapat disajikan karena adanya keterbatasan sumber data yang diperlukan.

f) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Sisa Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun 2022 adalah Rp288.004.356,00.

g) Dana Ketahanan Pangan dan Perikanan

Sisa Dana Ketahanan Pangan dan Perikanan pada tahun 2022 adalah Rp17.686.584,00.

h) Dana Fasilitas Penanaman Modal

Sisa Dana Fasilitas Penanaman Modal pada tahun 2022 adalah Rp86.795.127,00.

i) Dana Peningkatan Koperasi dan UKM

Sisa Dana Peningkatan Koperasi dan UKM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp72.620.750,00. Berikut perkembangan saldo Sisa Dana Peningkatan Koperasi dan UKM dari tahun ke tahun pada rekening Kas Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut:

Tabel 65 Sisa Dana Peningkatan Koperasi dan UKM

No.	Tahun	Pagu Tahun Anggaran	Penyaluran ke RKUD TA. 2022	Realisasi	Sisa Penyaluran TA. 2022
1	s/d 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2019	358.000.000,00	358.000.000,00	327.183.833,00	30.816.167,00
3	2020	417.358.000,00	417.358.000,00	269.932.040,00	147.425.960,00
4	2021	390.304.000,00	390.304.000,00	279.349.149,00	110.954.851,00
5	2022	404.200.000,00	404.200.000,00	331.579.250,00	72.620.750,00

Data sebelum tahun 2019 tidak dapat disajikan karena adanya keterbatasan sumber data yang diperlukan.

j) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan

Sisa Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp35.451.013,00 dan Rp225.781.013,00 Berikut perkembangan saldo Sisa Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dari tahun ke tahun pada rekening Kas Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut:

Tabel 66 Sisa Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan

No.	Tahun	Pagu Tahun Anggaran	Penyaluran ke RKUD TA. 2022	Realisasi	Sisa Penyaluran TA. 2022
1	s/d 2018	0,00	0,00	0,00	91.617.233,00
2	2019	1.205.909.000,00	1.114.291.767,00	1.132.703.816,00	73.205.184,00
3	2020	417.358.000,00	1.153.072.816,00	1.134.918.819,00	91.359.181,00
4	2021	1.221.514.000,00	1.221.514.000,00	995.732.987,00	225.781.013,00
5	2022	225.781.013,00	225.781.013,00	190.330.000,00	35.451.013,00

Data sebelum tahun 2019 tidak dapat disajikan karena adanya keterbatasan sumber data yang diperlukan. Dana BOS PAUD pada tahun 2022 tidak masuk dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tetapi langsung disalurkan ke masing-masing TK dan PAUD.

3) Sisa Dana Insentif Daerah (DID) Murni

Sisa Dana Insentif Daerah (DID) Murni pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.248.786.633,00 dengan jumlah dana yang disalurkan dari RKUN ke RKUD Pemkab Tanah Laut adalah sebesar Rp10.342.946.000,00 dan realisasi belanjanya sebesar Rp9.094.159.367,00. Dana Insentif Daerah Murni pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dipergunakan untuk Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Penguatan Perekonomian Daerah termasuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Industri Kecil, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat serta untuk perlindungan sosial.

4) Sisa Kas Murni

Sisa Kas Murni Tahun 2022 adalah sebesar Rp740.564.908.994,00 merupakan saldo per 31 Desember 2022 di Bank Kalsel dengan Nomor Rekening 007.0003.00.003.8 selain saldo terikat yang sudah dijelaskan sebelumnya.

7.1.3.2 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.1.3.3 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

7.1.3.4 KAS DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

31 Desember 2022

(Rp)

65.761.548.698,67

31 Desember 2021

(Rp)

59.162.059.397,36

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp65.761.548.698,67 dan Rp59.162.059.397,36 terdiri dari saldo Kas pada RSUD dan PKM yang merupakan UPT Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 67 Kas BLUD

No.	Uraian	Saldo Kas (Rp)		31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
		Tunai	Bank	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	RSUD H. Boejasin	16.608.788,00	55.764.148.967,31	55.780.757.755,31	46.205.547.508,43	9.575.210.246,88	20,72
2	RSUD KH. Mansyur	5.756.789,00	2.933.549.660,79	2.939.306.449,79	1.736.678.730,00	1.202.627.719,79	69,25
3	PKM Angsau	142.000,00	744.581.112,65	744.723.112,65	791.146.831,39	(46.423.718,74)	(5,87)
4	PKM Asam-Asam	350.000,00	352.035.006,78	352.385.006,78	442.145.483,55	(89.760.476,77)	(20,30)
5	PKM Batakan	0,00	429.909.061,42	429.909.061,42	949.800.761,55	(519.891.700,13)	(54,74)
6	PKM Bati-Bati	235.500,00	656.317.704,40	656.553.204,40	950.615.960,81	(294.062.756,41)	(30,93)
7	PKM Bumi Makmur	72.000,00	307.046.300,35	307.118.300,35	702.818.235,66	(395.699.935,31)	(56,30)
8	PKM Jorong	229.000,00	372.993.546,68	373.222.546,68	624.377.969,40	(251.155.422,72)	(40,22)
9	PKM Kait-Kait	98.000,00	143.049.125,19	143.147.125,19	262.387.727,96	(119.240.602,77)	(45,44)
10	PKM Kintap	0,00	535.390.302,93	535.390.302,93	829.565.487,91	(294.175.184,98)	(35,46)
11	PKM Kurau	0,00	364.203.200,94	364.203.200,94	466.719.396,97	(102.516.196,03)	(21,97)
12	PKM Padang Luas	0,00	315.312.222,20	315.312.222,20	320.070.193,49	(4.757.971,29)	(1,49)
13	PKM Panyipatan	0,00	539.629.524,25	539.629.524,25	673.639.277,63	(134.009.753,38)	(19,89)
14	PKM Pelaihari	305.500,00	19.344.848,87	19.650.348,87	409.661.276,74	(390.010.927,87)	(95,20)
15	PKM Sungai Cuka	126.000,00	132.253.770,03	132.379.770,03	319.090.221,29	(186.710.451,26)	(58,51)
16	PKM Sungai Riam	68.000,00	156.553.322,03	156.621.322,03	397.166.915,52	(240.545.593,49)	(60,57)
17	PKM Tajau Pecah	62.000,00	217.065.851,01	217.127.851,01	849.114.977,66	(631.987.126,65)	(74,43)
18	PKM Tambang Ulang	0,00	278.580.051,97	278.580.051,97	467.737.687,07	(189.157.635,10)	(40,44)
19	PKM Takisung	287.000,00	1.035.347.920,65	1.035.634.920,65	1.290.031.459,66	(254.396.539,01)	(19,72)
20	PKM Tanjung Habulu	80.000,00	104.043.815,43	104.123.815,43	159.451.659,73	(55.327.844,30)	(34,70)
21	PKM Tirtajaya	0,00	160.714.435,05	160.714.435,05	314.291.634,94	(153.577.199,89)	(48,86)
22	PKM Durian Bungkok	53.000,00	35.482.756,83	35.535.756,83	0,00	35.535.756,83	100,00
23	PKM Bentok Kampung	70.000,00	130.403.833,96	130.473.833,96	0,00	130.473.833,96	100,00
24	Balai Labkes	0,00	9.048.779,95	9.048.779,95	0,00	9.048.779,95	100,00
	Jumlah	24.543.577,00	65.737.005.121,67	65.761.548.698,67	59.162.059.397,36	6.599.489.301,31	11,15

Saldo tunai sebesar Rp24.543.577,00 pada 2 (Dua) RSUD dan 14 (empat belas) PKM yang merupakan pendapatan jasa pelayanan pada tanggal 31 Desember 2022. Rincian lengkap dapat dilihat pada *Lampiran 1.1*. Kas di Badan Layanan Umum Daerah.

7.1.3.5 KAS DI DANA KAPITASI JKN

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Kas Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

7.1.3.6 KAS DI DANA BOS

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>3.626.594.575,05</u>	<u>4.054.554.910,02</u>

Kas di Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.626.594.575,05 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.054.554.910,02. Kas Dana BOS terdiri dari Kas Pengelolaan dana BOS berada pada 49 SMPN dan 235 SDN dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Perhitungan dana BOS Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Bank Kalsel	:	Rp	4.050.360.078,02	
Saldo Awal Tunai	:	Rp	4.194.832,00	(+)
Total Saldo Awal	:	Rp	4.054.554.910,02	
Pendapatan BOS	:	Rp	36.153.634.262,00	
Pendapatan Lain-Lain	:	Rp	178.287.985,03	(+)
Total Pendapatan	:	Rp	36.331.922.247,03	
Belanja BOS	:	Rp	36.759.882.582,00	(-)
Saldo Kas Dana BOS	:	Rp	3.626.594.575,05	

Pada SDN Riam Pinang terdapat selisih antara saldo awal audited dengan saldo awal rekening koran, pada saldo awal audited saldo sebesar Rp4.107.055,00, sedangkan pada rekening koran Rp3.966.200,00 selisih ini dikarenakan adanya penutupan rekening tabungan lama tetapi dana yang masih tersisa di rekening lama tersebut baru dipindah bukukan atau disetorkan pada rekening giro yang baru pada tanggal 6 Januari 2022 sebesar Rp140.855,00. Pada SDN Handil Negara 1 terdapat selisih antara saldo awal dengan saldo rekening koran, pada saldo awal audited hanya sebesar Rp3.123.485,00 sedangkan pada rekening koran Rp7.109.485,00. Selisih ini dikarenakan adanya salah transfer pada tanggal 29 Desember 2021 dari pihak ketiga an CV. Eureka Book House sebesar Rp3.986.000,00, saldo tersebut sudah ditarik bulan Januari tahun 2022. Rincian rekapitulasi Dana BOS dapat dilihat pada *Lampiran 1.2*.

7.1.3.7 KAS LAINNYA

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>48.431.995,00</u>	<u>0,00</u>

Kas di Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per 31 Desember 2022 sebesar Rp48.431.995,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Kas Lainnya merupakan saldo dari Penyaluran BOP PAUD dan BOP Kesetaraan per 31 Desember 2022 sebesar

Rp48.431.995,00 merupakan Bantuan Operasional pada PAUD di Kabupaten Tanah Laut. Rincian Saldo Kas BOP Kesetaraan dan BOP PAUD dapat dilihat dalam *Lampiran 14*.

7.1.3.8 PIUTANG

Piutang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat dan Piutang Transfer Antar Daerah dan Piutang Lainnya. Rincian Piutang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 68 Piutang

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Piutang Pajak	17.671.672.015,00	16.310.176.319,00	1.361.495.696,00	8,35
2	Piutang Retribusi Daerah	745.347.500,00	428.041.500,00	317.306.000,00	74,13
3	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	30.678.546.590,64	57.002.494.023,12	(26.323.947.432,48)	(46,18)
4	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	24.817.804.050,00	(24.817.804.050,00)	(100,00)
5	Piutang Transfer Antar Daerah	50.656.124.065,67	49.896.491.243,53	759.632.822,14	1,52
6	Piutang Lainnya	771.850.000,00	816.850.000,00	(45.000.000,00)	(5,51)
	Jumlah	100.523.540.171,31	149.271.857.135,65	(48.748.316.964,34)	(32,66)

Penjelasan atas masing-masing piutang tersebut adalah sebagai berikut:

7.1.3.8.1 PIUTANG PAJAK DAERAH

31 Desember 2022

(Rp)

17.671.672.015,00

31 Desember 2021

(Rp)

16.310.176.319,00

Saldo Piutang Pajak merupakan tagihan pajak daerah yang belum dipungut per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp17.671.672.015,00 dan Rp16.310.176.319,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 69 Piutang Pajak Daerah

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pajak PBB – P2	17.670.922.015,00	16.309.426.319,00	1.361.495.696,00	8,35
2	Pajak Restoran / Rumah Makan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	17.671.672.015,00	16.310.176.319,00	1.361.495.696,00	8,35

Dari tabel Piutang Pajak Daerah tersebut dapat dijelaskan:

- Saldo Piutang PBB-P2 selama tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 70 Piutang PBB-P2

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo awal piutang bruto PBB P2	16.309.426.319,00
Koreksi Saldo awal Piutang PBB	0,00
Penambahan berupa penetapan PBB P2 Th. 2022	2.465.780.312,00
Pengurangan berupa penerimaan pendapatan PBB P2 di tahun 2022	1.104.284.616,00
Saldo akhir piutang bruto PBB P2	17.670.922.015,00

Daftar Piutang PBB-P2 terdapat pada *Lampiran 2.1*.

- 2) Piutang atas Pajak Restoran/Rumah Makan sebesar Rp750.000,00 merupakan Piutang yang berasal dari penerimaan jasa restoran oleh 2 (dua) penyedia yang diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah namun belum dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 antara lain Rumah Makan Kyta sebesar Rp350.000,00 atas ketetapan bulan Desember 2015 dan Rumah Makan Ramona sebesar Rp400.000,00 atas ketetapan bulan Oktober dan November 2015. Piutang Pajak Restoran/Rumah Makan ini termasuk dalam kategori piutang macet karena umur piutang di atas 3 (tiga) tahun sehingga penyisihan piutang sebesar Rp750.000,00.

Dari piutang tersebut sudah dilakukan penyisihan piutang. Perhitungan Piutang Pajak Netto dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 71 Piutang Pajak Netto

No.	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	Pajak PBB – P2	17.670.922.015,00	13.273.093.532,31	4.397.828.482,69
2	Pajak Restoran/ Rumah Makan	750.000,00	750.000,00	0,00
	Jumlah	17.671.672.015,00	13.273.843.532,31	4.397.828.482,69

7.1.3.8.2 PIUTANG RETRIBUSI

31 Desember 2022
(Rp)

745.347.500,00

31 Desember 2021
(Rp)

428.041.500,00

Saldo Piutang Retribusi Daerah merupakan tagihan atas retribusi daerah yang belum dipungut per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp745.347.500,00 dan Rp428.041.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 72 Piutang Retribusi Daerah

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Retribusi Pasar	679.577.000,00	353.771.000,00	325.806.000,00	92,10
	Retribusi Parkir Khusus				
2	Dinas Perhubungan	34.140.000,00	42.640.000,00	(8.500.000,00)	100,00
3	Dinas Koperasi, UK dan Perdagangan	31.630.500,00	31.630.500,00	0,00	100,00
	Jumlah	745.347.500,00	428.041.500,00	317.306.000,00	74,13

Piutang Retribusi Pasar

Piutang atas Retribusi Pasar sebesar Rp679.577.000,00 merupakan nilai bruto piutang atas sewa warung, kios/los yang belum dibayar oleh penyewa sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Piutang bruto atas retribusi pasar diketahui sebesar Rp679.577.000,00 dan penyisihan piutang dengan nilai Rp292.592.975,00.

Daftar Piutang Retribusi Pasar terdapat pada *Lampiran 3.1*.

Piutang Retribusi Parkir

Piutang Retribusi Parkir sebesar Rp65.770.500,00 merupakan nilai bruto yang terdiri dari Piutang Retribusi Parkir dari Dinas Perhubungan sebesar Rp34.140.000,00 dan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan sebesar Rp31.630.500,00;

Saldo piutang bruto retribusi parkir dari dua SKPD tersebut telah dilakukan penyisihan piutang dengan nilai Rp21.865.000,00 pada Dinas Perhubungan serta penyisihan piutang dengan nilai Rp31.630.500,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;

Aging schedule dan persentase penyisihan sebagai dasar perhitungan penyisihan sudah sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Daftar piutang Retribusi Parkir terdapat pada **Lampiran 3.2** dan **Lampiran 3.3**.

Perhitungan Piutang Retribusi netto dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 73 Piutang Retribusi Netto

No.	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	Retribusi Pasar	679.577.000,00	292.592.975,00	386.984.025,00
2	Dinas Perhubungan	34.140.000,00	21.865.000,00	12.275.000,00
3	Dinas Koperasi, UK dan Perdagangan	31.630.500,00	31.630.500,00	0,00
	Jumlah	745.347.500,00	346.088.475,00	399.259.025,00

7.1.3.8.3 PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH

31 Desember 2022
(Rp)

30.678.546.590,64

31 Desember 2021
(Rp)

57.002.494.023,12

Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp30.678.546.590,64 dan sebesar Rp57.002.494.023,12 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 74 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	360.299.547,12	328.426.771,12	31.872.776,00	9,70
2	Piutang Tuntutan Perbendaharaan	111.055.000,00	118.952.950,00	(7.897.950,00)	(6,64)
3	Piutang BLUD	3.738.127.295,40	33.790.199.377,00	(30.052.072.081,60)	(88,94)
4	Piutang Sewa Pakai Kapal	1.740.950.000,00	1.770.950.000,00	(30.000.000,00)	(1,69)
5	Piutang Sapi Jantan	292.641.600,00	334.642.100,00	(42.000.500,00)	0,00
6	Piutang Sapi Betina	132.800.000,00	272.250.000,00	(139.450.000,00)	0,00
7	Piutang Ijin Usaha Pertambangan	952.382.510,00	1.052.382.510,00	(100.000.000,00)	(9,50)

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
8	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	- BPR	23.248.360.500,00	19.252.815.600,00	3.995.544.900,00	20,75
	- Dinas Kesehatan	23.830.000,00	0,00	23.830.000,00	0,00
	- DPPKBP3A	269.500,00	0,00	269.500,00	0,00
	- Temuan Inspektorat	0,00	81.874.715,00	(81.874.715,00)	(100,00)
9	Piutang Remunerasi Dana Transfer TDF	77.830.638,12	0,00	77.830.638,12	100,00
	Jumlah	30.678.546.590,64	57.002.494.023,12	(26.323.947.432,48)	(46,18)

1. Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

31 Desember 2022
(Rp)

360.299.547,12

31 Desember 2021
(Rp)

328.426.771,12

Saldo Piutang Tuntutan Ganti Rugi yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp360.299.547,12 dan Rp328.426.771,12 Saldo Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan saldo dari 6 (enam) orang yang telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atas kerugian daerah. Rincian bruto Piutang Tuntutan Ganti Rugi sebagai berikut.

Tabel 75 Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	RHM	43.589.948,00	58.717.172,00	(15.127.224,00)	(25,76)
2	H.JR/IQB	28.683.765,00	31.683.765,00	(3.000.000,00)	(9,47)
3	NASR	55.799.998,85	55.799.998,85	0,00	0,00
4	HJ.AST/PT.RUJ	93.141.441,43	93.141.441,43	0,00	0,00
5	CV.ACG/HJ.NS	6.136.699,84	6.136.699,84	0,00	0,00
6	HJ. S/CV.H	82.947.694,00	82.947.694,00	0,00	0,00
7	MST	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00
	Jumlah	360.299.547,12	328.426.771,12	31.872.776,00	9,70

Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) ini telah dilakukan penyisihan dengan nilai Rp310.549.547,12 Rincian lebih lanjut dimuat dalam *Lampiran 4.1*.

2. Piutang Tuntutan Perbendaharaan

31 Desember 2022
(Rp)

111.055.000,00

31 Desember 2021
(Rp)

118.952.950,00

Saldo Piutang Tuntutan Perbendaharaan yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp111.055.000,00 dan sebesar Rp118.952.950,00

Saldo Piutang Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan saldo dari 2 (dua) orang yang telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atas kerugian daerah. Rincian bruto Piutang Tuntutan Perbendaharaan sebagai berikut:

Tabel 76 Rincian Piutang Tuntutan Perbendaharaan

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	ADH	0,00	7.897.950,00	(7.897.950,00)	(100,00)
2	KART	111.055.000,00	111.055.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	111.055.000,00	118.952.950,00	(7.897.950,00)	(6,64)

Piutang Tuntutan Perbendaharaan (TP) ini telah dilakukan penyisihan dengan nilai Rp111.055.000,00. Rincian lebih lanjut dimuat dalam *Lampiran 4.2*.

3. Piutang BLUD

**31 Desember 2022
(Rp)**

3.738.127.295,40

**31 Desember 2021
(Rp)**

33.790.199.377,00

Saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp3.738.127.295,40 dan Rp33.790.199.377,00. Saldo piutang ini merupakan saldo Piutang RSUD H. Boejasin sebesar Rp3.725.125.966,00, RSUD KH. Mansyur sebesar Rp1.688.082,40 dan 12 PKM BLUD sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebesar Rp11.313.247,00.

Piutang BLUD Bruto dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 77 Piutang PKM BLUD Bruto

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	PKM Batakan	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2	PKM Padang Luas	0,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	(100,00)
4	PKM Takisung	0,00	27.340.000,00	(27.340.000,00)	(100,00)
5	PKM Kait Kait	0,00	4.460.000,00	(4.460.000,00)	(100,00)
6	PKM Tambang Ulang	0,00	11.125.000,00	(11.125.000,00)	(100,00)
7	PKM Tanjung Habulu	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
8	PKM Panyipatan	1.304,00	5.300.000,00	(5.298.696,00)	(99,98)
9	PKM Asam Asam	0,00	22.615.000,00	(22.615.000,00)	(100,00)
10	PKM Bati Bati	3.797.100,00	0,00	3.797.100,00	100,00
11	PKM Kintap	814.305,00	0,00	814.305,00	100,00
12	PKM Sungai Cuka	6.698.038,00	5.445.400,00	1.252.638,00	23,00
13	RSUD KH.Mansyur	1.688.082,40	0,00	1.688.082,40	100,00
14	RSUD H. Boejasin	3.725.125.966,00	33.709.513.977,00	(29.984.388.011,00)	(88,95)
	Jumlah	3.738.127.295,40	33.790.199.377,00	(30.052.072.081,60)	(88,94)

Piutang Netto BLUD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 78 Piutang PKM BLUD Netto

No.	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	PKM Batakan	2.500,00	12,5	2.487,50
2	PKM Panyipatan	1.304,00	6,52	1.297,48
3	PKM Bati Bati	3.797.100,00	18.985,50	3.778.114,50
4	PKM Kintap	814.305,00	4.071,53	810.233,48
5	PKM Sungai Cuka	6.698.038,00	33.490,19	6.664.547,81
6	RSUD KH.Mansyur	1.688.082,40	8.440,41	1.679.641,99
7	RSUD H. Boejasin	3.725.125.966,00	86.748.829,69	3.638.377.136,31
	Jumlah	3.738.127.295,40	86.813.836,34	3.651.313.459,07

Rincian lengkap Piutang BLUD dapat dilihat pada *Lampiran 4.3*.

4. Piutang Sewa Pakai Kapal

31 Desember 2022

(Rp)

1.740.950.000,00

31 Desember 2021

(Rp)

1.770.950.000,00

Saldo Piutang Sewa Pakai Kapal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.740.950.000,00 dan Rp1.770.950.000,00 terdiri atas:

Tabel 79 Piutang Sewa Pakai Kapal Bruto

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Perjanjian 30 Desember 2010	39.000.000,00	41.000.000,00	(2.000.000,00)	(4,88)
2	Perjanjian 30 Desember 2011	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
3	Perjanjian 08 Januari 2013	550.500.000,00	561.500.000,00	(11.000.000,00)	(1,96)
4	Perjanjian 01 April 2013	547.750.000,00	553.750.000,00	(6.000.000,00)	(1,08)
5	Perjanjian 01 Juli 2013	588.700.000,00	599.700.000,00	(11.000.000,00)	(1,83)
	Jumlah	1.740.950.000,00	1.770.950.000,00	(30.000.000,00)	(1,69)

Piutang Sewa Pakai Kapal Alat Tangkap beserta kelengkapannya per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.740.950.000,00 merupakan Piutang Sewa Kapal untuk Kelompok Usaha Bersama (KUB). Terhadap piutang ini telah dilakukan penyisihan dengan nilai Rp1.740.950.000,00 sebagai berikut:

Tabel 80 Piutang Sewa Pakai Kapal Netto

No.	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	Perjanjian 30 Desember 2010	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
2	Perjanjian 30 Desember 2011	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
3	Perjanjian 08 Januari 2013	550.500.000,00	550.500.000,00	0,00

No.	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
4	Perjanjian 01 April 2013	547.750.000,00	547.750.000,00	0,00
5	Perjanjian 01 Juli 2013	588.700.000,00	588.700.000,00	0,00
	Jumlah	1.740.950.000,00	1.740.950.000,00	0,00

Rincian Piutang Sewa Pakai Kapal pada *Lampiran 4.4*.

5. Piutang Sapi Jantan

31 Desember 2022

(Rp)

292.641.600,00

31 Desember 2021

(Rp)

334.642.100,00

Saldo Piutang Sapi Jantan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp292.641.600,00 dan Rp334.642.100,00. Piutang Sapi Jantan sebesar Rp292.641.600,00 merupakan nilai bruto atas penjualan sapi jantan yang telah dilakukan penyisihan sebesar piutang yaitu Rp292.641.600,00 dikarenakan umur piutang lebih dari 3 tahun (masuk kategori kualitas macet). Rincian Piutang Sapi Jantan terdapat pada *Lampiran 4.5*.

6. Piutang Sapi Betina

31 Desember 2022

(Rp)

132.800.000,00

31 Desember 2021

(Rp)

272.250.000,00

Saldo Piutang Sapi Betina per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp132.800.000,00 dan Rp272.250.000,00. Piutang Sapi Betina sebesar Rp132.800.000,00 merupakan nilai bruto atas penjualan sapi betina setelah dilakukan verifikasi ke peternak oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah dilakukan penyisihan sebesar Rp39.800.000,00. Rincian Piutang Sapi Betina terdapat pada *Lampiran 4.6*.

7. Piutang Ijin Usaha Pertambangan

31 Desember 2022

(Rp)

952.382.510,00

31 Desember 2021

(Rp)

1.052.382.510,00

Pada tahun 2020 sebelumnya Piutang Ijin Usaha Pertambangan masuk ke dalam rekening Piutang Retribusi, dan pada tahun 2022 direklasifikasi ke rekening Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah.

Dengan adanya UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka semua perda pajak dan retribusi yang tidak diatur dalam Undang-undang tersebut tidak boleh dipungut lagi. Salah satunya Peraturan Daerah Retribusi Izin Usaha Pertambangan; Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Daerah tentang retribusi daerah, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 perda – perda yang tidak diatur dalam UU 28 Tahun 2009 tidak boleh dipungut lagi dan dicabut kecuali sisa-sisa piutang tahun sebelumnya;

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 11.b/LHP/XIX.BJM/05/2019 tanggal

25 Mei 2019 Pemerintah Daerah sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan namun berdasarkan Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 540/390/BMB/DESDM tanggal 22 Januari 2021 menyatakan bahwa Piutang Ijin Usaha Pertambangan sebesar Rp1.119.369.010,00 menjadi kewenangan dan tercatat di Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;

Saldo Piutang Ijin Usaha Pertambangan sebesar Rp952.382.510,00 merupakan piutang bruto yang telah dilakukan penyisihan sebesar Rp952.382.510,00. Namun berdasarkan aging schedule piutang, diketahui bahwa Piutang Retribusi Ijin Usaha Pertambangan umur piutangnya masuk dalam kategori piutang macet karena diatas 3 tahun. Jadi pencatatan nettonya Rp0,00 dan sampai saat ini masih dalam proses penagihan.

8. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
23.272.460.000,00	19.334.690.315,00

Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp23.272.460.000,00 dan Rp19.334.690.315,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 81 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	BPR	23.248.360.500,00	19.252.815.600,00	3.995.544.900,00	20,75
2	Dinas Kesehatan	23.830.000,00	0,00	23.830.000,00	100,00
3	DPPKBP3A	269.500,00	0,00	269.500,00	100,00
4	Temuan Inspektorat	0,00	81.874.715,00	(81.874.715,00)	(100,00)
	Jumlah	23.272.460.000,00	19.334.690.315,00	3.937.769.685,00	20,37

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya sebesar Rp23.272.460.000,00 terdiri dari Pinjaman yang diberikan kepada Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut untuk pinjaman tanpa bunga kepada masyarakat sebesar Rp23.248.360.500,00 yang akan dikembalikan dalam waktu yang ditentukan dalam perjanjian, dan Piutang Pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp23.830.000,00 dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp269.500,00.

Tabel 82 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya Netto

No.	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	BPR	23.248.360.500,00	8.141.472.200,00	15.106.888.300,00
2	Dinas Kesehatan	23.830.000,00	119.150,00	23.710.850,00
3	DPPKBP3A	269.500,00	1.347,50	268.152,50
	Jumlah	23.272.460.000,00	8.141.592.697,50	15.130.867.302,50

Rincian piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya terdapat pada *Lampiran 4.7*.

9. Piutang Remunerasi Dana Transfer TDF

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
77.830.638,12	0,00

Saldo Piutang Remunerasi Dana Transfer TDF per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp77.830.638,12 dan Rp0,00. Piutang Remunerasi Dana TDF ini merupakan hasil pengelolaan Dana TDF atas dana transfer non tunai yang tersimpan di Bank Indonesia pada Rekening Lain BI TDF TKD Kab Tanah Laut Nomor Rekening 519000452980. Saldo Remunerasi atas Dana Transfer TDF ini berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Rekening Bank Indonesia Kabupaten Tanah Laut Nomor S-214/WPB.19/2023 Tanggal 13 Februari 2023 Perihal Kebijakan Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil Dalam Bentuk Non Tunai Melalui *Treasury Deposit Facilities* (TDF).

Perhitungan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah netto dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 83 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Netto

No.	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	360.299.547,12	310.549.547,12	49.750.000,00
2	Piutang Tuntutan Perbendaharaan	111.055.000,00	111.055.000,00	0,00
3	Piutang BLUD	3.738.127.295,40	86.813.836,33	3.651.313.459,07
4	Piutang Sewa Pakai Kapal	1.740.950.000,00	1.740.950.000,00	0,00
5	Piutang Sapi Jantan	292.641.600,00	292.641.600,00	0,00
6	Piutang Sapi Betina	132.800.000,00	39.840.000,00	92.960.000,00
7	Piutang Ijin Usaha Pertambangan	952.382.510,00	952.382.510,00	0,00
8	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya			0,00
	- BPR	23.248.360.500,00	8.141.472.200,00	15.106.888.300,00
	-Dinas Kesehatan	23.830.000,00	119.150,00	23.710.850,00
	- DPPKBP3A	269.500,00	1.347,50	268.152,50
9	Piutang Remunerasi Dana Transfer TDF	77.678.638,12	0,00	77.678.638,12
	Jumlah	30.678.546.590,64	11.675.825.190,95	19.002.569.399,69

7.1.3.8.4 PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

31 Desember 2022

(Rp)

0,00

31 Desember 2021

(Rp)

24.817.804.050,00

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp24.817.804.050,00 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

Tabel 84 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	DBH PBB	0,00	22.205.005.202,00	(22.205.005.202,00)	(100,00)
2	DBH PPh Ps.21, Ps. 25/29	0,00	2.346.279.051,00	(2.346.279.051,00)	(100,00)
3	DBH CHT	0,00	624,00	(624,00)	(100,00)
4	DBH SDA Mineral dan Batu Bara	0,00	246.359.748,00	(246.359.748,00)	(100,00)
5	DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DBH SDA Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DBH SDA Kehutanan	0,00	20.159.425,00	(20.159.425,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	24.817.804.050,00	(24.817.804.050,00)	(100,00)

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK No. 127 /PMK.07/2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Tahun 2022, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KM.7/2022 Tanggal 19 Oktober 2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Periode 2 Pada Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46/KM.7/2022 tgl 28 Desember 2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Periode 3 Pada Tahun 2022.

Piutang Transfer Pemerintah Pusat ini tidak dilakukan penyisihan piutang sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 Akuntansi Piutang Berbasis Akrual. Daftar Piutang Transfer Pemerintah Pusat pada *Lampiran 5*.

7.1.3.8.5 PIUTANG TRANSFER ANTAR DAERAH

31 Desember 2022

(Rp)

50.656.124.065,67

31 Desember 2021

(Rp)

49.896.491.243,53

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp50.656.124.065,67 dan Rp49.896.491.243,53. Rincian Piutang Transfer Antar Daerah adalah sebagai berikut:

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah tersebut merupakan sisa Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sampai dengan 31 Desember 2022 berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai berikut:

Tabel 85 Pergub Bagi Hasil Pemerintah Provinsi

No.	Uraian	No. Peraturan Gubernur	Nilai Yang Disalurkan (Rp)
1	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Pergub Nomor 068 Tahun 2022	6.314.389.421,68
2.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Pergub Nomor 06 Tahun 2023	40.726.078.689,99
3.	Pajak Air Permukaan	Pergub Nomor 07 Tahun 2023	224.920.419,00
4.	Pajak Rokok	Pergub Nomor 08 Tahun 2023	3.390.735.535,00
Jumlah			50.656.124.065,67

Piutang Transfer Antar Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 86 Piutang Transfer Antar Daerah

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	7.878.772.743,49	(7.878.772.743,49)	(100,00)
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBnKB)	0,00	4.747.811.322,00	(4.747.811.322,00)	(100,00)
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	47.040.468.111,67	34.362.233.457,05	12.678.234.654,62	36,90
4	Pajak Rokok	3.390.735.535,00	2.872.117.501,00	518.618.034,00	18,06
5	Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABT-AP)	224.920.419,00	35.556.219,99	189.364.199,01	532,58
Jumlah		50.656.124.065,67	49.896.491.243,53	759.632.822,14	1,52

Rincian lengkap daftar Piutang Transfer Antar Daerah pada *Lampiran 6*. Piutang Transfer Antar Daerah ini tidak dilakukan penyisihan piutang sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 Akuntansi Piutang Berbasis Akrua.

7.1.3.8.6 PIUTANG LAINNYA

31 Desember 2022
(Rp)

771.850.000,00

31 Desember 2021
(Rp)

816.850.000,00

Saldo Piutang Lainnya merupakan saldo piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran atau Piutang sewa beli kapal per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp771.850.000,00 dan sebesar Rp816.850.000,00 merupakan saldo bruto dari tagihan penjualan angsuran atas kerjasama pemanfaatan kapal dan alat tangkap ikan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Rincian piutang bruto tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 87 Rincian Piutang Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	AH	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	0,00
2	Usm	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	0,00
3	Jhr	42.000.000,00	54.000.000,00	(12.000.000,00)	(22,22)
4	TS	97.500.000,00	102.500.000,00	(5.000.000,00)	(4,88)
5	Rms	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	0,00
6	Swn	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Hj	155.250.000,00	155.250.000,00	0,00	0,00
8	Ltk	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00
9	Iskd	70.600.000,00	98.600.000,00	(28.000.000,00)	(28,40)
	Jumlah	771.850.000,00	816.850.000,00	(45.000.000,00)	(5,51)

Rincian lebih lanjut dimuat dalam *Lampiran 7*.

Saldo bruto tersebut di atas telah dilakukan penyisihan dengan persentase 94,49% karena umur piutangnya di atas 3 tahun. Penyisihan Piutang Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dengan nilai Rp771.850.000,00. Piutang netto dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 88 Rincian Piutang Netto Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

No.	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	Piutang Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	771.850.000,00	771.850.000,00	0,00
	Jumlah	771.850.000,00	771.850.000,00	0,00

7.1.3.8.7 PENYISIHAN PIUTANG

31 Desember 2022
(Rp)

26.067.607.198,26

31 Desember 2021
(Rp)

22.295.734.650,46

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp26.067.607.198,26 dan sebesar Rp22.295.734.650,46. Rincian Penyisihan bruto tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 89 Penyisihan Piutang

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	13.273.843.532,31	12.365.861.293,92	907.982.238,39	7,34
2	Penyisihan Piutang Retribusi	346.088.475,00	272.031.530,00	74.056.945,00	27,22
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	11.675.825.190,95	8.840.991.826,54	2.834.833.364,41	32,06
4	Penyisihan Piutang Lain-lain	771.850.000,00	816.850.000,00	(45.000.000,00)	(5,51)
	Jumlah	26.067.607.198,26	22.295.734.650,46	3.771.872.547,80	16,92

8.1.1.1 PERSEDIAAN

31 Desember 2022
(Rp)

22.842.008.750,19

31 Desember 2021
(Rp)

27.714.368.100,41

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp22.842.008.750,19 dan Rp27.714.368.100,41. Saldo Persediaan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 memiliki sumber penerimaan yang berasal dari APBD, BTT, BOS, serta BLUD. Saldo Realisasi Persediaan yang berasal dari APBD per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 5.886.984.267,32 atau sebesar 33,98% dari tahun sebelumnya. Saldo Realisasi Persediaan yang berasal dari BTT per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 95.785.040,00 atau sebesar 100,00% dari tahun sebelumnya. Saldo Realisasi Persediaan yang berasal dari BOS per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 379.129.951,91 atau sebesar 24,81% dari tahun sebelumnya. Saldo Realisasi Persediaan yang berasal dari BLUD per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.489.539.909,01 atau sebesar 17,00% dari tahun sebelumnya. Untuk rincian masing-masing sumber yang tercatat pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 90 Rincian Persediaan Berasal dari dana APBD

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Alat Tulis Kantor	313.135.522,08	420.167.908,30	(107.032.386,22)	(25,47)
2	Alat Listrik	1.015.590.901,00	68.168.375,00	947.422.526,00	1.389,83
3	Materai	6.290.000,00	33.190.000,00	(26.900.000,00)	(81,05)
4	Perabot Kantor	269.770.304,00	618.593.020,00	(348.822.716,00)	(56,39)
5	Natura	40.020.000,00	31.442.300,00	8.577.700,00	27,28
6	Barang Hibah	24.000.000,00	4.488.728.000,00	(4.464.728.000,00)	(99,47)
7	Bahan Komputer	736.335.522,00	565.525.323,00	170.810.199,00	30,20
8	Bibit Ternak / Bibit Tanaman	9.500.000,00	11.900.000,00	(2.400.000,00)	(20,17)
9	Alat Kesehatan Habis Pakai	2.913.315.258,75	3.887.948.246,36	(974.632.987,61)	(25,07)
10	Bahan Obat-Obatan	5.172.506.341,45	4.943.835.543,94	228.670.797,51	4,63
11	Bahan Kimia	796.203.126,00	1.443.707.108,00	(647.503.982,00)	(44,85)
12	Suku Cadang	2.374.400,00	121.514.400,00	(119.140.000,00)	(98,05)
13	Kertas dan Cover	100.162.487,00	206.711.199,00	(106.548.712,00)	(51,54)
14	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	39.712.994,00	484.469.700,00	(444.756.706,00)	(91,80)
	Jumlah	11.438.916.856,28	17.325.901.123,60	(5.886.984.267,32)	(33,98)

Pada persediaan barang pakai habis sesuai dengan tabel diatas terdapat beberapa *item* barang persediaan yang mengalami kenaikan dan penurunan sesuai stock opname yang ada di SKPD antara lain sebagai berikut:

- 1) Persediaan Alat listrik sebesar Rp1.015.590.901,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp68.168.375,00 sehingga ada kenaikan sebesar Rp947.422.526,00 atau 1.389,83% yang terbesar persediaannya pada DPRKPLH sebesar Rp1.004.716.638;
- 2) Persediaan Suku Cadang yang terdapat pada DP2KBP3A dengan total barang persediaan Suku Cadang sebesar Rp2.374.400,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp121.514.400,00 sehingga ada penurunan sebesar Rp119.140.000.000,00 atau 98,05%;
- 3) Persediaan Bahan Obat-Obatan yang terdapat pada Dinas Kesehatan, RSUD K. H. Mansyur, DP2KBP3A, Distanhorbun dan Disnakeswan dengan total barang persediaan Rp5.172.506.341,45 sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.943.835.543,94 sehingga ada kenaikan sebesar Rp 228.670.797,51 atau 4,63%. Hal ini dikarenakan untuk tahun 2022 barang obat-obat antara APBD dan BLUD sudah dipisah berdasarkan sumber penerimaannya masing – masing;
- 4) Persediaan Alat Tulis Kantor untuk tahun 2022 sebesar Rp313.135.522,08, untuk total stock opname persediaan barang pakai habis pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp Rp420.167.908,30, terjadi penurunan sebesar Rp(107.032.386,22) atau sebesar 25,47%. Hal ini disebabkan adanya perubahan kode rekening yang terjadi pada tahun 2022 sehingga mempengaruhi terhadap nilai yang ada pada tahun 2021;
- 5) Barang Hibah terdapat pada Inspektorat sebesar Rp24.000.000,00, saja sesuai dengan berita acara *stock opname*, sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 4.488.728.000,00, sehingga ada penurunan sebesar Rp4.464.728.000,00 atau sebesar 99,47%;
- 6) Bahan Kimia pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp796.203.126,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.443.707.108,00, terjadi kenaikan sebesar Rp647.503.982,00 atau 44,85%. Bahan kimia yang paling tinggi terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp612.152.306,00;

Sementara untuk persediaan yang lain diperoleh dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Belanja Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 91 Rincian Persediaan Berasal dari Dana BTT

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Alat Kesehatan Habis Pakai	0,00	95.785.040,00	(95.785.040,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	95.785.040,00	(95.785.040,00)	(100,0)

Untuk persediaan barang pakai habis ini hanya terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas Kesehatan.

Tabel 92 Rincian Persediaan Berasal dari Dana BOS

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Alat Tulis Kantor	413.788.940,96	512.145.762,00	(98.356.821,04)	(19,20)
2	Alat Listrik	43.399.034,00	31.347.540,00	12.051.494,00	38,44



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
3	Materai	1.171.994,00	4.140.000,00	(2.968.006,00)	(71,69)
4	Perabot Kantor	297.586.729,39	368.438.604,33	(70.851.874,94)	(19,23)
5	Bahan Komputer	129.135.214,50	124.397.500,00	4.737.714,50	3,81
6	Alat Kesehatan Habis Pakai	2.402.977,00	7.842.000,00	(5.439.023,00)	(69,36)
7	Bahan Obat-Obatan	13.749.360,00	57.962.044,00	(44.212.684,00)	(76,28)
8	Bahan Kimia	9.468.559,00	3.641.800,00	5.826.759,00	160,00
9	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	6.330.000,00	(6.330.000,00)	(100,00)
10	Kertas dan Cover	199.205.548,90	276.093.546,00	(76.887.997,10)	(27,85)
11	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.639.457,00	89.124.412,00	(75.484.955,00)	(84,70)
12	Perlengkapan Pendukung Olahraga	24.647.800,00	46.942.558,33	(22.294.758,33)	(47,49)
13	Bahan lainnya	1.080.200,00	0,00	1.080.200,00	0,00
	Jumlah	1.149.275.814,75	1.528.405.766,66	(379.129.951,91)	(24,81)

Untuk persediaan barang pakai habis ini hanya terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Tabel 93 Rincian Persediaan Berasal dari Dana BLUD

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Alat Tulis Kantor	247.278.431,78	226.962.874,00	20.315.557,78	8,95
2	Alat Listrik	26.684.035,00	24.391.049,00	2.292.986,00	9,40
3	Materai	1.360.000,00	300.000,00	1.060.000,00	353,33
4	Perabot Kantor	117.831.854,00	74.080.956,50	43.750.897,50	59,06
5	Bahan Komputer	81.045.108,00	41.255.832,00	39.789.276,00	96,45
6	Alat Kesehatan Habis Pakai	5.066.304.088,15	5.022.408.896,46	43.895.191,69	0,87
7	Bahan Obat-Obatan	4.028.258.881,73	3.140.719.800,69	887.539.081,04	28,26
8	Bahan Kimia	327.460.046,00	159.835.661,50	167.624.384,50	104,87
9	Bahan Bangunan & Konstruksi	0,00	4.140.944,00	(4.140.944,00)	(100,00)
10	Suku Cadang	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
11	Kertas dan Cover	99.067.133,50	70.180.156,00	28.886.977,50	41,16
12	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	216.936.501,00	0,00	216.936.501,00	0,00
13	Bahan lainnya	41.250.000,00	0,00	41.250.000,00	0,00
	Jumlah	10.253.816.079,16	8.764.276.170,15	1.489.539.909,01	17,00

Untuk persediaan barang pakai habis ini hanya terdapat pada 19 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit Umum Daerah. Daftar Persediaan selengkapnya terdapat pada **Lampiran 8**.

8.1.1.2 INVESTASI NON PERMANEN LAINNYA

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1,856,677,500.00	18.083.589.716 ,00

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1,856,677,500.00 dan Rp18.083.589.716 ,00 sebagai berikut:

Tabel 94 Investasi Non Permanen Lainnya

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Penggaduhan Ternak Sapi	1.856.677.500,00	4.747.077.500,00	(2.890.400.000,00)	(60,89)
2	Pengelolaan Kapal kepada Nelayan	13.336.512.216,00	13.336.512.216,00	0,00	0,00
	Jumlah	15.193.189.716,00	18.083.589.716,00	(2.890.400.000,00)	(15,98)

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.193.189.716,00 tersebut merupakan nilai bruto yang telah dilakukan penyisihan pada penggaduhan ternak sapi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan pengelolaan kapal pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Investasi Non Permanen disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan sebesar Rp1.856.677.500,00 untuk Penggaduhan Ternak Sapi dan Pengelolaan Kapal Nelayan sebesar Rp0,00. Penyisihan Investasi Non Permanen telah dilakukan penyisihan sesuai kebijakan akuntansi pemerintah daerah.

Rincian investasi non permanen per 31 Desember 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penggaduhan Ternak Sapi

Merupakan nilai perguliran yang belum lunas pada pengelolaan ternak sapi betina sebesar Rp4.330.392.500,00 dan sapi jantan dengan nilai bruto sebesar Rp79.600.000,00 dan telah dilakukan penyisihan investasi non permanen sebesar Rp2.523.215.000,00 untuk sapi betina dan Rp30.100.000,00 untuk sapi jantan sehingga diperoleh nilai bersih yang direalisasikan sebesar Rp1.856.677.500,00 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lampiran Data Aging Schedule sapi terdapat pada **Lampiran 9.1**.

2) Pengelolaan Kapal kepada Nelayan

Merupakan nilai aset Kapal 10 GT beserta alat tangkap dan kelengkapannya berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Nelayan pada Tanggal 03 Januari 2011, 02 Januari 2012 dan 08 Januari 2013. Perjanjian ini telah berakhir pada tahun 2019 dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Ketiga atas Perubahan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut disebutkan bahwa jika perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan nelayan berakhir, maka aset kapal tersebut akan dicatat sebagai aset lain-lain. Nilai investasi kapal dapat dilihat dalam rincian sebagai berikut:

Tabel 95 Nilai Investasi Kapal

No.	Uraian	Nilai Investasi (Rp)
1.	Kapal 10 GT Tahun 2010	3.843.839.426,00
2.	Kapal 10 GT Tahun 2011	4.952.080.000,00
3.	Kapal 10 GT Tahun 2012	4.540.592.790,00
	Jumlah	13.336.512.216,00

Kapal Ukuran 2,6 GT beserta alat tangkapnya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang dipinjamkaikan ke nelayan berdasarkan SK Bupati Tanah Laut Nomor 590 Tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pengelolaan Kapal dan Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Nelayan pada Tanggal 25 Juni 2010 telah dihapuskan berdasarkan SK Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/756-KUM/2014 tanggal 24 Desember 2014. Untuk data pengelolaan kapal kepada nelayan pada **Lampiran 9.2**.

Dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Tanah Tahun 2022, Investasi Non Permanen disajikan dengan nilai netto sebesar Rp1.856.677.500,00 yaitu nilai bruto dikurangi dengan penyisihan Investasi Non Permanen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 96 Investasi Non Permanen Netto

No.	Uraian	Investasi Non Permanen Bruto (Rp)	Penyisihan (Rp)	Investasi Non Permanen Netto (Rp)
1	Pengaduhan Ternak Sapi	4.330.392.500,00	2.523.215.000,00	1.807.177.500,00
2	Pengaduhan Sapi Jantan	79.600.000,00	30.100.000,00	49.500.000,00
3	Pengelolaan Kapal kepada Nelayan	13.336.512.216,00	13.336.512.216,00	0,00
	Jumlah	17.746.504.716,00	15.889.827.216,00	1.856.677.500,00

8.1.1.3 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

31 Desember 2022
(Rp)

144.405.364.828,06

31 Desember 2021
(Rp)

117.587.676.158,88

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp144.405.364.828,06 dan Rp117.587.676.158,88 terdiri atas:

Tabel 97 Saldo Penyertaan Modal

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Bank Kalsel	110.374.250.000,00	85.374.367.703,00	24.999.882.297,00	29,28
2	PDAM Kabupaten Tanah Laut	25.101.136.078,23	26.616.722.133,54	(1.515.586.055,31)	(5,69)
3	PT.BPR Tanah Laut	5.477.300.435,83	5.596.586.322,34	(119.285.886,50)	(2,13)
4	PD Baratala Tuntung Pandang	3.452.678.314,00	0,00	3.452.678.314,00	100,00
	Jumlah	144.405.364.828,06	117.587.676.158,88	26.817.688.669,18	22,81

1) Bank Kalsel

Saldo penyertaan modal kepada Bank Kalsel per 31 Desember 2022 sebesar Rp110.374.250.000,00 dengan persentase kepemilikan sebesar 6,36% dan penyajian penyertaan modalnya menggunakan metode biaya sama seperti tahun 2021. Penambahan Penyertaan Modal ke Bank Kalsel sebesar Rp25.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tanggal 30 September 2022 tentang Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 122 Tahun 2022 Tanggal 17 November 2022 tentang Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

2) PDAM Kabupaten Tanah Laut

Saldo penyertaan modal kepada PDAM Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2022 sebesar Rp25.101.136.078,23 dengan persentase kepemilikan sebesar 89,10% dan penyajian penyertaan modalnya menggunakan metode ekuitas. Nilai penyertaan modal sebesar Rp25.101.136.078,23 ini merupakan bagian 89,10% dari total Ekuitas dalam Neraca PDAM Kabupaten Tanah Laut Audited 2022 sebesar Rp28.171.869.897,00. Data dukung pada *Lampiran 10.1*.

3) PT. BPR Tanah Laut

Saldo penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.477.300.435,83 dengan persentase kepemilikan sebesar 75,41%, saldo tersebut merupakan 75,41% dari total Ekuitas dalam Neraca PT. BPR Tanah Laut Audited 2022 sebesar Rp7.263.360.875,00 sehingga penyajian penyertaan modalnya menggunakan metode ekuitas. Data dukung pada *Lampiran 10.2*.

4) PT Baratala Tuntung Pandang

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 06 tentang akuntansi penyertaan modal, Nilai 0 (Nol) tersebut dicatat Laporan Keuangan PT Baratala Tahun 2022 bernilai negatif berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* tahun 2022. Secara administratif Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tidak menyetorkan penyertaan modal secara tunai, namun secara substansi Perusahaan Daerah tersebut dalam penguasaan penuh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sehingga penyajian penyertaan modalnya menggunakan metode ekuitas. Penggunaan metode ekuitas dimulai tahun 2012 sehingga laba pada tahun 2011 dianggap sebagai akumulasi penyertaan modal Pemerintah Daerah per 31 desember 2011 sebesar Rp1.432.857.977,19 sementara dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2005 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut pada pasal 13 ayat (2) disebutkan bahwa Modal Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Pada tahun 2022 PD Baratala Tuntung Pandang memberikan bagian laba ke Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 sebesar Rp374.935.017,00 dan pada tanggal 8 April 2022 sebesar Rp479.277.014,00. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp3.452.678.314,00 merupakan nilai Ekuitas dalam Neraca PT. Baratala Tuntung Pandang dengan kepemilikan Pemerintah Kabupaten tanah Laut sebesar 100%. Data dukung pada *Lampiran 10.3*.

8.1.1.4 ASET TETAP

31 Desember 2022

(Rp)

3.562.874.935.230,64

31 Desember 2021

(Rp)

3.398.012.153.979,96

Saldo Aset Tetap Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp3.562.874.935.230,64 dan Rp3.398.012.153.979,96 terdiri atas:

Tabel 98 Rincian Saldo Aset Tetap

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1.	Tanah	836.235.257.191,35	808.616.413.726,52	27.618.843.464,83
2.	Peralatan dan Mesin	656.530.372.042,31	570.096.134.486,45	86.434.237.555,86
3.	Gedung dan Bangunan	1.329.095.131.735,75	1.234.545.603.141,78	94.549.528.593,97
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.533.893.026.483,34	2.334.275.258.255,78	199.617.768.227,56
5.	Aset Tetap Lainnya	4.830.380.283,00	4.796.764.345,00	33.615.938,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.586.988.476,40	24.530.347.182,50	(7.943.358.706,10)
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.814.296.220.981,51)	(1.578.848.367.158,06)	(235.447.853.823,45)
	Jumlah	3.562.874.935.230,64	3.398.012.153.979,97	164.862.781.250,67

Penjelasan atas saldo masing-masing Aset Tetap adalah sebagai berikut:

8.1.1.4.1 TANAH

31 Desember 2022

(Rp)

836.235.257.191,35

31 Desember 2021

(Rp)

808.616.413.726,52

Saldo Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp836.235.257.191,35 dan Rp808.616.413.726,52. Realisasi Tanah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp27.618.843.464,83 atau sebesar 3,42% dari tahun sebelumnya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 99 Rincian Tanah

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Saldo Awal	808.616.413.726,52	810.833.152.356,52	(2.216.738.630,00)	(0,27)
2	Penambahan:				
	- Belanja Modal	240.492.000,00	2.897.145.120,00	(2.656.653.120,00)	(91,70)
	- Penilaian:	27.683.634.600,00		27.683.634.600,00	100,00
	- Mutasi Unit Kerja	48.741.833.876,00	625.375.080,00	48.116.458.796,00	7.694,02
	- Reklasifikasi	116.782.690,00	568.929.500,00	(452.146.810,00)	(79,47)
	- Hibah dan Koreksi Tambah Aset	328.000.000,00	2.209.386.500,00	(1.881.386.500,00)	(85,15)
	Pengurangan:				
	- Mutasi Unit Kerja	48.741.833.876,00	625.375.080,00	48.116.458.796,00	7.694,02
	- Reklasifikasi	12.490.000,00		12.490.000,00	100,00
	- Penghapusan	604.965.825,17	7.892.199.750,00	(7.287.233.924,83)	(92,33)
	- Koreksi Kurang Aset Tetap	132.610.000,00		132.610.000,00	100,00
	Jumlah	836.235.257.191,35	808.616.413.726,52	27.618.843.464,83	3,42

Penambahan aset tetap Tanah pada tahun 2022 salah satunya berasal dari belanja modal sebesar Rp240.492.000,00 terdapat pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan berupa belanja perencanaan *land clearing* pabrik karet sebesar Rp12.490.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa belanja penyertifikatan tanah sebesar RpRp228.002.000,00.

Saldo Tanah tersebut termasuk tanah yang bersertifikat, belum proses sertifikat, proses pembuatan sertifikat dan sertifikat yang belum ditemukan senilai Rp836.235.257.191,35 yang berasal dari pembelian dan hibah saat otonomi daerah dari instansi vertikal. Tanah yang sudah memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat senilai Rp624.016.874.012,70 yang di atasnya berdiri bangunan Perkantoran, Poskesdes, tanah Balai Desa, tanah SD, tanah SMP yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Tanah yang bukti kepemilikan sertifikatnya dalam proses pembuatan sertifikat tanah senilai Rp2.439.270.794,00 yang di atasnya berdiri bangunan Poskesdes, tanah balai desa, tanah SD, SMP yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Tanah yang bukti kepemilikan sertifikatnya belum diproses pembuatan sertifikatnya senilai Rp204.858.240.584,65 termasuk didalamnya tanah untuk bangunan pemerintah, tanah untuk jalan serta tanah yang berasal dari proses ganti rugi. Tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang sertifikatnya belum ditemukan senilai Rp. 4.920.871.800,00.

Penambahan aset tetap tanah pada tahun 2022 yang berasal koreksi tambah sebesar Rp23.000.000,00 yaitu berupa tanah eks SPDN yang berasal dari aset hasil likuidasi PD. AUMB, dan yang berasal dari hibah masuk sebesar Rp Rp305.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD	No BAST	Pemberi Hibah	Nilai	Jumlah Persil
1	Dinas Kesehatan	032/01/BAST/BPKA D/2022	Tan Selamat	15.000.000,00	1
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	032/04/BAST/BPKA D/2022	Mulyono (Kepala Desa Bumi Jaya)	250.000.000,00	1
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	032/05/BAST/BPKA D/2022	Prof. Dr. Ir. H. Udiansyah, MS (Yayasan Udiansyah Muhammad Kasi)	40.000.000,00	1
Jumlah				305.000.000,00	

Mutasi unit kerja tanah pada tahun 2022 sebesar Rp48.741.833.876,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD Asal	SKPD Tujuan	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1.121.720,00
2	Dinas Sosial	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	300.000.000,00
3	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	610.000.000,00
4	Sekretariat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	80.240.000,00
5	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	89.100.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Dinas Kesehatan	2.335.280,00
		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.932.680,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD Asal	SKPD Tujuan	Nilai
		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	535.080,00
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	240.523.600,00
		Dinas Pariwisata	46.790.891.516,00
		Dinas Koperasi Dan Perdagangan	610.000.000,00
		Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	5.300.000,00
		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	9.854.000,00
	Jumlah		48.741.833.876,00

Reklasifikasi tambah pada aset tetap berupa tanah sebesar Rp116.782.690,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Gedung dan Bangunan	Tanah	116.782.690,00
	Jumlah			116.782.690,00

Reklasifikasi kurang pada aset tetap berupa tanah sebesar Rp12.490.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Gedung dan Bangunan	Tanah	116.782.690,00
	Jumlah			116.782.690,00

Pengurangan aset tetap Tanah pada tahun 2022 diantaranya berupa penghapusan sebesar Rp604.965.825,17 karena pemindah tanganan dalam bentuk hibah pada tiga SKPD yaitu pada Sekretariat Daerah sebesar Rp276.900.000,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp268.259.960,00, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp59.805.865,17, dengan rincian sebagai berikut:

1. 188.45/680-KUM/2022 tanggal 12 April 2022 senilai Rp276.900.000,00 dikarenakan hibah ke Yayasan Pondok Pesantren Asy Syuhada pada Sekretariat Daerah.
2. 032/57-BPKAD/2022 tanggal 10 Oktober 2022 senilai Rp268.259.960,00 dikarenakan hibah kepada Kepolisian Resor Tanah Laut pada Dinas Perhubungan.
3. 032/62-BPKAD/2022 tanggal 5 Desember 2022 senilai Rp59.805.865,17 dikarenakan hibah ke Pemerintah Desa Kunyit pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD);

Pengurangan aset tetap tanah selanjutnya yaitu koreksi kurang sebesar Rp132.610.000,00 berupa tanah kantor Bank Kalsel yang masih tercatat di KIB A Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Untuk rincian secara lengkap penambahan dan pengurangan Tanah terdapat dalam *Lampiran 11*.

8.1.1.4.2 PERALATAN DAN MESIN

31 Desember 2022

(Rp)

656.530.372.042,31

31 Desember 2021

(Rp)

570.096.134.486,45

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp656.530.372.042,31 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp570.096.134.486,45. Realisasi peralatan dan mesin Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp86.434.237.555,86 atau sebesar 15,16% dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 100 Rincian Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Saldo Awal	570.096.134.486,47	485.555.599.058,47	84.540.535.428,00	17,41
2	Penambahan :				
	- Belanja Modal	91.151.091.039,00	87.589.675.673,00	3.561.415.366,00	4,07
	- Atribusi	0,00	0,00	0,00	100,00
	- Mutasi Unit Kerja	10.495.120.861,75	5.446.175.122,22	5.048.945.739,53	92,71
	- Reklasifikasi	394.522.900,00	374.794.626,00	19.728.274,00	5,26
	- Hibah dan Koreksi Tambah Aset	2.609.225.206,00	2.565.727.000,00	43.498.206,00	1,70
3	Pengurangan :				
	- Ekstrakomtabel	197.265.470,00	541.918.284,87	(344.652.814,87)	(63,60)
	- Mutasi Unit Kerja	10.495.120.861,75	5.446.175.122,22	5.048.945.739,53	92,71
	- Reklasifikasi	1.359.755.110,00	967.053.479,00	392.701.631,00	40,61
	- Penghapusan	5.688.077.361,16	4.216.361.477,15	1.471.715.884,01	34,90
	- Koreksi Kurang Aset Tetap	475.503.648,00	264.328.630,00	211.175.018,00	79,89
	Jumlah	656.530.372.042,31	570.096.134.486,45	86.434.237.555,86	15,16

Penambahan pada aset tetap peralatan dan mesin diantaranya yaitu belanja modal sebesar Rp91.151.091.039,00 dan hibah masuk pada tahun 2022 sebesar Rp2.609.225.206,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama SKPD	No BAST	Nama Pemberi	Nilai
1.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5991/4.2/PLK.03.03/XII/2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	300.743.400,00
2.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	34/RT.01.3/6301/2022	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut	16.799.818,00
3.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	33/RT.01.3/6301/2022	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut	53.628.640,00
4.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	264/XI/PH-KOMPUTERDAERAH/DPPM/KEMENINVES-BKPM/2021	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	16.525.300,00
5.	Dinas Perhubungan	PL.301/08/7.A/AJ/XI/2022 dan 550/477/DISHUB/2022	Kementerian Perhubungan RI	515.560.000,00
6.	Dinas Kesehatan	KN 02 02/9/3695.2/2022	Kementerian Kesehatan RI	275.248.048,00
7.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29701.111/C3/KPA/XII/BAST/2022	Direktorat Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	1.430.720.000,00
Jumlah				2.609.225.206,00

Penambahan berupa mutasi unit kerja peralatan dan mesin pada Tahun 2022 sebesar Rp10.495.120.861,75 dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD Asal	SKPD Tujuan	Nilai
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	53.243.414,67
2	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial	39.831.099,97
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	145.708.668,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Kecamatan Kurau	6.600.000,00
		Kecamatan Pelaihari	25.750.000,00
		Dinas Kesehatan	18.370.000,00
		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	188.700.000,00
		Kecamatan Kintap	6.600.000,00
4	Dinas Sosial	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	750.000,00
5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.300.000,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	121.151.272,73
		Dinas Kesehatan	82.500.000,00
7	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	267.800.000,00
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perdagangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	86.649.682,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.654.000,00
		Dinas Kesehatan	2.639.000,00
9	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	24.800.000,00
10	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	18.510.000,00
11	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Dinas Komunikasi dan Informatika	545.000.000,00
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.750.000,00
12	Sekretariat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	41.900.000,00
		Kecamatan Pelaihari	845.786.000,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	169.157.200,00
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.129.000,00
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.693.000,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	356.160.000,00
13	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	821.443.933,00
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	453.050.000,00
14	Kecamatan Kurau	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	122.210.000,00
15	Kecamatan Bati-Bati	Dinas Perhubungan	354.200.000,00
16	Kecamatan Panyipatan	Dinas Perhubungan	354.200.000,00
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	54.000.000,00
17	Kecamatan Jorong	Dinas Perhubungan	354.200.000,00
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	19.635.000,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	17.299.755,29
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.590.000,00
		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	500.000,00

No	SKPD Asal	SKPD Tujuan	Nilai
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32.000.000,00
19	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	162.987.282,09
		Dinas Perhubungan	255.000.000,00
		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	15.308.500,00
		Kecamatan Kurau	147.383.333,00
		Dinas Sosial	269.500.000,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	336.945.975,00
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	275.865.000,00
		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	78.391.746,00
		Inspektorat Kabupaten	271.600.000,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	286.700.000,00
		Sekretariat Daerah	2.651.850.000,00
20	Badan Pendapatan Daerah	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	7.800.000,00
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	67.328.000,00
Jumlah			10.495.120.861,75

Penambahan berupa reklasifikasi tambah pada aset tetap berupa peralatan dan mesin sebesar Rp394.522.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan	Peralatan Mesin	17.833.000,00
		Aset Lain Lain	Peralatan Mesin	45.000.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Gedung dan Bangunan	Peralatan Mesin	246.020.000,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Gedung dan Bangunan	Peralatan Mesin	20.394.900,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Aset Lain Lain	Peralatan Mesin	32.000.000,00
5	Kecamatan Pelaihari	Aset Lain Lain	Peralatan Mesin	9.350.000,00
6	Kecamatan Bajuin	Aset Lain Lain	Peralatan Mesin	4.465.000,00
7	Inspektorat Kabupaten	Aset Lain Lain	Peralatan Mesin	11.560.000,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Aset Lain Lain	Peralatan Mesin	7.900.000,00
Jumlah				394.522.900,00

Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin pada tahun 2022 diantaranya penghapusan sebesar Rp5.688.077.361,16 dimana penghapusan ini terdapat 20 SKPD dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Daerah penghapusan dikarenakan sebab Pemindahtanganan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp1.038.296.000,00 dengan SK Nomor: 188.45/723-KUM/2022 tanggal 28 April 2022, sebesar Rp213.000.000,00 dengan SK Nomor : 188.45/738-KUM/2022 tanggal 10 Mei 2022 dan sebesar Rp37.260.000,00 dengan SK Nomor : 188.45/917-KUM/2022 tanggal 7 Juli 2022, sebesar Rp145.000.000,00 dengan SK Nomor 188.45/1260-KUM/2022 tanggal 7 Desember 2022;
- 2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai aset

- tetapnya sebesar Rp89.658.704,00 dengan SK Nomor : 032/02-BPKAD/2022 tanggal 14 Maret 2022;09
- 3) Kecamatan Bati-Bati penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp8.171.545,00 dengan SK Nomor : 032/01-BPKAD/2022 tanggal 11 Maret 2022;
 - 4) Badan Pendapatan Daerah penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp8.169.650,00 dengan SK Nomor : 032/03-BPKAD/2022 tanggal 15 Maret 2022, sebesar Rp28.542.007,48 dengan SK Nomor : 032/48-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022;
 - 5) Dinas Perhubungan penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp25.233.864,00 dengan SK Nomor : 032/05-BPKAD/2022 tanggal 22 Maret 2022;
 - 6) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp43.122.889,00 dengan SK Nomor : 032/08-BPKAD/2022 tanggal 1 April 2022,;
 - 7) Dinas Komunikasi dan Informatika penghapusan dikarenakan sebab Pemindahtanganan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp113.722.884,75 dengan SK Nomor: 032/09-BPKAD/2022 tanggal 25 April 2022, dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp43.168.885,00 dengan SK Nomor : 032/17-BPKAD/2022 tanggal 17 Juni 2022;
 - 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil penghapusan dikarenakan sebab Pemindahtanganan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp22.900.000,00 dengan SK Nomor: 032/10-BPKAD/2022 tanggal 25 April 2022;
 - 9) Dinas Kesehatan penghapusan dikarenakan sebab Pemindahtanganan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp174.500.000,00 dengan SK Nomor: 032/11-BPKAD/2022 tanggal 25 April 2022, sebesar Rp1.961.003.992,00 dengan SK Nomor: 032/64-BPKAD/2022 tanggal 5 Desember 2022;
 - 10) Dinas Kepemudaan dan Olahraga penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp27.150.000,00 dengan SK Nomor : 032/13-BPKAD/2022 tanggal 6 Mei 2022;
 - 11) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp102.921.673,87 dengan SK Nomor : 032/15-BPKAD/2022 tanggal 17 Juni 2022,;
 - 12) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp216.748.637,15 dengan SK Nomor : 032/18-BPKAD/2022 tanggal 17 Juni 2022;
 - 13) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah penghapusan dikarenakan sebab pemindahtanganan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp44.149.255,00 dengan SK Nomor : 032/20-BPKAD/2022 tanggal 4 Juli 2022, sebesar Rp621.593.859,67 dengan SK Nomor : 032/73-BPKAD/2022 tanggal 29 Desember 2022;
 - 14) Kecamatan Kurau penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp48.647.113,45 dengan SK Nomor: 032/22-BPKAD/2022 tanggal 4 Juli 2022;
 - 15) Dinas Sosial penghapusan dikarenakan sebab lain (terbakar) dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp64.802.545,00 dengan SK Nomor : 032/21-BPKAD/2022 tanggal 4 Juli 2022,;

- 16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp99.593.801,60 dengan SK Nomor: 032/51-BPKAD/2022 tanggal 10 Oktober 2022;
- 17) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Pertanahan penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp210.491.545,19 dengan SK Nomor: 032/55-BPKAD/2022 tanggal 10 Oktober 2022;
- 18) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan penghapusan dikarenakan sebab Pemindahtanganan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp5.000.000,00 dengan SK Nomor: 032/63-BPKAD/2022 tanggal 5 Desember 2022;
- 19) Kecamatan Pelaihari penghapusan dikarenakan sebab pemusnahan dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp294.628.509,00 dengan SK Nomor: 032/65-BPKAD/2022 tanggal 5 Desember 2022,
- 20) Badan Penanggulangan Bencana Daerah penghapusan dikarenakan sebab lain (kebakaran) dengan nilai aset tetapnya sebesar Rp 600.000,00 dengan SK Nomor: 032/60-BPKAD/2022 tanggal 28 November 2022;

Pengurangan berupa reklasifikasi kurang pada aset tetap berupa peralatan dan mesin sebesar Rp1.359.755.110,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Peralatan Mesin	Aset Tetap Lainnya	1.038.224.633,00
2	Dinas Kesehatan	Peralatan Mesin	Gedung dan Bangunan	187.037.017,00
		Peralatan Mesin	Jalan Jaringan dan Irigasi	5.582.460,00
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Peralatan Mesin	Gedung dan Bangunan	44.000.000,00
		Peralatan Mesin	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	62.150.000,00
4	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Peralatan Mesin	Gedung dan Bangunan	6.000.000,00
5	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peralatan Mesin	Gedung dan Bangunan	16.761.000,00
Jumlah				1.359.755.110,00

Berdasarkan data kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memiliki 1.744 unit kendaraan dinas bermotor senilai Rp129.121.850.205,44. Dari 1.744 unit kendaraan dinas bermotor yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, 1.564 unit sudah memiliki bukti kepemilikan (BPKB) senilai Rp118.046.035.201,44

Terdapat 180 unit kendaraan dinas bermotor senilai Rp11.075.815.004,00 yang belum memiliki bukti kepemilikan (BPKB) dengan rincian : 76 unit kendaraan dinas bermotor senilai Rp603.586.000,00 BPKB masih belum ditemukan dan dalam proses penelusuran, 33 unit kendaraan dinas bermotor senilai Rp9.189.646.533,00 BPKB masih dalam proses penerbitan BPKB (kendaraan pengadaan Tahun Anggaran 2021 dan 2022) serta 71 unit kendaraan dinas senilai Rp1.282.582.471,00 yang sudah memiliki bukti kepemilikan (BPKB) namun keberadaan BPKB masih di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Pemerintah Pusat.

Untuk rincian secara lengkap penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin terdapat dalam **Lampiran 11**.

8.1.1.4.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

31 Desember 2022

(Rp)

1.329.095.131.735,75

31 Desember 2021

(Rp)

1.234.545.603.141,78

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar dan 2021 sebesar Rp1.329.095.131.735,75 dan Rp1.234.545.603.141,78. Realisasi Bangunan dan Gedung Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp94.549.528.593,97 atau sebesar 7,66% dari tahun sebelumnya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 101 Rincian Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Saldo Awal	1.234.545.603.141,82	1.120.868.287.443,68	113.677.315.698,14	10,14
2	Penambahan :				
	- Belanja Modal	104.788.622.560,00	125.469.046.825,83	(20.680.424.265,83)	(16,48)
	- Mutasi Unit Kerja	35.912.649.013,06	36.111.731.480,00	(199.082.466,94)	(0,55)
	- Reklasifikasi	7.664.878.096,00	6.171.803.989,00	1.493.074.107,00	24,19
	- Hibah dan Koreksi Tambah	1.170.505.247,65	0,00	1.170.505.247,65	100,00
3	Pengurangan :				
	- Ekstrakomtabel	6.000.000,00	241.288.247,00	(235.288.247,00)	(97,51)
	- Mutasi Unit Kerja	35.912.649.013,06	36.111.731.480,00	(199.082.466,94)	(0,55)
	- Reklasifikasi	10.129.307.001,00	2.984.624.639,00	7.144.682.362,00	239,38
	- Penghapusan	6.704.519.374,72	12.203.507.418,73	(5.498.988.044,01)	(45,06)
	- Koreksi Kurang Aset Tetap	2.234.650.934,00	2.534.114.812,00	(299.463.878,00)	(11,82)
	Jumlah	1.329.095.131.735,75	1.234.545.603.141,78	94.549.528.593,97	7,66

Penambahan aset tetap gedung dan bangunan diantaranya berasal dari belanja modal Rp104.788.622.560,00, koreksi tambah sebesar Rp900.650.540,00 berupa bangunan eks SPDN yang berasal dari aset hasil likuidasi PD. AUMB, dan yang berasal dari hibah masuk sebesar Rp83.875.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama SKPD	No BAST	Nama Pemberi	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	032/02/BAST/BP KAD/2022	DONY WIDODO (Komite Sekolah UPTD SMPN 2 Batu Ampar)	57.875.000,00
		032/03/BAST/BP KAD/2022	H. SYAHMINAN (Komite Sekolah UPTD SMPN 1 Bumi Makmur)	26.000.000,00
Jumlah				83.875.000,00

Mutasi unit kerja aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp35.912.649.013,06 dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD Awal	SKPD Tujuan	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial	4.579.143.887,06
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	195.620.000,00
		Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	3.548.941.000,00
		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	189.255.000,00
		Dinas Kesehatan	6.020.674.000,00
		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	198.250.000,00
		Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	391.364.000,00
		Kecamatan Bati-Bati	499.557.000,00
		Kecamatan Batu Ampar	269.765.000,00
		Kecamatan Jorong	215.280.000,00
		Kecamatan Kintap	3.397.567.000,00
		Kecamatan Kurau	3.425.115.000,00
		Kecamatan Panyipatan	195.862.000,00
		Kecamatan Takisung	215.280.000,00
		Kecamatan Pelaihari	7.279.593.100,00
		Sekretariat Daerah	216.510.000,00
		Kecamatan Tambang Ulang	195.440.000,00
		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	215.570.000,00
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Inspektorat Kabupaten	299.860.207,00
		Kec. Batu Ampar	193.738.700,00
4	Dinas Sosial	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	785.545.000,00
5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1.500.897.400,00
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perdagangan	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	333.098.000,00
7	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Dinas Koperasi dan Perdagangan	1.500.897.400,00
		Sekretariat Daerah	49.825.319,00
Jumlah			35.912.649.013,06

Selain itu juga terdapat reklasifikasi tambah sebesar Rp7.664.878.096,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai (Rp)
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan	865.507.000,00
2	Dinas Kesehatan	Peralatan Mesin	Gedung dan Bangunan	187.037.017,00

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai (Rp)
		Sebelum	Sesudah	
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Gedung dan Bangunan	1.268.012.171,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan	918.370.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Peralatan Mesin	Gedung dan Bangunan	44.000.000,00
		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Gedung dan Bangunan	4.031.683.308,00
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan	123.843.000,00
		Barang dan Jasa	Gedung dan Bangunan	34.253.400,00
5	Dinas Sosial	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Gedung dan Bangunan	15.712.200,00
6	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Peralatan Mesin	Gedung dan Bangunan	6.000.000,00
7	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	Barang dan Jasa	Gedung dan Bangunan	77.121.000,00
8	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peralatan Mesin	Gedung dan Bangunan	16.761.000,00
9	Kecamatan Pelaihari	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Gedung dan Bangunan	76.578.000,00
Jumlah				7.664.878.096,00

Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan pada tahun 2022 diantaranya merupakan reklasifikasi kurang dan penghapusan. Pengurangan karena reklasifikasi kurang pada aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp10.129.307.001,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai (Rp)
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.907.597.139,00
		Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	764.388.720,00
2	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan	Peralatan Mesin	17.833.000,00
		Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	15.600.000,00
		Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	29.117.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Gedung dan Bangunan	Peralatan Mesin	246.020.000,00
		Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.311.007.000,00
		Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	428.350.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Gedung dan Bangunan	Tanah	116.782.690,00
		Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.180.274.000,00
		Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	568.927.300,00
5	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Gedung dan Bangunan	Peralatan Mesin	20.394.900,00

6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	187.666.000,00
7	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	97.680.000,00
8	Sekretariat Daerah	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	194.161.000,00
9	Kecamatan Pelaihari	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	40.028.000,00
10	Kecamatan Tambang Ulang	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.480.252,00
Jumlah				10.129.307.001,00

Sedangkan untuk penghapusan sebesar Rp6.704.519.374,72 dimana penghapusan ini terdapat pada 10 SKPD dengan rincian SK Penghapusan sebagai berikut:

- 032/06-BPKAD/2022 tanggal 31 Maret 2022 dengan nilai Rp816.344.421,00 dikarenakan pemusnahan pada Kecamatan Kurau;
- 032/07-BPKAD/2022 tanggal 1 April 2022 dengan nilai Rp9.977.800,00 dikarenakan pemusnahan, 032/23-BPKAD/2022 tanggal 5 Agustus 2022 dengan nilai Rp 223.491.589,40 dikarenakan pemusnahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, total Rp233.469.389,40;
- 032/12-BPKAD/2022 tanggal 29 April 2022 dengan nilai Rp971.420.228,00 dikarenakan pemusnahan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- 032/14-BPKAD/2022 tanggal 6 Juni 2022 dengan nilai Rp5.894.646,00 dikarenakan pemusnahan, 032/71-BPKAD/2022 tanggal 12 Desember 2022 dengan nilai Rp 17.683.939,00 dikarenakan pemusnahan pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, total Rp23.578.585,00;
- 032/19-BPKAD/2022 tanggal 30 Juni 2022 dengan nilai Rp113.825.000,00 dikarenakan pemusnahan pada Kecamatan Bati-Bati;
- 032/24-BPKAD/2022 tanggal 5 Agustus 2022 dengan nilai Rp1.168.934.796,11 dikarenakan pemusnahan, 032/27-BPKAD/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dengan nilai Rp563.860.879,12 dikarenakan pemusnahan, 032/70-BPKAD/2022 tanggal 7 Desember 2022 dengan nilai Rp210.450.226,50 dikarenakan pemusnahan, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, total Rp1.943.245.901,73;
- 032/25-BPKAD/2022 tanggal 5 Agustus 2022 dengan nilai Rp197.599.000,00 dikarenakan pemusnahan, 032/67-BPKAD/2022 tanggal 5 Desember 2022 dengan nilai Rp 1.435.583.400,00 dikarenakan pemusnahan, 032/69-BPKAD/2022 tanggal 7 Desember 2022 dengan nilai Rp519.030.000,00 dikarenakan pemusnahan, pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan, total Rp2.152.212.400,00;
- 032/50-BPKAD/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dengan nilai Rp130.216.449,59 dikarenakan pemusnahan pada Dinas Kesehatan;
- 032/59-BPKAD/2022 tanggal 21 November 2022 dengan nilai Rp307.211.000,00 dikarenakan pemusnahan pada Kecamatan Kintap;
- 032/68-BPKAD/2022 tanggal 7 Desember 2022 dengan nilai Rp12.996.000,00 dikarenakan pemusnahan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;

Untuk rincian secara lengkap penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan terdapat dalam **Lampiran 11**.

8.1.1.4.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

31 Desember 2022

(Rp)

2.533.893.026.483,34

31 Desember 2021

(Rp)

2.334.275.258.255,78

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp2.533.893.026.483,34 dan Rp2.334.275.258.255,78. Realisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2199.617.768.227,56 atau sebesar 8,55% dari tahun sebelumnya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 102 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Saldo Awal	2.334.275.258.255,79	2.113.229.213.765,78	221.046.044.490,01	10,46
2	Penambahan :				
	- Belanja Modal	200.681.712.555,00	226.307.789.870,00	(25.626.077.315,00)	(11,32)
	- Mutasi Unit Kerja	63.740.000,00	169.310.122.687,35	(169.246.382.687,35)	(99,96)
	- Reklasifikasi	10.112.607.889,00	1.124.581.500,00	8.988.026.389,00	799,23
	- Hibah dan Koreksi Tambah	37.140.774.269,35	3.751.911.769,00	33.388.862.500,35	889,92
3	Pengurangan :				
	- Mutasi Unit Kerja	63.740.000,00	169.310.122.687,35	(169.246.382.687,35)	(99,96)
	- Reklasifikasi	8.773.827.959,00	9.804.950.083,00	(1.031.122.124,00)	(10,52)
	- Penghapusan	201.640.136,80	333.288.566,00	(131.648.429,20)	(39,50)
	- Koreksi Kurang aset tetap	39.341.858.390,00	0,00	39.341.858.390,00	100,00
	Jumlah	2.533.893.026.483,34	2.334.275.258.255,78	199.617.768.227,56	8,55

Penambahan aset tetap jalan irigasi dan jaringan diantaranya berupa belanja modal sebesar Rp200.681.712.555,00 dan mutasi unit kerja pada jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp63.740.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD Awal	SKPD Tujuan	Nilai (Rp)
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3.1870.000
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perdagangan	3.1870.000
Jumlah			63.740.000,00

Reklasifikasi tambah pada aset tetap jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp10.112.607.889,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai (Rp)
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.907.597.139,00
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	118.242.000,00
2	Dinas Kesehatan	Peralatan dan Mesin	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.582.460,00
		Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	15.600.000,00

3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.311.007.000,00
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.313.732.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Peralatan dan Mesin	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	62.150.000,00
		Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.180.274.000,00
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	98.581.000,00
5	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	59.814.290,00
6	Kecamatan Pelaihari	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	40.028.000,00
Jumlah				10.112.607.889,00

Reklasifikasi kurang pada aset tetap jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp8.773.827.959,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai (Rp)
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Kesehatan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Gedung dan Bangunan	1.268.012.171,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.335.766.280,00
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Gedung dan Bangunan	4.031.683.308,00
4	Dinas Sosial	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Gedung dan Bangunan	15.712.200,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perdagangan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	46.076.000,00
6	Kecamatan Pelaihari	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Gedung dan Bangunan	76.578.000,00
Jumlah				8.773.827.959,00

Pengurangan aset tetap jalan irigasi dan jaringan pada tahun 2022 diantaranya adalah penghapusan sebesar Rp201.640.136,80 dimana penghapusan ini terdapat 3 SKPD dengan rincian SK Penghapusan sebagai berikut:

- 1) 032/49-BPKAD/2022 tanggal 5 September 2022 dengan nilai Rp70.126.000,00 dikarenakan pemusnahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 2) 032/67-BPKAD/2022 tanggal 5 Desember 2022 dengan nilai Rp31.870.000,00 dikarenakan pemusnahan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan;
- 3) 032/27-BPKAD/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dengan nilai Rp99.644.136,80 dikarenakan pemusnahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Untuk rincian secara lengkap penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan terdapat dalam *Lampiran 11*.

8.1.1.4.5 ASET TETAP LAINNYA

31 Desember 2022

(Rp)

4.830.380.283,00

31 Desember 2021

(Rp)

4.796.764.345,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp4.830.380.283,00 dan sebesar Rp4.796.764.345,00. Realisasi Aset Tetap Lainnya

Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp33.615.938,00 atau sebesar 0,70% dari tahun sebelumnya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 103 Rincian Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Saldo Awal	4.796.764.345,00	4.756.568.345,00	40.196.000,00	0,85
2	Penambahan:				
	- Belanja Modal	16.548.300,00	305.806.626,00	(289.258.326,00)	(94,59)
	- Mutasi Unit Kerja	0,00	0,00	0,00	100,00
	- Reklasifikasi	1.038.224.633,00	0,00	1.038.224.633,00	100,00
	- Hibah	30.343.400,00	0,00	30.343.400,00	100,00
3	Pengurangan:				
	- Ekstrakomtabel	1.041.150.395,00	42.044.000,00	999.106.395,00	2.376,34
	- Mutasi Unit kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Reklasifikasi	10.350.000,00	124.294.626,00	(113.944.626,00)	(91,67)
	- Penghapusan	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Koreksi kurang aset tetap	0,00	99.272.000,00	(99.272.000,00)	(100,00)
	Jumlah	4.830.380.283,00	4.796.764.345,00	33.615.938,00	0,70

Penambahan aset tetap lainnya diantaranya berupa belanja modal sebesar Rp16.548.300,00 dan adanya berupa reklasifikasi tambah aset tetap lainnya sebesar Rp1.038.224.633,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai (Rp)
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	1.038.224.633,00
Jumlah				1.038.224.633,00

Penambahan aset tetap lainnya berupa hibah sebesar Rp30.343.400,00 yaitu dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama SKPD	No BAST	Nama Pemberi	Nilai (Rp)
1.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5991/4.2/PLK.03.03/XII/2021	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	30.343.400,00
Jumlah				30.343.400,00

Untuk rincian secara lengkap penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya terdapat dalam *Lampiran 11*.

8.1.1.4.6 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

31 Desember 2021
(Rp)

16.586.988.476,40

31 Desember 2020
(Rp)

24.530.347.182,50

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp16.586.988.476,40 dan Rp24.530.347.182,500. Realisasi Konstruksi Dalam

Pengerjaan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp7.943.358.706,10 atau sebesar 32,38% dari tahun sebelumnya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 104 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Saldo Awal	24.530.347.182,50	18.600.746.970,50	5.929.600.212,00	31,88
2	Penambahan:				
	- Mutasi Unit Kerja	195.681.700,00	0,00	195.681.700,00	100,00
	- Reklasifikasi	5.668.102.552,00	7.672.494.612,00	(2.004.392.060,00)	(26,12)
3	Pengurangan:				
	- Mutasi Unit Kerja	195.681.700,00	0,00	195.681.700,00	100,00
	- Reklasifikasi	12.018.883.657,00	1.742.894.400,00	10.275.989.257,00	589,59
	- Koreksi Kurang Aset Tetap	1.592.577.601,10	0,00	1.592.577.601,10	100,00
	Jumlah	16.586.988.476,40	24.530.347.182,50	(7.943.358.706,10)	(32,38)

Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2022 sebesar Rp5.668.102.552,00 merupakan jasa konsultansi perencanaan/DED yang nantinya menjadi penambahan harga perolehan pada aset tetap yang akan dibangun, dengan rincian:

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai (Rp)
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	764.388.720,00
2	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	29.117.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	428.350.000,00
		Jalan Jaringan dan Irigasi	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.335.766.280,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	568.927.300,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perdagangan	Tanah	Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.490.000,00
		Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	187.666.000,00
		Jalan Jaringan dan Irigasi	Konstruksi Dalam Pengerjaan	46.076.000,00
6	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	97.680.000,00
7	Sekretariat Daerah	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	194.161.000,00
8	Kecamatan Tambang Ulang	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.480.252,00
Jumlah				5.668.102.552,00

Pengurangan konstruksi dalam pengerjaan pada Tahun 2022 sebesar Rp4.498.089.290,00 berupa jasa konsultansi perencanaan/DED sudah diatribusikan ke aset induk yang berkenaan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai (Rp)
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan	865.507.000,00
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jalan Jaringan dan Irigasi	118.242.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan	918.370.000,00
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jalan Jaringan dan Irigasi	2.313.732.000,00
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan	123.843.000,00
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jalan Jaringan dan Irigasi	98.581.000,00
4	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jalan Jaringan dan Irigasi	59.814.290,00
Jumlah				4.498.089.290,00

Pengurangan konstruksi dalam pengerjaan pada Tahun 2022 sebesar Rp7.520.794.367,00 berupa jasa konsultasi perencanaan/DED dreklasifikasi ke aset lain-lain karena tidak akan digunakan lagi, direncanakan untuk dihapuskan, dan jasa konsultasi perencanaan/DED yang belum diketahui kapan keberlanjutan atas pekerjaan fisiknya dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Jenis Aset Tetap		Nilai (Rp)
		Sebelum	Sesudah	
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset Lain-Lain	6.656.422.767,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset Lain-Lain	291.800.000,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset Lain-Lain	11.248.000,00
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset Lain-Lain	48.500.000,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset Lain-Lain	89.666.000,00
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset Lain-Lain	423.157.600,00
Jumlah				7.520.794.367,00

Pengurangan konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2022 yang lain yaitu berupa koreksi kurang sebesar Rp1.592.577.601,10 atas jasa konsultasi perencanaan/DED yang dinyatakan dihentikan pengerjaannya/tidak digunakan lagi dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	203.148.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	792.399.100,00
3	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	30.690.000,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perdagangan	98.277.000,00
5	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	63.650.000,00

No	SKPD	Nilai (Rp)
6	Dinas Pariwisata	23.248.139,00
7	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	10.578.858,00
8	Sekretariat Daerah	23.050.000,00
9	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6.913.000,00
10	Kecamatan Kurau	115.128.000,00
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	182.838.000,00
12	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	42.657.504,10
Jumlah		1.592.577.601,10

Untuk rincian secara lengkap penambahan dan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat dalam *Lampiran 11*.

8.1.1.4.7 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

31 Desember 2022

(Rp)

1.814.296.220.981,51

31 Desember 2021

(Rp)

1.578.848.367.158,06

Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tanggal Neraca. Penyusutan terhadap Aset Tetap pertama kali diterapkan pada tahun buku 2015. Akumulasi Penyusutan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.814.296.220.981,51 dan 1.578.848.367.158,06. Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 105 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022				Kenaikan/ Penurunan %
		Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)	
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)		
1	Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	365.527.848.626,81	66.740.171.936,18	3.779.394.446,39	428.488.626.116,60	17,22
2	Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	244.888.025.733,44	35.659.350.945,67	2.415.333.316,00	278.132.043.363,11	13,58
3	Akum. Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	966.784.656.265,81	139.349.686.612,99	108.570.865,00	1.106.025.772.013,80	14,40
4	Akum. Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.647.836.532,00	1.942.956,00	0,00	1.649.779.488,00	0,12
	Jumlah	1.578.848.367.158,06	241.751.152.450,84	6.303.298.627,39	1.814.296.220.981,51	14,91

Penambahan akumulasi penyusutan aset tetap pada Tahun 2022 sebesar Rp241.751.152.450,84, berupa beban penyusutan sebesar Rp241.648.364.857,84 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp66.637.384.198,18;
- 2) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp35.659.351.170,67;
- 3) Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp139.349.686.532,99;
- 4) Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.942.956,00.

Penambahan lainnya berupa reklasifikasi dari aset lain-lain sebesar Rp102.787.875,00 dan koreksi saldo awal sebesar Rp282,00 akibat dari selisih perhitungan penyusutan pada aplikasi SIMDA BMD.

Sedangkan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap pada Tahun 2022 sebesar Rp6.303.298.627,39 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pengurangan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin berupa penghapusan sebesar Rp3.779.394.446,39;
- 2) Pengurangan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar berupa penghapusan, koreksi kurang dan perbaikan atribusi serta kode barang Rp2.415.333.316,00;
- 3) Pengurangan akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan berupa penghapusan dan koreksi kurang sebesar Rp108.570.865,00 .

Penyusutan Aset Tetap menggunakan metode garis lurus dengan menggunakan pendekatan bulanan, dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh. Jika setelah perolehan masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya perbaikan seperti renovasi (kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas), restorasi (kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya) dan *overhaul* (kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas), maka akan menambah masa manfaat.

8.1.1.5 DANA CADANGAN

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
56.160.390.391,32	15.000.000.000,00

Saldo Dana Cadangan Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp56.160.390.391,32 dan Rp15.000.000.000,00. Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk mendanai proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada Tahun 2024 atau tahun lain sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Kepala Daerah. Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening khusus Pemerintah Daerah pada Bank yang ditunjuk. Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan Daerah. Dana Cadangan yang disisihkan dari Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 dengan total dana sebesar Rp75.000.000.000,00. Dana Cadangan pada tahun 2022 sebesar Rp40.000.000.000,00 telah dikeluarkan sebagai pengeluaran pembiayaan dan terdapat penambahan sebesar Rp1.160.390.391,32 yang merupakan bunga deposito dari Deposito Dana Cadangan pada Bank Kalsel dengan Nomor 0042099 Nomor Rekening AA22339K5MSJ-3201322722 yang menambah Dana Cadangan tersebut.

8.1.1.6 ASET LAINNYA

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
341.837.641.175,37	15.822.566.957,61

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp341.837.641.175,37 dan Rp15.822.566.957,61 terdiri atas:

Tabel 106 Rincian Saldo Aset Lainnya

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021	Kenaikan / (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Aset Tak Berwujud	5.206.658.805,52	7.556.204.010,52	(2.349.545.205,00)
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tak berwujud	(2.834.236.121,39)	(5.526.751.385,32)	2.692.515.263,93
3	Aset Lain-lain	349.666.114.158,06	27.764.661.333,35	321.901.452.824,71
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(10.200.895.666,82)	(13.971.547.000,94)	3.770.651.334,12
Jumlah		341.837.641.175,37	15.822.566.957,61	326.015.074.217,76

Penjelasan atas saldo masing-masing Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

8.1.1.6.1 ASET TIDAK BERWUJUD

31 Desember 2022

(Rp)

5.206.658.805,52

31 Desember 2021

(Rp)

7.556.204.010,52

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp5.206.658.805,52 dan Rp7.556.204.010,52. Aset Tidak Berwujud berupa *Software*, *Software Lainnya*, Hak Cipta, Film, Karya Seni, Lisensi dan *Franchise*, serta Kajian yang nilai bruto sebesar Rp5.206.658.805,52 dengan nilai Amortisasi senilai Rp2.834.236.121,39 sehingga nilai netto sebesar Rp2.372.422.684,13 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 107 Rincian Aset Tidak Berwujud

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022				Kenaikan/(Penurunan)	
		Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)		
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)		(Rp)	%
1	Software	5.936.106.010,52	379.130.000,00	3.430.798.205,00	2.884.437.805,52	(3.051.668.205,00)	(51,41)
2	Software Lainnya	40.425.000,00	0,00	0,00	40.425.000,00	0,00	0,00
3	Hak Cipta	138.847.000,00	0,00	69.597.000,00	69.250.000,00	(69.597.000,00)	(50,12)
4	Film	44.990.000,00	0,00	0,00	44.990.000,00	0,00	0,00
5	Karya Seni/Budaya	95.300.000,00	0,00	72.100.000,00	23.200.000,00	(72.100.000,00)	(75,66)
6	Lisensi dan Frenchise	128.425.000,00	0,00	0,00	128.425.000,00	0,00	100,00
7	Kajian	1.172.111.000,00	843.820.000,00	0,00	2.015.931.000,00	843.820.000,00	100,00
	JUMLAH	7.556.204.010,52	1.222.950.000,00	3.572.495.205,00	5.206.658.805,52	(2.349.545.205,00)	(31,09)

Realisasi aset tak berwujud Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.349.545.205,00 atau sebesar 31,09% dari tahun sebelumnya.

Penambahan aset tak berwujud berasal dari belanja modal aset tak berwujud Rp379.130.000,00 dan belanja konsultansi kajian sebesar Rp843.820.000,00 dan pengurangannya berasal dari penghapusan aset tak berwujud berdasarkan SK Penghapusan Nomor 032/26-BPKAD/2022 tanggal 5 Agustus 2022 dengan nilai Rp3.572.495.205,00

Nilai netto Aset Tak Berwujud untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.372.422.684,13. Adapun rincian Amortisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 108 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022				Kenaikan/(Penurunan)	
		Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)		
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)		(Rp)	%
1	Software	5.042.610.185,32	420.175.741,07	3.430.798.205,00	2.031.987.721,39	(3.010.622.463,93)	(59,70)
2	Software Lainnya	13.541.000,00	8.085.000,00	0,00	21.626.000,00	8.085.000,00	59,71
3	Hak Cipta	97.197.000,00	13.850.000,00	69.597.000,00	41.450.000,00	(55.747.000,00)	(57,35)
4	Film	17.996.000,00	8.998.000,00	0,00	26.994.000,00	8.998.000,00	50,00
5	Karya Seni/Budaya	95.300.000,00	0,00	72.100.000,00	23.200.000,00	(72.100.000,00)	(75,66)
6	Lisensi dan Frenchise	25.685.000,00	25.685.000,00	0,00	51.370.000,00	25.685.000,00	100,00
7	Kajian	234.422.200,00	403.186.200,00	0,00	637.608.400,00	403.186.200,00	100,00
	JUMLAH	5.526.751.385,32	879.979.941,07	3.572.495.205,00	2.834.236.121,39	(2.692.515.263,93)	(48,72)

Saldo Akumulasi Amortisasi atas Aset Tak Berwujud Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.692.515.263,93 atau sebesar 48,72% dari tahun sebelumnya.

Penambahan nilai akumulasi amortisasi aset tidak berwujud berasal dari beban amortisasi aset tidak berwujud Tahun 2022 sebesar Rp879.979.941,07, dan pengurangannya berasal dari penghapusan akumulasi amortisasi aset tak berwujud sebesar Rp3.572.495.205,00.

8.1.1.6.2 ASET LAIN-LAIN

31 Desember 2022
(Rp)

349.666.114.158,06

31 Desember 2021
(Rp)

27.764.661.333,35

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp349.666.114.158,06 dan Rp27.764.661.333,35. Realisasi Aset Lain-lain Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp325.672.104.158,83 atau sebesar 2.361,12% dari tahun sebelumnya. Nilai bruto Aset Lain-lain sebesar Rp349.666.114.158,06 dengan nilai akumulasi penyusutan senilai Rp10.200.895.666,82 sehingga nilai netto sebesar Rp339.465.218.491,24. Adapun rincian Aset Lain-Lain terdiri atas:

Tabel 109 Rincian Aset Lain-Lain

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Uang persediaan yang hilang dicuri	8.920.000,00	8.920.000,00	0,00	0,00
2	Aset tidak ditemukan keberadaannya	15.784.174.468,10	17.863.807.707,69	(2.079.633.239,59)	(11,64)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
3	Aset yang direncanakan akan dihapuskan	4.603.317.966,96	9.053.867.125,66	(4.450.549.158,70)	(49,16)
4	Jasa Konsultasi Perencanaan	8.358.860.867,00	838.066.500,00	7.520.794.367,00	897,40
5	Transfer DBH berupa TDF	320.910.840.856,00	0,00	320.910.840.856,00	100,00
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(10.200.895.666,82)	(13.971.547.000,94)	3.770.651.334,12	(26,99)
Jumlah		339.465.218.491,24	13.793.114.332,41	325.672.104.158,83	2.361,12

Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 terdiri atas:

- 1) Dalam saldo 31 Desember 2021 masih terdapat Uang Persediaan Tahun 2008 pada Dinas Peternakan sebesar Rp8.920.000,00 yang hilang akibat pencurian di Kantor Dinas Peternakan sebagaimana diungkapkan dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian No.Pol: STPL/77/XI/2008/SPK tanggal 25 Nopember 2008. Uang Persediaan yang hilang tersebut masih dalam proses penghapusan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan melakukan proses permintaan keterangan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Nomor: 700/03/LHK/NSP/2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang Laporan Hasil Permintaan Keterangan tentang Kehilangan Uang Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan hasil penelusuran Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dinyatakan memang terbukti telah terjadi pencurian uang kas yang dikelola bendahara pengeluaran pada Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut yang terjadi pada tanggal 25 Nopember 2008 senilai Rp8.920.000,00 untuk selanjutnya diusulkan dilakukan proses penghapusan;
- 2) Aset Tetap yang Tidak Ditemukan pada penguasaan pengguna sebesar Rp15.788.794.468,10 pada 24 SKPD berdasarkan hasil Inventarisasi/Sensus Aset Daerah dan masih dalam tahap konfirmasi yang selanjutnya akan dihapuskan atau direklasifikasi kembali ke Aset Tetap sampai dengan diperolehnya hasil penelitian dan pengkajian oleh tim. Penurunan aset tetap yang tidak ditemukan sebesar Rp2.079.633.239,59 karena adanya penghapusan, reklasifikasi ke aset tetap yang akan dihapuskan, dan koreksi pencatatan ganda dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 032/15-BPKAD/2022 tanggal 17 Juni 2022 Rp1.449.536,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. 032/73-BPKAD/2022 tanggal 29 Desember 2022 Rp252.215.897,59 dikarenakan sebab lain (kadaluwarsa) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. 032/21-BPKAD/2022 tanggal 04 Juli 2022 Rp7.650.000,00 dikarenakan sebab lain pada Dinas Sosial;
 - d. 032/22-BPKAD/2022 tanggal 04 Juli 2022 Rp14.710.000,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Kecamatan Kurau;
 - e. 032/55-BPKAD/2022 tanggal 10 Oktober 2022 Rp14.978.271,55 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Pertanahan;
 - f. 032/73-BPKAD/2022 tanggal 29 Desember 2022 Rp121.355.000,00 dikarenakan sebab pemindahtanganan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - g. 032/72-BPKAD/2022 tanggal 29 Desember 2022 Rp1.777.509.534,39 dikarenakan sebab lain (hilang tidak ditemukan) pada Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat Kabupaten, dan Kecamatan Bajuin.

- h. Reklasifikasi ke aset tetap yang akan dihapuskan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebesar Rp4.620.000,00.
 - i. Koreksi kurang karena pencatatan ganda pada Dinas Kesehatan sebesar Rp6.500.000,00.
- 3) Aset tetap yang akan dihapuskan pada Tahun 2022 mengalami dikarenakan adanya penghapusan sebesar Rp4.355.244.158,69 dan reklasifikasi ke aset tetap karena perubahan kondisi sebesar Rp110.275.000,00 dengan sebagai berikut:
- a. 188.45/1036-KUM /2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp70.145.000,01 dikarenakan sebab pemusnahan pada Sekretariat Daerah;
 - b. 032/37-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp1.450.000,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Perhubungan;
 - c. 032/34-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp129.200.000,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - d. 032/41-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp12.925.000,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. 032/40-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp716.272.139,60 dan 032/40-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp377.089.620,65 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Kesehatan;
 - f. 032/39-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp5.338.181,75 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - g. 032/43-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp4.000.000,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. 032/16-BPKAD/2022 tanggal 17 Juni 2022 Rp3.313.636,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu;
 - i. 032/18-BPKAD/2022 tanggal 17 Juni 2022 Rp39.375.000,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - j. 032/20-BPKAD/2022 tanggal 04 Juli 2022 Rp17.941.176,00 dikarenakan sebab pemindahtanganan, 032/58-BPKAD/2022 tanggal 04 Juli 2022 Rp328.303.000,00 dikarenakan sebab pemindahtanganan, 032/73-BPKAD/2022 tanggal 29 Desember 2022 Rp121.355.000,00 dikarenakan sebab pemindahtanganan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - k. 032/35-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp4.137.500,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Sosial;
 - l. 032/22-BPKAD/2022 tanggal 04 Juli 2022 Rp5.947.500,00 dikarenakan sebab pemusnahan, 032/47-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp3.550.000,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Kecamatan Kurau;

- m. 032/28-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp3.450.000,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan penghapusan;
- n. 032/29-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp146.623.111,75 dikarenakan sebab pemusnahan, 032/55-BPKAD/2022 tanggal 10 Oktober 2022 Rp72.105.388,75 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Pertanahan;
- o. 032/30-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp9.407.000,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- p. 032/31-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp60.236.550,33 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- q. 032/32-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp461.334.920,01 dikarenakan sebab pemusnahan pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin;
- r. 032/33-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp73.891.154,38 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- s. 032/36-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp65.536.571,43 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
- t. 032/38-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp9.510.000,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- u. 032/42-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp14.111.500,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Sekretariat DPRD;
- v. 032/44-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp137.359.564,80 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- w. 032/45-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp14.158.909,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Kecamatan Pelaihari;
- x. 032/46-BPKAD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Rp7.650.000,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Kecamatan Bajuin;
- y. 032/52-BPKAD/2022 tanggal 10 Oktober 2022 Rp482.971.950,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan 032/66-BPKAD/2022 tanggal 5 Desember 2022 Rp14.500.000,00 dikarenakan sebab pemindahtanganan karena hibah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- z. 032/53-BPKAD/2022 tanggal 10 Oktober 2022 Rp11.900.000,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Pariwisata;
- aa. 032/54-BPKAD/2022 tanggal 10 Oktober 2022 Rp278.599.422,69 dikarenakan sebab pemusnahan, 032/61-BPKAD/2022 tanggal 5 Desember 2022 Rp643.455.361,54 dikarenakan sebab pemusnahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- bb. 032/56-BPKAD/2022 tanggal 10 Oktober 2022 Rp8.100.000,00 dikarenakan sebab pemusnahan pada Kecamatan Tambang Ulang;
- cc. Reklasifikasi ke aset tetap karena perubahan kondisi barang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp32.000.000,00, Kecamatan Pelaihari sebesar Rp9.350.000,00, Kecamatan Bajuin sebesar Rp4.465.000,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp45.000.000,00, Inspektorat sebesar Rp11.560.000,00, dan BPKAD sebesar Rp7.900.000.

Sehingga saldo akhir aset tetap yang akan dihapuskan dengan nilai Rp4.592.967.966,96 dengan rincian sebagai berikut:

- Aset rusak berat hasil sensus BMD Tahun 2013 sebesar Rp139.862.500,00 dan aset rusak berat hasil Sensus BMD Tahun 2018 sebesar Rp3.354.441.871,96;
 - Alsintan yang rencana akan dihapuskan sebesar Rp194.843.095,00 merupakan reklasifikasi dari Investasi non Permanen;
 - Aset sisa P3D Dinas Pertambangan dan Energi sebesar Rp824.331.700,00;
 - Selisih aset sisa P3D Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp74.868.800,00.
 - Jasa Konsultansi Perencanaan sebesar Rp8.358.860.867,00 merupakan jasa konsultansi perencanaan/DED yang sudah tidak akan digunakan lagi, direncanakan untuk dihapuskan, dan jasa konsultansi perencanaan/DED yang belum diketahui kapan keberlanjutan atas pekerjaan fisiknya.
 - Aset Tetap lainnya berupa maket sebesar Rp10.350.000,00 pada Dinas Kesehatan yang direncanakan akan dihapuskan.
- 4) Akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp10.200.895.666,82 yang terdiri dari:
- a. Akumulasi penyusutan aset lain-lain untuk hasil sensus BMD Tahun 2018 sebesar Rp9.531.271.531,88.
 - b. Akumulasi penyusutan aset lain-lain untuk Aset sisa P3D Dinas Pertambangan dan Energi sebesar Rp669.624.134,94;

Terdapat juga Aset lainnya berupa Treasury Deposit Facilities per 31 Desember 2022 sebesar Rp320.910.840.856,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Treasury Deposit Facilities (TDF) di Bank Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Keuangan sebagai penampungan Dana Bagi Hasil yang disalurkan secara non tunai, dengan cara pencairan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

8.1.1.7 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
45.004.188.393,86	77.655.730.591,51

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp45.004.188.393,86 dan Rp77.655.730.591,51 terdiri atas:

Tabel 110 Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1.	Pendapatan Diterima Di muka	346.108.795,96	218.646.756,26	127.462.039,70
2.	Utang Belanja	3.509.128.544,90	5.599.125.149,25	(2.089.996.604,35)
3.	Utang Jangka Pendek Lainnya	41.148.951.053,00	71.837.958.686,00	(30.689.007.633,00)
Jumlah		45.004.188.393,86	77.655.730.591,51	(32.651.542.197,65)

Penjelasan atas saldo masing-masing Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut
Penjelasan atas saldo masing-masing Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut:

8.1.1.7.1 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

31 Desember 2022

(Rp)

346.108.795,96

31 Desember 2021

(Rp)

218.646.756,26

Saldo Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp346.108.795,96 dan Rp218.646.756,26. Saldo tersebut berasal dari:

- Pendapatan diterima dimuka atas sebagian tanah di Desa Panggung seluas ± 122.540 m² x Rp. 15,-/m² milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disewa oleh Abdul Rahman sebesar Rp1.135.674,80 berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 188.45/50-PPBMD/KUM/2022 tanggal 6 September 2022 dengan besaran sewa Rp7.352.000,00 dengan jangka waktu 4 bulan mulai 19 September 2022 sampai dengan 19 Januari 2023.
- Pendapatan diterima dimuka atas Sebagian Tanah Jl. Penggadungan Desa Ujung Kec. Bati-Bati Rt. 007 Rw. 002 seluas lahan seluas ± 13.894 m² x Rp. 15,-/m² milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disewa oleh Safriansyah sebesar Rp231.566,67 berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 188.45/89-PPBMD/KUM/2022 tanggal 12 Desember 2022 dengan besaran sewa Rp416.820,00 dengan jangka waktu 2 bulan mulai 4 Desember 2022 sampai dengan 4 Februari 2023.
- Pendapatan diterima dimuka atas Perjanjian sewa-menyewa Bangunan Gedung Kantor Jalan A. Syairani Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari dengan luas bangunan 101 m² sebesar Rp68.316.035,58 milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disewa oleh Bank Kalsel Cabang Pelaihari berdasarkan Perjanjian Nomor 188.45/9-Perj/KUM/2022 tanggal 7 Februari 2022 dengan jangka waktu dengan jangka waktu 3 tahun mulai 23 Februari 2022 sampai dengan 22 Februari 2025 dengan besaran sewa Rp95.625.000,00 per 3 tahun;
- Pendapatan diterima dimuka atas Perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan gedung untuk *booth* ATM di Jalan A. Syairani dengan luas 5 m² sebesar Rp33.595.415,15 milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disewa oleh Bank Kalsel Cabang Pelaihari berdasarkan Perjanjian Nomor 188.45/9-Perj/KUM/2022 tanggal 07 Pebruari 2022 dengan jangka waktu dengan jangka waktu 3 tahun mulai 3 Januari 2021 sampai dengan 2 Januari 2023 dengan besaran sewa Rp47.025.000,00 per 3 tahun;
- Pendapatan diterima dimuka atas Perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan rumah dinas di Jalan Pangeran Antasari Pelaihari dengan luas bangunan 60 m² sebesar Rp90.986,30 milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disewa oleh PT.Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut berdasarkan Perjanjian Nomor 188.45/21-Perj/KUM/2022 dan 001/PT. BPR/TALA/VI/2022 tanggal 2 Januari 2021 dengan jangka waktu dengan jangka waktu 2 tahun mulai 3 Januari 2021 sampai dengan 2 Januari 2023 dengan besaran sewa Rp33.210.000,00 per 1 tahun;
- Pendapatan diterima dimuka atas Perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan rumah dinas di Jalan Pangeran Antasari Pelaihari dengan luas bangunan 60 m² sebesar Rp66.142,47 milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disewa oleh PT.Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut berdasarkan Perjanjian Nomor 188.45/37-Perj/KUM/2022 dan 088/PT. BPR/TALA/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 dengan jangka waktu dengan jangka waktu 1 tahun mulai 3 Januari 2022 sampai dengan 2 Januari 2023 dengan besaran sewa Rp12.071.000,00 per 1 tahun;
- Pendapatan diterima dimuka atas Perjanjian sewa-menyewa tanah di Jalan Swadaya No.111 Desa Padang Luas Kecamatan Kurau sebesar Rp7.915.808,22 milik Pemerintah

Kabupaten Tanah Laut yang disewa oleh PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pelaihari berdasarkan Perjanjian Nomor 180.3/PK-KUM/2021 tanggal 5 Januari 2021 dengan jangka waktu dengan jangka waktu 3 tahun mulai 5 Januari 2021 sampai dengan 4 Januari 2024, dengan besaran sewa Rp23.490.000,00 per 3 tahun;

- Pendapatan diterima dimuka atas Perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan gudang di Jalan Telkom Desa Ambungan Pelaihari dengan luas 440 m2 sebesar Rp827.465,75 milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disewa oleh PT. Gede Langgeng Makmur berdasarkan Perjanjian Nomor 188.45/4/PK-KUM/2021 tanggal 6 Januari 2022 dengan jangka waktu 1 tahun, mulai 6 Januari 2022 sampai dengan 5 Januari 2023, dengan besaran sewa Rp60.405.000,00 per tahun;
- Pendapatan diterima dimuka atas Perjanjian sewa-menyewa Tanah dan 1 unit Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat Peristirahatan Permanen seluas 192 m2 sebesar Rp22.915.380,82 milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disewa oleh PD. Baratala Tuntung Pandang berdasarkan Perjanjian Nomor 188.45/5/PK-KUM/2022 tanggal 7 Februari 2022 dengan jangka waktu 2 tahun, mulai 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2024, dengan besaran sewa Rp42.243.000,00 per tahun;
- Pendapatan diterima dimuka atas Penyewaan Sebagian Bangunan Gedung Kantor Permanen DPMPTSP sebesar Rp7.618.510,27 milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disewa oleh Koperasi Pegawai Negeri Tuntung Pandang Kab. Tanah Laut berdasarkan Perjanjian Nomor 188.45/87-Perj/KUM/2022 tanggal 27 Desember 2022 dengan jangka waktu 2 tahun mulai tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan 7 Oktober 2022 dengan besaran sewa Rp8.622.500,00 per 2 tahun;
- Pendapatan diterima dimuka atas Penyewaan rumah dinas di Jalan Karya RT. 2 RW. 1/Mess Pemda sebesar Rp802.756,83 milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disewa oleh Khairandi berdasarkan Perjanjian Nomor 188.45/64-Perj/KUM/2022 tanggal 11 Oktober 2022 dengan jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan 11 April 2023 dengan besaran sewa Rp1.454.500,00 per 6 bulan;
- Pendapatan diterima dimuka atas Penyewaan Rumah Dinas Jalan Pancapan Kecamatan Pelaihari Nomor 50.13.01/0040 sebesar Rp6.811,83 milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disewa oleh Rohib Hidayat berdasarkan Perjanjian Nomor 188.45/70-Perj/KUM/2022 tanggal 30 September 2022 dengan jangka waktu 3 bulan mulai tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan 1 Januari 2023 dengan besaran sewa Rp633.500,00 per 3 bulan;
- Pendapatan diterima dimuka atas Penyewaan rumah dinas di Jalan Karya RT. 2 RW. 1/Mess Pemda sebesar Rp245.051,97 milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disewa oleh Abdul Bakar berdasarkan Perjanjian Nomor 188.45/48-Perj/KUM/2022 tanggal 1 Agustus 2022 dengan jangka waktu 6 bulan mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Januari 2023 dengan besaran sewa Rp1.454.502,00 per 6 bulan;
- Pendapatan Diterima dimuka atas Pendapatan Pajak Reklame yang diterima di tahun 2022 sebesar Rp202.341.189,31 pada Badan Pendapatan Daerah.

Rincian Pendapatan diterima dimuka atas sewa dan pajak reklame bisa dilihat pada *Lampiran 12.1* dan *Lampiran 12.2*.

8.1.1.7.2 UTANG BEBAN

31 Desember 2022

(Rp)

3.509.128.545,50

31 Desember 2021

(Rp)

5.599.125.149,25

Saldo Utang Beban per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp3.509.128.545,50 dan Rp5.599.125.149,25. Utang beban barang dan jasa yang berasal dari jasa listrik, jasa air, jasa telepon serta jasa internet sebesar Rp629.811.837,00 tahun 2022, yang telah dibayarkan semua pada triwulan I Tahun Anggaran 2023.

Rincian Utang Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

Tabel 111 Rincian Utang Beban Barang dan Jasa SKPD

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	DPUPRP	23.996.601,00	19.569.204,00	4.427.397,00	22,62
2	Dinas Perhubungan	6.746.098,00	5.701.515,00	1.044.583,00	18,32
3	Inspektorat Kabupaten	6.190.328,00	4.187.710,00	2.002.618,00	47,82
4	DPMPSTP	6.624.072,00	5.319.808,00	1.304.264,00	24,52
5	Kecamatan Jorong	1.333.900,00	1.544.772,00	(210.872,00)	(13,65)
6	DP2KBP3A	7.906.818,00	3.643.144,00	4.263.674,00	117,03
7	DPMD	1.864.524,00	1.536.530,00	327.994,00	21,35
8	Sekretariat DPRD	26.219.259,00	22.272.256,00	3.947.003,00	17,72
9	BPBD	441.000,00	3.009.037,00	(2.568.037,00)	(85,34)
10	Dinas Pariwisata	2.016.361,00	6.667.572,00	(4.651.211,00)	(69,76)
11	Kecamatan Batu Ampar	1.434.688,00	1.712.804,00	(278.116,00)	(16,24)
12	Kecamatan Kintap	1.460.400,00	1.185.908,00	274.492,00	23,15
13	Kecamatan Bumi Makmur	1.213.242,00	2.007.387,00	(794.145,00)	(39,56)
14	Badan Pendapatan Daerah	5.778.306,00	4.285.204,00	1.493.102,00	34,84
15	Dinas Kesehatan	3.190.498.047,50	5.321.556.240,25	(2.131.058.192,75)	(40,05)
16	DPRKPLH	2.824.720,00	8.076.541,00	(5.251.821,00)	(65,03)
17	Disdikbud	15.835.366,00	9.358.635,00	6.476.731,00	69,21
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.087.859,00	8.296.912,00	3.790.947,00	45,69
19	Dinas Sosial	2.137.292,00	3.745.843,00	(1.608.551,00)	(42,94)
20	Disnakerind	9.269.432,00	8.895.598,00	373.834,00	4,20
21	DKPP	0,00	386.090,00	(386.090,00)	(100,00)
22	Disdukcapil	13.547.439,00	7.116.468,00	6.430.971,00	90,37
23	Diskopdag	4.837.622,00	3.812.234,00	1.025.388,00	26,90
24	Dispora	11.414.548,00	9.532.064,00	1.882.484,00	19,75
25	Dispusip	9.637.188,00	5.330.830,00	4.306.358,00	80,78
26	Distanhorbun	12.222.348,00	9.715.665,00	2.506.683,00	25,80
27	Disnakeswan	7.432.855,00	5.471.993,00	1.960.862,00	35,83
28	Sekretariat Daerah	76.976.550,00	70.836.720,00	6.139.830,00	8,67
29	Kecamatan Pelaihari	3.167.291,00	2.833.090,00	334.201,00	11,80
30	Kecamatan Tambang Ulang	996.899,00	1.120.527,00	(123.628,00)	(11,03)
31	Kecamatan Kurau	1.620.302,00	2.502.831,00	(882.529,00)	(35,26)

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
32	Kecamatan Bati-Bati	3.374.656,00	2.925.444,00	449.212,00	15,36
33	Kecamatan Panyipatan	0,00	2.271.052,00	(2.271.052,00)	(100,00)
34	Kecamatan Takisung	3.503.619,00	3.215.403,00	288.216,00	8,96
35	Kecamatan Bajuin	2.181.317,00	1.063.154,00	1.118.163,00	105,17
36	Bappeda	9.182.270,00	7.273.950,00	1.908.320,00	26,23
37	BPKAD	13.753.851,00	13.341.692,00	412.159,00	3,09
38	BKPSDM	4.509.208,00	4.914.266,00	(405.058,00)	(8,24)
39	Badan Kesbangpol	4.892.269,00	2.889.056,00	2.003.213,00	69,34
	Jumlah	3.509.128.545,50	5.599.125.149,25	(2.089.996.603,75)	(37,33)

Utang beban barang dan jasa SKPD pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.089.996.603,75 atau sebesar 37,33% dari tahun sebelumnya, utang beban jasa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.879.316.708,50 merupakan utang pada BLUD. Utang BLUD RSUD & Puskesmas sebesar Rp2.879.316.708,50 terdiri dari:

Tabel 112 Utang BLUD RSUD & Puskesmas

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL 2022
1	PKM ANGSAU	11.844.580,00
2	PKM ASAM-ASAM	3.142.301,08
3	PKM BATAKAN	5.833.799,79
4	PKM BATI-BATI	16.223.550,00
5	PKM BUMI MAKMUR	16.081.480,00
6	PKM JORONG	23.176.960,00
7	PKM KAIT-KAIT	4.573.100,00
8	PKM KINTAP	4.479.900,00
9	PKM KURAU	1.005.900,00
10	PKM PANYIPATAN	4.972.100,00
11	PKM PADANG LUAS	3.673.600,00
12	PKM PELAIHARI	305.500,00
13	PKM SUNGAI RIAM	2.921.800,00
14	PKM TAJAU PECAH	12.191.200,00
15	PKM TAKISUNG	5.765.999,63
16	PKM TAMBANG ULANG	9.510.980,00
17	PKM TANJUNG HABULU	2.171.400,00
18	PKM TIRTA JAYA	10.737.860,00
19	PKM SUNGAI CUKA	34.178.030,00
20	PKM BENTOK KAMPUNG	66.729.750,00
21	PKM DURIAN BUNGKUK	1.778.700,00
22	RSUD H. BOEJASIN	2.207.757.291,00
23	RSUD KH.MANSYUR	430.260.927,00
Total		2.879.316.708,50

Rincian pada **Lampiran 13.1**

Tabel 113 Rincian Utang Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Beban Jasa telepon	31.859.402,00	2.703.833,00	29.155.569,00	1.078,31
2	Beban Jasa air	52.293.500,00	37.963.840,00	14.329.660,00	37,75
3	Beban Jasa listrik	543.758.385,00	532.473.835,00	11.284.550,00	2,12
4	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	1.900.550,00	26.798.773,00	(24.898.223,00)	(92,91)
5	Beban Jasa Medis	2.879.316.708,50	4.999.184.868,25	(2.119.868.159,75)	(42,40)
	Jumlah	3.509.128.545,50	5.599.125.149,25	(2.089.996.603,75)	(37,33)

8.1.1.7.3 UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

31 Desember 2022

(Rp)

41.148.951.053,00

31 Desember 2021

(Rp)

71.837.958.686,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp41.148.951.053 dan Rp71.837.958.686,00 terjadi penurunan sebesar Rp30.689.007.633,00 atau sebesar 42,72%. Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2022 merupakan Utang Lebih Salur DBH Pajak dan SDA. Rincian untuk utang jangka pendek lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 114 Utang Lebih Salur DBH

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	DBH PBB	591.314.888,00	44.346.699,00	546.968.189,00	1233,39
2	DBH SDA Minyak Bumi	0,00	968.218.600,00	(968.218.600,00)	(100,00)
3	DBH SDA Pertambangan Umum (Mineral dan Batu Bara)	40.384.163.241,00	70.667.699.367,00	(30.283.536.126,00)	(42,85)
4	DBH SDA Perikanan	173.472.924,00	157.694.020,00	15.778.904,00	10,01
	Jumlah	41.148.951.053,00	71.837.958.686,00	(30.689.007.633,00)	(42,72)

Rincian utang Lebih Salur DBH Pajak dan SDA dapat dilihat pada **Lampiran 13.2**.

Saldo Utang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat merupakan Dana Bagi Hasil yang lebih bayar dari Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK No. 127 /PMK.07/2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Tahun 2022, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KM.7/2022 Tanggal 19 Oktober 2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Periode 2 Pada Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46/KM.7/2022 tgl 28 Desember 2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Periode 3 Pada Tahun 2022.

8.1.1.8 EKUITAS

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
4.991.132.313.394,95	4.230.967.002.274,38
Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp4.991.132.313.394,95 dan Rp4.230.967.002.274,38. Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari selisih antara Aset dan Kewajiban.	
Saldo Ekuitas diperoleh dari Ekuitas Awal atau Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.230.967.002.274,38 ditambah dampak kumulatif akibat kesalahan mendasar, selanjutnya ditambah surplus/defisit Laporan Operasional Tahun 2022, dengan penjelasan sebagai berikut:	
Saldo Ekuitas Dana per 31 Desember 2021	4.230.967.002.274,38
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	73.721.130.756,88
Surplus/defisit Operasional	686.444.180.363,69
Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022	4.991.132.313.394,95

8.1.2 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

8.1.2.1 PENDAPATAN-LO

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 115 Pendapatan LO

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	168.093.093.620,29	240.672.417.322,89	(72.579.323.702,60)	(30,16)
2	Pendapatan Transfer	2.138.379.085.769,35	1.167.194.767.400,02	971.184.318.369,33	83,21
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.172.105.677,00	50.845.899.839,00	(45.673.794.162,00)	(89,83)
	Jumlah	2.311.644.285.066,64	1.458.713.084.561,91	852.931.200.504,73	58,47

Realisasi masing-masing pada akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

8.1.2.2 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.

Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun Anggaran 2022 dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Daerah

Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 116 Pendapatan Pajak Daerah

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Pajak Hotel	88.001.904,00	48.977.500,00	39.024.404,00	79,68
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	487.100.153,00	236.774.452,00	250.325.701,00	105,72
3	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.305.161.295,80	4.037.420.782,00	267.740.513,80	6,63
4	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	65.345.000,00	46.790.000,00	18.555.000,00	39,66
5	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron	489.924.998,77	376.655.487,44	113.269.511,33	30,07
6	Pajak Reklame Kain	46.717.875,00	112.634.467,43	(65.916.592,43)	(58,52)
7	Pajak Reklame Melekat/Stiker	18.087.840,00	21.423.070,00	(3.335.230,00)	(15,57)
8	Pajak Reklame Berjalan	5.875.200,00	5.884.597,16	(9.397,16)	(0,16)
9	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	24.887.516.287,00	21.009.663.614,00	3.877.852.673,00	18,46
10	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	52.972.952,00	60.867.925,00	(7.894.973,00)	(12,97)
11	Pajak Parkir	118.382.800,00	37.651.000,00	80.731.800,00	214,42
12	Pajak Air Tanah	1.357.979.711,00	1.124.850.085,00	233.129.626,00	20,73
13	Pajak Sarang Burung Walet	75.090.000,00	93.364.500,00	(18.274.500,00)	(19,57)
14	Mineral bukan Logam dan Batuan lainnya	1.630.843.755,00	1.305.156.468,00	325.687.287,00	24,95
15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.610.538.542,00	6.383.268.747,00	227.269.795,00	3,56
16	BPHTB - Pemindahan Hak Baru	5.448.746.032,00	2.858.475.687,00	2.590.270.345,00	90,62
17	BPHTB - Pemberian Hak Baru	1.011.497.684,00	6.769.672.591,00	(5.758.174.907,00)	(85,06)
	Jumlah	46.699.782.029,57	44.529.530.973,03	2.170.251.056,54	4,87

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah–LO Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.170.251.056,54 atau sebesar 4,87%.

Terdapat Perbedaan antara Pendapatan Pajak (LRA) dan Pendapatan Pajak (LO) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 117 Perbedaan Pendapatan Pajak LRA dan LO

Pendapatan Pajak Daerah (LRA)	45.363.440.225,80
Pendapatan Pajak Daerah (LO)	46.699.782.029,57
Selisih	(1.336.341.803,30)

Perbedaan sebesar Rp1.336.341.803,30 dikarenakan Penambahan piutang pajak daerah sebesar Rp2.465.780.312,00 pengurangan piutang pajak daerah sebesar Rp1.104.284.616,00, Penambahan Pendapatan Diterima dimuka atas Pajak Reklame sebesar Rp202.341.189,30 dan Pengurangan Pendapatan Diterima dimuka atas Pajak Reklame sebesar Rp177.187.297,08.

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun Anggaran 2022 dan 2021 berdasarkan jenis retribusi adalah sebagai berikut:

Tabel 118 Pendapatan Retribusi

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan kesehatan	0,00	1.120.000,00	(1.120.000,00)	(100,00)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	223.380.000,00	324.077.500,00	(100.697.500,00)	(31,07)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	82.700.000,00	45.445.000,00	37.255.000,00	81,98
4	Retribusi Pelataran	562.209.000,00	497.329.000,00	64.880.000,00	13,05
5	Retribusi Los	425.476.000,00	174.669.000,00	250.807.000,00	143,59
6	Retribusi Kios	739.232.000,00	226.638.000,00	512.594.000,00	226,17
7	Retribusi PKB	306.330.500,00	437.562.500,00	(131.232.000,00)	(29,99)
8	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	22.330.000,00	12.440.000,00	9.890.000,00	79,50
9	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	314.499.500,00	190.478.950,00	124.020.550,00	65,11
10	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	562.424.000,00	564.880.000,00	(2.456.000,00)	(0,43)
11	Retribusi Penyewaan Bangunan	337.995.000,00	344.864.200,00	(6.869.200,00)	(1,99)
12	Retribusi Pemakaian Laboratorium	495.792.500,00	541.781.400,00	(45.988.900,00)	(8,49)
13	Retribusi Pemakaian Ruang	46.214.000,00	29.720.000,00	16.494.000,00	55,50
14	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	72.915.000,00	52.485.000,00	20.430.000,00	38,93
15	Retribusi Pemakaian Alat	448.916.500,00	177.875.000,00	271.041.500,00	152,38
16	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	189.442.000,00	223.661.500,00	(34.219.500,00)	(15,30)
17	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	81.700.500,00	88.465.500,00	(6.765.000,00)	(7,65)
18	Retribusi Tempat Khusus Parkir	484.163.000,00	424.555.500,00	59.607.500,00	14,04
19	Retribusi Rumah Potong Hewan	59.796.000,00	56.844.000,00	2.952.000,00	5,19
20	Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	899.829.000,00	544.346.500,00	355.482.500,00	65,30
21	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan	933.559.507,00	761.149.978,80	172.409.528,20	22,65
	Jumlah	7.288.904.007,00	5.720.388.528,80	1.568.515.478,20	27,42

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.568.515.478,20 atau sebesar 27,42 %.

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Retribusi (LRA) dan Pendapatan Retribusi (LO) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 119 Perbedaan Pendapatan Retribusi LRA dan LO

Pendapatan Retribusi Daerah (LRA)	6.971.598.007,00
Pendapatan Retribusi Daerah (LO)	7.288.904.007,00
Selisih	(317.306.000,00)

Perbedaan sebesar Rp317.306.000,00 dikarenakan Penambahan Piutang Retribusi sebesar Rp343.575.000,00 dan Pengurangan Piutang Retribusi sebesar Rp26.269.000,00.

2) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan PAD dalam bentuk pendapatan dividen dan hasil investasi atas penyertaan pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah dan pada Bank Kalsel. Pendapatan dividen diperoleh dari penyertaan modal pada Bank Kalsel dengan kepemilikan saham minoritas yang dicatat berdasarkan metode biaya.

Tabel 120 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Bank Kalsel	10.425.528.033,00	9.461.741.668,00	963.786.365,00	10,19
2	Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD Lembaga Keuangan	838.743.041,28	541.016.478,20	297.726.563,08	55,03
3	Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD Aneka Usaha	1.273.886.134,00	374.935.017,00	898.951.117,00	239,76
	Jumlah	12.538.157.208,28	10.377.693.163,20	2.160.464.045,08	20,82

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.160.464.045,08 atau sebesar 20,82%.

Perbedaan antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (LRA) dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (LO) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 121 Perbedaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA dan LO

Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (LRA)	11.010.810.384,00
Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (LO)	12.538.157.208,28
Selisih	(1.527.346.824,28)

Terdapat Perbedaan sebesar Rp1.527.346.824,28 merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR Tanah Laut Rp732.737.704,28 dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. Baratala Rp794.609.120,00.

3) Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang realisasinya untuk periode Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 122 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan	126.026.425,00	271.301.749,00	(145.275.324,00)	(53,55)
2	Hasil Sewa BMD	445.894.106,53	208.777.976,11	237.116.130,42	113,57
3	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD-LO	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	100,00
4	Jasa Giro Kas Daerah	18.071.530.348,14	17.153.845.293,13	917.685.055,01	5,35
5	Jasa Giro Kas Bendahara	383.838.274,83	144.973.481,26	238.864.793,57	164,76
6	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan-LO	1.160.390.391,32	0,00	1.160.390.391,32	100,00
7	Jasa Giro Rekening Dana BOS	0,00	10.671.270,00	(10.671.270,00)	(100,00)
8	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	30.000.000,00	(106.342.500,00)	136.342.500,00	(128,21)
9	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	16.808.219.172,75	(16.808.219.172,75)	(100,00)
10	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	518.315.758,00	144.600.396,00	373.715.362,00	258,45
11	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	410.125,00	4.441.000,00	(4.030.875,00)	(90,77)
12	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.622.030.176,84	530.479.990,94	1.091.550.185,90	205,77
13	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan	308.410.195,00	461.266.133,00	(152.855.938,00)	(33,14)
14	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Taperum Rakyat	2.000.000,00	53.827.262,00	(51.827.262,00)	(96,28)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
15	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	401.587.962,00	77.517.090,00	324.070.872,00	418,06
16	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	188.554.605,00	(188.554.605,00)	(100,00)
17	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran (JKK)	161.499.510,00	77.461.703,00	84.037.807,00	108,49
18	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran (JKM)	0,00	32.757.490,00	(32.757.490,00)	(100,00)
19	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran (JKN)	0,00	0,20	(0,20)	(100,00)
20	Pendapatan BLUD	77.978.126.479,63	143.912.853.018,47	(65.934.726.538,84)	(45,82)
21	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	30.972.500,00	68.950.000,00	(37.977.500,00)	(55,08)
22	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	202.387.485,03	649.527,00	201.737.958,03	31.059,21
23	Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF	77.830.638,12	0,00	77.830.638,12	100,00
	Jumlah	101.566.250.375,44	180.044.804.657,86	(78.478.554.282,42)	(43,59)

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp78.478.554.282,42 atau sebesar 43,59%.

Perbedaan antara Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah (LRA) dan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah (LO) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 123 Perbedaan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LRA dan LO

Lain-lain PAD Yang Sah (LRA)	130.544.167.137,07
Lain-lain PAD Yang Sah (LO)	101.566.250.375,44
Selisih	28.977.916.761,63

Perbedaan sebesar Rp28.977.916.761,63 dikarenakan penambahan Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa bangunan/tanah sebesar Rp184.977.606,65, pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp86.838.971,18, Pengurangan Piutang sebesar Rp33.955.067.421,00, dan Penambahan Piutang Rp3.914.898.903,52, dan Pendapatan Bunga Deposito Dana Cadangan sebesar Rp1.160.390.391,32.

8.1.2.3 PENDAPATAN TRANSFER

Realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 124 Pendapatan Transfer

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.946.912.915.925,00	1.034.624.002.233,00	912.288.913.692,00	88,18
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	10.342.946.000,00	19.072.439.000,00	(8.729.493.000,00)	(45,77)
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	181.123.223.844,35	113.498.326.167,02	67.624.897.677,33	59,58
	Jumlah	2.138.379.085.769,35	1.167.194.767.400,02	971.184.318.369,33	83,21

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk periode Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 125 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022	Tahun Anggaran 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	1.216.551.769.067,00	348.951.388.688,00	867.600.380.379,00	248,63
2	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	491.839.636.893,00	494.306.446.000,00	(2.466.809.107,00)	(0,50)
3	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	89.691.850.759,00	78.056.125.716,00	11.635.725.043,00	14,91
4	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	148.829.659.206,00	113.310.041.829,00	35.519.617.377,00	31,35
	Jumlah	1.946.912.915.925,00	1.034.624.002.233,00	912.288.913.692,00	88,18

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagai berikut:

Tabel 126 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	DBH PBB	28.080.787.140,00	34.752.815.873,00	(6.672.028.733,00)	(19,20)
2	DBH PPh Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29	8.877.959.820,00	8.667.310.362,00	210.649.458,00	2,43



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
3	DBH Cukai Hasil Tembakau	47.161,00	624,00	46.537,00	7.457,85
4	DBH SDA Minyak Bumi	-92.432.908,00	1.588.988.768,00	(1.681.421.676,00)	(105,82)
5	DBH SDA Gas Bumi	0,00	542.721.600,00	(542.721.600,00)	(100,00)
6	DBH SDA Mineral dan BatuBara-LandRent	1.647.232.617,00	570.843.748,00	1.076.388.869,00	188,56
7	DBH SDA Mineral dan BatuBara-Royalty	1.175.277.961.081,00	301.438.298.513,00	873.839.662.568,00	289,89
8	DBH SDA Kehutanan-PSDH	605.928.849,00	349.671.050,00	256.257.799,00	73,29
9	DBH SDA Perikanan	2.154.285.307,00	1.040.738.150,00	1.113.547.157,00	107,00
10	Dana Alokasi Umum	491.839.636.893,00	494.306.446.000,00	(2.466.809.107,00)	(0,50)
11	DAK Fisik Bidang Pendidikan-Reguler	11.242.522.680,00	9.582.476.862,00	1.660.045.818,00	17,32
12	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler	21.091.856.293,00	27.416.593.703,00	(6.324.737.410,00)	(23,07)
13	DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman Reguler	5.977.020.000,00	2.793.665.000,00	3.183.355.000,00	113,95
14	DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah Penugasan	0,00	495.376.000,00	(495.376.000,00)	(100,00)
15	DAK Fisik Bidang Pertanian-Penugasan	5.256.882.750,00	2.910.617.416,00	2.346.265.334,00	80,61
16	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan	357.771.036,00	290.630.000,00	67.141.036,00	23,10
17	DAK Fisik Bidang Jalan-Reguler-Jalan	10.762.859.500,00	15.243.807.735,00	(4.480.948.235,00)	(29,40)
18	DAK Fisik Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	16.454.105.000,00	0,00	16.454.105.000,00	100,00
19	DAK Fisik Bidang Air Minum Reguler	11.033.469.000,00	0,00	11.033.469.000,00	100,00
20	DAK Fisik Bidang Sanitasi Reguler	1.950.000.000,00	0,00	1.950.000.000,00	100,00
21	DAK Fisik Bidang Air Minum Penugasan	0,00	6.951.313.000,00	(6.951.313.000,00)	(100,00)
22	DAK Fisik Bidang	0,00	2.631.288.000,00	(2.631.288.000,00)	(100,00)

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
23	Sanitasi Penugasan DAK Fisik Bidang Irigasi- Penugasan	4.274.239.500,00	8.383.048.000,00	(4.108.808.500,00)	(49,01)
24	DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup- Penugasan	1.291.125.000,00	1.357.310.000,00	(66.185.000,00)	(4,88)
26	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	34.913.634.262,00	0,00	34.913.634.262,00	100,00
27	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	1.240.000.000,00	0,00	1.240.000.000,00	100,00
28	DAK Non Fisik TPG PNSD	87.015.173.489,00	99.243.920.000,00	(12.228.746.511,00)	(12,32)
29	DAK Non Fisik Tamsil Guru PNSD	1.485.145.500,00	615.467.000,00	869.678.500,00	141,30
30	DAK Non Fisik BOP PAUD	6.659.495.000,00	7.156.218.625,00	(496.723.625,00)	(6,94)
31	DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan	1.546.200.000,00	1.869.270.400,00	(323.070.400,00)	(17,28)
32	DAK Non Fisik BOKKB BOKB	14.983.944.401,00	2.615.635.945,00	12.368.308.456,00	472,86
34	DAK Non Fisik PK2UKM	293.245.149,00	242.878.040,00	50.367.109,00	20,74
35	DAK Non Fisik/Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	1.566.651.819,00	(1.566.651.819,00)	(100,00)
36	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	244.776.000,00	0,00	244.776.000,00	100,00
37	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	354.013.405,00	0,00	354.013.405,00	100,00
38	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian-LO	94.032.000,00	0,00	94.032.000,00	100,00
	Jumlah	1.946.912.915.925,00	1.034.624.002.233,00	912.288.913.692,00	88,18

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp912.288.913.692,00 atau sebesar 88,18%. Antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (LRA) dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (LO) terdapat perbedaan, sebagai berikut:

Tabel 127 Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA dan LO

Uraian	Nominal
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –Dana Perimbangan (LRA)	1.667.151.026.122,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (LO)	1.946.912.915.925,00
Selisih	279.761.889.803,00

Perbedaan Rp279.761.889.803,00 dikarenakan Dana DBH dalam bentuk TDF (Treasury Deposit Facilities) sebesar Rp320.910.840.856,00, Pengurangan Piutang Transfer Pusat sebesar Rp24.817.804.050,00, Pengurangan Utang Transfer Pusat sebesar Rp65.173.419.712,00, Penambahan Utang DBH Pusat sebesar Rp607.093.792,00.

Untuk Pendapatan Dana Desa yang tidak diakui sebagai Pendapatan LO sebesar Rp104.093.790.400,00 sesuai Penerapan Bultek 21 Dana Desa (Non Provinsi) tidak diakui sebagai Pendapatan LO.

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya untuk periode Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 128 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	DID	10.342.946.000,00	19.072.439.000,00	(8.729.493.000,00)	(45,77)
	Jumlah	10.342.946.000,00	19.072.439.000,00	(8.729.493.000,00)	(45,77)

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp8.729.493.000,00 atau sebesar 45,77%.

Penerapan Bultek 21 Pendapatan Transfer Dana Desa (Non Provinsi) tidak diakui sebagai Pendapatan LO

3) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah untuk periode Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

4) Tabel 129 Pendapatan Transfer Antar Daerah

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	181.123.223.844,35	112.798.326.167,02	68.324.897.677,33	60,57
2	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	(100,00)
3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	181.123.223.844,35	113.498.326.167,02	67.624.897.677,33	59,58

Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagai berikut:

Tabel 130 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor	14.676.101.732,51	20.958.077.480,44	(6.281.975.747,93)	(29,97)
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.667.069.287,15	9.427.289.865,46	(2.760.220.578,31)	(29,28)

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	140.544.616.751,68	66.102.623.729,53	74.441.993.022,15	112,62
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	621.860.148,01	150.759.128,59	471.101.019,42	312,49
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	18.613.575.925,00	16.159.575.963,00	2.453.999.962,00	15,19
6	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	(100,00)
7	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten / Kota	0,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	181.123.223.844,35	113.498.326.167,02	67.624.897.677,33	59,58

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp67.624.897.677,33 atau sebesar 59,58%.

Tabel 131 Perbedaan Pendapatan Transfer Antar Daerah LRA dan LO

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Transfer Antar Daerah (LRA)	181.618.220.753,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah (LO)	181.123.223.844,35
Selisih	494.996.908,65

Perbedaan sebesar Rp494.996.908,65 dikarenakan Penambahan Piutang Transfer Antar Daerah Rp50.656.124.065,67 dan Pengurangan Piutang Transfer Antar Daerah Rp51.151.120.974,32.

8.1.2.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dapat dijabarkan sebagai berikut.

1) Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022:

Tabel 132 Pendapatan Hibah

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.639.568.606,00	7.743.747.769,00	(5.134.522.563,00)	(66,31)
2	Pendapatan Hibah Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	2.908.647.000,00	(2.908.647.000,00)	(100,00)
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	305.000.000,00	582.786.500,00	(277.786.500,00)	(47,67)
4	Sumbangan Pihak Ketiga / Sejenis	2.143.662.071,00	497.938.570,00	1.648.911.635,00	331,15

5	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	-
6	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	83.875.000,00	0,00	83.875.000,00	100,00
Jumlah		5.172.105.677,00	11.733.119.839,00	(6.588.169.428,00)	(56,15)

Realisasi Pendapatan Hibah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp6.588.169.428,00 atau sebesar 56,15%.

Tabel 133 Perbedaan Pendapatan Hibah LRA dan LO

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Hibah (LRA)	2.143.662.071,00
Pendapatan Hibah (LO)	5.172.105.677,00
Selisih	(3.028.443.606,00)

Perbedaan sebesar Rp3.028.443.606,00 merupakan Hibah Aset/Barang yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 134 Rincian Perbedaan Pendapatan Hibah LRA dan LO

No	Nama SKPD/UPT	Jumlah Pendapatan Hibah Yang Diterima
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat		
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	16.799.818,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	331.086.800,00
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.525.300,00
4	Dinas Kesehatan	275.248.048,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.430.720.000,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	53.628.640,00
7	Dinas Perhubungan	515.560.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat		2.639.568.606,00
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah		
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan		
1	PKM Bumi Makmur	15.000.000,00
2	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup	40.000.000,00
3	UPTD Pelaihari Disdik	250.000.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan		305.000.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi		
1	Dinas Pendidikan	83.875.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi		83.875.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis		
1	Pemerintah Pusat	1.288.000.000,00
2	Sumbangan Pihak Ketiga:	
	PT. Charoend Phokpand	21.000.000,00
	PT. Pugung Raya	130.216.656,00

No	Nama SKPD/UPT	Jumlah Pendapatan Hibah Yang Diterima
	PT. Patriot Intan AB	22.200.000,00
	PT. Adhom Farm Indonesia	10.000.000,00
	PT. Arutmin	620.456.982,00
	PT. Ciomas Adisatwa	2.500.000,00
	PT. Prima Media Selaras	2.456.000,00
	PT. Sumber Graha Sejahtera	5.934.100,00
	Bank BJB	1.318.333,00
	BAPOPSI KALSEL	27.600.000,00
	Sumbangan Masyarakat	11.980.000,00
	Jumlah Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	2.143.662.071,00

2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 135 Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	39.112.780.000,00	(39.112.780.000,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	39.112.780.000,00	(39.112.780.000,00)	(100,00)

Realisasi Lain-Lain Pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengalami penurunan sebesar Rp39.112.780.000,00 atau sebesar 100,00%. Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS pada tahun 2022 sebesar Rp39.112.780.000,00

8.1.2.5 BEBAN

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi Beban selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebesar Rp1.615.548.306.693,40 dan Rp1.651.784.881.071,82 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 136 Rincian Beban

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pegawai	653.956.945.688,00	639.840.569.796,56	14.116.375.891,44	2,21
2	Persediaan	67.714.598.060,22	39.430.197.101,75	28.284.400.958,47	71,73
3	Jasa	343.585.705.542,38	250.882.770.953,98	92.702.934.588,40	36,95
4	Pemeliharaan	67.165.991.058,00	44.795.963.221,00	22.370.027.837,00	49,94
5	Perjalanan Dinas	45.122.102.741,00	40.228.425.279,00	4.893.677.462,00	12,16
6	Barang & BLUD	-	131.025.337.576,41	(131.025.337.576,41)	(100,00)
7	Hibah	44.321.201.603,00	53.691.496.964,00	(9.370.295.361,00)	(17,45)
8	Bantuan Sosial	22.416.500.000,00	15.250.290.000,00	7.166.210.000,00	46,99

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
9	Penyusutan dan Amortisasi	242.528.344.798,91	303.077.833.023,09	(60.549.488.224,18)	(19,98)
10	Penyisihan Piutang	3.796.434.962,30	2.344.293.329,47	1.452.141.632,83	61,94
11	Lain-lain	4.057.803.099,58	4.521.621.201,56	(463.818.101,98)	(10,26)
12	Transfer	120.136.253.140,00	120.224.510.660,00	(88.257.520,00)	(0,07)
13	Luar Biasa	746.426.000,00	6.471.571.965,00	(5.725.145.965,00)	(88,47)
	Jumlah	1.615.548.306.693,39	1.651.784.881.071,82	(36.236.574.378,43)	(2,19)

Realisasi Beban Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp36.236.574.378,42 atau sebesar 2,19% dari tahun sebelumnya. Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

8.1.2.5.1 BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp653.956.945.688,00 dan Rp639.840.569.796,56. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 137 Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	255.040.274.160,00	248.167.096.471,00	6.873.177.689,00	2,77
2	Beban Tunjangan Keluarga	22.297.525.913,00	21.865.596.332,00	431.929.581,00	1,98
3	Beban Tunjangan Jabatan	5.110.735.876,00	7.676.009.750,00	(2.565.273.874,00)	(33,42)
4	Beban Tunjangan Fungsional	21.329.458.775,00	18.605.633.450,00	2.723.825.325,00	14,64
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum	2.735.531.851,00	2.427.057.260,00	308.474.591,00	12,71
6	Beban Tunjangan Beras	13.926.293.558,00	13.564.116.379,00	362.177.179,00	2,67
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	808.178.326,00	797.253.379,00	10.924.947,00	1,37
8	Beban Pembulatan Gaji	3.603.657,00	3.521.011,00	82.646,00	2,35
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	23.079.828.624,00	(23.079.828.624,00)	(100,00)
10	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	20.795.767.496,00	0,00	20.795.767.496,00	0,00
11	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	525.785.207,00	0,00	525.785.207,00	0,00
12	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.562.879.316,00	0,00	1.562.879.316,00	0,00
13	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.353.008.250,00	0,00	1.353.008.250,00	0,00
14	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	215.039.065,00	0,00	215.039.065,00	0,00
15	Beban Uang Representasi DPRD	764.505.000,00	0,00	764.505.000,00	0,00
16	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	65.404.500,00	0,00	65.404.500,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
17	Beban Tunjangan Beras DPRD	81.979.440,00	0,00	81.979.440,00	0,00
18	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.108.532.250,00	0,00	1.108.532.250,00	0,00
19	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	111.713.439,00	0,00	111.713.439,00	0,00
20	Beban Uang Paket	66.559.500,00	66.244.500,00	315.000,00	0,48
21	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	7.174.921.553,00	(7.174.921.553,00)	(100,00)
22	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	67.652.286,00	0,00	67.652.286,00	0,00
23	Beban Uang Jasa Pengabdian	1.575.000,00	9.450.000,00	(7.875.000,00)	(83,33)
24	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	0,00	54.600.000,00	0,00
25	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	0,00
26	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	0,00	98.280.000,00	0,00
27	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.607.120,00	0,00	2.607.120,00	0,00
28	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.783.156,00	0,00	1.783.156,00	0,00
29	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
30	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.351.760,00	0,00	5.351.760,00	0,00
31	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	251.040,00	0,00	251.040,00	0,00
32	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	668.880,00	0,00	668.880,00	0,00
33	Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	312.450.000,00	312.480.000,00	(30.000,00)	(0,01)
34	Tunjangan Profesi Guru PNSD	83.944.522.200,00	99.919.135.170,00	(15.974.612.970,00)	(15,99)
35	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	1.503.097.500,00	589.862.500,00	913.235.000,00	154,82
36	Iuran Asuransi Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian	0,00	2.033.963.206,00	(2.033.963.206,00)	(100,00)
37	Tunjangan Transportasi	6.112.000.000,00	6.112.000.000,00	0,00	0,00
38	Tambahan Khusus Guru PNSD	269.775.000,00	238.676.400,00	31.098.600,00	13,03
39	Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	1.543.500.000,00	1.514.100.000,00	29.400.000,00	1,94
40	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	998.460,00	0,00	998.460,00	0,00
41	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.374.193.904,00	0,00	6.374.193.904,00	0,00
42	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	186.014.882.695,00	105.921.966.479,00	80.092.916.216,00	75,62

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
43	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	7.028.229.355,00	6.581.767.346,00	446.462.009,00	6,78
44	Tunjangan Penghasilan PNS berbasis kinerja	0,00	59.540.934.078,56	(59.540.934.078,56)	(100,00)
45	Beban Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.129.900.000,00	6.100.500.000,00	29.400.000,00	0,48
46	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
47	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	492.003.000,00	2.019.625.000,00	(1.527.622.000,00)	(75,64)
48	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	67.907.073,00	225.972.908,00	(158.065.835,00)	(69,95)
49	Beban Pegawai BLUD	5.425.000.000,00	4.660.358.000,00	764.642.000,00	16,41
50	Beban Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan	0,00	32.500.000,00	(32.500.000,00)	(100,00)
	Jumlah	653.956.945.688,00	639.840.569.796,56	14.116.375.891,44	2,21

Realisasi Beban Pegawai Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp14.116.375.891,44 atau sebesar 2,21% dari tahun sebelumnya.

8.1.2.5.2 BEBAN PERSEDIAAN

Beban Persediaan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp67.714.598.060,22 dan Rp39.430.197.101,75. Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut::

Tabel 138 Rincian Beban Persediaan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Alat Tulis Kantor	6.173.039.676,48	8.907.239.760,84	(2.734.200.084,36)	(30,70)
2	Kertas dan Cover	1.346.781.561,60	0,00	1.346.781.561,60	100,00
3	Perabot Kantor	1.554.458.137,44	0,00	1.554.458.137,44	100,00
4	Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, <i>Battery</i> Kering)	1.757.611.414,00	1.792.728.056,00	(35.116.642,00)	(1,96)
5	Perlengkapan Dinas	1.042.050.254,00	0,00	1.042.050.254,00	100,00
6	Pendukung Olah Raga	357.368.978,33	0,00	357.368.978,33	100,00
7	Suvenir/Cendera Mata	631.507.891,00	0,00	631.507.891,00	100,00
8	Benda Pos	242.688.006,00	355.997.000,00	(113.308.994,00)	(31,83)
9	Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	1.916.973.605,00	(1.916.973.605,00)	(100,00)
10	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.364.685.816,00	0,00	3.364.685.816,00	100,00
11	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	19.387.727,00	(19.387.727,00)	(100,00)
12	Pengisian Isi Tabung Gas	1.050.000,00	20.321.000,00	(19.271.000,00)	(94,83)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
13	Barang Cetak	54.545.100,00	689.905.810,00	(635.360.710,00)	(92,09)
14	Bahan-Bahan Baku	566.681.265,00	0,00	566.681.265,00	100,00
15	Bahan-Bahan Lainnya	(3.066.310.143,90)	0,00	(3.066.310.143,90)	(100,00)
16	Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.944.519.346,00	1.395.051.551,00	9.549.467.795,00	684,52
17	Bahan/Bibit Tanaman	134.169.935,00	215.374.319,00	(81.204.384,00)	(37,70)
18	Bibit Ternak	11.900.000,00	4.202.400,00	7.697.600,00	183,17
19	Bahan Obat-obatan	2.688.127.314,45	6.371.195.796,29	(3.683.068.481,84)	(57,81)
20	Obat-Obatan Lainnya	3.165.630.842,00	0,00	3.165.630.842,00	0,00
21	Bahan Kimia	827.633.042,50	4.701.262.439,50	(3.873.629.397,00)	(82,40)
22	Makanan dan Minuman Rapat	6.867.647.739,00	0,00	6.867.647.739,00	100,00
23	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.113.564.000,00	0,00	2.113.564.000,00	100,00
24	Penambah Daya Tahan Tubuh	927.091.500,00	0,00	927.091.500,00	100,00
25	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.740.848.540,00	0,00	5.740.848.540,00	100,00
26	Bahan Komputer	1.780.857.102,50	2.535.569.863,00	(754.712.760,50)	(29,77)
27	Hadiah dalam bentuk barang	0,00	852.829.221,00	(852.829.221,00)	(100,00)
28	Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.381.586.050,00	(1.913.387.825,00)	3.294.973.875,00	(172,21)
29	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.216.748.452,00	0,00	7.216.748.452,00	100,00
30	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	70.470.000,00	0,00	70.470.000,00	100,00
31	Bahan	0,00	2.883.729.712,78	(2.883.729.712,78)	(100,00)
32	Suku Cadang	0,00	3.399.464.798,00	(3.399.464.798,00)	(100,00)
33	Suku Cadang Alat Angkutan	129.798.400,00	0,00	129.798.400,00	100,00
35	Suku Cadang Lainnya	7.528.724.102,82	0,00	7.528.724.102,82	100,00
36	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	1.561.389.713,00	5.056.836.848,34	(3.495.447.135,34)	(69,12)
37	Natura dan Pakan	212.225.575,00	36.676.554,00	175.549.021,00	478,64
38	Persediaan Penelitian	9.570.000,00	188.838.465,00	(179.268.465,00)	(94,93)
39	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	124.200.000,00	0,00	124.200.000,00	100,00
40	Pakaian Kerja Laboratorium	40.090.000,00	0,00	40.090.000,00	100,00
41	Pakaian Adat Daerah	29.500.000,00	0,00	29.500.000,00	100,00
42	Pakaian Batik Tradisional	135.582.200,00	0,00	135.582.200,00	100,00
43	Pakaian Olahraga	24.392.250,00	0,00	24.392.250,00	100,00
44	Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	3.498.000,00	0,00	3.498.000,00	100,00
45	Pipa-Pipa Lainnya	18.676.000,00	0,00	18.676.000,00	100,00
	Jumlah	67.714.598.060,22	39.430.197.101,75	28.284.400.958,47	71,73

Realisasi Beban Persediaan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp28.284.400.958,47 atau sebesar 71,73% dari tahun sebelumnya.

Penjelasan perbedaan antara Belanja barang yang menghasilkan persediaan dengan Beban Persediaan dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 139 Selisih Beban Persediaan

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Barang yang Menghasilkan Persediaan (1)	62.842.238.710,00
Beban Persediaan (2)	67.714.598.060,22
Saldo Awal Persediaan (3)	27.714.368.100,41
Saldo Akhir Persediaan (4)	22.842.008.750,19
Selisih {5=1- (2+4-3)}	0,00

8.1.2.5.3 BEBAN JASA

Beban Jasa Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp343.585.705.542,38 dan Rp250.882.770.953,98. Rincian Beban Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 140 Rincian Beban Jasa

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Jasa telepon	858.804.744,00	364.075.670,00	494.729.074,00	135,89
2	Beban Jasa air	1.058.015.931,00	896.337.597,00	161.678.334,00	18,04
3	Beban Jasa listrik	14.174.133.565,00	11.863.679.277,00	2.310.454.288,00	19,48
4	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	181.395.220,00	1.971.040.600,00	(1.789.645.380,00)	(90,80)
5	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	3.830.707.296,00	4.594.747.920,00	(764.040.624,00)	(16,63)
6	Beban Jasa Paket/Pengiriman	22.876.896,00	1.838.450,00	21.038.446,00	1.144,36
7	Beban Jasa Transaksi Keuangan	14.678.955,00	13.993.201,00	685.754,00	4,90
8	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	1.186.163.600,00	0,00	1.186.163.600,00	100,00
9	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00
10	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	34.861.500,00	0,00	34.861.500,00	100,00
11	Beban Jasa Kalibrasi	203.774.000,00	0,00	203.774.000,00	100,00
12	Beban Jasa Pengolahan Sampah	350.815.324,00	0,00	350.815.324,00	100,00
13	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.045.597.000,00	0,00	2.045.597.000,00	100,00
14	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	38.110.520.000,00	0,00	38.110.520.000,00	100,00
15	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	17.118.605.505,00	0,00	17.118.605.505,00	100,00
16	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	338.819.740,00	0,00	338.819.740,00	100,00
17	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	9.971.048.200,00	0,00	9.971.048.200,00	100,00
18	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.230.470.000,00	0,00	5.230.470.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
19	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	51.600.000,00	0,00	51.600.000,00	100,00
20	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	88.300.000,00	0,00	88.300.000,00	100,00
21	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	317.600.000,00	0,00	317.600.000,00	100,00
22	Beban Jasa Tenaga Administrasi	25.267.980.000,00	0,00	25.267.980.000,00	100,00
23	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	680.400.000,00	0,00	680.400.000,00	100,00
24	Beban Jasa Tenaga ahli/narasumber/instruktur	11.498.258.334,00	12.769.074.344,00	(1.270.816.010,00)	(9,95)
25	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	100,00
26	Beban Jasa Tenaga Keamanan	3.206.800.000,00	0,00	3.206.800.000,00	100,00
27	Beban Jasa Tenaga Supir	767.800.000,00	0,00	767.800.000,00	100,00
28	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	7.240.000,00	0,00	7.240.000,00	100,00
29	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	252.500.000,00	0,00	252.500.000,00	100,00
30	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	58.968.392,00	0,00	58.968.392,00	100,00
31	Beban Jasa Kantor	0,00	63.366.429.786,00	(63.366.429.786,00)	(100,00)
32	Beban Honorarium	0,00	30.914.235.700,00	(30.914.235.700,00)	(100,00)
33	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.142.365.000,00	0,00	3.142.365.000,00	100,00
34	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.082.263.007,00	0,00	5.082.263.007,00	100,00
35	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.466.523.141,00	0,00	2.466.523.141,00	100,00
36	Beban Honorarium Rohaniwan	177.000.000,00	0,00	177.000.000,00	100,00
37	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	220.840.000,00	0,00	220.840.000,00	100,00
38	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	100,00
39	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
40	Beban Penambahan Daya	151.567.170,00	32.997.600,00	118.569.570,00	359,33
41	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.537.419,00	4.047.845,00	(510.426,00)	(12,61)
42	Beban Pengolahan Air Limbah	184.404.300,00	129.222.000,00	55.182.300,00	42,70
43	Beban Medical Check Up	57.957.000,00	40.997.406.423,00	(40.939.449.423,00)	(99,86)
44	Beban Registrasi/Keanggotaan	6.391.130,00	0,00	6.391.130,00	0,00
45	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	0,00	59.951.607.470,00	(59.951.607.470,00)	(100,00)
46	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	1.519.461.517,00	0,00	1.519.461.517,00	100,00
47	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	55.241.944.492,00	0,00	55.241.944.492,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
48	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	674.038.400,00	0,00	674.038.400,00	100,00
49	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.484.682.840,00	0,00	4.484.682.840,00	100,00
50	Beban Premi Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja	232.995.028,00	187.239.673,04	45.755.354,96	24,44
51	Beban Premi Asuransi Jaminan Kematian	292.698.100,00	231.243.732,94	61.454.367,06	26,58
52	Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
53	Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	187.100.000,00	362.855.000,00	(175.755.000,00)	(48,44)
54	Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	109.880.000,00	744.918.650,00	(635.038.650,00)	(85,25)
55	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	78.278.400,00	0,00	78.278.400,00	100,00
56	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	160.000.000,00	800.000,00	159.200.000,00	19.900,00
57	Beban Sewa Bangunan Terbuka	624.172.000,00	0,00	624.172.000,00	100,00
58	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	3.662.398.120,00	(3.662.398.120,00)	(100,00)
59	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.431.127.000,00	0,00	2.431.127.000,00	100,00
60	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.043.295.091,00	0,00	2.043.295.091,00	100,00
61	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	44.650.000,00	0,00	44.650.000,00	100,00
62	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	2.000.000,00	9.100.000,00	(7.100.000,00)	(78,02)
63	Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	34.554.000,00	0,00	34.554.000,00	100,00
64	Beban Sewa Mebel	200.832.550,00	0,00	200.832.550,00	100,00
65	Beban Sewa Alat Pendingin	22.700.000,00	0,00	22.700.000,00	100,00
66	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	214.600.000,00	0,00	214.600.000,00	100,00
67	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00	100,00
68	Beban Sewa Sumber Tenaga	94.150.000,00	0,00	94.150.000,00	100,00
69	Beban Sewa Peralatan Jaringan	19.980.000,00	0,00	19.980.000,00	100,00
70	Beban Sewa Meja Kursi	0,00	150.986.800,00	(150.986.800,00)	(100,00)
71	Beban Sewa Generator	0,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(100,00)
72	Beban Sewa Sound system	0,00	18.500.000,00	(18.500.000,00)	(100,00)
73	Beban Sewa Peralatan/Perlengkapan lain-lain	0,00	619.871.180,00	(619.871.180,00)	(100,00)
74	Beban Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	5.691.473.100,00	(5.691.473.100,00)	(100,00)
75	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	5.616.057.015,00	(5.616.057.015,00)	(100,00)
76	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	1.024.724.350,00	(1.024.724.350,00)	(100,00)
77	Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	4.401.671.600,00	96.500.000,00	4.305.171.600,00	4.461,32
78	Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	3.419.761.062,00	1.139.183.000,00	2.280.578.062,00	200,19

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
79	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	0,00	26.400.000,00	(26.400.000,00)	(100,00)
80	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	56.430.000,00	317.610.500,00	(261.180.500,00)	(82,23)
81	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	46.742.150,00	0,00	46.742.150,00	100,00
82	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	100,00
83	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.940.592.024,00	2.548.173.174,00	1.392.418.850,00	54,64
84	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	205.001.250,00	0,00	205.001.250,00	100,00
85	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.250.950.000,00	0,00	3.250.950.000,00	100,00
86	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.667.500.000,00	0,00	1.667.500.000,00	100,00
87	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	5.705.400.000,00	27.500.000,00	5.677.900.000,00	20.646,91
88	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	3.743.999.698,00	404.999.976,00	3.338.999.722,00	824,44
89	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	120.502.800,00	(120.502.800,00)	(100,00)
90	Beban Barang dan Jasa BOS	27.527.531.405,00	0,00	27.527.531.405,00	100,00
91	Beban Barang dan Jasa BLUD	71.990.304.566,38	0,00	71.990.304.566,38	100,00
	Jumlah	343.585.705.542,38	250.882.770.953,98	92.702.934.588,40	36,95

Realisasi Beban Jasa Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp92.702.934.588,40 atau sebesar 36,95% dari tahun sebelumnya.

Antara Belanja Jasa dan Beban Jasa terdapat selisih sebesar Rp111.374.400,00 yang merupakan reklasifikasi dari belanja barang dan jasa ke asset tetap Gedung dan bangunan. Selisih antara Belanja Jasa dan Beban Jasa dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 141 Selisih Beban Jasa

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Jasa (1)	345.802.136.897,92
Beban Jasa (2)	343.585.705.542,38
Saldo Awal Utang Jasa Medis (3)	5.614.185.502,04
Saldo Akhir Utang Beban (4)	3.509.128.545,50
Selisih {5=1- (2+3)+4}	111.374.400,00

8.1.2.5.4 BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp67.165.504.058,00 dan Rp44.795.963.221,00. Rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 142 Rincian Beban Pemeliharaan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	158.502.000,00	(158.502.000,00)	(100,00)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.387.510.351,00	11.181.651.056,00	(794.140.705,00)	(7,10)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.257.145.157,00	7.368.638.904,00	(6.111.493.747,00)	(82,94)
4	Beban Pemeliharaan Jalan Irigasi dan Jaringan	55.518.935.550,00	25.985.149.261,00	29.533.786.289,00	113,66
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.400.000,00	102.022.000,00	(99.622.000,00)	(97,65)
	Jumlah	67.165.991.058,00	44.795.963.221,00	22.370.027.837,00	49,94

Realisasi Beban Pemeliharaan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp22.370.027.837,00 atau sebesar 49,94% dari tahun sebelumnya.

8.1.2.5.5 BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp45.122.102.741,00 dan Rp40.228.425.279,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 143 Rincian Beban Perjalanan Dinas

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.958.773.981,00	14.096.908.247,00	(138.134.266,00)	(0,98)
2	Beban Perjalanan Dinas Biasa	31.153.328.760,00	25.527.525.784,00	5.625.802.976,00	22,04
3	Beban Perjalanan Dinas Tetap	0,00	602.391.248,00	(602.391.248,00)	(100,00)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.000.000,00	1.600.000,00	8.400.000,00	525,00
	Jumlah	45.122.102.741,00	40.228.425.279,00	4.893.677.462,00	12,16

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp4.893.677.462,00 atau sebesar 12,16% dari tahun sebelumnya.

8.1.2.5.6 BEBAN BARANG

Beban Barang Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp131.025.337.576,41. Rincian Beban Barang adalah sebagai berikut:

Tabel 144 Rincian Beban Barang

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Barang Dana BOS	0,00	32.532.379.983,00	(32.532.379.983,00)	(100,00)
2	Beban Makanan dan Minuman	0,00	21.882.300.550,00	(21.882.300.550,00)	(100,00)
3	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	189.033.000,00	(189.033.000,00)	(100,00)
4	Beban Pakaian Kerja	0,00	724.857.874,00	(724.857.874,00)	(100,00)
5	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	3.256.639.263,00	(3.256.639.263,00)	(100,00)
6	Beban barang dan jasa BLUD	0,00	68.269.265.906,41	(68.269.265.906,41)	(100,00)
7	Beban Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)	0,00	251.370.000,00	(251.370.000,00)	(100,00)
8	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	2.344.046.000,00	(2.344.046.000,00)	(100,00)
9	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	0,00	1.575.445.000,00	(1.575.445.000,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	131.025.337.576,41	(131.025.337.576,41)	(100,00)

Realisasi Beban Barang Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp131.025.337.576,41 atau sebesar 100,00% dari tahun sebelumnya.

8.1.2.5.7 BEBAN HIBAH

Beban Hibah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanah Laut atas pemberian hibah. Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran. Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan kelompok penerima Beban Hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp44.321.201.603,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp53.691.496.964,00 Rincian Beban Hibah adalah sebagai berikut:

Tabel 145 Rincian Beban Hibah

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	41.550.726.114,00	(41.550.726.114,00)	(100,00)
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	9.779.072.300,00	(9.779.072.300,00)	(100,00)
3	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	897.000.000,00	(897.000.000,00)	(100,00)
4	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.920.000.000,00	0,00	1.920.000.000,00	100,00
5	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.268.021.000,00	0,00	1.268.021.000,00	100,00
6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela	11.723.798.571,00	0,00	11.723.798.571,00	100,00

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
	dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				
7	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	8.956.671.120,00	0,00	8.956.671.120,00	0,00
8	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	8.280.602.804,00	0,00	8.280.602.804,00	0,00
9	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10.333.459.582,00	0,00	10.333.459.582,00	0,00
10	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	373.949.976,00	0,00	373.949.976,00	0,00
11	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.464.698.550,00	1.464.698.550,00	0,00	0,00
	Jumlah	44.321.201.603,00	53.691.496.964,00	(9.370.295.361,00)	(30,88)

Realisasi Beban Hibah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp9.370.295.361,00 atau sebesar 30,88% dari tahun sebelumnya.

8.1.2.5.8 BEBAN BANTUAN SOSIAL

Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran. Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp22.416.500.000,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.250.290.000,00. Adapun Rincian Beban Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 146 Rincian Beban Bantuan Sosial

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0,00	1.600.000.000,00	(1.600.000.000,00)	(100,00)
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	22.416.500.000,00	13.650.290.000,00	8.766.210.000,00	64,22
	Jumlah	22.416.500.000,00	15.250.290.000,00	7.166.210.000,00	46,99

Realisasi Beban Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp7.166.210.000,00 atau sebesar 46,99% dari tahun sebelumnya.

8.1.2.5.9 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban penyusutan dan amortisasi aset tetap dan aset tidak berwujud tahun anggaran 2022 sebesar Rp242.528.344.798,91 dan tahun anggaran 2021 sebesar Rp303.077.833.023,09.

1) Beban Penyusutan

Beban Penyusutan merupakan penyusutan aset tetap Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp241.648.364.857,84, sedangkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp302.360.991.697,89. Rincian Beban Penyusutan adalah sebagai berikut:

Tabel 147 Rincian Beban Penyusutan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	66.637.384.198,18	58.658.366.287,16	7.979.017.911,02	13,60
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	35.659.351.170,67	33.913.327.866,00	1.746.023.304,67	5,15
3	Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	139.349.686.532,99	209.733.173.478,73	(70.383.486.945,74)	(33,56)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.942.956,00	56.124.066,00	(54.181.110,00)	(96,54)
	Jumlah	241.648.364.857,84	302.360.991.697,89	(60.712.626.840,05)	(20,08)

Realisasi Beban Penyusutan pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp60.712.626.840,05 atau sebesar 20,08% dari tahun sebelumnya.

2) Beban Amortisasi

Beban Amortisasi merupakan amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp879.979.941,07 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp716.841.325,20. Adapun rincian Beban Amortisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 148 Rincian Beban Amortisasi

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	879.979.941,07	716.841.325,20	163.138.615,87	22,76
	Jumlah	879.979.941,07	716.841.325,20	163.138.615,87	22,76

Realisasi Beban Amortisasi pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp163.138.615,87 atau sebesar 22,76% dari tahun sebelumnya.

8.1.2.5.10 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

Beban Penyisihan Piutang merupakan penyisihan piutang tidak tertagih. Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun 2015 dan perubahan ketiga Nomor 218 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Bersamaan dengan dimulainya penerapan SAP Berbasis Akrua pada Tahun Anggaran 2017, kenaikan penyisihan piutang tidak tertagih diakui sebagai beban penyisihan piutang.

Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.796.434.962,30 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.344.293.329,47. Beban Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 149 Rincian Beban Penyisihan Piutang

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	907.982.238,39	(373.705.976,50)	1.281.688.214,89	(342,97)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	74.056.945,00	57.346.454,00	16.710.491,00	29,14
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	(30.000.000,00)	0,00	(30.000.000,00)	0,00
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	2.741.652.851,97	(2.741.652.851,97)	(100,00)
5	Beban Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	2.990.064.400,00	0,00	2.990.064.400,00	0,00
6	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	(171.252.254,64)	0,00	(171.252.254,64)	0,00
7	Beban Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	173.984.886,05	0,00	173.984.886,05	0,00
8	Beban Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	0,00	130.494.279,05	0,00
9	Beban Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	(100.000.000,00)	0,00	(100.000.000,00)	0,00
10	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	120.497,50	0,00	120.497,50	0,00
11	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	(3.521.750,00)	0,00	(3.521.750,00)	0,00
12	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat	(45.000.000,00)	(81.000.000,00)	36.000.000,00	(44,44)
	Jumlah	3.796.434.962,30	2.344.293.329,47	1.452.141.632,83	61,94

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.452.141.632,83 atau sebesar 61,94% dari tahun sebelumnya.

8.1.2.5.11 BEBAN LAIN-LAIN

Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.4.057.803.099,58 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.521.621.201,56. Rincian Beban Lain-Lain adalah sebagai berikut:

Tabel 150 Rincian Beban Lain-Lain

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Penurunan Nilai Investasi	2.813.387.234,58	3.696.370.669,69	(882.983.435,11)	(23,89)
2	Beban Ekstrakomtabel (Lain-Lain)	0,00	825.250.531,87	(825.250.531,87)	(100,00)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
3	Beban Lain-lain	1.244.415.865,00	0,00	1.244.415.865,00	0,00
	Jumlah	4.057.803.099,58	4.521.621.201,56	(463.818.101,98)	(10,26)

Realisasi Beban Lain-lain Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp463.818.101,98 atau sebesar 10,26% dari tahun sebelumnya.

8.1.2.5.12 BEBAN TRANSFER

Beban Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp120.136.253.140,00,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp120.224.510.660,00. Beban Transfer terdiri atas pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan sesuai Penerapan Bultek 21 Beban Transfer Dana Desa (Non Provinsi) tidak diakui dalam Laporan Operasional (LO). Rincian Beban Transfer adalah sebagai berikut:

Tabel 151 Rincian Beban Transfer

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.100.025.000,00	4.161.500.000,00	(61.475.000,00)	(1,48)
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	115.040.966.190,00	115.040.966.190,00	0,00	0,00
3	Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
4	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	795.261.950,00	1.022.044.470,00	(226.782.520,00)	(22,19)
	Jumlah	120.136.253.140,00	120.224.510.660,00	(88.257.520,00)	(0,07)

Realisasi Beban Transfer Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp88.257.520,00 atau sebesar 0,07% dari tahun sebelumnya.

8.1.2.6 DEFISIT NON OPERASIONAL

Beban Defisit Non Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.651.798.009,56 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00. Rincian Beban Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 152 Rincian Beban Defisit Non Operasional

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Defisit Penghapusan Aset Lainnya	9.651.798.009,56	0,00	9.651.798.009,56	100,00
	Jumlah	9.651.798.009,56	0,00	9.651.798.009,56	100,00

Realisasi Beban Defisit Non Operasional Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp9.651.798.009,56 atau 100,00% dari tahun sebelumnya.

8.1.2.7 BEBAN TAK TERDUGA

Beban Tak Terduga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp746.426.000,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.471.571.965,00. Beban Tak Terduga tahun 2022 yang dialokasikan untuk keadaan darurat, keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan/atau bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, Beban Tak Terduga adalah sebagai berikut:

Tabel 153 Rincian Beban Luar Biasa

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Tak Terduga	746.426.000,00	6.471.571.965,00	(5.725.145.965,00)	(88,47)
	Jumlah	746.426.000,00	6.471.571.965,00	(5.725.145.965,00)	(88,47)

Realisasi Tak Terduga Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp5.725.145.965,00 atau sebesar 88,47% dari tahun sebelumnya.

8.1.3 LAPORAN ARUS KAS

8.1.3.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN ARUS KAS

8.1.3.1.1 TUJUAN LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas bertujuan untuk memberikan informasi mengenai arus kas masuk, arus kas keluar, dan perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi pada tanggal pelaporan.

8.1.3.1.2 DEFINISI

- 1) Arus kas yaitu arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas.
- 2) Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.
- 3) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas dengan jumlah tertentu serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

8.1.3.1.3 AKTIVITAS ARUS KAS

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Penerimaan/arus masuk kas dari aktivitas operasi antara lain berupa penerimaan pajak daerah, penerimaan transfer pusat, dan penerimaan transfer provinsi. Sedangkan pengeluaran/arus keluar kas dari aktivitas operasi antara lain berupa belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial.

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

8.1.3.2 ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2.159.068.634.674,87	1.522.630.088.767,55

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasi pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi pada Tahun 2022 dan 2021 terdiri atas:

Tabel 154 Masuk Kas Aktivitas Operasi

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Penerimaan Pajak Daerah	45.363.440.225,80	43.638.422.656,00	1.725.017.569,80	3,95
2	Penerimaan Retribusi Daerah	6.971.598.007,00	5.743.153.528,80	1.228.444.478,20	21,39
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.010.810.384,00	9.836.676.685,00	1.174.133.699,00	11,94
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	130.373.140.712,07	146.646.076.076,75	(16.272.935.364,68)	(11,10)
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	936.789.879.264,00	360.227.578.392,00	576.562.300.872,00	160,06
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	491.839.636.893,00	494.306.446.000,00	(2.466.809.107,00)	(0,50)
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	238.521.509.965,00	191.366.167.545,00	47.155.342.420,00	24,64
8	Penerimaan Dana Insentif Daerah	10.342.946.000,00	19.072.439.000,00	(8.729.493.000,00)	(45,77)
9	Penerimaan Dana penyesuaian -Dana Alokasi Desa	104.093.790.400,00	109.494.413.000,00	(5.400.622.600,00)	(4,93)
10	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	181.618.220.753,00	99.282.497.314,00	82.335.723.439,00	82,93
11	Penerimaan Bantuan Keuangan	0,00	700.000.000,00	(700.000.000,00)	(100,00)
12	Penerimaan Hibah	2.143.662.071,00	3.203.438.570,00	(1.059.776.499,00)	(33,08)
13	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	39.112.780.000,00	(39.112.780.000,00)	(100,00)
	Jumlah	2.159.068.634.674,87	1.522.630.088.767,55	636.438.545.907,32	41,80

8.1.3.3 ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.466.604.325.738,92	1.450.969.138.478,00

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi pada Tahun 2022 dan 2021 terdiri atas:

Tabel 155 Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pembayaran Pegawai	653.956.945.688,00	639.840.569.796,56	14.116.375.891,44	2,21
2	Pembayaran Barang dan Jasa	520.933.208.907,92	505.996.286.092,44	14.936.922.815,48	2,95
3	Pembayaran Hibah	44.321.201.603,00	53.691.496.964,00	(9.370.295.361,00)	(17,45)
4	Pembayaran Bantuan Sosial	22.416.500.000,00	15.250.290.000,00	7.166.210.000,00	46,99
5	Pembayaran Bantuan Keuangan	219.334.756.590,00	224.535.379.190,00	(5.200.622.600,00)	(2,32)
6	Pembayaran Tak Terduga	746.426.000,00	6.471.571.965,00	(5.725.145.965,00)	(88,47)
7	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	4.100.025.000,00	5.183.544.470,00	(1.083.519.470,00)	(20,90)
8	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	795.261.950,00	0,00	795.261.950,00	100,00
	Jumlah	1.466.604.325.738,92	1.450.969.138.478,00	15.635.187.260,92	1,08

8.1.3.4 ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Tahun 2022

(Rp)

171.026.425,00

Tahun 2021

(Rp)

95.180.000,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan pada Tahun 2022 dan 2021 terdiri atas:

Tabel 156 Arus Masuk Kas Investasi

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	171.026.425,00	271.301.749,00	(100.275.324,00)	(36,96)
2	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	95.180.000,00	(95.180.000,00)	(100,00)
	Jumlah	171.026.425,00	366.481.749,00	(195.455.324,00)	(53,33)

8.1.3.5 ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Tahun 2022

(Rp)

397.257.596.454,00

Tahun 2021

(Rp)

458.098.788.114,83

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap setara investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan pada Tahun 2022 dan 2021 terdiri atas:

Tabel 157 Arus Keluar Kas Investasi

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	15.000.000.000,00	(15.000.000.000,00)	(100,00)
2	Perolehan Tanah	240.492.000,00	2.897.145.120,00	(2.656.653.120,00)	(91,70)
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	91.151.091.039,00	87.589.675.673,00	3.561.415.366,00	4,07
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	104.788.622.560,00	125.469.046.825,83	(20.680.424.265,83)	(16,48)
5	Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi	200.681.712.555,00	226.307.789.870,00	(25.626.077.315,00)	(11,32)
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	395.678.300,00	835.130.626,00	(439.452.326,00)	(52,62)
7	Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Perolehan Aset Tetap-BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	397.257.596.454,00	458.098.788.114,83	(60.841.191.660,83)	(13,28)

8.1.3.6 ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
6.335.623.100,00	5.759.078.400,00

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan pada Tahun 2022 dan 2021 terdiri atas:

Tabel 158 Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	6.004.455.100,00	5.747.184.400,00	257.270.700,00	4,48
2	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	331.168.000,00	11.894.000,00	319.274.000,00	2684,33
	Jumlah	6.335.623.100,00	5.759.078.400,00	576.544.700,00	10,01

8.1.3.7 ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN / PEMBIAYAAN

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
75.000.000.000,00	5.000.000.000,00

Arus kas keluar dari aktifitas pendanaan/pembiayaan pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021 terdiri atas:

Tabel 159 Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
2	Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	0,00	40.000.000.000,00	100,00
3	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	25.000.000.000,00	0,00	25.000.000.000,00	100,00
	Jumlah	75.000.000.000,00	5.000.000.000,00	70.000.000.000,00	1.400,00

8.1.3.8 ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
95.613.172.096,80	107.164.053.516,98

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus masuk kas dari aktivitas Transitoris/Non Anggaran pada Tahun 2022 dan 2021 terdiri atas:

Tabel 160 Arus Masuk Kas Transitoris

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	95.613.172.096,80	107.164.053.516,98	(11.550.881.420,18)	(10,78)
	Jumlah	95.613.172.096,80	107.164.053.516,98	(11.550.881.420,18)	(10,78)

8.1.3.9 ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
95.613.172.096,80	107.164.053.516,98

Arus kas keluar dari aktivitas investasi non keuangan pada Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp95.613.172.096,80 dan Rp107.164.053.516,98 terjadi penurunan pada Tahun 2022 sebesar Rp11.550.881.420,18 atau sebesar 10,78%.

8.1.3.10 KENAIKAN/PENURUNAN KAS

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
226.713.362.006,95	(385.312.277.676,28)

Kenaikan atau penurunan kas adalah jumlah semua arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp692.464.308.935,95 mengalami kenaikan sebesar Rp620.803.358.646,40 dari tahun 2021. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan sebesar – Rp397.086.570.029,00 mengalami kenaikan sebesar Rp60.645.736.336,83 dari tahun 2021, sedangkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan mengalami penurunan sebesar Rp67.905.298.500,00 dari tahun 2021.

8.1.3.11 SALDO AWAL KAS

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
604.990.188.933,83	990.302.466.610,11

Saldo awal kas Tahun 2022 dan 2021 terdiri atas:

Tabel 161 Saldo Awal Kas

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Kas Daerah - Bank Kalsel	541.773.574.626,45	962.569.200.331,74	(420.795.625.705,29)	(43,72)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	10.138.500,00	(10.138.500,00)	(100,00)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
4	Kas Di Dana Kapitasi JKN	0,00	4.678.516.301,00	(4.678.516.301,00)	(100,00)
5	Kas Badan Layanan Umum Daerah	59.162.059.397,36	20.437.482.956,35	38.724.576.441,01	189,48
6	Kas di Bendahara BOS	4.054.554.910,02	2.607.128.521,02	1.447.426.389,00	55,52
	Jumlah	604.990.188.933,83	990.302.466.610,11	(385.312.277.676,28)	(38,91)

8.1.3.12 SALDO AKHIR KAS

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
831.703.550.940,78	604.990.188.933,83

Saldo akhir Kas Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp831.703.550.940,78 dan Rp604.990.188.933,83. Kas tersebut berada dalam penguasaan BUD, Bendahara BLUD, dan Bendahara di sekolah-sekolah penerima BOS, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 162 Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Kas Daerah - Bank Kalsel	762.266.975.672,06	541.773.574.626,45	220.493.401.045,61	40,70
2	Kas Badan Layanan Umum Daerah	65.761.548.698,67	59.162.059.397,36	6.599.489.301,31	11,15
3	Kas Di Dana BOS	3.626.594.575,05	4.054.554.910,02	(427.960.334,97)	(10,56)
4	Kas Lainnya	48.431.995,00	0,00	48.431.995,00	100,00
	Jumlah	831.703.550.940,78	604.990.188.933,83	226.713.362.006,95	37,47

8.1.4 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas antara Tahun Anggaran 2022 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021.

Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.991.132.313.394,95 berasal dari saldo awal Ekuitas per 1 Januari 2022 sebesar Rp4.230.967.002.274,38 ditambah Surplus LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp686.444.180.363,69 ditambah dampak kumulatif kesalahan mendasar Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp73.721.130.756,88.

8.1.4.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas awal Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp4.230.967.002.274,38. Nilai tersebut merupakan saldo akhir per 31 Desember 2021..

8.1.4.2 SURPLUS/(DEFISIT)-LO TAHUN ANGGARAN 2022

Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp686.444.180.363,69 berasal dari pendapatan (LO) dikurangi beban Tahun Anggaran 2022. Mengenai hal tersebut penjelasan lebih lengkap pada Catatan atas Laporan Operasional.

8.1.4.3 DAMPAK KUMULATIF KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar berupa pengurangan sebesar Rp73.721.130.756,88, Rincian untuk masing masing koreksi ekuitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 163 Koreksi Ekuitas

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Koreksi ekuitas – Penyusutan dan Amortisasi	282,00	0,00
2	Koreksi ekuitas - Penyisihan Piutang	24.562.414,50	0,00
3	Koreksi ekuitas - Aset Tetap	22.156.838.543,97	72.738.706.474,39
5	Koreksi Ekuitas – Lainnya	(4.760.500,00)	0,00
6	Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya	837.319.999,93	(10.224.005.230,91)
7	Koreksi ekuitas -Kewajiban jangka pendek lainnya	47.005.094.283,21	0,00
8	Koreksi ekuitas -Investasi Jangka Panjang	2.777.835.329,48	
9	Koreksi ekuitas -Pendapatan di Terima di Muka	(4.169.512,00)	0,00
10	Koreksi ekuitas - Piutang	928.409.915,79	5.222.926.694,61
	Jumlah Koreksi Ekuitas	73.721.130.756,88	67.737.627.938,09

Tabel 164 Rincian Koreksi Ekuitas

No.	Uraian	Koreksi		Keterangan
		Kurang	Tambah	
1	Koreksi Ekuitas-Piutang	2.900,00		Koreksi Ekuitas Piutang PKM Panyipatan
		2.900,00		Koreksi Ekuitas Piutang PKM Padang Luas
		5.800,00		Koreksi Ekuitas Piutang PKM Sungai Cuka
		2.900,00		Koreksi Ekuitas Piutang PKM Tambang Ulang
		2.900,00		Koreksi Ekuitas Piutang PKM Tanjung Habulu
		2.900,00		Koreksi Ekuitas Piutang PKM Takisung
		2.900,00		Koreksi Ekuitas Piutang PKM Kait Kait
		2.900,00		Koreksi Ekuitas Piutang PKM Asam Asam



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Koreksi		Keterangan
		Kurang	Tambah	
		28.750.000,00		Koreksi Pengurangan Piutang Sapi Betina selisih harga jual dengan harga pokok
			1.254.629.730,79	Koreksi Saldo Awal Piutang DBH Provinsi
		297.290.000,00		Koreksi Ekuitas Sapi Betina
		153.715,00		Koreksi Ekuitas Piutang
2	Koreksi Ekuitas-Penyisihan Piutang		24.562.414,50	Koreksi Ekuitas atas Penyisihan Piutang Temuan Inspektorat atas Dana BOS pada Dinas Pendidikan
3	Koreksi Ekuitas-Lainnya		739.500,00	Koreksi selisih SILPA
		5.500.000,00		Koreksi Ekuitas Pengurangan INP Sapi jantan
4	Koreksi Ekuitas-Utang jangka pendek lainnya	34.131.450,21		Koreksi Saldo Awal Utang PKM Batakan
		10.032.369,63		Koreksi Saldo Awal Utang PKM Sungai Riam
		33.877.318.287,00		Koreksi Saldo Awal Utang Utang DBH Pusat
		16.044.634,76		Koreksi Saldo Awal Utang PKMTajau Pecah
			2.096.188,00	Koreksi Saldo Awal Utang PKM Angsau
			2.602.457,20	Koreksi Saldo Awal Utang PKM Bumi Makmur
			6.824.281,38	Koreksi Saldo Awal Utang PKM Jorong
			12.965.835,51	Koreksi Saldo Awal Utang PKM Kurau
			9.882.497,54	Koreksi Saldo Awal Utang PKM Panyipatan
			581.106,73	Koreksi Saldo Awal Utang PKM Padang Luas
			1.221.073,50	Koreksi Saldo Awal Utang PKM Pelaihari
			1.210.557,87	Koreksi Saldo Awal Utang PKM Tambang Ulang
			1.600.000,00	Koreksi Saldo Awal Utang PKM Tanjung Habulu
			1.947.552,38	Koreksi Saldo Awal Utang PKM Kintap



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Koreksi		Keterangan
		Kurang	Tambah	
			4.216.551,70	Koreksi Saldo Awal Utang PKM Sungai Cuka
			80.897.472.923,00	Koreksi Ekuitas DBH Pusat
5	Koreksi Ekuitas Investasi Jangka Panjang		2.777.835.329,48	Koreksi Ekuitas Penyertaan Modal
6	Koreksi Ekuitas-Pendapatan di terima di muka	4.169.512,00		Koreksi Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka
7	Koreksi Ekuitas-Aset Tetap	4.595.611.083,10	-	Koreksi tambah aset tetap
			17.940.355.140,07	Koreksi Kurang Aset tetap
		29.285.671.990,00		pengurangan aset tetap KIB D pada DPUPRP
			29.285.671.990,00	penambahan aset tetap KIB D pada DPUPRP
		5.540.602.000,00		pengurangan KIB D jaringan pembawa pada DPUPRP
			5.354.622.292,35	penambahan KIB D jaringan pembawa pada DPUPRP
			185.979.707,65	penambahan KIB C Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga pada DPUPRP
		4.355.315.500,00		pengurangan aset tetap KIB D pada DPUPRP
			2.500.479.987,00	penambahan KIB D jaringan pembawa pada DPUPRP
			10.666.930.000,00	reklasifikasi koreksi ekuitas lainnya ke koreksi ekuitas aset tetap pada PKM asam2, PPKD, Diskominfo dan Diskopdag
8	Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya	6.500.000,00		Koreksi atas double pencatatan pada PKM Tajau Pecah
			0,60	Koreksi tambah saldo awal atas aset lain-lain
		0,67		Koreksi kurang saldo awal atas aset lain-lain
			50.000.000,00	penambahan ATB pada BPKAD
			150.000.000,00	penambahan ATB pada Dispusip
			493.820.000,00	penambahan ATB pada DPUPRP
			150.000.000,00	penambahan ATB pada Setda
9	Koreksi Ekuitas-Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		362,00	Koreksi tambah saldo awal atas akumulasi penyusutan
		80,00		Koreksi kurang saldo awal atas akumulasi penyusutan
	Jumlah	78.057.116.722,37	151.778.247.479,25	

BAB IX

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

9.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

9.1.1 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) BANK KALSEL

Rapat Umum Pemegang Saham Bank Kalsel untuk Tahun Buku 2022 dan RUPS Luar Biasa (LB) tahun 2022 dilaksanakan tanggal 8 Februari 2023 di Banjarmasin yang dihadiri seluruh Pemegang Saham Bank Kalsel baik Gubernur, Bupati/Walikota dan Perwakilan dari 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan *Dividen* sebesar Rp11.394.363.814,00 dan telah dipindah bukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 13 Februari 2023.

9.1.2 BAGI HASIL PAJAK DARI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pada tahun 2023 diterbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi meliputi Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 06 Tahun 2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2022, Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 07 Tahun 2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2022 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 08 Tahun 2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Bulan November 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 165 Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

No	Uraian	Nomor Peraturan Gubernur	Nilai Yang Disalurkan
1	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Pergub Nomor 06 Tahun 2023	40.726.078.694,99
2	Pajak Rokok	Pergub Nomor 07 Tahun 2023	3.390.735.535,00
3	Pajak Air Permukaan	Pergub Nomor 08 Tahun 2023	224.920.418,02
Jumlah			44.341.734.648,01

BAB X

PENUTUP

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2021 realisasi penerimaan pendapatan daerah telah terlampaui dari target yang ditetapkan dan terjadi efisiensi pengeluaran belanja daerah. Selain itu, LKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 ini masih melalui proses konversi, mengingat masih adanya perbedaan struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pelaksanaan konversi mengacu kepada pedoman konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dimana buletin teknis merupakan bagian dari SAP. Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 dari segi pendapatan ditargetkan sebesar Rp1.740.032.489.864,00 dan terealisasi sebesar Rp2.159.239.661.099,87 atau 124,09%. Belanja dianggarkan sebesar Rp1.897.683.755.305,00 yang terealisasi sebesar Rp1.639.631.878.652,92 atau 86,40%. Transfer dianggarkan Rp224.470.023.140,00 yang terealisasi Rp224.230.043.540,00 atau 99,89%. Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp610.990.188.934,00 dan terealisasi sebesar Rp611.325.812.033,83 atau 100,05%. Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp75.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp75.000.000.000,00 atau 100,00%. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp536.325.812.033,83. Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2022 ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bertekad meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah tersebut, baik dari segi penyempurnaan regulasi/aturan dan segi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 kami sajikan dengan mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang konstruktif, sehingga kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di masa mendatang akan semakin meningkat. Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKPD secara andal sebagai cerminan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.



LAMPIRAN VIII

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 1 Tahun 2023
Tanggal : 10 Agustus 2023

No	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal 2022	KOREKSI SALDO AWAL	Saldo Awal Setelah Koreksi	Penambahan Piutang	Pembayaran Piutang	Saldo Piutang Bruto AUDITED
1	PIUTANG PAJAK DAERAH		16.310.176.319,00	0,00	16.310.176.319,00	2.465.780.312,00	1.104.284.616,00	17.671.672.015,00
	Badan Pendapatan Daerah	Piutang PBB P2	16.309.426.319,00	0,00	16.309.426.319,00	2.465.780.312,00	1.104.284.616,00	17.670.922.015,00
	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Restoran	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
2	PIUTANG RETRIBUSI		428.041.500,00	0,00	428.041.500,00	343.575.000,00	26.269.000,00	745.347.500,00
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	Piutang Retribusi Pasar	353.771.000,00	0,00	353.771.000,00	343.575.000,00	17.769.000,00	679.577.000,00
	Dinas Perhubungan	Piutang Parkir Dinas Perhubungan	42.640.000,00	0,00	42.640.000,00	0,00	8.500.000,00	34.140.000,00
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	Piutang Parkir Dinas Koperasi, UK dan Perdagangan	31.630.500,00	0,00	31.630.500,00	0,00	0,00	31.630.500,00
3	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH		57.002.494.023,12	196.400.815,00	56.806.093.208,12	13.908.376.403,52	40.035.923.021,00	30.678.546.590,64
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Izin Usaha Pertambangan	1.052.382.510,00	0,00	1.052.382.510,00	0,00	100.000.000,00	952.382.510,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	328.426.771,12	0,00	328.426.771,12	85.000.000,00	53.127.224,00	360.299.547,12
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Tuntutan Perbendaharaan	118.952.950,00	0,00	118.952.950,00	0,00	7.897.950,00	111.055.000,00
	BLUD	Piutang BLUD	33.790.199.377,00	26.100,00	33.790.173.277,00	3.666.996.265,40	33.719.042.247,00	3.738.127.295,40
	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Piutang Sewa Pakai Kapal	1.770.950.000,00	0,00	1.770.950.000,00		30.000.000,00	1.740.950.000,00
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Piutang Sapi Jantan	334.642.100,00	0,00	334.642.100,00	0,00	42.000.500,00	292.641.600,00
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Piutang Sapi Betina	272.250.000,00	114.500.000,00	157.750.000,00	54.450.000,00	79.400.000,00	132.800.000,00
	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya							
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	- Temuan Inspektorat	81.874.715,00	81.874.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	- BPR	19.252.815.600,00	0,00	19.252.815.600,00	10.000.000.000,00	6.004.455.100,00	23.248.360.500,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	- DINKES	0,00	0,00	0,00	23.830.000,00	0,00	23.830.000,00
		- DPPKBP3A	0,00	0,00	0,00	269.500,00	0,00	269.500,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Remunerasi	0,00	0,00	0,00	77.830.638,12	0,00	77.830.638,12

No	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal 2022	KOREKSI SALDO AWAL	Saldo Awal Setelah Koreksi	Penambahan Piutang	Pembayaran Piutang	Saldo Piutang Bruto AUDITED
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	24.817.804.050,00	0,00	24.817.804.050,00	0,00	24.817.804.050,00	0,00
			0					0,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Transfer Antar Daerah	49.896.491.243,53	1.254.629.730,79	51.151.120.974,32	50.656.124.065,67	51.151.120.974,32	50.656.124.065,67
6	PIUTANG LAIN-LAIN		816.850.000,00	0,00	816.850.000,00	0,00	45.000.000,00	771.850.000,00
	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Piutang Sewa Beli Kapal	816.850.000,00	0,00	816.850.000,00	0,00	45.000.000,00	771.850.000,00
		TOTAL PIUTANG	149.271.857.135,65	1.451.030.545,79	150.330.086.051,44	67.373.855.781,19	117.180.401.661,32	100.523.540.171,31

Sekretaris Daerah

CAP TTD

Drs. H. Dahnial Kifli, M. AP
NIP. 19640425 198703 1 012

LAMPIRAN IX

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih



Lampiran IX
Nomor
Tanggal

: Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
: Tahun 2023
: Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	SALDO PIUTANG BRUTO 2022	PENYISIHAN				TOTAL PENYISIHAN	SALDO PIUTANG NETTO 2022
			LANCAR (0,5%)	KURANG LANCAR (30%)	DIRAGUKAN (50%)	MACET (100%)		
1	PIUTANG PAJAK DAERAH	17.671.672.015,00	11.799.347,10	600.255.272,70	649.162.772,50	12.012.626.140,00	13.273.843.532,30	4.397.828.482,70
	Piutang PBB P2	17.670.922.015,00	11.799.347,10	600.255.272,70	649.162.772,50	12.011.876.140,00	13.273.093.532,30	4.397.828.482,70
	Piutang Pajak Restoran	750.000,00	0,00			750.000,00	750.000,00	0,00
2	PIUTANG RETRIBUSI	745.347.500,00	1.717.875,00	4.601.100,00	46.666.000,00	293.103.500,00	346.088.475,00	399.259.025,00
	Piutang Retribusi Pasar	679.577.000,00	1.717.875,00	4.601.100,00	34.391.000,00	251.883.000,00	292.592.975,00	386.984.025,00
	Piutang Retribusi Parkir							
	- Dinas Perhubungan	34.140.000,00	0,00	0,00	12.275.000,00	9.590.000,00	21.865.000,00	12.275.000,00
	- Dinas Koperasi, UK dan Perdagangan	31.630.500,00	0,00	0,00	0,00	31.630.500,00	31.630.500,00	0,00
3	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH	30.678.546.590,64	68.705.478,84	950.340.000,00	3.035.040.475,00	7.621.739.237,12	11.675.825.190,96	19.002.721.399,68
	Piutang Izin Usaha Pertambangan	952.382.510,00	0,00	0,00	0,00	952.382.510,00	952.382.510,00	0,00
	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	360.299.547,12	250.000,00	0,00	0,00	310.299.547,12	310.549.547,12	49.750.000,00
	Piutang Tuntutan Perbendaharaan	111.055.000,00	0,00	0,00	0,00	111.055.000,00	111.055.000,00	0,00
	Piutang BLUD	3.738.127.295,40	18.334.981,34	0,00	2.652.175,00	65.826.680,00	86.813.836,34	3.651.313.459,06
	Piutang Sewa Pakai Kapal	1.740.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.740.950.000,00	1.740.950.000,00	0,00
	Piutang Sapi Jantan	292.641.600,00	0,00	0,00	0,00	292.641.600,00	292.641.600,00	0,00
	Piutang Sapi Betina	132.800.000,00	0,00	39.840.000	0,00	0,00	39.840.000,00	92.960.000,00
	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya							
	- BPR	23.248.360.500,00	50.000.000,00	910.500.000,00	3.032.388.300,00	4.148.583.900,00	8.141.472.200,00	15.106.888.300,00

No	Uraian	SALDO PIUTANG BRUTO 2022	PENYISIHAN				TOTAL PENYISIHAN	SALDO PIUTANG NETTO 2022
			LANCAR (0,5%)	KURANG LANCAR (30%)	DIRAGUKAN (50%)	MACET (100%)		
	- DINKES	23.830.000,00	119.150,00	0,00	0,00	0,00	119.150,00	23.710.850,00
	- DPPKBP3A	269.500,00	1.347,50	0,00	0,00	0,00	1.347,50	268.152,50
	Piutang Remunerasi	77.830.638,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.830.638,12
4	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Transfer Antar Daerah	50.656.124.065,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.656.124.065,67
6	PIUTANG LAIN-LAIN	771.850.000,00	0,00	0,00	0,00	771.850.000,00	771.850.000,00	0,00
	Piutang Sewa Beli Kapal	771.850.000,00	0,00	0,00	0,00	771.850.000,00	771.850.000,00	0,00
	TOTAL PIUTANG	100.523.540.171,31	82.222.700,94	1.555.196.372,70	3.730.869.247,50	20.699.318.877,12	26.067.607.198,26	74.455.932.973,05

Sekretaris Daerah

CAP TTD

Drs. H. Dahnial Kifli, M. AP
NIP. 19640425 198703 1 012

LAMPIRAN X

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana
Bergulir

Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Nomor : 1 Tahun 2023
Tanggal : 10 Agustus 2023



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Sekretaris Daerah

CAP TTD

Drs. H. Dahnia Kifli, M. AP
NIP. 19640425 198703 1 012

LAMPIRAN XI

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah



**DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
SAMPAI DENGAN TAHUN 2022**

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 1 Tahun 2023
Tanggal : 10 Agustus 2023

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal	Bentuk Penyertaan Modal	Jumlah Penyertaan Modal (Rp)	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai tahun lalu	Penyertaan modal tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2005	PD AUMB Pelaihari	Perda No.5 Tahun 2005	Uang	500.000.000	500.000.000	-	500.000.000	-	500.000.000
2	2008 s/d 2022	Bank Kalsel Cabang Pelaihari	Perda No. 8 Tahun 2022, Perbup No. 122 Tahun 2022	Uang	110.374.367.703	85.374.367.703	25.000.000.000	110.374.367.703	-	110.374.367.703
3	2008 s/d 2015	PDAM Kab. Tanah Laut	Perda No.6 Tahun 2015	Uang	14.946.070.000	14.946.070.000	-	14.946.070.000	-	14.946.070.000
		PDAM Kab. Tanah Laut	Perda No.6 Tahun 2015	Aset dan Hibah	23.232.640.320	23.232.640.320	-	23.232.640.320	-	23.232.640.320
4	2013 s/d 2019	PD BPR Pelaihari	Perda No. 16 Tahun 2008, SK Bupati No.188.45/507- KUM/2019	Uang	4.600.000.000	4.600.000.000	-	4.600.000.000	-	4.600.000.000
JUMLAH					153.653.078.023	128.653.078.023	25.000.000.000	153.653.078.023	-	153.653.078.023

Sekretaris Daerah

CAP TTD

Drs. H. Dahnial Kifli, M. AP
NIP. 19640425 198703 1 012

LAMPIRAN XII

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan Dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
 Nomor : 1 Tahun 2023
 Tanggal : 10 Agustus 2023



KABUPATEN TANAH LAUT
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET TETAP DAERAH
TA 2022

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	581.368.283.854,46	55.520.722.915,00	10.413.005.478,20	626.476.001.291,26
2	Dinas Kesehatan	702.485.893.457,97	102.201.523.304,00	10.176.089.550,62	794.511.327.211,35
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2.266.403.817.120,03	225.805.901.913,00	83.828.023.002,19	2.408.381.696.030,84
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	422.286.197.659,66	59.454.531.999,00	8.018.009.362,40	473.722.720.296,26
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	16.293.136.759,54	517.298.600,00	-	16.810.435.359,54
6	Dinas Sosial	6.231.836.725,62	5.141.722.741,03	1.167.294.745,00	10.206.264.721,65
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.034.894.625,72	347.950.325,00	9.228.000,00	12.373.616.950,72
8	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	53.711.449.800,00	511.176.341,00	87.328.900,00	54.135.297.241,00
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	18.023.092.229,49	18.045.269,00	-	18.041.137.498,49
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.349.366.202,21	775.071.500,00	2.173.967.400,00	9.950.470.302,21
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.981.417.458,85	367.391.840,00	53.628.640,00	7.295.180.658,85
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.917.296.438,06	1.261.095.684,00	656.359.976,73	11.522.032.145,33
13	Dinas Perhubungan	17.882.910.217,55	2.610.639.000,00	293.493.824,00	20.200.055.393,55
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.653.012.367,03	655.702.750,00	424.691.769,75	15.884.023.347,28
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	54.701.416.211,48	3.678.662.625,00	3.049.298.082,00	55.330.780.754,48
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.441.765.117,05	36.825.300,00	-	4.478.590.417,05
17	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	37.079.772.297,10	4.781.449.662,00	1.087.020.228,00	40.774.201.731,10
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12.747.771.860,60	1.093.475.100,00	236.569.201,60	13.604.677.759,00
19	Dinas Pariwisata	66.006.890.807,26	63.583.995.109,00	23.248.139,00	129.567.637.777,26
20	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	168.674.936.355,86	9.964.423.922,00	112.481.733,00	178.526.878.544,86
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	19.613.089.214,04	562.047.037,38	646.693.889,00	19.528.442.362,42
22	Sekretariat Daerah	89.467.156.478,26	4.328.842.614,00	3.433.732.200,00	90.362.266.892,26
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	29.940.659.845,01	1.110.584.042,00	1.387.267.933,00	29.663.975.954,01
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.352.969.931,85	67.028.000,00	-	3.419.997.931,85
25	Kecamatan Pelaihari	16.540.903.322,86	9.718.863.760,00	413.723.009,00	25.846.044.073,86
26	Kecamatan Tambang Ulang	7.242.623.348,13	205.850.489,00	3.480.252,00	7.444.993.585,13
27	Kecamatan Kurau	2.512.610.422,94	3.637.798.333,00	1.102.329.534,45	5.048.079.221,49
28	Kecamatan Bati-Bati	6.787.070.094,95	540.227.000,00	476.196.545,00	6.851.100.549,95
29	Kecamatan Batu Ampar	6.088.893.611,86	514.836.228,00	-	6.603.729.839,86

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
30	Kecamatan Panyipatan	6.645.929.529,29	198.822.000,00	408.200.000,00	6.436.551.529,29
31	Kecamatan Takisung	5.038.400.966,00	215.280.000,00	-	5.253.680.966,00
32	Kecamatan Jorong	6.532.638.302,00	215.280.000,00	373.835.000,00	6.374.083.302,00
33	Kecamatan Kintap	2.272.985.619,07	3.428.217.000,00	307.211.000,00	5.393.991.619,07
34	Kecamatan Bajuin	3.950.951.527,00	69.215.000,00	-	4.020.166.527,00
35	Kecamatan Bumi Makmur	7.611.510.819,61	-	-	7.611.510.819,61
36	Inspektorat Kabupaten	7.196.264.750,00	1.768.146.507,00	-	8.964.411.257,00
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.685.004.621,84	489.184.000,00	455.976.392,44	5.718.212.229,40
38	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	246.610.834.269,94	20.389.646.478,40	54.896.313.195,03	212.104.167.553,31
39	Badan Pendapatan Daerah	2.317.207.428,49	170.035.000,00	44.511.657,48	2.442.730.771,01
40	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.177.659.469,42	287.584.000,00	175.249.673,87	16.289.993.795,55
Jumlah		4.976.860.521.138,10	586.245.093.387,81	185.934.458.313,76	5.377.171.156.212,15

Sekretaris Daerah

CAP TTD

Drs. H. Dahnial Kifli, M. AP

NIP. 19640425 198703 1 012

LAMPIRAN XIII

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap

Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
 Nomor : 1 Tahun 2023
 Tanggal : 10 Agustus 2023



KABUPATEN TANAH LAUT
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TA 2022

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
01	TANAH	808.616.413.726,52	77.110.743.166,00	49.491.899.701,17	836.235.257.191,35
01.01	Tanah	808.616.413.726,52	77.110.743.166,00	49.491.899.701,17	836.235.257.191,35
01.01.01	Tanah Persil	140.046.687.061,56	11.867.484.640,00	2.557.487.600,00	149.356.684.101,56
01.01.02	Tanah Non Persil	232.380.863.969,94	47.123.633.116,00	46.790.309.916,00	232.714.187.169,94
01.01.03	Lapangan	436.188.862.695,02	18.119.625.410,00	144.102.185,17	454.164.385.919,85
02	PERALATAN DAN MESIN	570.096.134.486,47	104.649.960.006,75	18.215.722.450,91	656.530.372.042,31
02.01	Alat Besar	21.848.561.887,01	119.811.037,00	36.198.000,00	21.932.174.924,01
02.01.01	Alat Besar Darat	18.307.804.407,00	-	-	18.307.804.407,00
02.01.03	Alat Bantu	3.540.757.480,01	119.811.037,00	36.198.000,00	3.624.370.517,01
02.02	Alat Angkutan	126.206.331.039,45	16.646.857.238,49	11.935.922.285,16	130.917.265.992,78
02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	122.913.203.476,45	16.169.156.238,49	11.935.922.285,16	127.146.437.429,78
02.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.407.380.063,00	437.601.000,00	-	1.844.981.063,00
02.02.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	1.313.788.500,00	40.100.000,00	-	1.353.888.500,00
02.02.04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	571.959.000,00	-	-	571.959.000,00
02.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	8.932.905.271,27	184.880.084,00	14.780.733,00	9.103.004.622,27
02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	1.340.168.897,80	33.862.869,00	2.970.000,00	1.371.061.766,80
02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	1.092.408.133,34	1.200.000,00	-	1.093.608.133,34
02.03.03	Alat Ukur	6.500.328.240,13	149.817.215,00	11.810.733,00	6.638.334.722,13
02.04	Alat Pertanian	23.105.414.109,26	3.660.000,00	3.353.545,00	23.105.720.564,26
02.04.01	Alat Pengolahan	23.105.414.109,26	3.660.000,00	3.353.545,00	23.105.720.564,26
02.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	117.460.798.334,39	13.155.225.156,97	2.114.077.693,69	128.501.945.797,67

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
02.05.01	Alat Kantor	30.171.756.096,74	1.311.552.701,00	218.905.556,00	31.264.403.241,74
02.05.02	Alat Rumah Tangga	85.579.557.830,24	11.762.017.180,97	1.887.515.942,69	95.454.059.068,52
02.05.03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.709.484.407,40	81.655.275,00	7.656.195,00	1.783.483.487,40
02.06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	22.159.673.855,06	722.218.393,00	733.968.730,75	22.147.923.517,31
02.06.01	Alat Studio	10.438.729.139,15	364.940.725,00	69.830.000,00	10.733.839.864,15
02.06.02	Alat Komunikasi	3.805.627.406,09	87.536.000,00	116.006.984,75	3.777.156.421,34
02.06.03	Peralatan Pemancar	7.915.317.309,82	269.741.668,00	548.131.746,00	7.636.927.231,82
02.07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	119.661.354.486,18	61.151.175.598,00	371.842.647,00	180.440.687.437,18
02.07.01	Alat Kedokteran	116.429.693.618,82	39.612.398.573,00	166.565.170,00	155.875.527.021,82
02.07.02	Alat Kesehatan Umum	3.231.660.867,36	21.538.777.025,00	205.277.477,00	24.565.160.415,36
02.08	Alat Laboratorium	42.505.878.843,42	3.757.671.304,00	1.772.624.412,77	44.490.925.734,65
02.08.01	Unit Alat Laboratorium	21.667.425.558,70	1.631.084.554,00	1.514.836.167,00	21.783.673.945,70
02.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	291.655.750,00	-	-	291.655.750,00
02.08.03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10.924.358.506,24	-	3.621.500,00	10.920.737.006,24
02.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	3.523.976.135,07	121.553.750,00	62.866.745,77	3.582.663.139,30
02.08.06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	32.386.000,00	-	-	32.386.000,00
02.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5.775.873.420,32	1.895.533.000,00	106.150.000,00	7.565.256.420,32
02.08.08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	86.960.000,00	-	85.150.000,00	1.810.000,00
02.08.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	203.243.473,09	109.500.000,00	-	312.743.473,09
02.09	Alat Persenjataan	296.055.870,00	-	-	296.055.870,00
02.09.01	Senjata Api	117.470.000,00	-	-	117.470.000,00
02.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	100.150.870,00	-	-	100.150.870,00
02.09.04	Alat Khusus Kepolisian	78.435.000,00	-	-	78.435.000,00
02.10	Komputer	81.375.083.693,16	8.072.102.995,29	858.124.403,54	88.589.062.284,91
02.10.01	Komputer Unit	61.629.036.817,99	7.177.689.878,29	579.280.101,49	68.227.446.594,79
02.10.02	Peralatan Komputer	19.746.046.875,17	894.413.117,00	278.844.302,05	20.361.615.690,12

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
02.11	Alat Eksplorasi	2.200.000,00	168.300.000,00	-	170.500.000,00
02.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	2.200.000,00	-	-	2.200.000,00
02.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	-	168.300.000,00	-	168.300.000,00
02.15	Alat Keselamatan Kerja	1.172.379.993,00	200.378.200,00	2.280.000,00	1.370.478.193,00
02.15.02	Alat Pelindung	120.024.020,00	69.508.200,00	-	189.532.220,00
02.15.03	Alat Sar	1.052.355.973,00	130.870.000,00	2.280.000,00	1.180.945.973,00
02.16	Alat Peraga	-	358.600.000,00	358.600.000,00	-
02.16.01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	-	358.600.000,00	358.600.000,00	-
02.17	Peralatan Proses/Produksi	6.340.000,00	-	-	6.340.000,00
02.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	6.340.000,00	-	-	6.340.000,00
02.18	Rambu - Rambu	2.857.371.799,64	25.530.000,00	-	2.882.901.799,64
02.18.01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	2.804.268.799,64	25.530.000,00	-	2.829.798.799,64
02.18.03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	53.103.000,00	-	-	53.103.000,00
02.19	Peralatan Olah Raga	2.505.785.304,64	83.550.000,00	13.950.000,00	2.575.385.304,64
02.19.01	Peralatan Olah Raga	2.505.785.304,64	83.550.000,00	13.950.000,00	2.575.385.304,64
03	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.234.545.603.141,82	149.536.654.916,71	54.987.126.322,78	1.329.095.131.735,75
03.01	Bangunan Gedung	1.166.842.638.818,39	140.024.565.044,71	53.835.163.864,78	1.253.032.039.998,32
03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.095.016.311.800,19	139.592.775.044,71	53.298.567.415,19	1.181.310.519.429,71
03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	71.826.327.018,20	431.790.000,00	536.596.449,59	71.721.520.568,61
03.02	Monumen	7.191.702.461,88	179.161.000,00	105.771.183,00	7.265.092.278,88
03.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	7.191.702.461,88	179.161.000,00	105.771.183,00	7.265.092.278,88
03.03	Bangunan Menara	1.708.455.000,00	-	-	1.708.455.000,00
03.03.01	Bangunan Menara Perambuan	1.708.455.000,00	-	-	1.708.455.000,00
03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	58.802.806.861,55	9.332.928.872,00	1.046.191.275,00	67.089.544.458,55
03.04.01	Tugu/Tanda Batas	58.802.806.861,55	9.332.928.872,00	1.046.191.275,00	67.089.544.458,55
04	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	2.334.275.258.255,79	247.998.834.713,35	48.381.066.485,80	2.533.893.026.483,34

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
04.01	Jalan Dan Jembatan	1.586.443.000.783,34	156.135.468.654,33	33.196.309.748,00	1.709.382.159.689,67
04.01.01	Jalan	1.302.306.753.051,34	103.244.717.996,92	11.244.700.018,00	1.394.306.771.030,26
04.01.02	Jembatan	284.136.247.732,00	52.890.750.657,41	21.951.609.730,00	315.075.388.659,41
04.02	Bangunan Air	517.288.518.940,34	68.725.274.106,67	8.352.445.637,80	577.661.347.409,21
04.02.01	Bangunan Air Irigasi	92.249.010.206,75	7.361.804.645,00	4.542.823.800,00	95.067.991.051,75
04.02.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	15.413.001.050,00	-	-	15.413.001.050,00
04.02.03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	16.489.534.754,02	2.804.942.000,00	-	19.294.476.754,02
04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	201.404.670.433,01	12.481.761.222,67	3.655.377.701,00	210.231.053.954,68
04.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	40.787.284.609,88	1.515.803.000,00	54.600.000,00	42.248.487.609,88
04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	145.016.460.786,68	32.596.850.939,00	99.644.136,80	177.513.667.588,88
04.02.07	Bangunan Air Kotor	5.928.557.100,00	11.964.112.300,00	-	17.892.669.400,00
04.03	Instalasi	67.014.600.836,00	2.986.935.300,00	1.059.663.300,00	68.941.872.836,00
04.03.01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	27.400.854.057,00	1.796.364.300,00	26.922.300,00	29.170.296.057,00
04.03.02	Instalasi Air Kotor	5.665.974.000,00	1.128.421.000,00	1.032.741.000,00	5.761.654.000,00
04.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	2.411.698.000,00	-	-	2.411.698.000,00
04.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	31.002.761.479,00	62.150.000,00	-	31.064.911.479,00
04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	438.313.300,00	-	-	438.313.300,00
04.03.09	Instalasi Pengaman	95.000.000,00	-	-	95.000.000,00
04.04	Jaringan	163.529.137.696,11	20.151.156.652,35	5.772.647.800,00	177.907.646.548,46
04.04.01	Jaringan Air Minum	116.279.096.771,00	5.779.194.752,35	5.540.602.000,00	116.517.689.523,35
04.04.02	Jaringan Listrik	45.382.916.969,11	14.371.961.900,00	232.045.800,00	59.522.833.069,11
04.04.03	Jaringan Telepon	1.483.347.456,00	-	-	1.483.347.456,00
04.04.04	Jaringan Gas	383.776.500,00	-	-	383.776.500,00
05	ASET TETAP LAINNYA	4.796.764.345,00	1.085.116.333,00	1.051.500.395,00	4.830.380.283,00
05.01	Bahan Perpustakaan	1.918.910.857,00	1.078.266.333,00	1.051.500.395,00	1.945.676.795,00
05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	365.249.100,00	1.069.252.333,00	1.034.134.395,00	400.367.038,00

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
05.01.02	Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	434.482.100,00	-	-	434.482.100,00
05.01.03	Kartografi, Naskah Dan Lukisan	1.108.829.657,00	9.014.000,00	7.016.000,00	1.110.827.657,00
05.01.06	Three Dimensional Artefacts And Realita	10.350.000,00	-	10.350.000,00	-
05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	2.407.856.088,00	6.850.000,00	-	2.414.706.088,00
05.02.01	Barang Bercorak Kesenian	2.353.933.588,00	2.400.000,00	-	2.356.333.588,00
05.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	53.922.500,00	4.450.000,00	-	58.372.500,00
05.05	Tanaman	469.997.400,00	-	-	469.997.400,00
05.05.01	Tanaman	469.997.400,00	-	-	469.997.400,00
06	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	24.530.347.182,50	5.863.784.252,00	13.807.142.958,10	16.586.988.476,40
06.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	24.530.347.182,50	5.863.784.252,00	13.807.142.958,10	16.586.988.476,40
06.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	24.530.347.182,50	5.863.784.252,00	13.807.142.958,10	16.586.988.476,40
Jumlah		4.976.860.521.138,10	586.245.093.387,81	185.934.458.313,76	5.377.171.156.212,15

Sekretaris Daerah

CAP TTD

Drs. H. Dahnia Kifli, M. AP
NIP. 19640425 198703 1 012

LAMPIRAN XIV

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 1 Tahun 2023
Tanggal : 10 Agustus 2023



KABUPATEN TANAH LAUT
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
PER 31 DESEMBER 2022

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN/ PINDAH SKPD	SALDO PER 31 DESEMBER 2022
			BERTAMBAH				BERKURANG					
			TANAH	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	TANAH	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.708.123.000,00		764.388.720,00				865.507.000,00	118.242.000,00		494.948.000,00	993.814.720,00
2	Dinas Kesehatan	89.475.100,00		29.117.000,00								118.592.100,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	21.464.277.291,40		624.031.700,00	3.335.766.280,00			918.370.000,00	2.313.732.000,00		7.448.821.867,00	14.743.151.404,40
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	371.336.000,00		568.927.300,00				123.843.000,00	98.581.000,00		618.839.300,00	99.000.000,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	41.938.000,00									41.938.000,00	-
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	98.277.000,00	12.490.000,00	187.666.000,00	46.076.000,00						187.943.000,00	156.566.000,00
7	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	244.193.000,00									63.650.000,00	180.543.000,00
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			97.680.000,00								97.680.000,00
9	Dinas Pariwisata	23.248.139,00									23.248.139,00	-
10	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	70.393.148,00							59.814.290,00		10.578.858,00	-
11	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	48.500.000,00									48.500.000,00	-
12	Sekretariat Daerah	23.050.000,00		194.161.000,00							23.050.000,00	194.161.000,00
13	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6.913.000,00									6.913.000,00	-
14	Kecamatan Tambang Ulang			3.480.252,00								3.480.252,00
15	Kecamatan Kurau	115.128.000,00									115.128.000,00	-
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	182.838.000,00									182.838.000,00	-
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	42.657.504,10									42.657.504,10	-
Jumlah		24.530.347.182,50	12.490.000,00	2.469.451.972,00	3.381.842.280,00	-	-	1.907.720.000,00	2.590.369.290,00	-	9.309.053.668,10	16.586.988.476,40

Sekretaris Daerah

CAP TTD

Drs. H. Dahnia Kifli, M. AP
NIP. 19640425 198703 1 012

LAMPIRAN XV

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya

Lampiran XV : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
 Nomor : 1 Tahun 2023
 Tanggal : 10 Agustus 2023



KABUPATEN TANAH LAUT
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2022

No	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2				
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.435.742.078,50	325.250.000,00	1.865.464.784,23	7.895.527.294,27
2	Dinas Kesehatan	10.188.661.850,89	25.275.000,00	2.182.394.577,85	8.031.542.273,04
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2.824.692.595,86	7.208.042.767,00	1.501.231.070,44	8.531.504.292,42
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	1.906.594.857,20	423.157.600,00	499.401.950,00	1.830.350.507,20
5	Dinas Sosial	11.787.500,00	-	11.787.500,00	-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	116.673.949,00	-	-	116.673.949,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	381.633.000,00	26.248.000,00	337.813.000,00	70.068.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	491.431.550,33	31.300.000,00	188.986.550,33	333.745.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.237.863.577,00	-	317.925.000,00	919.938.577,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	207.705.821,00	19.000.000,00	162.516.564,80	64.189.256,20
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	67.077.677,00	-	7.500.000,00	59.577.677,00
12	Dinas Perhubungan	479.802.924,74	45.800.000,00	44.825.000,00	480.777.924,74
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	886.967.000,00	109.055.000,00	471.950.300,00	524.071.700,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	385.572.844,43	89.666.000,00	111.414.178,43	363.824.666,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	694.529.715,52	-	172.660.936,00	521.868.779,52
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	8.335.643,29	-	5.338.181,75	2.997.461,54
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	94.257.834,00	150.000.000,00	39.227.834,00	205.030.000,00
18	Dinas Pariwisata	412.394.500,00	-	84.000.000,00	328.394.500,00
19	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	700.307.877,72	-	194.737.804,38	505.570.073,34
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	106.720.000,00	48.500.000,00	97.800.000,00	57.420.000,00
21	Sekretariat Daerah	2.003.236.597,81	168.300.000,00	1.189.648.250,01	981.888.347,80
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	290.538.506,00	-	178.719.500,00	111.819.006,00

No	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2				
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.407.000,00	-	9.407.000,00	-
24	Kecamatan Pelaihari	23.508.909,00	-	23.508.909,00	-
25	Kecamatan Tambang Ulang	32.445.000,00	-	8.100.000,00	24.345.000,00
26	Kecamatan Kurau	46.832.500,00	-	29.207.500,00	17.625.000,00
27	Kecamatan Batu Ampar	19.250.000,00	-	-	19.250.000,00
28	Kecamatan Takisung	1.350.000,00	-	-	1.350.000,00
29	Kecamatan Jorong	9.620.000,00	-	-	9.620.000,00
30	Kecamatan Kintap	4.700.000,00	-	-	4.700.000,00
31	Kecamatan Bajuin	41.334.258,00	-	14.615.000,00	26.719.258,00
32	Kecamatan Bumi Makmur	59.500.000,00	-	59.500.000,00	-
33	Inspektorat Kabupaten	37.453.000,00	-	37.453.000,00	-
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	270.649.050,00	19.900.000,00	102.535.000,00	188.014.050,00
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.391.688.190,51	761.973.897,59	852.532.573,59	1.301.129.514,51
36	Badan Pendapatan Daerah	342.050.000,00	-	-	342.050.000,00
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	98.549.536,00	-	8.199.536,00	90.350.000,00
Jumlah		35.320.865.343,80	9.451.468.264,59	10.810.401.500,81	33.961.932.107,58

Sekretaris Daerah

CAP TTD

Drs. H. Dahnial Kifli, M. AP
NIP. 19640425 198703 1 012

LAMPIRAN XVI

Daftar Dana Cadangan Daerah

Lampiran XVI
Nomor
Tanggal

: Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
: 1 Tahun 2023
: 10 Agustus 2023



KABUPATEN TANAH LAUT
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2022

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	MENDANAI PROSES PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 5 TAHUN 2021	Rp 75.000.000.000	Rp -	Rp 55.000.000.000	Rp -	Rp 55.000.000.000	Rp 20.000.000.000

Sekretaris Daerah

CAP TTD

Drs. H. Dahnial Kifli, M. AP
NIP. 19640425 198703 1 012

LAMPIRAN XVII

Daftar Kewajiban Jangka Pendek

Lampiran XVII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Nomor : 1 Tahun 2023

Tanggal : 10 Agustus 2023



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI SALDO AWAL	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	MUTASI		SALDO AKHIR
					TAMBAH	KURANG	
1	Pendapatan Diterima Dimuka	218.646.756,26	4.169.512,00	222.816.268,26	479.644.011,30	356.351.483,60	346.108.795,96
2	Utang Belanja	4.999.184.868,25	63.458.097,79	5.062.642.966,04	2.823.174.463,60	5.006.500.721,14	2.879.316.708,50
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	71.837.958.686,00	33.877.318.287,00	105.715.276.973,00	607.093.792,00	65.173.419.712,00	41.148.951.053,00
JUMLAH		77.055.790.310,51	33.944.945.896,79	111.000.736.207,30	3.909.912.266,90	70.536.271.916,74	44.374.376.557,46

Sekretaris Daerah

CAP TTD

Drs. H. Dahnia Kifli, M. AP

NIP. 19640425 198703 1 012

LAMPIRAN XVIII

Daftar Kewajiban Jangka Panjang

Lampiran XVIII

: Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Nomor

: 1 Tahun 2023

Tanggal

: 10 Agustus 2023



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2022

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

Sekretaris Daerah

CAP TTD

Drs. H. Dahnial Kifli, M. AP

NIP. 19640425 198703 1 012

LAMPIRAN XIX

Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan sampai Akhir
Tahun Anggaran 2022 Dan Dianggarkan Kembali Dalam
Tahun Anggaran Berikutnya



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TA. 2022 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN
ANGGARAN BERIKUTNYA

Lampiran XIX : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 1 Tahun 2023
Tanggal : 10 Agustus 2023

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN APBD	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			N I H I L					

Sekretaris Daerah

CAP TTD

Drs. H. Dahnia Kifli, M. AP
NIP. 19640425 198703 1 012

LAMPIRAN XX

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah

LAMPIRAN XX.1

Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	BUMD/PERUSAHAAN DAERAH TAHUN	SUMBER	STATUS	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	ASET LAINNYA	TOTAL ASET	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9
1	PDAM TANAH LAUT	LK PDAM 2022 AUDITED	AKTIF	6.264.418.724,00	22.228.438.892,00	0,00	28.492.857.616,00	295.534.799,00
2	PD. BARATALA TUNTUNG	LK PD. BARATALA TUNTUNG PANDANG 2022 AUDITED	AKTIF	3.706.340.030,00	268.518.333,00	0,00	3.974.858.363,00	522.180.049,00
3	PT. BPR TANAH LAUT	LK PT. BPR TANAH LAUT 2022 AUDITED	AKTIF	34.385.192.937,00	458.564.794,00	0,00	34.843.757.731,00	27.212.533.885,00
JUMLAH				44.355.951.691,00	22.955.522.019,00	0,00	67.311.473.710,00	28.030.248.733,00

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYDS	EKUITAS LAINNYA	LABA (RUGI) DITAHAN	TOTAL EKUITAS	%SAHAM DAERAH	KEPEMILIKAN DAERAH
10	11=9+10	12	13	14	15	16	17	18	19=17X18
25.452.920,00	320.987.719,00	71.568.504.147,00	0,00	0,00	2.383.038.650,00	(45.779.672.900,00)	28.171.869.897,00	89,10%	25.101.136.078,23
0,00	522.180.049,00	0,00	0,00	5.144.588.576,00	0,00	(1.691.910.262,00)	3.452.678.314,00	100,00%	3.452.678.314,00
367.862.971,00	27.580.396.856,00	6.100.000.000,00	0,00	0,00	51.117.086,00	1.112.243.789,00	7.263.360.875,00	75,41%	5.477.300.435,84
393.315.891,00	28.423.564.624,00	77.668.504.147,00	0,00	5.144.588.576,00	2.434.155.736,00	(46.359.339.373,00)	38.887.909.086,00		34.031.114.828,06

Sekretaris Daerah

CAP TTD

Drs. H. Dahnial Kifli, M. AP

NIP. 19640425 198703 1 012

LAMPIRAN XX.2

Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Lampiran XX.II : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : Agustus 2023

NO	BUMD/PERUSAHAAN DAERAH TAHUN	SUMBER	STATUS	PENDAPATAN	BEBAN	LABA (RUGI) KOTOR	PENDAPATAN DI LUAR USAHA	BEBAN DI LUAR USAHA	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PDAM TANAH LAUT	LK PDAM 2022 AUDITED	AKTIF	11.875.189.280,00	10.838.372.386,00	1.036.816.894,00	152.426.087,00	3.981.042.627,00	(2.791.799.646,00)
2	PD. BARATALA TUNTUNG	LK PD. BARATALA TUNTUNG PANDANG 2022 AUDITED	AKTIF						-
3	PT. BPR TANAH LAUT	LK PT. BPR TANAH LAUT 2022 AUDITE	AKTIF	4.324.179.519,00	3.048.581.329,00	1.275.598.190,00	0,00	5.000.000,00	1.270.598.190,00
JUMLAH				16.199.368.799,00	13.886.953.715,00	2.312.415.084,00	152.426.087,00	3.986.042.627,00	(1.521.201.456,00)

Sekretaris Daerah

CAP TTD

Drs. H. Dahnial Kifli, M. AP
NIP. 19640425 198703 1 012